



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
AUDITED

20
24





KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang dipimpinnya. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disebutkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga harus disusun berdasarkan SAP dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*, Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu entitas pelaporan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola dengan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*).

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) adalah Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan disusun secara lengkap meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024 (*Audited*), disusun secara berjenjang dengan menggunakan Aplikasi SAKTI dan merupakan suatu kesatuan/konsolidasi dari 145 (seratus empat puluh lima) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri dari 13 (tiga belas) Satker di Pusat dan 132 (seratus tiga puluh dua) Satker Perwakilan RI, sehingga keakuratan data tersebut akan sangat berpengaruh pada kualitas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024 (*Audited*).

Dengan tersusunnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*), kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Pimpinan Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta seluruh jajarannya, baik di Pusat maupun di Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk Inspektorat Jenderal sebagai Tim Reviu, atas komitmen dan peran aktifnya dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024 (*Audited*).

Kami juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Satker terkait di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Barang Milik Negara, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu



dan mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024 (*Audited*). Besar harapan kami Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna Laporan Keuangan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara dan memberikan informasi kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2025
a.n. Menteri Luar Negeri
Sekretaris Jenderal

Cecep Herawan
NIP. 19661015 199303 1 002





KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
II. NERACA.....	4
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	9
A. PENJELASAN UMUM.....	9
A.1. DASAR HUKUM.....	9
A.2. PROFIL DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI.....	10
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	14
A.4. BASIS AKUNTANSI.....	15
A.5. DASAR PENGUKURAN.....	15
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	15
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	34
B.1. PENDAPATAN.....	39
B.1.1. PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, DAN IURAN BADAN USAHA.....	42
B.1.2. PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM.....	46
B.1.3. PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN.....	48
B.1.4. PENDAPATAN DENDA.....	50
B.1.5. PENDAPATAN LAIN-LAIN.....	51
B.2. BELANJA.....	54
B.2.1. BELANJA PEGAWAI.....	60
B.2.2. BELANJA BARANG.....	64
B.2.3. BELANJA MODAL.....	66
B.2.3.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN.....	68
B.2.3.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN.....	71
B.2.3.3. BELANJA MODAL LAINNYA.....	74
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA.....	76
C.1. ASET LANCAR.....	76
C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN.....	76
C.1.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN.....	78
C.1.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS.....	80
C.1.4. BELANJA DIBAYAR DI MUKA (<i>PREPAID</i>).....	84
C.1.5. UANG MUKA BELANJA (<i>PREPAYMENT</i>).....	86
C.1.6. PIUTANG BUKAN PAJAK.....	87
C.1.7. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG BUKAN PAJAK.....	88

C.1.8.	PIUTANG BUKAN PAJAK (<i>NETTO</i>).....	88
C.1.9.	BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR).....	89
C.1.10.	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR).....	90
C.1.11.	BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUTAN GANTI RUGI (<i>NETTO</i>).....	92
C.1.12.	PERSEDIAAN.....	92
C.2.	ASET TETAP.....	94
C.2.1.	TANAH.....	95
C.2.2.	PERALATAN DAN MESIN.....	96
C.2.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN.....	99
C.2.4.	JALAN DAN JEMBATAN, IRIGASI DAN JARINGAN.....	103
C.2.5.	ASET TETAP LAINNYA.....	103
C.2.6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP).....	105
C.2.7.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP.....	108
C.3.	PIUTANG JANGKA PANJANG.....	108
C.3.1.	PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI.....	108
C.3.2.	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI.....	110
C.3.3.	TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (<i>NETTO</i>).....	112
C.4	ASET LAINNYA.....	112
C.4.1.	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	113
C.4.2.	ASET TAK BERWUJUD.....	115
C.4.3.	DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA.....	116
C.4.4.	DANA CADANGAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI.....	118
C.4.5.	ASET LAIN-LAIN.....	125
C.4.6.	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA.....	126
C.5.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK.....	128
C.5.1.	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA.....	128
C.5.2.	BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG.....	130
C.5.3.	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA.....	131
C.5.4.	UANG MUKA DARI KPPN.....	132
C.5.5.	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA.....	133
C.6.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.....	133
C.6.1.	UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI LAINNYA.....	133
C.7.	EKUITAS.....	137
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	138

D.1.	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK.....	138
D.2.	BEBAN PEGAWAI.....	142
D.3.	BEBAN PERSEDIAAN.....	144
D.4.	BEBAN BARANG DAN JASA.....	146
D.5.	BEBAN PEMELIHARAAN.....	151
D.6.	BEBAN PERJALANAN DINAS.....	153
D.7.	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT.....	154
D.8.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI.....	155
D.9.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH.....	157
D.10.	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR.....	158
D.11.	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA.....	159
D.12.	POS-POS LUAR BIASA.....	162
E.	PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	163
E.1.	EKUITAS AWAL.....	163
E.2.	SURPLUS/(DEFISIT) LO.....	163
E.3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR.....	163
E.4.	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS.....	163
E.4.1.	PENYESUAIAN NILAI ASET.....	164
E.4.2.	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN.....	164
E.4.3.	KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI.....	166
E.4.4.	SELISIH REVALUASI ASET.....	166
E.4.5.	KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI.....	167
E.4.6.	KOREKSI LAIN-LAIN.....	172
E.5.	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS.....	173
E.5.1.	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL).....	173
E.5.2.	TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR.....	173
E.5.3.	PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG.....	175
E.6.	PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL.....	176
E.7.	KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS.....	176
E.8.	EKUITAS AKHIR.....	176
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	177
F.1.	TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2010 – 2023.....	177
F.2.	PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR).....	185
F.3.	PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SELISIH TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI (TPLN) ATAS PEMBERLAKUAN PERMENLU 04 TAHUN 2009 DAN SELISIH LUMP SUM TIKET MUTASI DI PERWAKILAN RI.....	187
F.4.	PERSEKOT KERJA (PK) MINUS PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI.....	189

F.5. PINJAMAN RESMI KEMENTERIAN LUAR NEGERI.....	190
F.6. BEBAN PUSAT PERJALANAN DINAS (BPJ) KEMENTERIAN LUAR NEGERI.....	192
F.7. PERMASALAHAN TERKAIT ASET TANAH DAN BANGUNAN YANG DIKELOLA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.....	193
F.8. PENGELOLAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN.....	201
F.9. PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA.....	205
F.10. TANAH GEDUNG ASEAN SECRETARIAT (ASEC).....	208
F.11. PERMASALAHAN RUMAH DINAS/RUMAH NEGARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.....	210
F.12. PENGUNGKAPAN ATAS HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG BERUPA TANAH, BANGUNAN, STRUKTUR, DAN FASILITASNYA.....	212
F.13. <i>FORCE MAJEURE</i> YANG TERJADI DI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI.....	212
F.14. PENGELOLAAN <i>PROVIDENT FUND</i> PADA PERWAKILAN RI.....	216
F.15. PEMBAYARAN REKENING PENAMPUNGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN (RPATA) TAHUN ANGGARAN 2023.....	216
F.16. PENGUNGKAPAN ATAS CAPAIAN <i>OUTPUT</i> STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2024.....	220
F.17. PENGEMBANGAN APLIKASI SIMKEU REAL TIME.....	225
F.18. PENGUNGKAPAN TERKAIT PEMBAYARAN IURAN KONTRIBUSI ORGANISASI INTERNASIONAL.....	227
F.19. PENGUNGKAPAN TERKAIT HASIL REVIU VERIFIKASI PEMBAYARAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL.....	227
F.20. REKLASIFIKASI AKUN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN.....	229
F.21. PENGHENTIAN KEGIATAN OPERASIONAL AFRICA AND GULF BANK (AGB) CABANG KHARTOUM.....	234
F.22. PERKEMBANGAN PERMASALAHAN KEUANGAN KBRI DEN HAAG TERKAIT PFK INDOVER.....	235
F.23. JAMINAN KESEHATAN PIMPINAN PERWAKILAN RI.....	236
F.24. BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK (BBPA).....	239
F.25. ASET BERSEJARAH.....	240
F.26. UPAYA PENYITAAN PROPERTI PEMERINTAH RI DI PARIS.....	241
F.27. PERKEMBANGAN KASUS PEMALSUAN CEK.....	242
F.28. DANA SUMBANGAN ROHINGYA.....	244



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Rincian Jumlah Satuan Kerja di Kementerian Luar Negeri.....	15
Tabel 2:	Exotic Currency Bank Indonesia Per 31 Desember 2024.....	17
Tabel 3:	Perhitungan Penyisihan Piutang.....	22
Tabel 4:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	25
Tabel 5:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	27
Tabel 6:	Perubahan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024.....	34
Tabel 7:	Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024.....	35
Tabel 8:	Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024.....	39
Tabel 9:	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	39
Tabel 10:	Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	40
Tabel 11:	Realisasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Satuan Kerja Pusat untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	43
Tabel 12:	Realisasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Satuan Kerja Perwakilan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	43
Tabel 13:	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	49
Tabel 14:	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	52
Tabel 15:	Pendapatan Anggaran Lain-lain untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	54
Tabel 16:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	55
Tabel 17:	Perbandingan Realisasi Belanja Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	55
Tabel 18:	Rincian Belanja Berdasarkan Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	56
Tabel 19:	Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	57
Tabel 20:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	61
Tabel 21:	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	62
Tabel 22:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	65
Tabel 23:	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	65
Tabel 24:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	67

Tabel 25:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	67
Tabel 26:	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	68
Tabel 27:	Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	71
Tabel 28:	Perbandingan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	73
Tabel 29:	Perbandingan Belanja Modal Lainnya untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	74
Tabel 30:	Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	77
Tabel 31:	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	77
Tabel 32:	Rincian Penggunaan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.....	78
Tabel 33:	Rincian Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	79
Tabel 34:	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	80
Tabel 35:	Rincian Kas dan Bank Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.....	80
Tabel 36:	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	81
Tabel 37:	Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.....	82
Tabel 38:	Rincian Mutasi Rekening Penampungan Sementara Bantuan kepada Rohingya Tahun 2018 - 2024.....	83
Tabel 39:	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	84
Tabel 40:	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka Per Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	85
Tabel 41:	Perbandingan Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	86
Tabel 42:	Perbandingan Rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	87
Tabel 43:	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	88
Tabel 44:	Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	89
Tabel 45:	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	89
Tabel 46:	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024.....	91
Tabel 47:	Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	92

Tabel 48:	Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023....	94
Tabel 49:	Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024.....	95
Tabel 50:	Mutasi Tambah/Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024.....	96
Tabel 51:	Mutasi Tambah/Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024.....	99
Tabel 52:	Mutasi Tambah/Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024.....	103
Tabel 53:	Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024.....	104
Tabel 54:	Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	105
Tabel 55:	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	108
Tabel 56:	Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	109
Tabel 57:	Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024.....	110
Tabel 58:	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024.....	111
Tabel 59:	Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2024.....	112
Tabel 60:	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024.....	113
Tabel 61:	Perbandingan Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	113
Tabel 62:	Mutasi Tambah/Kurang Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	114
Tabel 63:	Rincian Tanah dan Bangunan yang dijadikan Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024.....	114
Tabel 64:	Tanah Persil Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024.....	114
Tabel 65:	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	115
Tabel 66:	Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024.....	115
Tabel 67:	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024.....	117
Tabel 68:	Rincian Mutasi Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2024.....	118
Tabel 69:	Daftar Perwakilan yang Melakukan Peminjaman Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri.....	119
Tabel 70:	Daftar Perwakilan yang Memiliki Pagu Kas Besi Berbeda antara SIMKEU dengan Surat Menteri Keuangan RI.....	119
Tabel 71:	Daftar Perwakilan yang Tidak Mempunyai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri.....	124
Tabel 72:	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024.....	125
Tabel 73:	Perbandingan Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	125
Tabel 74:	Perbandingan Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember	

	2024 dan 31 Desember 2023.....	127
Tabel 75:	Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024.....	127
Tabel 76:	Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	128
Tabel 77:	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	129
Tabel 78:	Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	130
Tabel 79:	Perbandingan Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	131
Tabel 80:	Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024.....	132
Tabel 81:	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	133
Tabel 82:	Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	134
Tabel 83:	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	138
Tabel 84:	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2024.....	139
Tabel 85:	Pendapatan Anggaran Lain-Lain untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2024.....	142
Tabel 86:	Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	142
Tabel 87:	Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	144
Tabel 88:	Beban Persediaan Bahan Baku.....	145
Tabel 89:	Beban Persediaan Lainnya.....	146
Tabel 90:	Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	146
Tabel 91:	Rincian Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	151
Tabel 92:	Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	154
Tabel 93:	Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	155
Tabel 94:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	155
Tabel 95:	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	157
Tabel 96:	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tuntutan	

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	157
Tabel 97: Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	158
Tabel 98: Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	159
Tabel 99: Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	159
Tabel 100: Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	164
Tabel 101: Daftar Perwakilan dengan Koreksi Nilai Persediaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	164
Tabel 102: Daftar Perwakilan dengan Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	166
Tabel 103: Daftar Satker Pusat dan Satker Perwakilan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi.....	167
Tabel 104: Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	170
Tabel 105: Rincian Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	172
Tabel 106: Rincian Koreksi Lain-lain untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	172
Tabel 107: Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	173
Tabel 108: Rincian Transfer Masuk untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	173
Tabel 109: Rincian Transfer Keluar untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	174
Tabel 110: Penjelasan Selisih Transfer Keluar Transfer Masuk untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	175
Tabel 111: Penjelasan Pengesahan Hibah Langsung untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.....	175
Tabel 112: Matriks Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2010 – 2023 Kementerian Luar Negeri.....	177
Tabel 113: Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara oleh TPKN Periode Januari – Desember 2024.....	186
Tabel 114: Koreksi Nilai Piutang TP/TGR (Berdasarkan Rekon Piutang Negara dengan KPKNL) Periode Januari – Desember 2024.....	186
Tabel 115: Perkembangan Penyelesaian Potensi Kerugian Negara.....	187
Tabel 116: Rekapitulasi Pegawai yang Belum Mengembalikan Selisih TPLN Akibat Penerapan Permenlu 04 Tahun 2009 per 31 Desember 2024.....	188
Tabel 117: Pengembalian Selisih Lumpsum Tiket.....	189
Tabel 118: Rincian PK Minus per 31 Desember 2024.....	189
Tabel 119: Pagu dan Realisasi Anggaran BPPR per 31 Desember 2024.....	191

Tabel 120: Rincian Data BPPR Minus Berdasarkan Simkeu Real Time per 31 Desember 2024.	191
Tabel 121: Rincian Data BPPR Plus Berdasarkan Simkeu Real Time per 31 Desember 2024....	191
Tabel 122: Rincian Realisasi Anggaran Mutasi Perjalanan Pindah per 31 Desember 2024.....	192
Tabel 123: Rincian Data BPJ Minus Berdasarkan Simkeu Real Time per 31 Desember 2024....	193
Tabel 124: Rincian Data BPJ Plus Berdasarkan Simkeu Real Time per 31 Desember 2024.....	193
Tabel 125: Rincian Setoran Bea Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan 5 (lima) Bidang Tanah	198
Tabel 126: Rincian Setoran Bea Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan 5 (lima) Bidang Tanah.	199
Tabel 127: Rincian Peta Bidang Tanah yang sudah Bersertifikat.....	199
Tabel 128: Rincian Perubahan Nama Sertifikat.....	200
Tabel 129: Rincian Pengembalian SPRI/paspor 24 Halaman dari Perwakilan RI ke Sekretariat Jenderal.....	201
Tabel 130: Rincian Pengembalian SPRI/Paspor 24 Halaman dari Sekretariat Jenderal Kepada Ditjen Imigrasi.....	202
Tabel 131: Rincian Nomor Perforasi SPRI/Paspor 24 Halaman.....	202
Tabel 132: Transfer Keluar oleh Satker Sekretariat Jenderal ke KBRI Berlin.....	202
Tabel 133: Koreksi Transfer Keluar oleh Satker Sekretariat Jenderal ke KBRI Berlin.....	203
Tabel 134: Dokumen Keimigrasian in Transit.....	203
Tabel 135: Saldo Akhir Dokumen Keimigrasian per 31 Desember 2024.....	204
Tabel 136: Hasil Kajian Tim Internal Pemanfaatan BMN.....	206
Tabel 137: Rincian Tanah dan Gedung Kantor ASEAN Secretariat (ASEC).....	209
Tabel 138: Rincian Tanah dan Gedung Kantor ASEAN Secretariat (ASEC) Setelah Penilaian Kembali.....	210
Tabel 139: Rincian Kendaraan Dinas Hilang Akibat Penjarahan.....	215
Tabel 140: Rincian Gedung dan Bangunan Rusak Akibat Penjarahan.....	215
Tabel 141: Rincian BMN yang Memerlukan Penghapusan.....	216
Tabel 142: Rincian atas saldo RPATA Pustik-KP.....	218
Tabel 143: Rincian Proses Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran.....	229
Tabel 144: Rincian Pengembalian Belanja KBRI Lisbon.....	233
Tabel 145: Rincian Jaminan Kesehatan Unsur Pimpinan pada Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun Anggaran 2024.....	239
Tabel 146: Rincian Data BBPA Plus Berdasarkan Simkeu Real Time per 31 Desember 2024....	240



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI LUAR NEGERI

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025


Sugiono



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 *Audited* ini telah disusun berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025, perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*, dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp534.394.583.417,00 atau mencapai 120,41% dari estimasi Pendapatan sebesar Rp443.806.270.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.911.996.778.615,00 atau mencapai 97,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.118.292.894.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Kementerian Luar Negeri mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp53.720.786.084.890,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp448.132.443.483,00; Aset Tetap sebesar Rp52.084.804.580.976,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp675.098.460,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.187.173.961.971,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp993.120.133.102,00 dan Rp52.727.665.951.788,00.

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp445.569.421.683,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp9.007.958.769.268,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp8.562.389.347.585,00), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.794.439.232,00 dan sebesar Rp0,00, sehingga Kementerian Luar Negeri mengalami Defisit-LO sebesar (Rp8.560.594.908.353,00).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode pelaporan pada tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp52.720.930.123.336,00, dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp8.560.594.908.353,00), dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp186.428.568.399,00, dan ditambah transaksi antar entitas senilai total Rp8.753.759.305.204,00 sehingga Ekuitas Kementerian Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah senilai Rp52.727.665.951.788,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

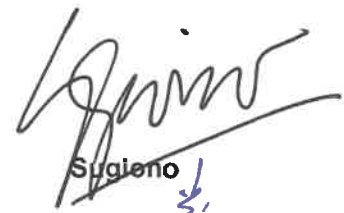
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2024			% TERHADAP ANGGARAN	31 DESEMBER 2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)		REALISASI
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak		Rp 443.806.270.000	Rp 534.394.583.417	Rp 90.588.313.417	120,41%	Rp 538.225.801.495
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 443.806.270.000	Rp 534.394.583.417	Rp 90.588.313.417	120,41%	Rp 538.225.801.495
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	Rp 3.904.702.485.000	Rp 3.887.709.600.803	Rp (16.992.884.197)	99,56%	Rp 3.770.705.511.386
Belanja Barang	B.2.2	Rp 4.438.752.535.000	Rp 4.276.860.794.326	Rp (161.891.740.674)	96,35%	Rp 3.622.575.004.153
Belanja Modal	B.2.3	Rp 774.837.874.000	Rp 747.426.383.486	Rp (27.411.490.514)	96,46%	Rp 1.288.382.891.037
Belanja Modal Tanah	B.2.3.1	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3.2	Rp 252.377.337.000	Rp 248.100.242.399	Rp (4.277.094.601)	98,31%	Rp 385.947.962.952
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.3.3	Rp 504.836.422.000	Rp 481.784.574.296	Rp (23.051.847.704)	95,43%	Rp 886.736.882.549
Belanja Modal Lainnya	B.2.3.4	Rp 17.624.115.000	Rp 17.541.566.791	Rp (82.548.209)	99,53%	Rp 15.698.045.536
JUMLAH BELANJA		Rp 9.118.292.894.000	Rp 8.911.996.778.615	Rp (206.296.115.385)	97,74%	Rp 8.681.663.406.576

Jakarta, Mei 2025
Menteri Luar Negeri


Sugiono ↓



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NERACA

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

II. NERACA

**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

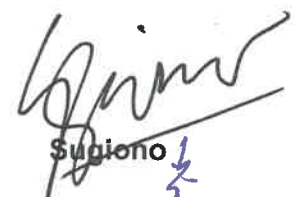
(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2024		2023	
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	Rp	132.479.164.274	Rp	118.552.365.738
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	Rp	7.653.639.038	Rp	12.046.952.654
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	Rp	27.710.095.105	Rp	17.322.696.783
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.4	Rp	115.688.821.919	Rp	217.966.754.350
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.1.5	Rp	-	Rp	36.861.475.638
Piutang Bukan Pajak	C.1.6	Rp	62.000.778.518	Rp	73.650.557.540
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.7	Rp	(311.825.758)	Rp	(368.252.790)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.8	Rp	61.688.952.760	Rp	73.282.304.750
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.9	Rp	1.492.737.610	Rp	1.443.906.431
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.10	Rp	(7.463.688)	Rp	(7.219.532)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.1.11	Rp	1.485.273.922	Rp	1.436.686.899
Persediaan	C.1.12	Rp	101.426.496.465	Rp	77.157.433.811
JUMLAH ASET LANCAR		Rp	448.132.443.483	Rp	554.626.670.623
ASET TETAP	C.2				
Tanah	C.2.1	Rp	43.781.338.280.789	Rp	43.463.865.940.463
Peralatan dan Mesin	C.2.2	Rp	3.233.696.982.770	Rp	3.070.894.578.740
Gedung dan Bangunan	C.2.3	Rp	10.996.469.656.352	Rp	9.958.070.727.743
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	Rp	31.480.214.763	Rp	30.840.351.331
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	Rp	57.517.801.235	Rp	56.369.934.155
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	Rp	168.445.150.188	Rp	764.076.047.369
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	Rp	(6.184.143.505.121)	Rp	(5.227.855.479.057)
JUMLAH ASET TETAP		Rp	52.084.804.580.976	Rp	52.116.262.100.744
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	Rp	33.469.087.080	Rp	34.185.012.104
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan	C.3.2	Rp	(32.793.988.620)	Rp	(33.536.895.083)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN	CAT.	2024		2023	
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi					
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.3.3	Rp	675.098.460	Rp	648.117.021
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		Rp	675.098.460	Rp	648.117.021
ASET LAINNYA	C.4				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.4.1	Rp	156.068.872.428	Rp	156.068.872.428
Aset Tak Berwujud	C.4.2	Rp	87.389.576.973	Rp	79.025.406.260
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.3	Rp	31.019.944.315	Rp	69.287.878.219
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.4.4	Rp	694.448.762.957	Rp	672.607.878.119
Aset Lain-Lain	C.4.5	Rp	378.815.746.630	Rp	379.314.774.954
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.6	Rp	(160.568.941.332)	Rp	(152.682.046.508)
JUMLAH ASET LAINNYA		Rp	1.187.173.961.971	Rp	1.203.622.763.472
JUMLAH ASET		Rp	53.720.786.084.890	Rp	53.875.159.651.860
KEWAJIBAN	C.5				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	Rp	60.400.813.192	Rp	93.195.203.923
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.5.2	Rp	128.938.661.211	Rp	129.164.861.024
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	Rp	475.797.550	Rp	1.107.191.389
Uang Muka dari KPPN	C.5.4	Rp	132.479.164.274	Rp	118.552.365.738
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.5	Rp	3.326.726	Rp	35.511.425
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		Rp	322.297.762.953	Rp	342.055.133.499
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.6				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.6.1	Rp	670.822.370.149	Rp	812.174.395.025
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		Rp	670.822.370.149	Rp	812.174.395.025
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp	993.120.133.102	Rp	1.154.229.528.524
EKUITAS					
Ekuitas	C.7	Rp	52.727.665.951.788	Rp	52.720.930.123.336
JUMLAH EKUITAS		Rp	52.727.665.951.788	Rp	52.720.930.123.336
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Rp	53.720.786.084.890	Rp	53.875.159.651.860

Jakarta, Mei 2025
Menteri Luar Negeri


Sugiono



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2024		31 DESEMBER 2023	
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Sumber Daya Alam		Rp	-	Rp	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		Rp	-	Rp	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	Rp	445.569.421.683	Rp	454.791.664.833
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		Rp	445.569.421.683	Rp	454.791.664.833
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		Rp	445.569.421.683	Rp	454.791.664.833
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2.	Rp	3.847.553.004.171	Rp	3.755.866.921.473
Beban Persediaan	D.3.	Rp	75.123.007.371	Rp	79.559.602.504
Beban Barang dan Jasa	D.4.	Rp	2.944.878.531.661	Rp	2.372.617.827.231
Beban Pemeliharaan	D.5.	Rp	599.096.273.812	Rp	558.622.531.144
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	Rp	756.093.634.596	Rp	696.165.820.514
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7.	Rp	23.643.934	Rp	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	Rp	785.989.763.062	Rp	774.070.869.510
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	Rp	(799.089.339)	Rp	105.876.855
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		Rp	9.007.958.769.268	Rp	8.237.009.449.231
SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. OPERASIONAL		Rp	(8.562.389.347.585)	Rp	(7.782.217.784.398)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	Rp	(17.673.882.714)	Rp	(232.046.117.401)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		Rp	4.267.261.733	Rp	4.565.775.355
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		Rp	21.941.144.447	Rp	236.611.892.756
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	Rp	19.468.321.946	Rp	(21.215.901.285)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		Rp	346.871.527.999	Rp	127.166.393.286
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		Rp	327.403.206.053	Rp	148.382.294.571
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		Rp	1.794.439.232	Rp	(253.262.018.686)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		Rp	(8.560.594.908.353)	Rp	(8.035.479.803.084)
POS LUAR BIASA	D.12.	Rp	-	Rp	-

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2024		31 DESEMBER 2023	
Beban Luar Biasa		Rp	-	Rp	-
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL		Rp	(8.560.594.908.353)	Rp	(8.035.479.803.084)

Jakarta, Mei 2025
Menteri Luar Negeri



Sugiono



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

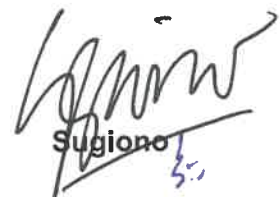
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2024		31 DESEMBER 2023	
EKUITAS AWAL	E.1	Rp	52.720.930.123.336	Rp	49.124.654.310.278
Surplus/Defisit LO	E.2	Rp	(8.560.594.908.353)	Rp	(8.035.479.803.084)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.3	Rp	-	Rp	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	Rp	(186.428.568.399)	Rp	3.442.322.486.970
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	Rp	-	Rp	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	Rp	664.601.383	Rp	89.265.677
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	Rp	(1.246.834.261)	Rp	(13.623.482)
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	Rp	-	Rp	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	Rp	(184.141.044.514)	Rp	3.360.616.470.924
Lain-Lain	E.4.6	Rp	(1.705.291.007)	Rp	81.630.373.851
Transaksi Antar Entitas	E.5	Rp	8.753.759.305.204	Rp	8.189.433.129.172
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.5.1	Rp	8.911.996.778.615	Rp	8.681.663.406.576
Diterima Dari Entitas Lain	E.5.1	Rp	(534.394.583.417)	Rp	(538.225.801.495)
Transfer Masuk	E.5.2	Rp	123.045.279.706	Rp	200.635.402.248
Transfer Keluar	E.5.2	Rp	(76.828.941.200)	Rp	(163.339.698.965)
Pengesahan Hibah Langsung	E.5.3	Rp	329.940.771.500	Rp	8.699.820.808
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.5.4	Rp	-	Rp	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.6	Rp	6.735.828.452	Rp	3.596.275.813.058
EKUITAS AKHIR	E.7	Rp	52.727.665.951.788	Rp	52.720.930.123.336

Jakarta, Mei 2025
Menteri Luar Negeri


Sugiono



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN UMUM

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Umum

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
5. Undang Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan

- Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
 22. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Kementerian Luar Negeri;
 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 25. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB.6/2023, perihal Kebijakan atas Pencatatan dan Pengungkapan Belanja Modal Dibayar di Muka (*Prepaid*) pada Kementerian Luar Negeri;
 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
 27. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL TA 2024 *Audited*.

*Profil dan Rencana
Strategis Kementerian
Luar Negeri*

A.2. PROFIL DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI

*Profil Kementerian
Luar Negeri*

A.2.1. PROFIL KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memiliki peran strategis dalam pemerintahan Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 UUD 1945. Sebagai salah satu kementerian triumvirat, Kemenlu bertanggung jawab membantu Presiden dalam menjalankan hubungan luar negeri dan pelaksana politik luar negeri. Tugas ini dijalankan melalui perumusan kebijakan dan strategi yang berlandaskan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kedudukan, tugas dan fungsi Kemenlu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri. Perpres tersebut menegaskan peran kunci dan strategis Kemenlu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemenlu menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
2. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengoordinasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
6. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Struktur organisasi dan tugas Kemenlu dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Luar Negeri, yang kemudian diperbarui melalui Permenlu Nomor 10 Tahun 2023.

Sesuai Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang OTK Kemenlu, struktur organisasi Kemenlu terdiri dari 10 unit kerja Eselon I, 5 Staf Ahli, 3 Staf Khusus, dan 62 unit kerja Eselon II. Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) 132 Perwakilan RI masih merujuk pada Kepmenlu Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri (yang terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Kepmenlu 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri).

A.2.2. VISI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Guna mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2020 – 2024 yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, serta guna mewujudkan Misi ke-3 Pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu “Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim”, Agenda Pembangunan Nasional, maka ditetapkan Visi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

“Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

dengan penjelasan sebagai berikut:

Memimpin Diplomasi adalah mengkoordinasikan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri.

Diplomasi yang aktif dan produktif merupakan diplomasi yang aktif menjalankan kerja sama luar negeri dan menghasilkan nilai manfaat guna bagi kepentingan rakyat.

Untuk Indonesia Maju adalah kondisi di mana seluruh rakyat Indonesia dapat meraih cita-citanya.

Misi Kementerian Luar Negeri

A.2.3. MISI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi dan Satuan Kerja selama kurun waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal melalui hubungan luar negeri untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
2. Memberikan perlindungan WNI di luar negeri yang prima sebagai upaya perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
3. Menjaga integritas NKRI yang bersinergi bersama dengan Pemerintah Pusat serta Daerah dan meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional.
4. Memajukan kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di dunia internasional.
5. Meningkatkan infrastruktur diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Tujuan Kementerian Luar Negeri

A.2.4. TUJUAN/SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Tujuan/Sasaran Strategi Kementerian Luar Negeri disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Luar Negeri. 6 (enam) tujuan/sasaran strategis Kementerian Luar Negeri yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal.

2. Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global.
3. Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang meningkat.
4. Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima.
5. Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi.
6. Infrastruktur Diplomasi yang kuat.

*Arah Kebijakan
Kementerian Luar
Negeri*

A.2.5. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Sepuluh Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri, sebagai berikut:

1. Peningkatan optimalisasi nilai manfaat diplomasi ekonomi melalui hubungan luar negeri.
2. Peningkatan pengaruh kepemimpinan dan peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional.
3. Penguatan integritas NKRI dan diplomasi politik keamanan.
4. Peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional.
5. Peningkatan pelindungan WNI/BHI di luar negeri dan pelayanan publik.
6. Peningkatan dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional.
7. Penguatan diplomasi sosial budaya.
8. Penguatan Diplomasi Digital dan Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri yang sistematis.
9. Penguatan kerja sama pembangunan internasional.
10. Peningkatan Infrastruktur diplomasi berbasis teknologi informasi.

*Program dan
Kebijakan
Kementerian Luar
Negeri*

A.2.6. PROGRAM KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Berdasarkan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada tahun 2021, dalam 5 (lima) tahun periode tersebut Kementerian Luar Negeri akan melaksanakan 5 (lima) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Adapun program yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai berikut:

1. Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional.
2. Program pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik.
3. Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral.
4. Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional
5. Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian Luar Negeri memiliki

Alokasi Anggaran untuk Program Prioritas Nasional (Pro PN) 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang tersebar pada 5 Satuan Kerja melalui 1 Program Prioritas dan 2 Kegiatan Prioritas. Ke-5 Satuan Kerja tersebut adalah Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, dan Perwakilan RI.

Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi yang mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban Anggaran. SAKTI menerapkan konsep *single database* yang digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga secara sistem elektronik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* untuk seluruh jenjang entitas akuntansi dan entitas pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E-1, dan UAPA) menggunakan aplikasi MonSAKTI.

Pada bulan Desember 2022 telah ditandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dan Petunjuk Teknis Implementasi Interkoneksi Sistem SAKTI dengan SIMKEU Tahun 2023 oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri. Pada awal Tahun 2023, pengembangan implementasi interkoneksi SIMKEU-SAKTI dengan fitur sinkronisasi pagu Satker Kementerian Luar Negeri akan mulai berlaku dengan tujuan mengurangi kesalahan *input*/perbedaan data SIMKEU dan SAKTI sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pengelola keuangan, khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan Satker Perwakilan RI.

Kualitas penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* memperhatikan tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 *Audited* ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri baik Pusat dan Perwakilan sebanyak 145 Satuan Kerja, yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Tabel 1: Rincian Jumlah Satuan Kerja di Kementerian Luar Negeri

NO	SATKER	JUMLAH
1	Unit Eselon I	10
2	Satker Perwakilan RI	132
3	Unit Eselon II (KPA)	3
	TOTAL	145

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Luar Negeri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Kementerian Luar Negeri.

Petunjuk teknis akuntansi tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, akurat, transparan, dan akuntabel pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang menggunakan DIPA Kementerian Luar Negeri.

Merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2022 tersebut, kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Pengakuan Pendapatan

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Negara; atau
2. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan; atau
3. Pengesahan atas penerimaan pendapatan; atau
4. PNBPN yang belum disetorkan ke **Kas Negara** sampai dengan tanggal pelaporan dan yang sudah disetorkan namun belum diterima Pusat (*Deposit in Transit*).

Pengukuran dan Pencatatan Pendapatan

Penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas, yaitu sebesar nilai Rupiah yang diterima atau disahkan. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dalam rekening mata uang asing, sesuai paragraf 63 SAP Pernyataan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang transaksi dalam mata uang asing, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang Rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs penutup bank sentral. Penerimaan kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima dalam akun bank bermata uang Rupiah maka jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadi jumlah dalam Rupiah.

Pendapatan yang masih berada dalam penguasaan Bendahara di Perwakilan RI di luar negeri dan belum disetorkan ke kas negara pada tanggal pelaporan diakui sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Dalam hal penerimaan pendapatan tersebut diterima dalam mata uang setempat yang nilai tukarnya

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

terhadap rupiah terdapat pada Bank Indonesia (sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 di bawah), maka nilai pendapatan tersebut langsung ditranslasikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs penutup Bank Indonesia (*Exotic Currency*). Apabila nilai tukar mata uang setempat terhadap Rupiah tidak terdapat pada Tabel 2, maka pendapatan ditranslasikan ke US Dollar menggunakan kurs tengah bank sentral negara setempat untuk kemudian ditranslasikan ke Rupiah dengan kurs penutup pada tanggal pelaporan keuangan.

Tabel 2: Exotic Currency Bank Indonesia Per 31 Desember 2024

No.	Nama Mata Uang	Kode	Kurs
1	Dolar Australia	AUD	10.052,90
2	Dolar Brunei D	BND	11.890,22
3	Dolar Kanada	CAD	11.245,53
4	Franc Swiss	CHF	17.883,68
5	Yuan Cina	CNH	2.207,00
6	Yuan Cina Renminbi	CNY	2.213,48
7	Kroner Denmark	DKK	2.255,72
8	EURO	EUR	16.822,68
9	Poundsterling Inggris	GBP	20.296,44
10	Dolar Hongkong	HKD	2.081,09
11	Yen Jepang	JPY	103,43
12	Won Korea	KRW	10,96
13	Dinar Kuwait	KWD	52.440,02
14	Kips Laos	LAK	0,74
15	Ringgit Malaysia	MYR	3.611,72
16	Kroner Norwegia	NOK	1.425,16
17	Dolar Selandia Baru	NZD	9.102,87
18	Kina Papua Nugini	PGK	3.979,00
19	Peso Philipina	PHP	279,38
20	Riyal Saudi	SAR	4.300,52
21	Kroner Swedia	SEK	1.468,91
22	Dolar Singapura	SGD	11.890,22
23	Baht Thailand	THB	471,60
24	Dolar Amerika Serikat	USD	16.157,00
25	Dong Vietnam	VND	0,64

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO di Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:
 1. Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri diakui pada saat Bendahara Penerimaan menerima uang tunai/transfer dana melalui rekening beserta rincian dari Fungsi Konsuler;
 2. Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri diakui pada saat Bendahara Penerimaan menerima uang tunai/transfer dana melalui rekening beserta rincian dari Fungsi Konsuler;
 3. Pendapatan Dokumen Kekonsuleran diakui pada saat Bendahara Penerimaan menerima uang tunai/transfer dana melalui rekening beserta rincian dari Fungsi Konsuler;
 4. Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri diakui pada saat Bendahara Penerimaan menerima uang tunai/transfer dana melalui rekening beserta rincian dari Fungsi Konsuler;
 5. Pendapatan Administrasi di Luar Negeri diakui pada saat Bendahara Penerimaan menerima uang tunai/transfer dana melalui rekening;
 6. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) diakui pada saat pendapatan jasa giro diakui pada rekening koran;
 7. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya diakui pada saat Bendahara Penerimaan menerima uang tunai/transfer dana melalui rekening;
 8. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 9. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi diperoleh dari selisih lebih antara perbedaan kurs transaksi dengan kurs pelaporan pos moneter; dan
 10. Pendapatan selisih kurs yang terealisasi adalah selisih kurs yang diakibatkan adanya kenaikan kas dan setara kas secara riil.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Secara khusus pengakuan saldo Beban pada Laporan Operasional Kementerian Luar Negeri dapat berasal dari:
 1. Perekaman transaksi berjalan, yaitu dari:
 - a. Perekaman SP2D belanja pada Aplikasi SAKTI;
 - b. Perekaman pemakaian persediaan pada Aplikasi SAKTI; dan
 - c. Proses penyusutan dan amortisasi yang dihitung secara otomatis pada Aplikasi SAKTI.
 2. Jurnal Penyesuaian, yaitu jurnal penyesuaian yang direkam manual pada Aplikasi SAKTI, yaitu dari:
 - a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada suatu periode pelaporan;
 - b. Belanja Dibayar di Muka untuk mencatat pengeluaran yang telah ditentukan penggunaannya namun belum menerima manfaat, baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut;
 - c. Belanja yang Masih Harus Dibayar untuk mencatat utang karena belanja yang telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - d. Koreksi Antar Beban untuk melakukan koreksi atas beban yang terlanjur dicatat pada akun yang salah menjadi akun beban yang seharusnya;
 - e. Koreksi Antar Beban dan Aset untuk melakukan koreksi atas beban/aset yang terlanjur dicatat menggunakan akun belanja barang menjadi akun belanja modal, atau sebaliknya; dan
 - f. Pembukuan Persekot Kerja (PK) minus yang dibiayai menggunakan dana Kas Besi yang belum dipertanggungjawabkan sampai akhir periode Pelaporan Keuangan.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs BI pada

tanggal neraca. Pada Satker Perwakilan RI di luar negeri, kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian.

Merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Kementerian Luar Negeri, Aset Lancar berupa Kas pada Kementerian Luar Negeri terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening Bendahara Pengeluaran, yang terbentuk dari transaksi penyediaan Uang Persediaan, penggantian Uang Persediaan (GUP), pengembalian Uang, dan transaksi akun moneter pada sisa UP/TUP Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kementerian Luar Negeri mulai tahun 2016 mengambil kebijakan terkait sisa UP/TUP, khusus Satker Perwakilan RI sisa UP/TUP TA 2016 tidak disetorkan ke kas negara dan akan diperhitungkan pada saat pengiriman UP Perdana. Oleh karena itu, sisa UP/TUP tersebut disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan PMK Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan RI di luar negeri mulai tahun 2016 pengiriman UP/TUP pada Perwakilan RI di luar negeri menggunakan valuta US Dollar. Terkait perlakuan akuntansi atas transaksi UP/TUP tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang asing sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 tanggal 06 April 2017 perihal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang asing. Hal tersebut juga sesuai dengan Lampiran I PP Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang penyajian Laporan Keuangan, Paragraf 74 menyebutkan bahwa "Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca".

Dalam menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2024, Perwakilan RI menggunakan Kurs Penutup Bank Indonesia (BI) sebagai kurs pelaporan, sementara untuk mencatat transaksi-transaksi akrual per 31 Desember 2024 menggunakan Kurs Tengah BI per 31 Desember 2024. Kurs sebagaimana dimaksud (Kurs Tengah dan Kurs Penutup BI) sebagaimana terlampir dalam brafaks Kepala Biro Keuangan Nomor B-00098/KEMLU/250110.

- Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari kas tunai dan kas di rekening Bendahara Penerimaan, yang belum disetor ke kas negara per tanggal neraca.
- Kas dan Setara Kas digunakan untuk mencatat Kas Lainnya dan Setara Kas, yang mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi, dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan.
- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai. Biasanya diperuntukkan antara lain untuk pertanggungjawaban peminjaman dana kas besi yang belum disetor rekening kas besi, Dana Biaya Bantuan Pendidikan Anak (BBPA) yang belum ditransfer ke masing-masing *Home Staff*, Pengembalian Belanja (PB), PPh Pasal 21 dan Pasal 22, Dana Beban Pusat Perjalanan Dinas (BPJ) Plus, Kelebihan transfer UP dan TUP yang belum disetor, uang pihak ketiga lainnya yang belum diserahkan, serta Pendapatan selisih kurs yang diperoleh dari selisih antara Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka KPPN, sedangkan kerugian selisih kurs terealisasi tidak dilakukan pencatatan di dalam jurnal namun diungkapkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi digunakan untuk mencatat reklasifikasi Kas Besi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Satker Perwakilan RI di luar negeri selama Uang Persediaan belum diterima dan keterbatasan likuiditas keuangan perwakilan.
- Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan digunakan untuk mencatat kas lainnya di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan.
- Berdasarkan Permenlu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Kementerian Luar Negeri, kriteria pengakuan pendapatan sebagai berikut:
 1. Diakui pada saat pendapatan diterima di kas negara yang dibuktikan dengan terbitnya NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
 2. Diakui baik yang masih berada di rekening maupun di brankas yang belum disetorkan ke Bendahara Penerimaan Pusat maupun ke rekening Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan;
 3. Diakui pada saat telah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Perwakilan RI ke Bendahara Penerimaan Pusat namun belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan (kriteria *Deposit in Transit*); atau
 4. Diakui pada saat telah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Pusat ke kas negara namun belum terbit NTPN sampai dengan tanggal pelaporan (kriteria *Deposit in Transit*).

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

- Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*) merupakan uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga, di mana sampai tanggal neraca entitas belum menerima barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan. Belanja Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai nominal berdasarkan nilai rupiah pada SP2D atas prestasi kerja yang belum diterima dari pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
- Piutang:
 1. Piutang dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak tagih yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Piutang pada Satker Perwakilan RI di luar negeri terdiri atas pinjaman Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) RI.
 3. Pencatatan Piutang dalam mata uang asing ditranslasikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI.
 4. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang PNBPN dikategorikan sebagai piutang lancar dengan nilai penyisihan sebesar 0,5% dari saldo Piutang PNBPN.
- Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Perhitungan Penyisihan Piutang

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dapat diselesaikan tanpa penerbitan Surat Keputusan Pembebanan dengan cara penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh penanggung kerugian negara. Hal ini dilakukan ketika

penanggung kerugian telah mengakui kesalahan dan berniat baik untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi. SKTJM ini merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi penanggung kerugian dan yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian tersebut. Kasus kerugian negara yang telah memiliki bukti berupa SKTJM dapat diakui sebagai Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Sedangkan untuk penyelesaian yang dilakukan selain dengan cara damai, maka pengakuannya dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Penetapan Kerugian Negara.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian, apabila diperoleh dengan pembelian, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya dan/atau nilai perolehan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang terutama untuk dokumen keimigrasian.
- Nilai persediaan dalam mata uang valuta setempat ditranslasikan ke dalam mata uang USD lalu ditranslasikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI dalam neraca per tanggal perolehan (kuitansi/BAST). Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai SP2D maka diakui sebagai keuntungan/ kerugian selisih kurs.
- Nilai persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar.

Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pada Kementerian Luar Negeri, harga perolehan atau harga wajar aset tetap dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI saat perolehan (kuitansi/BAST). Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai SP2D maka diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah;
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 3. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MANFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Bangunan Gedung	50 tahun
Monumen / Tugu	40 s.d 50 tahun
Instalasi	5 s.d 40 tahun

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Jaringan	20 s.d 40 tahun
Jalan dan Jembatan	10 s.d 50 tahun
Bangunan Air	10 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Pencatatan Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud (ATB) Menggunakan Kurs Pembelian

Penyajian Saldo Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud (ATB) pada satuan kerja Perwakilan di Luar Negeri dinilai berdasarkan harga pembelian (kuitansi/BAST), dan dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) saat tanggal perolehan barang. Dalam hal mata uang valuta setempat tidak tersedia dalam situs BI, maka nilai valuta setempat ditranslasikan terlebih dahulu ke mata uang US Dollar dengan menggunakan kurs tengah bank sentral negara setempat atau sumber data lain yang valid. Nilai BMN dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah BI saat perolehan (kuitansi/BAST). Dalam hal terdapat perbedaan harga pembelian dengan nilai SP2D maka diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs.

Pencatatan persediaan mulai tahun 2022 menggunakan aplikasi SAKTI pada Satker Pusat. Modul Persediaan SAKTI menggunakan metode pencatatan perpetual. Metode perpetual adalah metode yang menentukan pencatatan persediaan dilakukan secara langsung dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pada setiap transaksi. Agar Modul Persediaan SAKTI menyajikan Laporan Persediaan dengan benar maka Satker harus melakukan perekaman dan *approval* transaksi secara urut sesuai dengan tanggal dokumen transaksinya. Tanggal pembukuan transaksi persediaan juga harus disesuaikan dengan tanggal dokumen transaksinya.

Persediaan akan dicatat pada modul komitmen sesuai jenis barang, kuantitas dan nilai persediaan yang diperoleh, setelah dilakukan pembelian. Selanjutnya, setelah dilakukan validasi, maka dilakukan pendetilan pada modul persediaan sesuai jenis barang, kuantitas dan nilai persediaan serta dilakukan *approval*.

Tagihan TP/TGR

- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- Kebijakan pencatatan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri dilakukan secara terpusat pada satker Sekretariat Jenderal.
- Terkait Piutang yang masih menjadi Potensi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) proses pencatatannya dilakukan oleh masing-masing Satker.

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

- Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dicatat dan diakui setelah diperoleh Surat Ketentuan Penyelesaian (dapat berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara).
- Penyajian Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dihitung berdasarkan jangka waktu jatuh tempo piutang, maksimal 12 bulan untuk Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan 24 bulan untuk Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Nilai yang akan ditagihkan dalam waktu 12 bulan sejak Surat Ketentuan Penyelesaian (dapat berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara) dicatatkan sebagai aset lancar (akun Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan) dan porsi piutang yang akan ditagihkan/jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya disajikan sebagai aset lainnya (akun Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Jangka Panjang).
- Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, Kementerian Luar Negeri memiliki kebijakan akuntansi untuk Piutang TGR bahwa penyajian porsi Piutang TGR dihitung secara proporsional sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo. Sehingga Piutang Perbendaharaan menjadi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan sejak diakui.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Dana Cadangan Perwakilan RI di luar negeri, Aset Lain-Lain, dan Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat bersih yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT (TAHUN)
Software Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain terdiri dari:
 1. Aset Lain-Lain berupa deposit sewa gedung, deposit sewa rumah *Home Staff*, PK Minus yang menggunakan Kas Besi, serta potensi kerugian negara yang belum mendapat penetapan TP/TGR yang menggunakan dana Kas Besi, PK Atnis, PK Lain-lain yang bersumber dari Kas Besi, belanja yang belum dipertanggungjawabkan yang bersumber dari Kas Besi.
 2. Pencatatan belanja yang belum dipertanggungjawabkan sebagai aset lain-lain diperuntukkan untuk transaksi yang menggunakan kas besi dan PK Plus. Transaksi belanja yang belum dipertanggungjawabkan yang menggunakan UP diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan dan dicantumkan di dalam Lampiran Laporan Keuangan Matriks Kas Bendahara Pengeluaran.
 3. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023, Fasilitas Sewa Rumah (FSR) adalah sarana tempat tinggal yang diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri selama melaksanakan tugas pada Perwakilan.

FSR di Perwakilan setidaknya harus memenuhi standar minimal, sebagai berikut:

1. Jarak kedudukan fasilitas dengan Perwakilan dalam radius 5 (lima) kilometer;
2. Telah dilengkapi perabotan dan peralatan penunjang lain yang memadai;
3. Memiliki 2 (dua) kamar tidur.

Pemberian FSR bagi pegawai yang bertugas di Perwakilan mengacu pada Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tingkat SBML berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 38/B/PR/12/2023, terdiri atas:

- a. SBML Tingkat I, ditujukan untuk:
 - 1) PNS dengan Jenjang Fungsional Ahli Pertama atau dengan pangkat sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 2) Prajurit TNI sampai dengan Pangkat Letnan Satu; dan
 - 3) Anggota Polri sampai dengan pangkat Inspektur Polisi Satu.
- b. SBML Tingkat 2
 - 1) PNS dengan Jenjang Fungsional Ahli Muda atau dengan pangkat dari Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - 2) Prajurit TNI dengan pangkat Kapten sampai dengan Mayor; dan
 - 3) Anggota Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi sampai dengan pangkat Komisaris Polisi.
- c. SBML Tingkat 3
 - 1) PNS dengan Jenjang Fungsional Ahli Madya atau dengan pangkat

- dari Pembina (IV/a) ke atas yang tidak termasuk unsur pimpinan;
- 2) Prajurit TNI sampai dengan Pangkat Letnan Kolonel ke atas; dan
- 3) Anggota Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ke atas.

- Dana Cadangan Perwakilan RI di luar negeri atau dikenal dengan istilah Kas Besi merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia. Pengelolaan Dana Cadangan Perwakilan RI di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Besi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Kas Besi Perwakilan RI dapat dipergunakan untuk:

1. Kondisi darurat di negara setempat;
2. Kunjungan Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menerima jaminan tertulis dari Sekretariat Negara;
3. Terjadi keterlambatan penerimaan Uang Persediaan (UP);
4. Pembayaran belanja barang operasional di luar perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di luar negeri atau Kas Besi diperoleh dari *Bank Statement* per tanggal pelaporan ditranslasikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR. Dengan demikian nilai Kas Besi di neraca merupakan perkalian nilai Kas Besi di *Bank Statement* dengan kurs JISDOR pada akhir periode pelaporan sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada setiap periode pelaporan.

(6) Kewajiban

- Pengakuan Kewajiban/Utang:
 1. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah;
 2. Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar; dan
 3. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- Pengukuran Kewajiban/Utang:
 1. Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah

- atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak;
2. Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.
- Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban/Utang:
 1. Utang jangka pendek/jangka panjang disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek/jangka panjang.
 2. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi:

1. Utang Kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan;
2. Utang Biaya Pinjaman;
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
4. Hibah yang Belum Disahkan;
5. Dana Pihak Ketiga;
6. Pendapatan Diterima Di Muka; dan
7. Uang Muka dari KPPN yang merupakan utang yang timbul akibat Uang Persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran Satker Perwakilan RI di luar negeri tidak disetorkan ke Kas Negara, namun diperhitungkan dengan UP tahun anggaran berjalan.

Pada Satker Perwakilan RI di luar negeri, Kewajiban Jangka Pendek dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang jangka panjang di Kementerian Luar Negeri merupakan utang yang berasal dari pengadaan Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan yang pembiayaannya diperoleh melalui pinjaman bank dengan masa pembayaran lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembiayaan melalui pinjaman bank tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2015 tentang Penganggaran Penyediaan Tanah/ Gedung/Bangunan Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Kewajiban Jangka Panjang dalam mata uang asing ditranslasikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs.

Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang diterima sebagai pinjaman. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut.

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-258/PB.6/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Pencatatan Bunga atas Utang Jangka Panjang di Kementerian Luar Negeri, pembayaran dan pencatatan bunga pinjaman atas cicilan jangka panjang terkait pengadaan aset tetap berupa gedung kantor Perwakilan RI di luar negeri, Kemenlu dapat menggunakan akun Belanja Barang (52).

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Persekot Kerja (PK)

Terdapat dua jenis PK di Kemenlu, yaitu PK minus dan PK plus. PK minus adalah pembukuan terhadap pengeluaran beban operasional dinas yang belum dapat dibebankan ke dalam DIPA, sedangkan PK Plus adalah titipan dari pihak ketiga yang belum dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran PK Minus dapat bersumber dari dana Kas Besi, Uang Persediaan (UP), maupun PK Plus yang ada di Perwakilan RI di luar negeri.

PK minus hanya bersifat sementara guna menampung pengeluaran-pengeluaran rutin yang anggarannya tidak mencukupi pada DIPA Tahun Berjalan, seperti Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

PK minus terdiri dari:

1. PK internal Satuan Kerja (belanja pegawai, barang dan modal yang dapat

- mempengaruhi saldo Kas Besi Perwakilan RI di luar negeri); dan/atau
2. PK eksternal (pinjaman kementerian teknis lainnya pada satker perwakilan/atase teknis).

Pembukuan PK yang berasal dari dana Uang Persediaan (UP) dan Kas Besi (KB) yang menjadi kewajiban Kementerian Luar Negeri disajikan sebagai akun beban dan/atau aset lain-lain, sedangkan PK yang menjadi kewajiban atase teknis disajikan sebagai akun aset lain-lain.

Persekot Kerja Selisih Kas Tahun Anggaran (PK SKTA) merupakan selisih kas yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terdapat tanda buktinya, sehingga menjadi tanggung jawab bendahara. Persekot Kerja Selisih Kas Tahun Anggaran (PK SKTA) yang berasal dari Uang Persediaan (UP) tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sedangkan PK SKTA yang berasal dari Kas Besi dicatat sebagai aset lain-lain.

Pengeluaran belanja yang belum dibukukan sebagai PK yang berasal dari Uang Persediaan tidak disajikan di dalam neraca hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pinjaman Resmi

Pinjaman Resmi adalah pinjaman sejumlah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada DIPA Kementerian kepada PDLN yang dimutasi/dipindah tugaskan ke Perwakilan sebagai persekot yang wajib dikembalikan oleh PDLN dan/atau ahli warisnya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenai bunga pinjaman.

Pemberian pinjaman tersebut dimaksudkan untuk memberi bantuan kelayakan hidup pada *Home Staff* atau Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) pada masa awal penempatan di luar negeri, yang dapat digunakan untuk membeli keperluan rumah tangga dalam rangka membantu penyesuaian diri dengan tempat baru di Perwakilan.

Pinjaman Resmi terdiri dari 3 (tiga) jenis pinjaman yaitu: 2 (dua) x Tunjangan Penghidupan Luar Negeri, Sewa Rumah, dan Pinjaman Pembelian Mobil. Tata cara pemberian dan pengembalian pinjaman resmi Pejabat Dinas Luar Negeri tertuang di Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan RI di Luar Negeri.

Hal ini tertuang di SK Menlu No. SP/6/PLN/66 tanggal 28 Februari 1966 Pemberian Uang Muka Tunjangan Luar Negeri Kepada Pejabat Yang Ditempatkan di Luar Negeri, SK Menlu No. SP/6/PLN/66 tanggal 28 Februari 1966 tentang Pemberian Uang Muka Atas Sewa Rumah Atau Uang Jaminan Sewa Rumah, SK Menlu No. KU/SK.026 A/III/92/02 tanggal 31 Maret 1992

tentang Perubahan Jumlah Uang Persekot Pembelian Mobil Pribadi.

Pada bulan Desember Tahun 2023, dikeluarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah yang berlaku pada 1 Januari 2024, maka pemberian pinjaman kepada *Home Staff* atau Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) yang berupa Uang Muka Atas Sewa Rumah Atau Uang Jaminan Sewa Rumah ditiadakan.

Cicilan Pinjaman Resmi dapat dicicil maksimal selama 24 bulan dan cicilan dilakukan pada bulan berikutnya setelah pinjaman diberikan. Sisa pinjaman dicatat sebagai piutang. Pinjaman Resmi disajikan pada akun Piutang Lainnya di dalam Neraca. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai cicilan yang belum dilunasi oleh para *Home Staff* dikalikan dengan kurs penutup pada tanggal pelaporan keuangan. Cicilan *Home Staff* yang telah disetorkan ke kas Negara diakui sebagai pendapatan non fungsional Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Dalam hal terdapat perbedaan kurs saat pinjaman dan kurs saat cicilan, hal tersebut diakui sebagai selisih kurs.

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-19/PB.6/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Perlakuan Akuntansi atas Pemberian dan Pengembalian Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) pada Kementerian Luar Negeri, pemberian pinjaman BPPR dicatat sebagai Piutang Lainnya (115212) sebagai bagian dari Piutang Bukan Pajak (1152).

Pinjaman Resmi tidak dapat diklasifikasikan sesuai masa jatuh tempo pengembalian pinjaman karena sifat ketertagihan piutang BPPR yang tinggi sehingga diklasifikasikan sebagai piutang lancar dan dilakukan penyisihan piutang lancar.

Beban Pusat Perjalanan Dinas (BPJ)

Beban Pusat Perjalanan Dinas (BPJ) merupakan pengeluaran atas perjalanan dinas pindah pejabat/pegawai Kemenlu RI dari Jakarta – Perwakilan, Perwakilan – Jakarta dan antar Perwakilan (*cross posting*) yang berasal dari DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Jenis pengeluaran BPJ terdiri dari biaya tiket perjalanan dinas pindah, biaya uang harian tiba di Perwakilan/pusat, dan biaya *lumpsum* barang pindahan.

Pemberian BPJ antar perwakilan (*cross posting*) dan dari perwakilan ke Jakarta menggunakan UP perwakilan terlebih dahulu untuk selanjutnya dimintakan penggantian ke pusat.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
POS-POS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

Penjelasan atas
Pos-Pos Laporan
Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kementerian Luar Negeri mendapatkan Alokasi Anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp8.856.121.610.000,00 yang dianggarkan ke dalam 5 (lima) program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Diplomasi dan Kerjasama Internasional sebesar Rp736.411.185.000,00;
2. Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral sebesar Rp1.045.019.356.000,00;
3. Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik sebesar Rp289.129.228.000,00;
4. Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional sebesar Rp9.942.501.000,00; dan
5. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp6.775.619.340.000,00.

Sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mendorong pencapaian kinerja IKPA secara optimal, percepatan pencapaian volume keluaran, dan optimalisasi penggunaan anggaran telah dilaksanakan revisi anggaran antar Program serta tambahan anggaran guna pemenuhan belanja Pegawai Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan PPh 21 Bagi *Home Staff* dari BABUN. Adapun perubahan Pagu DIPA Kemenlu sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6: Perubahan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	DIPA AWAL	DIPA - PER 31 DESEMBER 2024
Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	736.411.185.000	695.651.039.000
Program Peran dan kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja sama Multilateral	1.045.019.356.000	976.989.467.000
Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	289.129.228.000	274.225.768.000
Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	9.942.501.000	9.942.501.000
Program Dukungan Manajemen	6.775.619.340.000	7.161.484.119.000
Jumlah DIPA	8.856.121.610.000	9.118.292.894.000

Sementara itu, data berdasarkan pendapatan dan jenis belanja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 7: Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	DIPA AWAL	DIPA - PER 31 DESEMBER 2024
Pendapatan Negara dan Hibah		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	431.744.324.000	443.806.270.000
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	431.744.324.000	443.806.270.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.681.190.568.000	3.904.702.485.000
Belanja Barang	4.263.456.636.000	4.438.752.535.000
Belanja Modal	911.474.406.000	774.837.874.000
Jumlah DIPA	8.856.121.610.000	9.118.292.894.000

Penjelasan atas pergeseran/revisi DIPA Kementerian Luar Negeri sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran Belanja Pegawai ke Belanja Barang Operasional sebagai tindak lanjut perubahan Tunjangan Sewa Rumah (TSR) menjadi Fasilitas Sewa Rumah (FSR).

Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2019, Menteri Keuangan melalui Surat No. S475/MK.02/2023 telah menetapkan Standar Biaya Masukan Lainnya untuk besaran FSR yang menggantikan TSR.

Berkenaan dengan perubahan tersebut, Menteri Luar Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 11 Tahun 2023 tentang FSR Bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan RI di luar negeri. Perubahan tersebut berdampak pada pengalihan beban sewa rumah yang dari Belanja Pegawai untuk TSR, menjadi FSR pada BBO. Perubahan ini dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 29 Desember 2023.

Adapun besaran pergeseran anggaran dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang Operasional adalah sebesar Rp286.144.533.000,00.

2. Penerapan *Automatic Adjustment*

Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 telah menetapkan pencadangan/blokir pagu anggaran Rupiah Murni TA 2024 sebesar Rp616.251.537.000,00 (enam ratus enam belas miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. Anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan pada Program Dukungan Manajemen Kantor Pusat Sekretariat Jenderal sebesar Rp45.876.312.000,00;
- b. Anggaran Kontribusi Organisasi Internasional pada Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral sebesar Rp363.975.225.000,00; dan
- c. Anggaran pembangunan Gedung Kantor KBRI Washington DC yang masih diblokir karena memerlukan data dukung tambahan sebesar Rp206.400.000.000,00.

Penerapan AA tersebut dilakukan melalui pemblokiran anggaran melalui mekanisme revisi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 16 Januari 2024.

3. Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* Tahap I TA 2024

Menteri Luar Negeri menyampaikan usulan pembukaan blokir tahap I kepada Menteri Keuangan melalui Surat No. 257/PR/06/2024/03/01 tanggal 28 Juni 2024, untuk memenuhi kebutuhan prioritas sebesar Rp380.037.175.000,00 dengan rincian:

- a. Pembayaran Kontribusi Organisasi Internasional dan kebutuhan prioritas pada Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama Multilateral antara lain dukungan anggaran keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM, High Level Forum on Multi Stakeholder Perspective, dan kegiatan prioritas lainnya sebesar Rp246.339.389.000,00;
- b. Kebutuhan konsultan arsitek dalam rangka pengajuan izin kontrak tahun jamak (KTJ) renovasi/pembangunan Gedung Kantor KBRI Washington DC sebesar Rp32.300.946.000,00;
- c. Kebutuhan revitalisasi dan pemeliharaan jaringan, server dan pengolah data, serta penyusunan arsitektur SPBE, Peta Rencana, Ristik 2025-2029, peningkatan kapasitas Digital Command Center (DCC) sebesar Rp58.317.342.000,00;
- d. Pemenuhan kebutuhan Operasional yang bersifat mengikat, antara lain Fasilitas Manajemen Terpadu, Sewa Gedung Kantor/Wisma, dan kebutuhan operasional lainnya pada Perwakilan RI sebesar Rp34.043.396.000,00;
- e. Pengadaan kendaraan dinas pada KBRI Washington DC dan KJRI Jeddah sebesar Rp9.036.102.000,00;

Menteri Keuangan menyampaikan persetujuan usul pemanfaatan buka blokir AA sebesar Rp310.704.321.000,00 melalui Surat No. S-175/MK.2/2024 tanggal 30 Juli 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran kontribusi Organisasi Internasional (OI) dan kebutuhan prioritas pada Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral sebesar Rp244.359.979.000,00;

- b. Kebutuhan konsultan arsitek dalam rangka pengajuan izin Kontrak Tahun Jamak Renovasi dan Restorasi Gedung Kantor KBRI Washington DC sebesar Rp32.300.946.000,00; dan
- c. Pemenuhan Kebutuhan Operasional yang bersifat mengikat, antara lain Fasilitas Manajemen Terpadu, Sewa Gedung Kantor/Wisma, dan kebutuhan operasional lainnya pada Perwakilan RI sebesar Rp34.043.396.000,00.

Revisi pembukaan blokir tahap I disahkan pada 30 Juli 2024.

4. Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* Tahap II TA 2024

Menteri Luar Negeri menyampaikan usulan pembukaan blokir tahap II kepada Menteri Keuangan melalui Surat No. 389/PR/09/2024/03/01 tanggal 4 September 2024, untuk memenuhi kebutuhan prioritas sebesar Rp305.547.216.000,00 dengan rincian:

- a. Belanja Pegawai Perwakilan RI sebesar Rp105.802.006.000,00;
- b. Kebutuhan prioritas TIK Kemenlu berupa revitalisasi jaringan, pengembangan infrastruktur dan pemeliharaan sebesar Rp46.369.278.000,00;
- c. Belanja Barang Operasional (BBO) untuk kebutuhan mengikat dan Fasilitas Sewa Rumah (FSR) Perwakilan RI sebesar Rp19.500.392.000,00;
- d. Pengadaan perangkat SIMKIM dan kebutuhan belanja modal prioritas Perwakilan RI sebesar Rp35.354.549.000,00;
- e. Renovasi/pembangunan Gedung Kantor KBRI Washington DC sebesar Rp52.833.495.000,00;
- f. Kegiatan pelayanan dukungan substansi dan administrasi prioritas Pimpinan Kementerian Luar Negeri sebesar Rp12.217.895.000;
- g. Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA), seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Madya, dan pengadaan paspor sebesar Rp33.469.601.000,00.

Menteri Keuangan menyampaikan persetujuan usul pemanfaatan buka blokir AA sebesar Rp156.605.349.000,00 melalui Surat No. S-291/MK.2/2024 tanggal 20 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kebutuhan kekurangan Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di Luar Negeri sebesar Rp105.802.006.000,00;
- b. Kebutuhan prioritas TIK Kemenlu berupa revitalisasi jaringan, arsitektur SPBE, dan pemeliharaan jaringan sebesar Rp34.597.395.000,00;
- c. Belanja Barang Operasional (BBO) untuk kebutuhan mengikat dan Fasilitas Sewa Rumah (FSR) pada 4 Satker Perwakilan RI di Luar Negeri sebesar Rp9.129.948.000,00;
- d. Pengadaan genset pada KJRI Houston dan KBRI Dar Es Salaam sebesar Rp961.199.000,00;

- e. Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengadaan paspor dinas sebesar Rp6.114.801.000,00.

Revisi pembukaan blokir tahap II disahkan pada 14 Oktober 2024.

5. Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* Tahap III TA 2024

Menteri Luar Negeri menyampaikan usulan pembukaan blokir tahap III kepada Menteri Keuangan melalui Surat No. 451/KU/10/2024/03/01 tanggal 17 Oktober 2024, untuk memenuhi kebutuhan prioritas sebesar Rp119.417.040.000,00 dengan rincian:

- a. Pembayaran kontribusi Organisasi Internasional (OI) pada Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral sebesar Rp22.656.774.000,00;
- b. Kebutuhan tambahan Belanja Barang Operasional Perwakilan RI untuk keperluan Fasilitas Sewa Rumah Home Staff, sewa Gedung Kantor/Wisma Duta dan belanja mengikat lainnya sebesar Rp64.033.553.000,00;
- c. Kebutuhan anggaran kegiatan prioritas pada Unit Sekretariat Jenderal sebesar Rp32.726.713.000,00;

Menteri Keuangan menyampaikan persetujuan usul pemanfaatan buka blokir AA sebesar Rp86.375.074.000,00 melalui Surat No. S-385/MK.2/2024 tanggal 7 November 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kebutuhan untuk pembayaran kontribusi Organisasi Internasional (OI) sebesar Rp22.656.774.000,00;
- b. Kebutuhan kekurangan Belanja Barang Operasional (BBO) pada 30 (tiga puluh) satker Perwakilan RI di LN TA 2024 sebesar Rp33.212.493.000,00;
- c. Kebutuhan untuk pelayanan dukungan substansi dan administrasi prioritas pimpinan Kemenlu berupa Penyelenggaraan Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI Tahun 2024, Pengiriman *Eminent Person High Level Task Force (HLTF)*, dan kegiatan Prioritas Pimpinan Luar Negeri sebesar Rp9.825.323.000,00;
- d. Pemenuhan untuk Biaya Bantuan Pendidikan Anak (BBPA) sebesar Rp20.680.484.000,00.

Revisi pembukaan blokir tahap III disahkan pada 18 November 2024.

6. Rincian pergeseran antar Jenis Belanja, dapat tergambar seperti pada tabel dibawah ini.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 8: Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	SEMULA	PER 31 MARET	PER 30 JUNI	PER 30 SEPTEMBER	PER 31 DESEMBER
Belanja Pegawai	3.681.190.568.000	3.394.771.355.000	3.394.777.355.000	3.414.350.476.000	3.904.702.485.000
Belanja Barang	4.263.456.636.000	4.532.995.849.000	4.525.485.580.000	4.483.166.852.000	4.438.752.535.000
Belanja Modal	911.474.406.000	928.354.406.000	935.858.675.000	958.604.282.000	774.837.874.000
Jumlah DIPA	8.856.121.610.000	8.856.121.610.000	8.856.121.610.000	8.856.121.610.000	9.118.292.894.000

Realisasi Pendapatan sebesar Rp534.394.583.417

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp534.394.583.417,00 atau sebesar 120,41% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp443.806.270.000,00.

Realisasi Pendapatan Kementerian Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ESTIMASI	REALISASI	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	3.862.033.262	0,00%
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	401.422.000	0,00%
3	Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	2.265.843.380	0,00%
4	Pendapatan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	259.786.320	0,00%
5	Pendapatan Visa RI di LN	12.781.227.000	95.301.059.797	745,63%
6	Pendapatan Paspor RI di LN	183.967.542.000	158.375.485.939	86,09%
7	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	132.108.523.000	110.816.682.908	83,88%
8	Pendapatan Pelayanan Lainnya di LN	11.478.829.000	23.790.055.719	207,25%
9	Pendapatan Administrasi di LN	42.829.694.000	44.776.361.056	104,55%
10	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	-	48.805.800	0,00%
11	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	651.637.000	1.639.911.421	251,66%

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	URAIAN	ESTIMASI	REALISASI	%
12	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	18.000.000	0,00%
13	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	75.200.756	0,00%
14	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1.287.294.705	0,00%
15	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	5.083.203.832	0,00%
16	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	511.378.785	0,00%
17	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	17.200.000	0,00%
18	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	59.988.818.000	79.547.654.844	132,60%
19	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	6.317.202.893	0,00%
Jumlah		443.806.270.000	534.394.583.417	120,41%

Perbandingan realisasi pendapatan Kementerian Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10: Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	% NAIK (TURUN)
A. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha					
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	14.708.800	(14.708.800)	(100,00%)
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.862.033.262	4.461.452.138	(599.418.876)	(13,44%)
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	401.422.000	27.000.000	374.422.000	1.386,75 %
4	Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.265.843.380	2.926.503.970	(660.660.590)	(22,58%)
5	Pendapatan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	259.786.320	1.525.021.729	(1.265.235.409)	(82,97%)
Jumlah (A)		6.789.084.962	8.954.686.637	(2.165.601.675)	(24,18%)
B. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum					

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	% NAIK (TURUN)
1	Pendapatan Visa RI di LN	95.301.059.797	81.174.688.340	14.126.371.457	17,40 %
2	Pendapatan Paspor RI di LN	158.375.485.939	171.461.650.039	(13.086.164.100)	(7,63%)
3	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	110.816.682.908	110.827.775.891	(11.092.983)	(0,01%)
4	Pendapatan Pelayanan Lainnya di LN	23.790.055.719	48.680.389.801	(24.890.334.082)	(51,13%)
5	Pendapatan Administrasi di LN	44.776.361.056	29.669.873.789	15.106.487.267	50,92 %
Jumlah (B)		433.059.645.419	441.814.377.860	(8.754.732.441)	(1,98%)
C. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan					
1	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	48.805.800	17.131.317	31.674.483	184,89 %
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.639.911.421	1.245.315.871	394.595.550	31,69 %
3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	18.000.000	59.775.510	(41.775.510)	(69,89%)
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	382.651.071	(382.651.071)	(100,00%)
Jumlah (C)		1.706.717.221	1.704.873.769	1.843.452	0,11 %
D. Pendapatan Denda					
1	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	75.200.756	7.864.865	67.335.891	856,16 %
Jumlah (D)		75.200.756	7.864.865	67.335.891	856,16 %
E. Pendapatan Lain-lain					
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	1.287.294.705	1.516.537.980	(229.243.275)	(15,12%)
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	5.083.203.832	11.685.575.153	(6.602.371.321)	(56,50%)
3	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	511.378.785	181.052.104	330.326.681	182,45 %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	% NAIK (TURUN)
4	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	17.200.000	55.482.750	(38.282.750)	(69,00%)
5	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	79.547.654.844	71.821.158.586	7.726.496.258	10,76 %
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	6.317.202.893	484.191.791	5.833.011.102	1.204,69 %
Jumlah (E)		92.763.935.059	85.743.998.364	7.019.936.695	8,19 %
F. Jumlah (A+B+C+D+E)		534.394.583.417	538.225.801.495	(3.831.218.078)	(0,71%)

Realisasi pendapatan Kementerian Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 turun sebesar 0,71% atau Rp3.831.218.078,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 dengan jumlah realisasi masing – masing sebesar Rp534.394.583.417,00 dan Rp538.225.801.495,00. Terdapat kenaikan dan penurunan pada setiap pendapatan. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, yaitu sebesar Rp374.422.000,00 atau sebesar 1.386,75% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan pendapatan ini meningkat dikarenakan adanya penjualan Barang Milik Negara berupa bongkaran hasil renovasi Gedung Pancasila Tahun Anggaran 2024. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya dan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sebesar masing-masing (100,00%) atau menjadi nihil di periode 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp6.789.084.962

B.1.1. PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, DAN IURAN BADAN USAHA

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.789.084.962,00.

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.165.601.675,00 atau sebesar 24,18% dari pendapatan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Penurunan terbesar pada pendapatan ini terjadi pada Pendapatan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp1.265.235.409,00 atau sebesar 82,97% dan penurunan Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp14.708.800,00 atau sebesar 100,00%.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp14.708.800,00 dari Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023. Pendapatan tahun 2023 merupakan penyerahan hasil pemusnahan arsip Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 sesuai Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.01/155/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan nomor B-KN.00.01/299/2023 tanggal 20 Oktober 2023 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip. Namun demikian untuk pendapatan hasil pemusnahan arsip Kementerian Luar Negeri tahun 2024 dibukukan pada MAK 425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Realisasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.862.033.262,00 yang bersumber dari 41 (empat puluh satu) Satker, yaitu 7 (tujuh) Satker Pusat dan 34 (tiga puluh empat) Satker Perwakilan.

Perbandingan realisasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Kementerian Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11: Realisasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Satuan Kerja Pusat untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	403247	Sekretariat Jenderal	176.576.000	156.509.998
2	651891	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan	120.150.000	10.000.000
3	677272	Perutusan Tetap RI di ASEAN	-	5.151.515
4	637372	Ditjen Amerika Dan Eropa	33.403.000	-
5	667829	Ditjen Hukum Dan Perjanjian Internasional	21.059.000	-
6	404202	Ditjen Protokol Dan Konsuler	74.000.000	-
7	404176	Inspektorat Jenderal	16.873.000	-
8	404227	BSKLN	-	5.000.001
9	667808	Ditjen Multilateral	188.000.000	39.499.999
10	606322	Ditjen KS Asean	-	220.906.322
11	637368	Ditjen ASPASAF	-	21.000.000
Total			630.061.000	458.067.835

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

**Tabel 12: Realisasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Satuan Kerja Perwakilan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023**

(dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	403253	KBRI ADDIS ABABA	201.968.000	-
2	403262	KBRI ALGER	219.279.053	-
3	403278	KBRI ANKARA	260.139.000	-
4	404114	KBRI BANDAR SERI BEGAWAN	137.751.576	-
5	403290	KBRI BANGKOK	5.796.841	142.356.822
6	403335	KJRI MUMBAI	-	38.873.760
7	403341	KBRI BERLIN	25.603.696	-
8	403381	KBRI BUENOS AIRES	30.014.300	46.903.710
9	403536	KBRI CANBERRA	-	92.230.380
10	403432	KBRI DAMASKUS	-	184.886.800
11	403536	KBRI KABUL	-	46.572.000
12	403582	KBRI ABUJA	-	14.509.350
13	403618	KBRI MEXICO CITY	35.117.241	77.735.377
14	403630	KBRI NEW DELHI	49.047.325	60.001.882
15	403799	KBRI SOFIA	-	92.000.144
16	403856	KBRI WINA	-	66.177.714
17	403871	KBRI WASHINGTON DC	-	67.397.598
18	403460	KBRI DEN HAAG	53.816.153	-
19	632402	KBRI DILI	301.675.950	-
20	403505	KBRI HANOI	95.454.000	-
21	403624	KBRI MOSKOW	23.772.000	-
22	677333	KBRI PANAMA CITY	102.344.205	-
23	403686	KBRI PARIS	171.234.914	-
24	403893	KBRI PORT MORESBY	64.910.370	-
25	403913	KBRI KOPENHAGEN	-	124.599.078
26	403950	KBRI HELSINKI	-	248.148.753
27	403990	KRI DARWIN	-	19.633.094
28	404010	KBRI ABU DHABI	-	60.720.240
29	404026	KJRI LOS ANGELES	-	42.072.240
30	404032	KBRI DAKAR	-	62.973.686
31	404063	KJRI CHICAGO	-	38.263.200
32	404139	KBRI RABAT	323.080.000	125.370.275
33	404145	KBRI RIYADH	-	56.806.864

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
34	403768	KBRI SEOUL	71.171.036	-
35	403780	KBRI SINGAPURA	34.950.000	-
36	403800	KBRI STOCKHOLM	11.636.744	-
37	403819	KBRI TEHRAN	97.494.140	-
38	532640	KBRI WINDHOEK	154.454.767	181.761.988
39	403491	KJRI HAMBURG	164.522.451	-
40	538861	KBRI PHNOM PENH	-	78.855.000
41	549849	KJRI HO CHI MINH CITY	3.250.200	1.541.600
42	549853	KJRI PERTH	-	541.825.602
43	568310	KBRI BRATISLAVA	-	56.029.455
44	576590	KRI SONGKHLA	35.729.660	78.798.881
45	576612	KBRI BEIRUT	-	47.748.000
46	621871	KBRI DOHA	44.090.001	41.853.780
47	404088	KJRI HOUSTON	23.524.800	-
48	403479	KJRI JEDDAH	45.485.915	213.324.131
49	651910	KBRI SUVA	-	784.830.359
50	651931	KBRI TRIPOLI	-	25.323.194
51	666955	KJRI KUCHING	56.945.785	-
52	677308	KBRI MANAMA	-	70.445.839
53	677375	KJRI TAWAU	-	94.533.607
54	683148	KJRI ISTANBUL	130.008.000	78.279.900
55	404072	KJRI MARSEILLE	24.803.614	-
56	403692	KJRI PENANG	35.523.900	-
57	403752	KJRI SAN FRANCISCO	102.256.359	-
58	403485	PTRI JENEWA	95.120.266	-
Total			3.231.972.262	4.003.384.303

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp599.418.876,00 atau sebesar 13,44% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut karena pada tahun 2024 jumlah Perwakilan RI yang melakukan Penjualan Peralatan dan Mesin tidak sebanyak di tahun 2023.

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp374.422.000,00 atau sebesar 1.386,75% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Pendapatan ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp401.422.000,00 yang bersumber dari penjualan secara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1. Risalah Lelang Nomor 112/06.23/2024-01, yakni untuk pelelangan 1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa bongkaran hasil renovasi Gedung Pancasila senilai Rp114.000.000,00;
2. Risalah Lelang Nomor 339/06.02/2024-01, yakni untuk 1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa bongkaran hasil renovasi bangunan Klinik, *Hydrant* senilai Rp27.000.000,00;
3. Risalah Lelang Nomor 340/06.02/2024-01, yakni untuk 1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa *scrap* yang terdiri dari 12 (dua belas) kendaraan bermotor senilai Rp4.660.000,00;
4. Risalah Lelang Nomor 111/06.23/2024-01, yakni untuk 1 (satu) paket Barang Milik Negara Selain Tanah dan Bangunan berupa material hasil pembongkaran bangunan senilai Rp2.012.000,00; dan
5. Risalah Lelang Nomor 587/06.2/2024-01, yakni untuk 1 (satu) material hasil renovasi pembongkaran Bangunan Gedung Pancasila senilai Rp253.750.000,00.

Realisasi Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan merupakan pendapatan dari 9 (sembilan) Satuan Kerja yaitu Bangkok, Dar Es Salaam, Davao City, London, PTRI New York, Singapura, Johor Bahru, Kuching, serta Sekretariat Jenderal turut menyumbang terhadap penurunan pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Sewa Gedung, Sewa Rumah Dinas/Wisma dan Sewa Kantin dengan nilai total sebesar Rp2.265.843.380,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp660.660.590,00 atau sebesar 22,58% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Penerimaan Klaim Asuransi BMN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp259.786.320,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan atas klaim asuransi BMN pada Perwakilan RI di New Delhi, Sydney, Tehran, Vatikan, Washington DC, Cape Town, Lisabon, dan Shanghai. Pendapatan Penerimaan Klaim Asuransi BMN tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.265.235.409,00 atau sebesar 82,97% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan
Administrasi dan
Penegakan Hukum
sebesar
Rp433.059.645.419

B.1.2. PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM

Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp433.059.645.419,00

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum pada periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.754.732.441,00 atau sebesar 1,98 % dari pendapatan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Terdapat kenaikan dan penurunan pada setiap pendapatan. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada Pendapatan Pelayanan Lainnya di LN, yaitu sebesar

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

Rp24.890.334.082,00 atau sebesar 51,13% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini dikarenakan sudah tidak ada lagi program khusus yang dilaksanakan di Perwakilan bekerja sama dengan Kementerian Teknis, seperti program rekalibrasi tenaga kerja di Malaysia dan Pasporisasi di Arab Saudi.

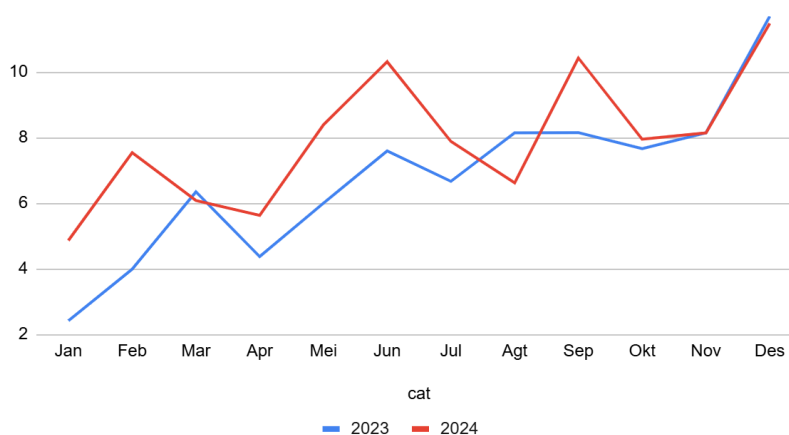
Di sisi lain, terdapat kenaikan realisasi pendapatan terutama disebabkan adanya kenaikan realisasi Pendapatan Administrasi di Luar Negeri sebesar Rp15.106.487.267,00 atau 50,92% yang dikarenakan adanya kenaikan dari Pendapatan Penerimaan Kembali VAT di Luar Negeri.

Realisasi Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp95.301.059.797,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp14.126.371.457,00 atau sebesar 17,40% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan pendapatan ini dikarenakan diberlakukannya pemberian visa kunjungan melalui 2 (dua) jalur, yaitu layanan e-visa dan penerbitan visa oleh Perwakilan RI.

Sebagai informasi, mekanisme pemberian visa selama masa pandemi tahun 2020 – 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Visa elektronik yang mengatur bahwa pemberian visa kunjungan hanya melalui layanan e-visa, sehingga visa yang diberikan di Perwakilan hanya dalam keadaan tertentu seperti darurat dan urgensi lainnya. Layanan e-visa langsung ditangani oleh Ditjen Imigrasi, Jakarta.

Perbandingan realisasi PNPB Visa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan dalam grafik di bawah ini:

Realisasi Pendapatan Visa



Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024, adalah sebesar Rp158.375.485.939,00. Pendapatan Paspor mengalami penurunan sebesar Rp13.086.164.100,00 atau

sebesar 7,63% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini dapat dikarenakan telah diberlakukannya masa berlaku paspor 10 (sepuluh) tahun sehingga mengurangi pemohon paspor. Namun sejak Agustus 2024, sesuai dengan Permenkumham nomor 19 Tahun 2024, untuk penerbitan paspor bagi WNI di luar negeri diberlakukan untuk 5 (lima) tahun.

Pendapatan Dokumen Kekonsuleran untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp110.816.682.908,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp11.092.983,00 atau sebesar 0,01% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terjadi karena telah diberlakukannya secara efektif Perpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) atau disebut Konvensi Apostille sejak September 2022. Melalui penerapan Konvensi Apostille tersebut, dilakukan penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik, sehingga sebagian besar legalisasi tidak perlu lagi melalui Perwakilan RI. Hal ini berimbas pada penurunan Pendapatan Dokumen Kekonsuleran yang diterima oleh Perwakilan RI.

Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.790.055.719,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp24.890.334.082,00 atau sebesar 51,13% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini dikarenakan sudah tidak ada lagi program khusus yang dilaksanakan di Perwakilan bekerja sama dengan Kementerian Teknis, seperti program recalibrasi tenaga kerja di Malaysia dan Pasporisasi di Arab Saudi.

Pendapatan Administrasi di Luar Negeri periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.776.361.056,00. Pendapatan ini merupakan perolehan dari 78 (tujuh puluh delapan) Perwakilan RI untuk pengembalian atas klaim *Value Added Tax* (VAT) Belanja Rutin Perwakilan RI di luar negeri. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp15.106.487.267,00 atau sebesar 50,92% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan pendapatan ini disebabkan kenaikan jumlah belanja yang diajukan pengembalian VAT oleh Perwakilan RI di luar negeri. Sebagai informasi, besarnya pendapatan pengembalian atas klaim VAT tergantung besarnya belanja yang dilakukan Perwakilan RI, jumlah Perwakilan RI yang mengajukan VAT, dan kebijakan pengembalian VAT pada negara setempat. Kenaikan pengembalian VAT tersebut juga merupakan tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Kemlu TA 2023. Hal lain yang dicatat pada akun Pendapatan Administrasi di Luar Negeri adalah Pajak Mineral/Bensin di Perwakilan Wina.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp1.706.717.221

B.1.3. PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.706.717.221,00

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp1.843.452,00 atau sebesar 0,11% dari pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai sebesar Rp41.775.510,00 atau 69,89% dan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sebesar Rp382.651.071,00 atau 100%.

Di sisi lain, terdapat kenaikan pada Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan dan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dengan nilai kenaikan masing-masing sebesar Rp31.674.483,00 atau 184,89% dan Rp394.595.550,00 atau 31,69%.

Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp48.805.800,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp31.674.483,00 atau sebesar 184,89% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Selisih Kurs atas perhitungan Uang Persediaan dari 37 (tiga puluh tujuh) Perwakilan RI di luar negeri.

Tabel 13: Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

NO	KD SATKER	AKUN	JUMLAH
1	403278	425752	6.626
2	403290	425752	236.481
3	403329	425752	1.241
4	403372	425752	325
5	403397	425752	2.166
6	403417	425752	163
7	403432	425752	156
8	403448	425752	1.311.811
9	403460	425752	3.088
10	403536	425752	471
11	403551	425752	1.573
12	403567	425752	6.192.735
13	403598	425752	2.508
14	403602	425752	1.580

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	KD SATKER	AKUN	JUMLAH
15	403630	425752	3.759
16	403670	425752	1.550.538
17	403862	425752	790.479
18	403887	425752	1.109
19	403893	425752	46.656
20	403922	425752	1.220
21	404114	425752	467
22	404139	425752	314
23	404145	425752	3.787
24	404160	425752	6.404
25	524728	425752	10.656
26	532612	425752	2.905.614
27	532654	425752	959.270
28	560710	425752	812
29	560724	425752	1.411
30	576590	425752	1.525
31	576612	425752	7.862
32	621871	425752	575.347
33	651910	425752	1.572
34	666955	425752	789
35	677286	425752	162
36	677312	425752	4.062
37	677329	425752	34.171.061
JUMLAH AKUN 425752 :			48.805.800

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.639.911.421,00 yang merupakan pendapatan bunga bank dari rekening rutin dan kas besi di Perwakilan RI di Luar Negeri dan rekening Sekretariat Jenderal. Pendapatan ini mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp394.595.550,00 atau sebesar 31,69% dari pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Kenaikan pendapatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan suku bunga bank USD pada rekening setempat dan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap USD yang melemah di akhir periode 2024.

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp18.000.000,00 merupakan pembayaran oleh 1 (satu) orang debitur dengan mekanisme pemotongan pensiun melalui PT

Taspen dan telah disetorkan ke Kas Negara. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp41.775.510,00 atau sebesar 69,89% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Sementara itu, **Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara** periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp382.651.071,00 atau sebesar 100% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2024 belum terdapat setoran Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Bendahara.

Realisasi Pendapatan
Denda sebesar
Rp75.200.756

B.1.4. PENDAPATAN DENDA

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp75.200.756,00.

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp67.335.891,00 atau sebesar 856,16% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan pendapatan ini bersumber dari denda yang dibayarkan oleh CV Kabayan Consulting atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Revitalisasi Portal Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Kontrak No.059/PPK-PUSTIK/10/2023/19 tanggal 27 Oktober 2023 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.BAST/059/PPK-PUSTIK/12/2023/19. Nilai kontrak sebesar Rp4.562.000.000,00 dengan masa berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2023, sehingga penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp52.809.738,00.

Selain itu, terdapat denda yang dikenakan kepada PT Edutama Tempo Integra atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Jasa Pelatihan Menulis Opini Beradu Gagasan di Media Massa untuk Peserta Sedsilu Angkatan ke-76 tanggal 19 dan 20 Maret 2024 dengan SPK No.055/SPK/03/2024/18 tanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan No.055/BAST/03/2024/18 tanggal 21 Maret 2024. Nilai Kontrak sebesar Rp98.500.000,00 dengan demikian penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp88.738,00.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Satker Sekretariat Jenderal total Rp22.302.280,00 terdiri atas:

1. Pembayaran keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PT. Winaguna Sarana Teknik berupa Belanja Modal Termin ke IV Pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi (M) Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kontrak Nomor

- 001.971.054.D/KONTRAK/PL/09/2023) sebesar Rp3.264.472,00 sesuai potongan pada SPM nomor 02091T.
2. Pembayaran keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PT. Rakit Unggul Mitratama berupa Belanja Modal Termin ke III Pengadaan Pelaksana Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kontrak Nomor 002.971.054.D/ADD-IV/KONTRAK/PL/09/2024) sebesar Rp19.037.808,00 sesuai potongan SPM nomor 02027T.

Realisasi Pendapatan
Lain-Lain sebesar
Rp92.763.935.059

B.1.5. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan Lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp92.763.935.059,00

Pendapatan Lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.019.936.695,00 atau sebesar 8,19% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan terbesar pada Pendapatan Lain-Lain bersumber dari Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Anggaran Lain-lain dengan kenaikan masing-masing sebesar Rp330.326.681,00 atau sebesar 182,45% dan Rp5.833.011.102,00 atau sebesar 1.204,69%.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.287.294.705,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp229.243.275,00 atau sebesar 15,12% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) berasal dari pelaksanaan anggaran dengan porsi terbesar dari pembayaran kekurangan Tunjangan Jabatan, baik Struktural maupun Fungsional, Tunjangan Umum, Tunjangan Keluarga, dan Kenaikan Gaji Berkala. Pengembalian Belanja tersebut terjadi karena adanya penyesuaian jabatan dan golongan para pegawai berdasarkan dokumen kepegawaiannya seperti Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ). Di samping itu, ada juga Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) yang berasal dari Perwakilan RI karena adanya pengembalian TPLN yang telah diterima *Home Staff* dari tahun anggaran yang lalu.

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.083.203.832,00. Pendapatan ini mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp6.602.371.321,00 atau sebesar 56,50% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Pendapatan ini bersumber dari Sekretariat Jenderal, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Amerika dan

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Kerja Sama Multilateral, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Badan Strategi dan Kebijakan Luar Negeri, serta 32 (tiga puluh dua) Perwakilan RI di Luar Negeri. Diantara Satker-satker tersebut, kenaikan tertinggi pendapatan ini bersumber dari KBRI Den Haag dengan nilai penerimaan sebesar Rp1.581.915.272,00, antara lain yang paling besar adalah Pengembalian kelebihan pembayaran langganan listrik dan gas Rp1.510.391.538,76.

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp511.378.785,00 yang terdiri atas Pengembalian Atas Belanja Modal TAYL dengan detail sebagai berikut:

Tabel 14: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No.	KD SATKER	AKUN	JUMLAH
1	403247	425913	383.547.557
2	403262	425913	16.612.355
3	403278	425913	15.366.948
4	403341	425913	767.486
5	403366	425913	21.311.639
6	403401	425913	4.327.033
7	403598	425913	62.338.588
8	532633	425913	3.897.705
9	677286	425913	3.209.474
JUMLAH AKUN 425913 :			511.378.785

Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp330.326.681,00 atau sebesar 182,45% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tertinggi pendapatan ini bersumber dari Sekretariat Jenderal dengan nilai penerimaan sebesar Rp383.547.557,00.

Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non-TP/TGR Pensiunan PNS untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.200.000,00 yang merupakan setoran dari PT Taspen dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp38.282.750,00 atau 69,00% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp79.547.654.844,00. Realisasi Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp7.726.496.258,00 atau sebesar

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

10,76% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini merupakan dampak adanya kenaikan jumlah dari Pinjaman Resmi *Home Staff* terutama *Home Staff* yang baru tiba di Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk akibat dari kenaikan ADTLN. (Kenaikan jumlah pinjaman resmi dan ADTLN terjadi dikarenakan berlakunya Perpres Nomor 84 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Terhitung Mulai tanggal 16 Agustus 2024).

Pendapatan Anggaran Lain – lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.317.202.893,00 yang terdiri atas pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya, penerimaan Pengembalian Deposit Sewa, Pendapatan Saldo Mengendap Dan Penerimaan Kelebihan Pembayaran Aplikasi atas Layanan Fungsional pada 20 (dua puluh) Perwakilan RI. Pendapatan ini mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp5.833.011.102,00 atau sebesar 1.204,69% dari pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan signifikan tersebut diantaranya merupakan setoran atas tindak lanjut penyelesaian Saldo Lebih yang terus mengendap di KBRI Berlin TA 2011-2013 sebesar USD340,526.65 eqv. Rp5.401.093.195,65 dengan kode NTPN 770D761QV4JA600P (vide Berita Biasa KBRI Berlin Nomor B-00426/BERLIN/241128 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Saldo Lebih USD dan EUR KBRI Berlin TA 2011-2013 dan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 54499/KU/12/2024/25 tanggal 10 Desember 2024 perihal Laporan Rapat Pembahasan Langkah-langkah Penyelesaian Permasalahan Keuangan pada KJRI Hamburg dan KBRI Lisabon).

Tabel 15: Pendapatan Anggaran Lain-lain untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	KD SATKER	AKUN	JUMLAH
1	403247	425999	7.450.000
2	403329	425999	886.445
3	403341	425999	5.401.093.196
4	403598	425999	51.961.942
5	403618	425999	312.335.726
6	403630	425999	3.019
7	403686	425999	3.117.650
8	403743	425999	157.512.343
9	403780	425999	10.800.655
10	403799	425999	1.316.311

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	KD SATKER	AKUN	JUMLAH
11	403825	425999	297.450.506
12	403862	425999	1.031.947
13	403871	425999	8.853.772
14	403975	425999	455
15	404160	425999	325.300
16	560710	425999	51.330.075
17	560724	425999	-
18	568306	425999	31.678
19	576605	425999	9.613.447
20	651910	425999	1.656.147
21	677290	425999	432.279
JUMLAH AKUN 425999 :			6.317.202.893

Realisasi Belanja
sebesar
Rp8.911.996.778.615

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.911.996.778.615,00 atau sebesar 97,74% dari anggaran belanja sebesar Rp9.118.292.894.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

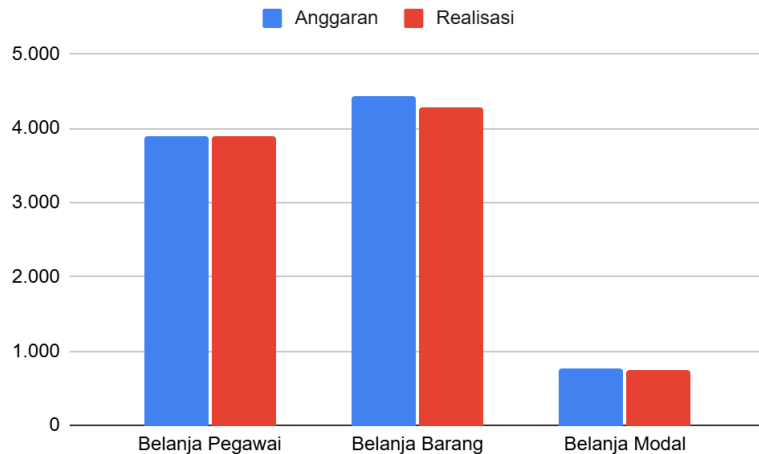
Tabel 16: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	%
Belanja Pegawai	3.904.702.485.000	3.891.021.278.429	3.311.677.626	3.887.709.600.803	99,56%
Belanja Barang	4.438.752.535.000	4.278.596.016.684	1.735.222.358	4.276.860.794.326	96,35%
Belanja Modal	774.837.874.000	747.567.246.011	140.862.525	747.426.383.486	96,46%
Jumlah Belanja	9.118.292.894.000	8.917.184.541.124	5.187.762.509	8.911.996.778.615	97,74%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**



Perbandingan antara Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17: Perbandingan Realisasi Belanja Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

	URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
51	Belanja Pegawai	3.887.709.600.803	3.770.705.511.386	117.004.089.417	3,10 %
52	Belanja Barang	4.276.860.794.326	3.622.575.004.153	654.285.790.173	18,06 %
53	Belanja Modal	747.426.383.486	1.288.382.891.037	(540.956.507.551)	(41,99%)
	Jumlah Belanja	8.911.996.778.615	8.681.663.406.576	230.333.372.039	2,65 %

Dibandingkan dengan 31 Desember 2023, Realisasi Belanja 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp230.333.372.039,00 atau mencapai 2,65%. Kenaikan terjadi pada realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, namun terjadi penurunan pada realisasi Belanja Modal sebesar 41,99%.

Secara umum kenaikan Belanja disebabkan antara lain:

1. Nilai kurs di TA 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan TA 2023;
2. Pemberlakuan Perpres 84/2024 tentang Kenaikan ADTLN Perwakilan RI di Luar Negeri mulai pertengahan Agustus 2024;
3. Terdapat pergantian *Home Staff* yang memiliki golongan/pangkat maupun Gelar Diplomatik lebih tinggi, sehingga menyebabkan kenaikan TPLN;
4. Terdapatnya pergeseran anggaran Fasilitas Sewa Rumah (FSR) yang semula Belanja Pegawai ke Belanja Barang Operasional, mengingat FSR Belanja Pegawai dialokasikan hanya 25% dari TPLN (Kenaikan Belanja Barang Operasional);
5. Peningkatan realisasi akun Belanja Gaji dan Tunjangan serta akun Belanja Lembur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sedangkan penurunan realisasi Belanja Modal disebabkan antara lain:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

1. Penetapan MP PNBП Tahap I hanya sebesar 40% dari pagu DIPA sumber dana PNBП, sehingga Perwakilan yang memiliki anggaran belanja modal renovasi menunda berkontrak dengan vendor yang menyebabkan realisasi MP PNBП Tahap I sampai dengan Semester I kurang signifikan. Hal ini menyebabkan MP PNBП Tahap II yang ditetapkan pada bulan Agustus hanya menjadi 80% (delapan puluh persen) sehingga tidak diterima sesuai dengan kebutuhan dan MP PNBП Tahap III baru dapat dicairkan di bulan November dimana sudah mendekati akhir tahun 2024;
2. Kurs Rupiah terhadap US Dollar yang melemah sehingga Perwakilan perlu melakukan penyesuaian spesifikasi Barang dan membuat proses pengadaan memerlukan waktu yang lebih lama; dan
3. Beberapa penyedia yang tidak bisa bekerja di musim-musim tertentu, terutama negara dengan 4 musim sehingga tidak merealisasikan pekerjaan renovasi/ perbaikan.

Sedangkan rincian Realisasi Belanja Kementerian Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 berdasarkan program disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 18: Rincian Belanja Berdasarkan Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

KODE PRGRM	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALI AN	REALISASI NETO	%
AA	Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	695.651.039.000	653.531.616.686	462.068.376	653.069.548.310	93,88 %
AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerjasama Multilateral	976.989.467.000	942.621.455.874	207.124.895	942.414.330.979	96,46 %
AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik (Rp Murni) & PWNI BHI di Pusat (Dana PNBП)	274.225.768.000	254.624.528.998	134.563.959	254.489.965.039	92,80 %
AM	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	9.942.501.000	9.624.138.086	-	9.624.138.086	96,80 %
WA	Program Dukungan Manajemen (Rp Murni) dan (Rp	7.161.484.119.000	7.056.782.801.480	4.384.005.279	7.052.398.796.201	98,48 %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

KODE PRGRM	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALI AN	REALISASI NETO	%
	PNBP)					
	Jumlah	9.118.292.894.000	8.917.184.541.124	5.187.762.509	8.911.996.778.615	97,74 %

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 berdasarkan program dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 19: Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Program untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KODE PRGRM	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
AA	Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	653.069.548.310	375.547.048.032	277.522.500.278	73,90 %
AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerjasama Multilateral	942.414.330.979	986.725.973.815	(44.311.642.836)	(4,49%)
AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik & PWNI Pusat	254.489.965.039	227.601.862.761	26.888.102.278	11,81 %
AM	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	9.624.138.086	9.255.295.229	368.842.857	3,99 %
WA	Program Dukungan Manajemen	7.052.398.796.201	7.082.533.226.739	(30.134.430.538)	(0,43%)
	Jumlah Belanja	8.911.996.778.615	8.681.663.406.576	230.333.372.039	2,65%

Anggaran Belanja Kementerian Luar Negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 direalisasikan untuk membiayai Belanja Pegawai (Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara, Belanja Lembur, serta Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito), Belanja Barang (Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Kontribusi dan Kompensasi, Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Luar Negeri, serta Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat) dan Belanja Modal (Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Lainnya) satuan kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Secara keseluruhan hingga 31 Desember 2024, anggaran per program yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian Luar Negeri mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp230.333.372.039,00 atau 2,65% menjadi Rp8.911.996.778.615,00,

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

dibandingkan periode 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp8.681.663.406.576,00.

Realisasi Anggaran Kementerian Luar Negeri Per 31 Desember 2024 terserap sebesar Rp8.911.996.778.615,00 atau sebesar 97,74%. dengan rincian penjelasan realisasi per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.887.709.600.803,00 atau mencapai 99,65%. Realisasi tersebut, naik sebesar Rp117.004.056.730,00 atau sebesar 3,10% dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023 sebesar Rp3.770.705.511.386,00.

Peningkatan realisasi Belanja Pegawai dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (pada bulan April 2024) maupun Gaji Ketiga Belas (pada bulan Juni 2024) bagi Aparatur Sipil Negara untuk semua golongan. Adapun THR dan Gaji ke-13 atas Tunjangan Kinerja pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100% dari Tunjangan Kinerja yang dibayar bulan Mei 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024. Kemudian THR dan Gaji ke-13 juga dibayarkan pada Home Staff di Perwakilan RI sebesar 50%;
2. Terdapat pergantian Home Staff yang memiliki golongan lebih tinggi; sehingga menyebabkan kenaikan TPLN yang cukup signifikan dari tahun 2023;
3. Peningkatan realisasi akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Kenaikan realisasi akun Belanja Lembur PNS dan PPPK;
5. Nilai kurs di Desember 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2023;
6. Pemberlakuan Perpres 84/2024 tentang Kenaikan ADTLN Perwakilan RI di Luar Negeri mulai pertengahan Agustus 2024;
7. Realisasi akun Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri yang berhenti senilai Rp232.181.600,00 di tahun 2024 dimana sebelumnya tidak terdapat realisasi di tahun 2023.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.276.860.794.326,00 atau mencapai 96,39%. Besaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp654.285.790.173,00 atau sebesar 18,06% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.622.575.004,00.

Peningkatan realisasi Belanja Barang dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran Belanja Barang mengalami kenaikan disebabkan karena:
2. Sebagian besar kenaikan Realisasi Belanja Barang disebabkan karena nilai kurs di Desember 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Desember 2023;

3. Diberlakukannya Permenlu No.11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah menggantikan Tunjangan Sewa Rumah sebesar 25% dari TPLN. Pemberlakuan Permenlu tersebut menyebabkan perubahan Belanja yang semula Belanja Pegawai menjadi Belanja Barang Operasional;
4. Kenaikan realisasi Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund pada TA 2024 senilai Rp. 891.625.854.294,00, dari semula senilai Rp.847.934.534.301,00 pada TA 2023.
5. Realisasi Belanja Jasa mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan kenaikan realisasi Belanja Barang lainnya, ada kenaikan sebesar Rp373.331.861.645 atau 57,80% , tahun 2024 sebesar Rp1.019.223.052.685,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp645.891.191.040

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp392.091.696.289,00 atau mencapai 40,90%. Besaran realisasi tersebut turun sebesar Rp21.602.885.693,00 atau sebesar (5,22%), apabila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp413.694.581.982,00.

Penurunan realisasi Belanja Modal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan MP PNBP Tahap I hanya sebesar 40% dari pagu DIPA sumber dana PNBP, sehingga Perwakilan yang memiliki anggaran belanja modal renovasi menunda berkontrak dengan vendor yang menyebabkan realisasi MP PNBP Tahap I sampai dengan Semester I kurang signifikan. Hal ini menyebabkan MP PNBP Tahap II yang ditetapkan pada bulan Agustus hanya menjadi 80% (delapan puluh persen) sehingga tidak diterima sesuai dengan kebutuhan. MP Tahap III yang ditetapkan pada bulan November sebagian besar tidak dapat terserap dengan maksimal dikarenakan sudah mendekati akhir tahun;
2. Penurunan pagu akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp.477.138.012.000,00 dari pagu tahun 2023 senilai Rp. 818.672.459.000,00 menjadi Rp.341.534.447.000,00 di tahun 2024.
3. Kurs Rupiah terhadap US Dollar yang melemah sehingga Perwakilan perlu melakukan penyesuaian spesifikasi Barang dan membuat proses pengadaan memerlukan waktu yang lebih lama; dan
4. Beberapa penyedia yang tidak bisa bekerja di musim-musim tertentu, terutama negara dengan 4 musim sehingga tidak terealisasi pekerjaan renovasi/ perbaikan.

Realisasi Belanja
Pegawai sebesar
Rp3.887.709.600.803

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.887.709.600.803,00 dan Rp3.770.705.511.386,00.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Proporsi anggaran Belanja Pegawai di Kementerian Luar Negeri sebesar Rp3.904.702.485.000,00 atau 42,48% dari keseluruhan anggaran belanja. Komponen Belanja Pegawai termasuk Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) serta Gaji dan Tunjangan Pegawai Setempat di Perwakilan RI di Luar Negeri yang menggunakan mata uang US Dollar atau valuta setempat.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp117.004.089.417,00 atau mencapai 3,10% dibandingkan realisasi Belanja pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adapun peningkatan realisasi Belanja Pegawai Desember 2024 disebabkan beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang memberlakukan kenaikan gaji pokok PNS; dan
2. Bertambahnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.
3. Nilai kurs di Desember 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2023;
4. Pemberlakuan Perpres 84/2024 tentang Kenaikan ADTLN Perwakilan RI di Luar Negeri mulai pertengahan Agustus 2024
5. Pemberian Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri yang berhenti di Tahun 2024

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 20: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PENGEM-BALIAN	REALISASI NETO	%
Belanja Gaji Pokok PNS	170.691.009.000	170.690.608.850	93.803.762	170.596.805.088	99,94 %
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.452.000	2.450.474	282.829	2.167.645	88,40 %
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	11.723.664.000	11.723.660.135	3.297.584	11.720.362.551	99,97 %
Belanja Tunj. Anak PNS	2.976.238.000	2.976.234.822	-	2.976.234.822	100,00 %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PENGEM-BALIAN	REALISASI NETO	%
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.358.585.000	7.358.585.000	239.359.000	7.119.226.000	96,75 %
Belanja Tunj. Fungsional PNS	36.746.012.000	36.746.012.000	116.299.000	36.629.713.000	99,68 %
Belanja Tunj. PPh PNS	3.371.355.000	3.370.835.660	-	3.370.835.660	99,98 %
Belanja Tunj. Beras PNS	7.551.995.000	7.551.993.810	-	7.551.993.810	100,00 %
Belanja Uang Makan PNS	11.381.068.000	11.146.488.000	2.276.950	11.144.211.050	97,92 %
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	1.453.800.000	1.453.800.000	139.850.000	1.313.950.000	90,38 %
Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)	-	-	-	-	- %
Belanja Tunj. Resti. Pengobatan PNS (Staff di LN)	99.996.343.000	96.882.079.906	2.285.196.313	94.596.883.593	94,60 %
Belanja TPLN untuk Home Staff (Staff di LN)	2.276.377.886.000	2.271.351.616.145	278.135.904	2.271.073.480.241	99,77 %
Belanja Lokal Staff Lainnya	1.066.238.229.000	1.061.425.521.098	41.319.128	1.061.384.201.970	99,54 %
Belanja Tunjangan Umum PNS	653.620.000	653.620.000	24.155.000	629.465.000	96,30 %
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	5.436.000.000	5.436.000.000	-	5.436.000.000	100,00 %
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	-	-	-	-	- %
Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	232.182.000	232.181.600	-	232.181.600	100,00 %
Belanja Gaji Pokok PPPK	7.174.793.000	7.174.792.189	1.230.000	7.173.562.189	99,98 %
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34.000	33.532	-	33.532	98,62 %
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	319.814.000	319.813.340	-	319.813.340	100,00 %
Belanja Tunjangan Anak PPPK	75.098.000	75.096.796	-	75.096.796	100,00 %
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.088.976.000	1.088.975.200	150	1.088.975.050	100,00 %
Belanja Tunjangan Beras PPPK	332.263.000	332.262.960	-	332.262.960	100,00 %
Belanja Uang Makan PPPK	1.216.336.000	1.142.484.000	-	1.142.484.000	93,93 %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PENGEM-BALIAN	REALISASI NETO	%
Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	-	-	-	-	- %
Belanja Uang Lembur	7.807.023.000	7.555.945.000	1.679.600	7.554.265.400	96,76 %
Belanja Uang Lembur PPPK	1.367.668.000	1.200.149.000	-	1.200.149.000	87,75 %
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	174.241.951.000	174.241.947.963	84.792.406	174.157.155.557	99,95 %
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	8.888.091.000	8.888.090.949	-	8.888.090.949	100,00 %
Jumlah Belanja	3.904.702.485.000	3.891.021.278.429	3.311.677.626	3.887.709.600.803	99,56 %

Perbandingan antara Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 21: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Gaji Pokok PNS	170.596.805.088	160.832.968.620	9.763.836.468	6,07 %
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.167.645	2.527.033	(359.388)	(14,22%)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	11.720.362.551	11.043.473.070	676.889.481	6,13 %
Belanja Tunj. Anak PNS	2.976.234.822	2.835.390.563	140.844.259	4,97 %
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.119.226.000	7.249.243.000	(130.017.000)	(1,79%)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	36.629.713.000	36.674.429.000	(44.716.000)	(0,12%)
Belanja Tunj. PPh PNS	3.370.835.660	1.872.164.053	1.498.671.607	80,05 %
Belanja Tunj. Beras PNS	7.551.993.810	7.845.910.380	(293.916.570)	(3,75%)
Belanja Uang Makan PNS	11.144.211.050	12.239.398.550	(1.095.187.500)	(8,95%)
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	1.313.950.000	1.237.200.000	76.750.000	6,20 %
Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)	-	277.927.468.661	(277.927.468.661)	(100,00%)
Belanja Tunj. Resti. Pengobatan PNS (Staff di LN)	94.596.883.593	92.825.544.591	1.771.339.002	1,91 %
Belanja TPLN untuk Home Staff (Staff di LN)	2.271.073.480.241	1.974.589.097.427	296.484.382.814	15,01 %
Belanja Lokal Staff Lainnya	1.061.384.201.970	987.412.308.886	73.971.893.084	7,49 %
Belanja Tunjangan Umum PNS	629.465.000	1.108.820.000	(479.355.000)	(43,23%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	5.436.000.000	5.283.000.000	153.000.000	2,90 %
Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau	232.181.600	-	232.181.600	100,00 %
Belanja Gaji Pokok PPPK	7.173.562.189	1.596.782.300	5.576.779.889	349,25 %
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	33.532	35.051	(1.519)	(4,33%)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	319.813.340	61.923.720	257.889.620	416,46 %
Belanja Tunjangan Anak PPPK	75.096.796	12.833.840	62.262.956	485,15 %
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.088.975.050	264.120.000	824.855.050	312,30 %
Belanja Tunjangan Beras PPPK	332.262.960	72.492.420	259.770.540	358,34 %
Belanja Uang Makan PPPK	1.142.484.000	362.572.000	779.912.000	215,11 %
Belanja Uang Lembur	7.554.265.400	5.682.499.000	1.871.766.400	32,94 %
Belanja Uang Lembur PPPK	1.200.149.000	163.226.000	1.036.923.000	635,27 %
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	174.157.155.557	179.124.827.806	(4.967.672.249)	(2,77%)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	8.888.090.949	2.385.255.415	6.502.835.534	272,63 %
Jumlah Belanja	3.887.709.600.803	3.770.705.511.386	117.004.089.417	3,10 %

Pada 31 Desember 2024 terjadi kenaikan pada realisasi Belanja Gaji Pokok PNS, Tunjangan Suami/Istri PNS, Tunjangan Anak PNS, Tunjangan PPh PNS, Tunjangan Kompensasi Kerja PNS, Tunjangan Restitusi Pengobatan *Home Staff* di Luar Negeri, TPLN *Home Staff* di Luar Negeri, Gaji *Local Staff* di Luar Negeri, Gaji Pokok Pejabat Negara, Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti, Gaji Pokok PPPK, Tunjangan Suami/Istri PPPK, Tunjangan Anak PPPK, Tunjangan Fungsional PPPK, Tunjangan Beras PPPK, Uang Makan PPPK, Uang Lembur PNS, Uang Lembur PPPK dan Tunjangan Khusus Kegiatan Kinerja PPPK.

Kenaikan yang signifikan terdapat pada Belanja Pegawai menyangkut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena bertambahnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan Pengumuman Nomor PENGUMUMAN/00115/KP/12/ 2023/24 perihal Hasil Akhir Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 tanggal 15 Desember 2023, jumlah peserta yang lulus ujian sebagai PPPK Kemlu sebanyak 107 (seratus tujuh orang) PPPK Teknis dan 1 (satu) orang PPPK Tenaga Kesehatan.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Selain itu, untuk Komponen Belanja Pegawai yang berkaitan dengan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) serta Gaji dan Tunjangan Pegawai Setempat di Perwakilan RI di Luar Negeri dipengaruhi oleh kenaikan nilai kurs dan pemberlakuan Perpres 84/2024 tentang Kenaikan ADTLN Perwakilan RI di Luar Negeri mulai pertengahan Agustus 2024.

Sedangkan penurunan pada realisasi belanja tahun ini terdapat pada Belanja Tunjangan Struktural PNS, Tunjangan Fungsional PNS, Tunjangan Beras PNS, Uang Makan PNS, Tunjangan Sewa Rumah PNS, Tunjangan Umum PNS dan Tunjangan Khusus Kegiatan.

Merujuk Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, pada Tahun 2024, Belanja Pegawai Tunjangan Sewa Rumah PNS direvisi seluruhnya menjadi MAK Belanja Barang (522142) Belanja Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

*Realisasi Belanja
Barang sebesar
Rp4.276.860.794.326*

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.276.860.794.326,00 dan Rp3.622.575.004.153,00.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Termasuk Belanja Barang di dalamnya adalah Belanja Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi, Belanja Perjalanan dalam rangka perolehan barang habis pakai, dan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap yang tidak menambah umur, manfaat, atau kapasitas.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 22: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEM-BALIAN	REALISASI NETO	%
Belanja Barang Operasional	474.689.014.000	465.400.738.286	156.962.951	465.243.775.335	98,01 %
Belanja Barang Non Operasional	496.417.837.000	479.159.831.251	46.990.841	479.112.840.410	96,51 %
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	922.686.110.000	891.625.854.294	-	891.625.854.294	96,63 %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Belanja Barang Persediaan	55.129.765.000	54.364.371.842	-	54.364.371.842	98,61 %
Belanja Jasa	1.031.664.354.000	1.019.610.099.515	387.046.830	1.019.223.052.685	98,79 %
Belanja Pemeliharaan	635.236.646.000	609.628.700.663	96.508.266	609.532.192.397	95,95 %
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	149.263.369.000	137.105.496.282	142.087.448	136.963.408.834	91,76 %
Belanja Perjalanan Luar Negeri	673.665.440.000	621.700.924.551	905.626.022	620.795.298.529	92,15 %
Jumlah Belanja	4.438.752.535.000	4.278.596.016.684	1.735.222.358	4.276.860.794.326	96,35 %

Perbandingan antara Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 23: Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	465.243.775.335	422.003.708.043	43.240.067.292	10,25 %
Belanja Barang Non Operasional	479.112.840.410	380.344.271.585	98.768.568.825	25,97 %
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	891.625.854.294	847.934.534.301	43.691.319.993	5,15 %
Belanja Barang Persediaan	54.364.371.842	44.249.285.625	10.115.086.217	22,86 %
Belanja Jasa	1.019.223.052.685	645.891.191.040	373.331.861.645	57,80 %
Belanja Pemeliharaan	609.532.192.397	585.062.365.964	24.469.826.433	4,18 %
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	136.963.408.834	148.973.203.871	(12.009.795.037)	(8,06%)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	620.795.298.529	548.116.443.724	72.678.854.805	13,26 %
Jumlah Belanja	4.276.860.794.326	3.622.575.004.153	654.285.790.173	18,06 %

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.276.860.794.326,00 atau mencapai 96,39%. Besaran tersebut naik sebesar Rp654.285.790.173,00 atau sebesar 18,06% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.622.575.004.153,00.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Belanja Barang per 31 Desember 2024 telah berjalan dengan baik. Adapun kenaikan penyerapan anggaran Belanja Barang disebabkan antara lain karena:

1. Nilai kurs yang naik cukup signifikan

Sebagai perbandingan nilai kurs USD 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.416 sedangkan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.162

2. Diberlakukannya Permenlu No.11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah menggantikan Tunjangan Sewa Rumah sebesar 25% dari TPLN

menyebabkan perubahan belanja dari Belanja Pegawai menjadi Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Fasilitas Sewa Rumah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp136.901.094.612,00.

3. Realisasi Belanja Kontribusi dan Kompensasi

Kenaikan realisasi Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund pada TA 2024 senilai Rp891.625.854.294,00, dari semula senilai Rp847.934.534.301,00 pada TA 2023;

4. Belanja Jasa

Mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan kenaikan realisasi Belanja Barang lainnya, ada kenaikan sebesar Rp373.331.861.645 atau 57,80% , tahun 2024 sebesar Rp1.019.223.052.685,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp645.891.191.040.

Realisasi Belanja
Modal sebesar
Rp747.426.383.486

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp747.426.383.486,00 dan Rp1.288.382.891.037,00.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan nilai realisasi sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sementara itu, penambahan nilai aset yang bersumber dari belanja modal yang perolehannya dalam mata uang asing, direkam dalam aplikasi SAKTI dengan terlebih dahulu dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat perolehan barang/barang diterima (kuitansi/Berita Acara Serah Terima). Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai kuitansi/Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan nilai SP2D maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs.

Perbandingan Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 24: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEM-BALIAN	REALISASI NETO	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.165.572.000	248.027.554.492	139.057.553	247.888.496.939	98,30 %
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	211.765.000	211.745.460	-	211.745.460	99,99 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	341.534.447.000	340.114.846.557	1.804.972	340.113.041.585	99,58 %
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	- %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	15.992.682.000	15.478.518.327	-	15.478.518.327	96,79 %
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	7.588.439.000	7.400.204.002	-	7.400.204.002	97,52 %
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	1.439.200.000	1.221.528.129	-	1.221.528.129	84,88 %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	138.281.654.000	117.571.282.253	-	117.571.282.253	85,02 %
Belanja Modal Lainnya	16.664.115.000	16.606.088.696	-	16.606.088.696	99,65 %
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	960.000.000	935.478.095	-	935.478.095	97,45 %
Jumlah Belanja	774.837.874.000	747.567.246.011	140.862.525	747.426.383.486	96,46 %

Perbandingan antara Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 25: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	247.888.496.939	385.559.800.951	(137.671.304.012)	(35,71%)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	211.745.460	388.162.001	(176.416.541)	(45,45%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.113.041.585	810.547.167.586	(470.434.126.001)	(58,04%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	-	-	- %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	15.478.518.327	-	15.478.518.327	100,00 %
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	7.400.204.002	-	7.400.204.002	100,00 %
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	1.221.528.129	-	1.221.528.129	100,00 %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	117.571.282.253	76.189.714.963	41.381.567.290	54,31 %
Belanja Modal Lainnya	16.606.088.696	15.698.045.536	908.043.160	5,78 %
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	935.478.095	-	935.478.095	100,00 %
Jumlah Belanja	747.426.383.486	1.288.382.891.037	(540.956.507.551)	(41,99%)

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp540.956.507.551,00 atau sebesar 41,99% menjadi Rp747.426.383.486,00, apabila dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.288.382.891.037,00. Penurunan realisasi Belanja Modal dikarenakan adanya penurunan pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Adapun realisasi belanja modal tersebut akan dirinci sebagaimana sub-judul di bawah ini.

*Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan
Mesin sebesar
Rp248.100.242.399*

B.2.3.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp248.100.242.399,00 dan Rp385.947.962.952,00

Perbandingan antara Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 26: Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Neto untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	247.888.496.939	385.559.800.951	(137.671.304.012)	(35,71%)
- Alat Besar (301)	4.785.167.204	1.709.503.908	3.075.663.296	179,92%
- Alat Angkutan (302)	53.301.178.943	86.552.448.599	(33.251.269.656)	(38,42%)
- Alat Bengkel dan Alat Ukur (303)	84.340.863	156.273.170	(71.932.307)	(46,03%)
- Alat Pertanian (304)	204.256.537	63.940.223	140.316.314	219,45%
- Alat Kantor dan Rumah Tangga (305)	35.908.412.955	77.890.379.388	(41.981.966.433)	(53,90%)
- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (306)	7.502.781.591	11.006.771.970	(3.503.990.379)	(31,83%)
- Alat Kedokteran dan Kesehatan (307)	574.262.810	1.205.430.519	(631.167.709)	(52,36%)
- Alat Laboratorium (308)	519.076.781	1.945.362.767	(1.426.285.986)	(73,32%)
- Alat Persenjataan (309)	323.738.832	519.733.980	(195.995.148)	(37,71%)
- Komputer (310)	42.773.370.251	139.388.858.482	(96.615.488.231)	(69,31%)
- Alat Eksplorasi (311)	-	4.639.728	(4.639.728)	(100,00%)
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (313)	-	57.615.600	(57.615.600)	(100,00%)
- Alat Keselamatan Kerja (315)	270.455.611	1.051.080.358	(780.624.747)	(74,27%)
- Peralatan Proses/Produksi (317)	16.075.140	39.774.577	(23.699.437)	(59,58%)
- Rambu-rambu (318)	-	19.367.926	(19.367.926)	(100,00%)
- Peralatan Olahraga (319)	1.405.787.527	715.971.728	689.815.799	96,35%
- Alat Laminating (320)	18.148.371	-	18.148.371	100,00%
- Bangunan Gedung (401)	57.802.514	-	57.802.514	100,00%
- Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)	7.990.072	-	7.990.072	100,00%
- Jaringan (504)	18.067.650,00	-	18.067.650	100,00%
- Bahan Perpustakaan (601)	-	15.819.810	(15.819.810)	(100,00%)
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (602)	264.014.374,00	111.257.237	152.757.137	137,30%
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (701)	88.568.816.601	63.091.078.634	25.477.737.967	40,38%
- Aset Tak Berwujud (801)	11.284.752.312	14.492.347	11.270.259.965	77.766,98%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	211.745.460	388.162.001	(176.416.541)	(45,45%)
- Alat Angkutan Darat Bermotor (302)	-	388.162.001	(388.162.001)	(100,00%)
- Alat Kantor dan Rumah Tangga (305)	180.180.860	-	180.180.860	100,00%
- Komputer (310)	15.420.000	-	15.420.000	100,00%
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (701)	16.144.600	-	16.144.600	100,00%
Jumlah Belanja	248.100.242.399	385.947.962.952	(137.847.720.553)	(35,72%)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp137.847.720.553,00 atau sebesar 35,72% menjadi Rp248.100.242.399,00, apabila dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp385.947.962.952,00. Penurunan disebabkan karena anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 kurang

dari anggaran pada tahun 2023, sementara itu realisasi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sudah mencapai 98,36%.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 direalisasikan untuk pembelian peralatan dan mesin berupa:

1. Alat Besar (301) yang terdapat pada 3 (tiga) Satuan Kerja Pusat, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Protkons, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional serta 18 (delapan belas) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri, yaitu KBRI Bangkok, KBRI Berlin, KBRI Dar Es Salaam, KBRI Doha, KBRI Havana, KBRI Lima, KBRI Oslo, KBRI Panama City, KBRI Port Moresby, KBRI Quito, KBRI Tokyo, KBRI Vientiane, KJRI Frankfurt, KJRI Houston, KJRI Karachi, KJRI Toronto, KRI Songkhla, dan KRI Vanimo;
2. Alat Angkutan (302) yang terdapat pada 4 (empat) Satuan Kerja Pusat, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Aspasaf, Ditjen Protkons, dan Inspektorat Jenderal, serta 47 (empat puluh tujuh) Satuan Kerja Perwakilan RI, yaitu KBRI Abu Dhabi, KBRI Abuja, KBRI Alger, KBRI Baku, KBRI Berlin, KBRI Bratislava, KBRI Budapest, KBRI Dhaka, KBRI Dili, KBRI Havana, KBRI Helsinki, KBRI Kyiv, KBRI London, KBRI Manama, KBRI Mexico City, KBRI Moskow, KBRI Muscat, KBRI New Delhi, KBRI Oslo, KBRI Panama City, KBRI Paramaribo, KBRI Port Moresby, KBRI Pretoria, KBRI Riyadh, KBRI Seoul, KBRI Singapura, KBRI Tashkent, KBRI Tokyo, KBRI Tripoli, KBRI Tunis, KBRI Washington Dc, KBRI Yangon, KBRI Yaounde, KJRI Chicago, KJRI Davao City, KJRI Guangzhou, KJRI Hong Kong, KJRI Jeddah, KJRI Johor Bahru, KJRI Kuching, KJRI Los Angeles, KJRI Marseille, KJRI San Francisco, KJRI Toronto, KRI Songkhla, PTRI New York, dan PTRI Asean;
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur (303) yang terdapat pada 2 (dua) Satuan Kerja Pusat, yaitu Sekretariat Jenderal dan Pusdiklat, serta 13 (tiga belas) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri, yaitu KBRI Amman, KBRI Astana, KBRI Berlin, KBRI Hanoi, KBRI Oslo, KBRI Quito, KBRI Tokyo, KBRI Wellington, KBRI Yangon, KJRI Hamburg, KJRI Kuching, KJRI Melbourne, dan PTRI Asean;
4. Alat Pertanian (304) pada 8 (delapan) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri, yaitu KBRI Berlin, KBRI Ottawa, KBRI Santiago, KBRI Sofia, KJRI Dubai, KJRI Frankfurt, KJRI Jeddah, dan KJRI Kuching;
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga (305) pada 10 (sepuluh) Satuan Kerja Pusat dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri;
6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (306) pada 8 (delapan) Satuan Kerja Pusat dan 109 (seratus sembilan) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri;
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan (307) terdapat pada 2 (dua) Satuan Kerja Pusat, yaitu Sekretariat Jenderal dan Ditjen IDP, serta 7 (tujuh) Satuan Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri, yaitu KBRI Abu Dhabi, KBRI Buenos Aires, KBRI Lima, KBRI Muscat, KBRI Sarajevo, KJRI Hamburg, dan KJRI Hong Kong;

8. Alat Laboratorium (308) terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal dan 18 (delapan belas) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri, yaitu KBRI Addis Ababa, KBRI Antananarivo, KBRI Berlin, KBRI Bucharest, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Kuwait City, KBRI Kyiv, KBRI Madrid, KBRI Manama, KBRI Paramaribo, KBRI Pretoria, KBRI Riyadh, KBRI Santiago, KBRI Vientiane, KJRI Frankfurt, KJRI Mumbai, KRI Darwin, dan PTRI Asean;
9. Alat Persenjataan (309) terdapat pada Satuan Kerja Pustik KP, serta 7 (tujuh) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri, yaitu KBRI Astana, KBRI Beirut, KBRI Berlin, KBRI Brussels, KBRI Bucharest, KBRI Kyiv, dan KJRI Toronto;
10. Alat Komputer (310) pada 11 (sebelas) Satuan Kerja Pusat dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri;
11. Alat Keselamatan Kerja (315) terdapat pada 12 (dua belas) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri, yaitu KBRI Bogota, KBRI Kairo, KBRI Kopenhagen, KBRI Kyiv, KBRI Pretoria, KBRI Windhoek, KJRI Hamburg, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Mumbai, KJRI Perth, KJRI Toronto, dan KRI Darwin;
12. Peralatan Proses/Produksi (317) terdapat pada Satuan kerja KBRI Kabul dan KJRI Kuching;
13. Peralatan Olahraga (319) terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, serta 15 (lima belas) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri, yaitu KBRI Bangkok, KBRI Berlin, KBRI Bucharest, KBRI Hanoi, KBRI Kopenhagen, KBRI Lima, KBRI Moskow, KBRI Oslo, KBRI Paramaribo, KBRI Riyadh, KBRI Sarajevo, KBRI Seoul, KJRI Hong Kong, KJRI Marseille, dan PTRI Asean;
14. Alat Laminating (320) terdapat pada Satuan Kerja KJRI Melbourne berupa mesin laminating paspor;
15. Bangunan Gedung (401) terdapat pada 2 (dua) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri yaitu KBRI Baghdad dan KBRI Bucharest;
16. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404) terdapat pada Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri yaitu KBRI Pretoria;
17. Jaringan (504) terdapat pada Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri yaitu KJRI Kota Kinabalu;
18. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (602) terdapat pada 10 (sepuluh) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri;
19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (701) terdapat pada Satuan kerja Sekretaris Jenderal serta 46 (empat puluh enam) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri;
20. Aset Tak Berwujud (801) terdapat pada Satuan Kerja Pustik KP, serta 6 (enam) Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri.

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan sebesar
Rp481.784.574.296

B.2.3.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (akun 5331) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp481.784.574.296,00 dan Rp Rp886.736.882.549,00.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Perbandingan antara Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (akun 5331) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 27: Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.113.041.585	810.547.167.586	(470.434.126.001)	(58,04%)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	15.478.518.327	-	15.478.518.327	100,00 %
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	7.400.204.002	-	7.400.204.002	100,00 %
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	1.221.528.129	-	1.221.528.129	100,00 %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	117.571.282.253	76.189.714.963	41.381.567.290	54,31 %
Jumlah Belanja	481.784.574.296	886.736.882.549	(404.952.308.253)	(45,67%)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (akun 5331) per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp404.952.308.253,00 atau sebesar 45,67% dari periode 31 Desember 2023. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dialokasikan pada periode 31 Desember 2024 terdiri atas 5 (lima) akun, yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111), Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (533115), Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan (533116), Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan (533118), dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121).

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan akun 533111 mengalami penurunan sebesar 58,04%. Hal ini karena alokasi anggaran juga mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan alokasi anggaran tahun 2023. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (akun 533111) per 31 Desember 2024 sebesar 99,58% atau sebesar Rp340.113.041.585,00, terdapat pada:

1. Sekretariat Jenderal berupa pembayaran cicilan pokok dan bunga dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan KBRI London, KJRI Chicago, KRI Tawau, KJRI Johor Bahru, KBRI Phnom Penh, KBRI Warsawa, dan KJRI Kuching sebesar Rp195.659.351.477,00; dan
2. KBRI Berlin sebesar Rp137.549.814.154,00 untuk pembangunan gedung.
3. KBRI Kuala Lumpur sebesar Rp5.851.628.648, KBRI Seoul sebesar Rp799.500.000,00, dan KBRI Pretoria sebesar Rp675.687.233,00 (pembuatan pagar keliling Wisma Tamu).

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

(533115) per 31 Desember 2024 ini terealisasi sebesar Rp15.478.518.327,00 sedangkan per 31 Desember 2023 tidak terealisasi. Anggaran pada belanja akun 533115 tersebut digunakan untuk biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan Sekolah Indonesia Riyadh pada KBRI Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah pada KJRI Jeddah, dan restorasi gedung kantor pada KBRI Washington DC.

Realisasi Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan (akun 533116) per 31 Desember 2024 ini terealisasi sebesar Rp7.400.204.002,00 sedangkan per 31 Desember 2023 tidak terealisasi. Anggaran pada belanja akun 533116 tersebut digunakan untuk biaya pembayaran konsultan hukum dalam rangka proses pengadaan renovasi dan restorasi gedung kantor KBRI Washington DC.

Realisasi Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan (akun 533118) per 31 Desember 2024 ini terealisasi sebesar Rp1.221.528.129,00 sedangkan per 31 Desember 2023 tidak terealisasi. Anggaran pada belanja akun 533116 tersebut digunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka proses pengadaan renovasi dan restorasi gedung kantor KBRI Washington DC.

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp117.571.282.253,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 41.381.567.290,00 atau sebesar 54,31% dari tahun sebelumnya.

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan adalah Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi batasan minimal kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (akun 533121) terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, sebagian besar untuk pekerjaan renovasi Gedung Pancasila, termasuk pekerjaan pada Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri, di antaranya:

1. KBRI Phnom Penh: penambahan ruangan untuk pos satpam;
2. KBRI Bangkok, KBRI Dar Es Salaam, KBRI Kuala Lumpur, PTRI Jenewa, dan KBRI Beograd untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan;
3. KBRI Bern: renovasi gedung kantor;
4. KBRI Amman: renovasi pagar kantor;
5. KJRI Melbourne: renovasi gedung kantor – biaya konsultan perencana;
6. KBRI Brussel: renovasi gedung kantor (perbaikan lantai dan ruang rapat kantor, perbaikan *basement* dan toilet kantor), serta renovasi Wisma Duta (perbaikan atap);
7. KBRI Wellington: renovasi gedung kantor – biaya konsultan desain

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

- penguatan gedung;
8. KJRI Hamburg: renovasi gedung kantor;
 9. KBRI Paramaribo: renovasi gedung kantor – renovasi toilet, penggantian jendela, dan pembongkaran tembok pagar gedung kantor.
 10. KBRI Windhoek: renovasi gedung kantor - KDP,
 11. KBRI Paris: renovasi gedung kantor (jaringan listrik), dan
 12. KJRI Vancouver: renovasi Wisma Konjen.

Perbandingan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 28: Perbandingan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NO	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN (+/-)
1	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	53.152.969.284	41.589.017.661	11.563.951.623
2	KBRI AMMAN	1.399.965.079	1.632.562.291	(232.597.212)
3	KBRI ANTANANARIVO	1.523.950.726	-	1.523.950.726
4	KBRI ATHENA	305.471.229	-	305.471.229
5	KBRI BANGKOK	3.288.669.653	3.864.727.502	(576.057.849)
6	KBRI BEOGRAD	291.324.828	-	291.324.828
7	KBRI BERN	1.745.189.814	-	1.745.189.814
8	KBRI BRUSSELS	6.007.576.173	1.012.328.691	4.995.247.482
9	KBRI BUDAPEST	135.097.824	-	135.097.824
10	KBRI DAR ES SALAAM	1.719.943.857	590.638.370	1.129.305.487
11	KBRI DEN HAAG	7.641.798.806	-	7.641.798.806
12	KBRI KOPENHAGEN	1.440.464.725	-	1.440.464.725
13	KBRI KUALA LUMPUR	989.550.475	-	989.550.475
14	KBRI LISABON	246.986.579	-	246.986.579
15	KBRI MADRID	8.702.077.347	3.340.773.405	5.361.303.942
16	KBRI OTTAWA	904.149.640	-	904.149.640
17	KBRI PARAMARIBO	1.290.508.058	-	1.290.508.058
18	KBRI PARIS	6.389.760.756	-	6.389.760.756
19	KBRI PHNOM PENH	366.211.999	-	366.211.999
20	KBRI STOCKHOLM	336.683.680	-	336.683.680
21	KBRI WELLINGTON	635.601.599	-	635.601.599
22	KBRI WINDHOEK	451.833.367	-	451.833.367
23	KJRI HAMBURG	1.231.295.176	-	1.231.295.176
24	KJRI HONG KONG	671.122.884	1.149.334.960	(478.212.076)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN (+/-)
25	KJRI MARSEILLE	26.795.853	-	26.795.853
26	KJRI MELBOURNE	1.132.007.508	-	1.132.007.508
27	KJRI PERTH	365.444.704	44.218.529	321.226.175
28	KJRI VANCOUVER	1.174.679.366	-	1.174.679.366
29	KRI DARWIN	470.403.384	-	470.403.384
30	KRI TAWAU	4.098.510.792	239.378.167	3.859.132.625
31	PTRI JENEWA	986.536.128	-	986.536.128
Jumlah Belanja :		109.122.581.293	53.462.979.576	55.659.601.717

Realisasi Belanja
Modal Lainnya
sebesar
Rp17.541.566.791

B.2.3.3. BELANJA MODAL LAINNYA

Pada Tahun 2024 ini dialokasikan 2 (dua) akun pada Belanja Modal Lainnya (5361), yaitu Belanja Modal Lainnya (akun 536111) dan Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya (akun 536121).

Realisasi Belanja Modal Lainnya (akun 536111) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.606.088.696,00 atau sebesar 99,65%. Sementara itu, untuk Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya (akun 536121) telah terealisasi sebesar Rp935.478.095,00 atau sebesar 97,45%.

Perbandingan antara Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 29: Perbandingan Belanja Modal Lainnya untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Lainnya	16.606.088.696	15.698.045.536	908.043.160	5,78 %
- Alat Kantor dan Rumah Tangga (305)	13.316.544	-	13.316.544	100,00%
- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (306)	422.816.590	-	422.816.590	100%
- Komputer (310)	7.127.461	-	7.127.461	100%
- Bahan Perpustakaan (601)	2.642.662.905	103.375.906	2.539.286.999	2.456,36%
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (602)	1.574.080.474	1.868.509.231	(294.428.757)	(15,76%)
- Konstruksi Dalam	4.312.630.444	-	4.312.630.444	100%

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Pengerjaan (701)				
- Aset Tak Berwujud (801)	7.633.454.278	13.726.160.399	(6.092.706.121)	(44,39%)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	935.478.095	-	935.478.095	100,00 %
- Bangunan Gedung (401)	393.849.920	-	393.849.920	100%
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (701)	541.628.175	-	541.628.175	100%
Jumlah Belanja	17.541.566.791	15.698.045.536	1.843.521.255	11,74 %

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.606.088.696,00 dan Rp15.698.045.536,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp 908.043.160,00 atau sebesar 5,78%.

Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp16.606.088.696,00 merupakan realisasi dari Aset Tetap Lainnya dalam pengerjaan, pembelian *software* komputer, Alat Musik Modern/Band, Alat Musik Tradisional/Daerah, Alat Peraga Kesenian, Lukisan, Barang Bercorak Kesenian Lainnya, dan Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya

Realisasi belanja modal lainnya sebagaimana di atas terdapat pada Satuan Kerja Pusat, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Protkons, dan Pustik KP. Sementara itu, realisasi belanja modal lainnya juga terdapat pada Satuan Kerja Perwakilan, yaitu KBRI Addis Ababa, KBRI Astana, KBRI Bangkok, KBRI Beograd, KBRI Berlin, KBRI Budapest, KBRI Canberra, KBRI Damascus, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Lisabon, KBRI Manila, KBRI Muscat, KBRI Phnom Penh, KBRI Quito, KBRI Tashkent, KBRI Wellington, KJRI Cape Town, KJRI Frankfurt, dan KRI Darwin.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
POS-POS
NERACA**

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

Penjelasan atas
Pos-Pos Neraca

Aset Lancar
Rp448.132.443.483

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp448.132.443.483,00 dan Rp554.626.670.623,00, mengalami penurunan sebesar Rp106.494.227.140,00 atau 19,20%. Penurunan tersebut antara lain disebabkan penurunan yang signifikan pada akun Kas di Bendahara Penerimaan dan Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*).

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar di Kementerian Luar Negeri meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*), Uang Muka Belanja (*Prepayment*), Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, dan Persediaan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp132.479.164.274

C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-21/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valuta asing ditranslasikan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan referensi Kurs Penutup Pemerintah per tanggal Pelaporan Keuangan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 merupakan hasil translasi nilai Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Satker Perwakilan RI di luar negeri sebesar USD8,199,486.20 dengan kurs penutup/*Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)* oleh Bank Indonesia per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157,00 dan Satker Pusat sebesar Rp65.743,00.

Dengan demikian, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 Satker Perwakilan sebesar USD8,199,486.20 x Rp16.157,00 = Rp 132.479.098.531,00 ditambah saldo di Kas Bendahara Pengeluaran Satker Pusat sebesar Rp65.743,00. Sehingga total keseluruhan sebesar Rp132.479.164.274,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

2023 masing-masing adalah sebesar Rp132.479.164.274,00 dan Rp118.552.365.738,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30: Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Kas di Bendahara Pengeluaran	132.479.164.274	118.552.365.738	13.926.798.536	11,75%
Jumlah	132.479.164.274	118.552.365.738	13.926.798.536	11,75 %

Keterangan:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dijelaskan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 31: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Sekretariat Jenderal		
	- Perwakilan	132.479.098.531	118.552.299.995
	- PTRI ASEAN	65.743	65.743
	Total	132.479.164.274	118.552.365.738

Kas Bendahara Pengeluaran di PTRI ASEAN sebesar Rp65.743,00 merupakan setoran sisa UP tahun 2021 yang menggunakan UP tahun 2022. Sisa UP tersebut sudah diselesaikan/nihil namun masih tercatat di saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Permenlu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Kementerian Luar Negeri disebutkan dalam pengungkapan yang merujuk pada Surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-855/PB.6/2018 tanggal 24 Januari 2018, akun Kas di Bendahara Pengeluaran diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Luar Negeri dengan menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar saldo riil termasuk apabila terdapat penggunaan kas dengan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Rincian penggunaan Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 32: Rincian Penggunaan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	NOMINAL (dalam USD)	NOMINAL (dalam Rupiah)
Kas dan Bank		
- Perwakilan RI di Luar Negeri	8.199.486	132.479.098.531
- Satuan Kerja Pusat	-	65.743
PK Minus TA berjalan	(42.174)	(681.399.201)
PK Minus TAYL	(54.339)	(877.963.260)
PK SKTA	(80.598)	(1.302.218.992)
BPPR Minus	(138)	(2.222.718)
BPJ Minus	(6.464)	(104.439.171)
Belanja yang belum dipertanggungjawabkan	(1.203)	(19.443.657)
Lain-lain	(91.421)	(1.477.091.100)
Total	7.923.149	128.014.386.175

Keterangan:

Nilai USD merupakan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Adapun nilai Rupiah merupakan penjumlahan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kementerian Luar Negeri.

Penjelasan penggunaan UP pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran dijelaskan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp7.653.639.038**

C.1.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.653.639.038,00 dan Rp12.046.952.654,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan seluruhnya merupakan kas di rekening Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan, umumnya dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah teridentifikasi.

Penyetoran PNBP dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Perwakilan ke rekening PNBP di Kemenlu Pusat sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perwakilan RI tentang Pola Setor PNBP dan Keputusan Kepala Perwakilan RI tentang *Standard Operating Procedures* (SOP) Pengelolaan PNBP. Sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan RI tentang Pola Setor PNBP masing-masing Perwakilan RI, bahwa kas yang berasal dari seluruh PNBP yang dipungut oleh Perwakilan RI

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

disetorkan secara berkala ke Kemenlu Pusat untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Penerimaan Pusat. Hal ini telah sesuai dengan Permenlu Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Apabila masih terdapat PNBPN yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal Neraca maka jumlah tersebut dilaporkan dalam Neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Kriteria-kriteria yang dikategorikan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan:

1. Dana PNBPN baik yang masih berada di rekening maupun di brankas yang belum disetorkan ke Bendahara Penerimaan Pusat maupun ke rekening Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan;
2. Dana PNBPN yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Pusat namun belum disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Pusat ke rekening Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan (kriteria *Deposit in Transit* (DIT)); dan
3. Dana PNBPN yang telah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Pusat namun sampai dengan tanggal pelaporan Bukti Penerimaan Negara (BPN) belum terbit (kriteria *Deposit in Transit* (DIT)).

Pencatatan nilai Kas di Bendahara Penerimaan ini dilakukan pada saat penerimaan yang bersumber baik dari pelayanan jasa hasil pelaksanaan tugas dan fungsi maupun yang bersumber dari kegiatan non operasional Satker Perwakilan RI di Luar Negeri tersebut belum disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pusat atau masih terdapat di kas atau rekening Perwakilan RI di Luar Negeri.

Jika nilai kas yang belum disetor atau yang masih terdapat di kas atau rekening Perwakilan RI di Luar Negeri tersebut masih senilai mata uang setempat, maka dikonversi ke mata uang rupiah sesuai kurs penutup BI per tanggal pelaporan (31 Desember 2024).

Adapun rincian menurut lingkup per Eselon I sebagai berikut:

1. Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp423.475,00; dan
2. Satker Perwakilan sebesar Rp7.653.215.563,00.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

Tabel 33: Rincian Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Kas di Bendahara Penerimaan	7.653.639.038	12.046.952.654	(4.393.313.616)	(36,47%)
Total	7.653.639.038	12.046.952.654	(4.393.313.616)	(36,47%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan lingkup per Eselon I tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 34: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Sekretariat Jenderal				
- Perwakilan	7.653.215.563	12.046.910.197	(4.393.694.634)	(36,47%)
- Setjen Pusat	423.475	42.457	381.018	897,42 %
Total	7.653.639.038	12.046.952.654	(4.393.313.616)	(36,47%)

Keterangan:

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Satker Perwakilan dijelaskan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Adapun rincian saldo Kas Bendahara Penerimaan di Kas dan Bank menurut lingkup Eselon I per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35: Rincian Kas dan Bank Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Eselon I	Kas BPM		DIT	Total
	Kas/Tunai	Bank		
Sekretariat Jenderal				
- Perwakilan	-	5.688.093.251	1.965.122.312	7.653.215.563
- Setjen Pusat	-	423.475	-	423.475
Total	-	5.688.516.726	1.965.122.312	7.653.639.038

Keterangan:

Rincian posisi kas dan bank Kas di Bendahara Penerimaan Kementerian Luar Negeri dijelaskan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Saldo Kas Bendahara Penerimaan di Satker Sekretariat Jenderal merupakan jasa giro pada rekening PNBPN periode Desember 2024 yang belum disetorkan ke kas negara pada akhir periode pelaporan. Adapun rincian dana PNBPN pada saldo Kas Bendahara Penerimaan di Satker Perwakilan RI dijelaskan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp27.710.095.105

C.1.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp27.710.095.105,00 dan Rp17.322.696.783,00.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 36: Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	9.742.211.693	10.842.294.876	(1.100.083.183)	(10,15%)
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	17.762.165.636	6.336.318.514	11.425.847.122	180,32 %
Kas Lainnya Bendahara Penerimaan	205.717.776	144.083.393	61.634.383	42,78 %
Total	27.710.095.105	17.322.696.783	10.387.398.322	59,96 %

Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi, dan Kas Lainnya Bendahara Penerimaan. Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP baik itu saldo rekening di bank maupun saldo tunai. Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi merupakan dana pinjaman Kas Besi di Perwakilan RI di luar negeri yang tidak digunakan (*idle*) yang ada di Bendahara Pengeluaran Satker Perwakilan RI. Sedangkan Kas Lainnya Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Kenaikan nilai Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar 59,96% disebabkan oleh kenaikan nilai Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 180,32% dan 42,78%. Sementara itu, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran mengalami penurunan, yaitu sebesar 10,15%.

Saldo Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi dengan total nilai sebesar Rp17.762.165.636 antara lain disebabkan adanya peminjaman kas besi dari KBRI Ottawa, KBRI Bratislava, KJRI Penang, KBRI Dar Es Salaam, KJRI Davao City, dan KBRI Paramaribo dengan total Rp11.055.528.393,00 yang sudah diproses pengembaliannya ke rekening kas besi namun masih belum masuk ke rekening Kas Besi (*Deposit in Transit*). Sementara itu, saldo Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi sebesar Rp6.382.015.000,00 merupakan peminjaman Kas Besi untuk penanganan bencana (*emergency cash standby*) di perwakilan KBRI Tehran, KBRI Damascus, dan KBRI Kyiv. Selain itu, terdapat saldo reklasifikasi kas besi di KBRI Alger sebesar Rp323.140.000 yang merupakan sisa peminjaman Kas Besi yang belum dikembalikan, dan saldo reklasifikasi kas besi di KBRI Brussel sebesar Rp1.482.243,00 yang merupakan biaya administrasi rekening Kas Besi.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan dana PNBPN yang belum dapat diidentifikasi per 31 Desember 2024 pada 5 satker perwakilan, yaitu KJRI Frankfurt, KBRI Madrid, KJRI Hamburg, KBRI Berlin, dan KBRI Stockholm. Kenaikan ini disebabkan bertambahnya jumlah satker perwakilan yang belum mengidentifikasikan dana PNBPN-nya di rekening PNBPN per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya Reklasifikasi Kas Besi, dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

Tabel 37: Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN
Sekretariat Jenderal			
- LS Bendahara	-	-	-
- Rohingya	969.562.806	961.109.947	-
Satker Perwakilan RI	8.772.648.887	17.762.165.636	205.717.776
Total	9.742.211.693	18.723.275.583	205.717.776

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdapat di Satker Pusat Sekretariat Jenderal dan 8 Satker Perwakilan. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdiri dari Pengembalian Belanja, Dana Bantuan Diyat, PPh 21 Pengelola Keuangan, Pengembalian Dana Indover, dan Reklasifikasi atas Koreksi BPK. Pengembalian Belanja terdapat di Satker KBRI Bangkok sebesar Rp182.386.356. Dana Bantuan Diyat merupakan dana bantuan kepada WNI bermasalah yang tidak dapat dikembalikan ke rekening diyat sebesar Rp4.311.835.571,00. Dana ini terdapat pada Satker KBRI Riyadh. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran juga terdiri dari dana pengembalian dari likuidasi Bank Indover sebesar Rp904.200.720,00 yang dicatat di Satker KBRI Den Haag. Selain itu, terdapat hasil koreksi BPK Tahun 2017 atas Selisih Kas Riil UM KPPN yang belum teridentifikasi, definitif PK Atnaker, dan definitif PK Atdag, yang tercatat di Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.574.909.512,00 di Satker KBRI Kuala Lumpur.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan PPh 21 honorarium pengelola keuangan terdapat di KBRI Bogota sebesar Rp3.326.726,00. Pada satker KBRI Buenos Aires, juga terdapat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan VAT (*Value Added Tax*) *Home Staff* sebesar Rp2.099.166,00. Pada KBRI Mexico City, juga terdapat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp793.890.836,00 yang merupakan sisa UP TA 2011 USD 51.99 dan Kelebihan Saldo Bank USD TA 2011 sebesar USD49.084,04.

Pada Satker Pusat, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada **Satker**

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Sekretariat Jenderal, terdiri dari Rekening Penampungan Sementara Bantuan kepada Rohingya.

Rekening Penampungan Sementara Bantuan kepada Rohingya dibuka pada Januari 2018 dengan menampung dana bantuan dari masyarakat sebesar Rp910.000.000,00, dengan saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp969.562.806,00 yang terdiri dari:

- a. Kadin Indonesia sebesar Rp510.000.000,00;
- b. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sebesar Rp400.000.000,00; serta
- c. Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp74.453.556 dan potongan pajak sebesar Rp14.890.750.

Rekening ini merupakan rekening penampungan dana bantuan dari masyarakat Indonesia yang diperuntukkan kepada Myanmar. Dalam pembukaan rekening ini melibatkan satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP). Atas keberadaan rekening ini maupun mekanisme penyaluran dana atas dana bantuan Rohingya ini belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri.

Tabel 38: Rincian Mutasi Rekening Penampungan Sementara Bantuan kepada Rohingya Tahun 2018 - 2024

(dalam Rupiah)

PERIODE	BANTUAN MASYARAKAT	JASA GIRO	PPh	SALDO
Jan - Des 2018	910.000.000	10.737.317	2.147.467	918.589.850
Jan - Des 2019	-	12.011.897	2.402.393	928.199.354
Jan - Des 2020	-	10.151.680	2.030.338	936.320.696
Jan - Des 2021	-	10.225.788	2.045.162	944.501.322
Jan - Des 2022	-	10.328.517	2.065.709	952.764.130
Jan - Des 2023	-	10.432.277	2.086.460	961.109.947
Jan - Des 2024	-	10.566.080	2.113.221	969.562.806
TOTAL	910.000.000	74.453.556	14.890.750	969.562.806

Atas saldo Bantuan Rohingya, sesuai Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 03672/PW/11/2023/69/11 tanggal 8 November 2023 perihal Tindak Lanjut Saldo pada Rekening Sekretariat Jenderal Khusus Bantuan Rohingya, disarankan agar Sekretariat Jenderal c.q. Biro Keuangan segera melakukan upaya tindak lanjut atas penyelesaian bantuan tersebut.

Pada Semester I Tahun 2025, sebagai upaya tindak lanjut yang didasarkan atas koordinasi dengan Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik sesuai Nota Dinas Nomor 16237/DM/04/2025/61 tanggal 27 April 2025, Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelesaian bantuan Rohingya dengan mengirimkan dana ke UNHCR sebesar US\$53,000. Kementerian Luar Negeri akan memproses penutupan rekening Bantuan Rohingya tersebut dan jika terdapat sisa setelah

proses pengiriman dana, akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Giro.

Kas Lainnya Bendahara Penerimaan yang merupakan penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan yang terdapat di KJRI Frankfurt, KBRI Berlin, KJRI Hamburg, KBRI Stockholm, dan KBRI Madrid. Adapun penyebab tidak dapat diidentifikasinya penerimaan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan, antara lain:

- Adanya pembatalan proses pengajuan dokumen kekonsuleran secara sepihak tanpa adanya konfirmasi dari *applicant*, sehingga dana yang sudah dibayarkan atau ditransfer ke rekening penerimaan Perwakilan RI masih belum dapat diidentifikasi;
- Adanya penolakan proses pengajuan dokumen kekonsuleran yang dilakukan oleh Perwakilan RI mengingat persyaratan ataupun kondisi yang tidak dapat dipenuhi oleh *applicant* sehingga dana yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kembali; serta
- Masih belum dapat teridentifikasinya penerimaan yang masuk ke rekening dikarenakan laporan penerimaan fungsi konsuler belum dapat diterima hingga 31 Desember 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya (menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga) diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Penerimaan dengan pasangan jurnal Dana Pihak Ketiga (untuk alasan kepraktisan, maka K/L mengakui sebagai Dana Pihak Ketiga).

Adapun rincian masing-masing akun Kas Lainnya dan Setara Kas dijelaskan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Belanja Dibayar di
Muka (Prepaid)
Rp115.688.821.919*

C.1.4. BELANJA DIBAYAR DI MUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal Neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran pada tahun anggaran berjalan, namun barang atau jasa belum diterima.

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp115.688.821.919,00 dan Rp217.966.754.350,00.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Rincian Belanja Dibayar Di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 39: Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai Dibayar di Muka	3.880.811.725	10.536.816.986	(6.656.005.261)	(63,17%)
Belanja Barang Dibayar di Muka	98.944.512.022	135.934.218.043	(36.989.706.021)	(27,21%)
Belanja Modal Dibayar di Muka	12.863.498.172	71.495.719.321	(58.632.221.149)	(82,01%)
Jumlah	115.688.821.919	217.966.754.350	(102.277.932.431)	(46,92%)

Belanja Pegawai Dibayar di Muka adalah pengeluaran belanja pegawai namun manfaat atas pengeluaran belanja pegawai tersebut belum diterima. Transaksi Belanja Pegawai Dibayar di Muka ini terdapat pada Satker Perwakilan RI berupa pembayaran Tunjangan Restitusi Pengobatan *Home Staff* dan Asuransi Kesehatan Pegawai Setempat yang dilakukan selama satu tahun ke depan, melewati periode 31 Desember 2024.

Belanja Barang Dibayar di Muka adalah pengeluaran Belanja Barang, namun manfaat atas pengeluaran Belanja Barang tersebut belum diterima. Transaksi ini sebagian besar berupa pembayaran asuransi antara lain gedung bangunan dan kendaraan dinas untuk jangka waktu 1 tahun, melewati periode 31 Desember 2024 yang terdapat pada Satker Perwakilan RI.

Belanja Modal Dibayar di Muka adalah pengeluaran belanja modal namun manfaat atas pengeluaran belanja modal tersebut belum diterima. Dapat diilustrasikan, pada saat Satker melakukan pembelian aset dengan belanja modal namun sampai periode pelaporan keuangan aset tersebut belum diterima, maka pembelian tersebut dicatat sebagai Belanja Modal Dibayar Di muka.

Atas pengeluaran-pengeluaran tersebut, dicatat dengan bukti-bukti legal/dokumen-dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dari pihak ketiga seperti kuitansi, *invoice*, dll telah terpenuhi.

Penurunan nilai Belanja Dibayar Di Muka sebesar 46,92% disebabkan karena penurunan signifikan atas Belanja Modal Dibayar Di Muka pada Satker Perwakilan RI sebesar 82,01%. Adapun rincian masing-masing akun Belanja dibayar di muka dijelaskan pada lampiran Laporan Keuangan.

Rincian Belanja Dibayar di Muka lingkup per Eselon I tersaji pada Tabel berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 40: Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka Per Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Sekretariat Jenderal	109.646.051.211	158.326.888.788	(48.680.837.577)	(30,75%)
- Perwakilan	67.954.498.202	120.055.854.015	(52.101.355.813)	(43,40%)
- Setjen Pusat	44.806.243	1.178.844.771	(1.134.038.528)	(96,20%)
- Pustik KP	41.646.746.766	37.092.190.002	4.554.556.764	12,28 %
BSKLN	133.695.239	100.776.098	32.919.141	32,67 %
Ditjen Aspasaf	1.331.172.653	1.224.038.277	107.134.376	8,75 %
Ditjen KS Multilateral	4.301.066.662	58.044.156.789	(53.743.090.127)	(92,59%)
Ditjen HPI	37.279.335	30.607.658	6.671.677	21,80 %
Ditjen Protkons	17.968.551	11.550.803	6.417.748	55,56 %
Ditjen IDP	202.444.411	228.735.937	(26.291.526)	(11,49%)
Ditjen Amerop	654.834	-	654.834	100,00 %
Ditjen KS ASEAN	18.489.023	-	18.489.023	100,00 %
Total	115.688.821.919	217.966.754.350	(102.277.932.431)	(46,92%)

Keterangan:

Rincian masing-masing akun Belanja Dibayar di Muka dijelaskan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Uang Muka Belanja
(Prepayment)
Rp0

C.1.5. UANG MUKA BELANJA (PREPAYMENT)

Uang Muka Belanja merupakan porsi pembayaran yang dilakukan di muka/awal sebelum pihak ketiga menyerahkan barang/jasa. Apabila sampai akhir periode pelaporan tidak terdapat progres penyelesaian pekerjaan sama sekali (prestasi pekerjaan nihil), namun pekerjaan tersebut dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, maka nilai pembayaran uang muka tersebut disajikan sebagai Uang Muka Belanja.

Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp36.861.475.638,00. Saldo Uang Muka Belanja tersebut mengalami penurunan dari periode tahun sebelumnya.

Tabel 41: Perbandingan Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Uang Muka Belanja Modal (Prepayment)	-	36.861.475.638	(36.861.475.638)	(100,00%)
Jumlah	-	36.861.475.638	(36.861.475.638)	(100,00%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Salah satu penyebab penurunan saldo Uang Muka Belanja Modal adalah adanya penyelesaian pembangunan gedung kantor KBRI Berlin. Sebelumnya, terdapat uang muka pembayaran KDP untuk pembangunan gedung pada KBRI Berlin sebesar Rp36.772.975.638,00. Dengan adanya penyelesaian pembangunan gedung kantor KBRI Berlin, saldo tersebut sudah diakui sebagai penambahan Gedung dan Bangunan.

Selain itu, penurunan saldo Uang Muka Belanja Modal disebabkan penyelesaian pekerjaan pembuatan film dokumenter atas restorasi Gedung Pancasila sebesar Rp88.500.000,00 di satker Sekretariat Jenderal, dimana uang muka atas film dokumenter tersebut sudah diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.

Piutang Bukan Pajak
Rp62.000.778.518,00

C.1.6. PIUTANG BUKAN PAJAK

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp62.000.778.518,00 dan Rp73.650.557.540,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak pemerintah untuk menagih, yang timbul dari perikatan misalnya transaksi pemberian pinjaman oleh pemerintah, jual beli atau pertukaran, kemitraan, dan pemberian jasa-jasa yang telah dilakukan pemerintah.

Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Luar Negeri dikategorikan ke dalam jenis transaksi pemberian pinjaman kepada pegawai atau *Home Staff* yang ditempatkan pada Perwakilan RI. Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 42: Perbandingan Rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Piutang Bukan Pajak				
Sekretariat Jenderal	-	-	-	- %
Satker Perwakilan	62.000.778.518	73.650.557.540	(11.649.779.022)	(15,82%)
Total	62.000.778.518	73.650.557.540	(11.649.779.022)	(15,82%)

Penurunan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Luar Negeri pada 31 Desember 2024 sebesar 15,82% berbanding lurus terhadap jumlah penempatan *Home Staff* baru ke wilayah Perwakilan RI. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan RI. Pinjaman Resmi adalah pinjaman *Home Staff* yang anggarannya berasal dari DIPA Sekretariat Jenderal Pusat. Pemberian pinjaman tersebut dimaksudkan untuk memberi bantuan kelayakan hidup bagi *Home Staff* pada masa awal penempatan di luar negeri, yang dapat digunakan untuk membeli keperluan rumah tangga dalam rangka membantu penyesuaian diri dengan tempat baru di Perwakilan RI. Pinjaman

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Resmi terdiri dari 3 (tiga) jenis persekot, yakni 2 (dua) kali Tunjangan Penghidupan Luar Negeri, Deposit Sewa Rumah, dan Pembelian Mobil.

Pinjaman Resmi yang dicatat sebagai piutang lainnya dicatat sebesar nilai cicilan yang belum dilunasi oleh para *Home Staff* dikalikan dengan kurs JISDOR pada tanggal Pelaporan Keuangan. Cicilan *Home Staff* yang telah disetorkan ke Kas Negara diakui sebagai Pendapatan Non Fungsional Pengembalian Uang Muka Gaji dengan akun 425991.

Jangka waktu pelunasan cicilan Pinjaman Resmi atau umur Piutang Bukan Pajak, yaitu selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak cicilan pertama dilakukan di bulan berikutnya setelah Pinjaman Resmi diberikan.

Selain itu, Piutang Bukan Pajak merupakan potongan SPM pada Satker Sekretariat Jenderal berupa potongan sewa rumah jabatan dan utang lebih pegawai dengan mekanisme pembayaran potong gaji, namun belum keluar SP2D di KPPN.

Rincian akun Piutang Bukan Pajak dijelaskan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (Rp311.825.758)

C.1.7. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG BUKAN PAJAK

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp311.825.758,00) dan (Rp368.252.790,00). Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 43: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(311.825.758)	(368.252.790)	56.427.032	(15,32%)
Total	(311.825.758)	(368.252.790)	56.427.032	(15,32%)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak termasuk dalam kategori lancar, sehingga perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak dilakukan dengan perhitungan 0,5% dari saldo piutang. Penurunan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak sebesar 15,32% berbanding lurus dengan penurunan Piutang Bukan Pajak.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Piutang Bukan Pajak
Rp62.000.778.518

C.1.8. PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)

Piutang Bukan Pajak (*Netto*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp61.688.952.760,00 dan Rp73.282.304.750,00.

Piutang Bukan Pajak (*Netto*) merupakan hasil pengurangan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024.

Berikut merupakan perbandingan Piutang Bukan Pajak (*Netto*):

Tabel 44: Rincian Piutang Bukan Pajak (*Netto*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)	61.688.952.760	73.282.304.750	(11.593.351.990)	(15,82%)
Total	61.688.952.760	73.282.304.750	(11.593.351.990)	(15,82%)

Penurunan saldo Piutang Bukan Pajak (*Netto*) tersebut berbanding lurus dengan adanya penurunan saldo Piutang Bukan Pajak.

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp1.492.737.610

C.1.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.492.737.610,00 dan Rp1.443.906.431,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebagai berikut:

Tabel 45: Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Bagian Lancar TP	70.669.423	67.335.268	3.334.155	4,95 %
Bagian Lancar TGR	1.422.068.187	1.376.571.163	45.497.024	3,31 %
Total	1.492.737.610	1.443.906.431	48.831.179	3,38 %

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 ini terdapat pergerakan dari saldo per 31 Desember 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat beberapa transaksi terkait Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yaitu:

1. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dari 1 (satu) orang debitur sebesar Rp18.000.000,00 dengan mekanisme pemotongan pensiun melalui PT Taspen dan telah disetorkan ke Kas Negara;
2. Pergerakan nilai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi akibat perubahan nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika dan beberapa valuta asing lainnya pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dicatat dan diakui setelah diperoleh Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari penanggung jawab kerugian atau memperoleh penetapan dari pejabat yang berwenang.

Penyajian Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dihitung berdasarkan jangka waktu jatuh tempo piutang, maksimal 12 bulan untuk Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan 24 bulan untuk Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Nilai yang akan ditagihkan dalam waktu 12 bulan sejak Surat Ketentuan Penyelesaian (dapat berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara) dicatatkan sebagai aset lancar (akun Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan) dan porsi piutang yang akan ditagihkan/jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya disajikan sebagai aset lainnya (akun Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Jangka Panjang).

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tersebut, Kementerian Luar Negeri memiliki kebijakan akuntansi untuk Piutang TGR bahwa penyajian porsi Piutang TGR dihitung secara proporsional sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo. Sehingga Piutang Perbendaharaan menjadi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan sejak diakui.

Rincian mengenai Data Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdapat pada Kartu Pengawas terlampir. Sebagian dari piutang yang tersaji telah dalam pengelolaan di Panitia Urusan Piutang Negara dan masih dalam proses penyelesaian oleh PUPN.

Proses penyelesaian atas Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, tetap dilakukan dengan melakukan penagihan dan penyerahan

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

pengelolaan ke Panitia Urusan Piutang Negara. Kesulitan dalam proses penyelesaian oleh Kementerian Luar Negeri maupun oleh PUPN utamanya adalah karena sebagian besar penanggung kerugian atau ahli warisnya sulit untuk dapat ditemukan, sehingga menghambat proses penyelesaian piutang.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –Bagian
Lancar TP/TGR
(Rp7.463.688)*

**C.1.10.PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – BAGIAN LANCAR
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
(TP/TGR)**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp7.463.688,00) dan (Rp7.219.532,00).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar tersebut, disusun berdasarkan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa penentuan kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan atau umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Tabel 46: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
I	ASIA	Lancar	1.419.769.716	0,50%	7.098.849
		Kurang Lancar	-	10%	-
		Diragukan	-	50%	-
		Macet	-	100%	-
II	EROPA	Lancar	70.669.423	0,50%	353.347
		Kurang Lancar	-	10%	-
		Diragukan	-	50%	-
		Macet	-	100%	-
III	AFRIKA DAN TIMUR TENGAH	Lancar	-	0,50%	-
		Kurang Lancar	-	10%	-
		Diragukan	-	50%	-
		Macet	-	100%	-
IV	AMERIKA DAN PASIFIK	Lancar	2.298.471	0,50%	11.492
		Kurang Lancar	-	10%	-
		Diragukan	-	50%	-

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

No	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
		Macet	-	100%	-
TOTAL			1.492.737.610		7.463.688

Penentuan kualitas piutang yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kenaikan Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar disebabkan karena adanya penyesuaian nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian atas jumlah penyisihan piutang dapat dilihat secara rinci pada Kartu Pengawas Piutang TP/TGR dijelaskan pada lampiran Laporan Keuangan.

Kementerian Luar Negeri selalu berupaya untuk menyelesaikan piutang TP/TGR yang masih harus diselesaikan oleh penanggung jawab kerugian negara melalui penyampaian tagihan, baik kepada individu maupun kepada Satuan Kerja di Kementerian Luar Negeri maupun yang berada pada Kementerian/ Instansi/ Lembaga lainnya.

*Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
(Netto)
Rp1.485.273.922*

C.1.11.BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (*Netto*) per 31 Desember 2024 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.485.273.922,00 dan Rp1.436.686.899,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (*Netto*) merupakan hasil pengurangan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Berikut merupakan perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

Tabel 47: Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
1	Bagian Lancar Netto Tuntutan Perbendaharaan	70.316.076	66.998.592	3.317.484	4,95 %
2	Bagian Lancar Netto Tuntutan Ganti Rugi	1.414.957.846	1.369.688.307	45.269.539	3,31 %
Total		1.485.273.922	1.436.686.899	48.587.023	3,38 %

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan adanya penyesuaian selisih kurs belum terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024.

Persediaan
Rp101.426.496.465

C.1.12.PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp101.426.496.465,00 dan Rp77.157.433.811,00.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Penerapan Metode *First In First Out (FIFO)*, mulai tahun 2021 Aplikasi Persediaan menggunakan metode *FIFO* yang semula menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT).

Dengan metode penilaian *FIFO*, aplikasi Persediaan tidak lagi menghasilkan Transaksi Koreksi Otomatis (KO) apabila dalam satu bulan terjadi pembelian persediaan dengan beberapa harga satuan yang berbeda. Dalam metode *FIFO*, persediaan dihitung berdasarkan asumsi bahwa barang yang pertama kali masuk akan keluar pertama kali pula, dan sisa dalam persediaan menunjukkan pembelian yang terakhir.

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Selain barang konsumsi berupa alat tulis kantor (ATK), juga berupa dokumen keimigrasian yang terdiri dari Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Stiker Visa Biasa, dan Perdim yang diterima dari Kementerian Hukum dan HAM dan dicatat sebagai barang Persediaan pada Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, Stiker Visa Dinas/Diplomatik merupakan dokumen keimigrasian yang digunakan untuk pemegang Paspor Dinas/Diplomatik.

Penatausahaan Persediaan Dokumen Keimigrasian yang bersumber dari

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) c.q. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Pengiriman dokumen keimigrasian dari Ditjen Imigrasi, Kemenkumham dicatat sebagai Transfer Masuk oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Luar Negeri.

Hal ini untuk memastikan kebijakan “Satu Pintu” jalur pendistribusian Dokumen Keimigrasian sebagai Persediaan dari Pusat ke Perwakilan RI di luar negeri. Dengan kebijakan ini pengendalian terhadap penatausahaan dokumen keimigrasian antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Luar Negeri (Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI di luar negeri) lebih terarah dan terkoordinasi. Dengan kebijakan ini diharapkan nilai, jumlah, dan jenis dokumen keimigrasian yang dikirimkan dari Pusat ke Perwakilan RI di luar negeri dapat diketahui secara andal dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri melakukan penatausahaan dan pendistribusian dokumen keimigrasian yang bersumber dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM kepada UAKPB di Perwakilan RI di luar negeri (Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia) dengan transaksi Transfer Keluar. UAKPB yang menerima distribusi dokumen keimigrasian dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri menatausahakan sebagai Transfer Masuk.

Sementara itu, untuk dokumen keimigrasian yang bersumber dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, berupa Stiker Visa Diplomati/Dinas, pendistribusian ke UAKPB di Perwakilan RI di luar negeri (Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dengan mekanisme penatausahaan Transfer Keluar oleh UAKPB Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dan Transfer Masuk oleh UAKPB Perwakilan RI yang menerima dokumen dimaksud.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 48: Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Barang Konsumsi	96.337.488.814	73.774.694.058	22.562.794.756	30,58%
Bahan untuk Pemeliharaan	4.180.995.496	2.652.963.634	1.528.031.862	57,60%
Persediaan Lainnya	908.012.155	729.776.119	178.236.036	24,42%
Jumlah	101.426.496.465	77.157.433.811	24.269.062.654	31,45%

Barang persediaan dalam Neraca Kementerian Luar Negeri per 31 Desember

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

2024 merupakan barang persediaan dalam kondisi baik yang masih digunakan sebagai stok untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Nilai persediaan rusak sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp934.130.799,00, dan nilai persediaan usang sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp973.848.576,00. Barang persediaan dalam kondisi usang/rusak disajikan dalam lampiran.

Aset Tetap
Rp52.084.804.580.976

C.2. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp52.084.804.580.976,00 dan Rp52.116.262.100.744,00.

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah
Rp43.781.338.280.789

C.2.1. TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.781.338.280.789,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp43.463.865.940.463,00, terdapat mutasi tambah sebesar Rp317.472.340.326,00.

Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 49: Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	43.463.865.940.463
Mutasi Tambah	
Hibah Masuk	316.995.326.000
Reklasifikasi Masuk	14.141.701.436.896
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	477.014.326
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	(14.141.701.436.896)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Saldo per 31 Desember 2024	43.781.338.280.789
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	43.781.338.280.789

Mutasi Tambah

- Hibah Masuk sebesar Rp316.995.326.000,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, merupakan penerimaan Hibah Langsung Barang berupa Tanah dan/atau Bangunan dari *The Secretary Of State For Foreign Commonwealth & Development Affairs Of The United Kingdom Of Great Britain & Northern Ireland* yang telah diserahterimakan pada tanggal 31 Oktober 2024 kepada Kementerian Luar Negeri. Serah terima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima nomor BA/01781/PL/10/2024/26 tanggal 31 Oktober 2024, dan Naskah Perjanjian Hibah nomor PRJ/PK/00012/10/2024/03 tanggal 31 Oktober 2024 ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI dan *His Britannic Majesty's Ambassador to the Republic of Indonesia and Timor Leste* selaku kuasa dari *Secretary of State for Foreign Commonwealth & Development Affairs of the United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland*.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp14.141.701.436.896,00 terdapat pada 51 (lima puluh satu) satker Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi perubahan BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain, sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp477.014.326,00 terdapat pada KBRI Madrid, merupakan kapitalisasi nilai atas pekerjaan pengaspalan halaman kantor KBRI Madrid yang semula dikapitalisasi ke aset Gedung Garasi/Pool Permanen.

Mutasi Kurang

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp14.141.701.436.896,00 terdapat pada 51 (lima puluh satu) satker Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi perubahan BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain, sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Peralatan dan Mesin
Rp3.233.696.982.770

C.2.2. PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.233.696.982.770,00 dan Rp3.070.894.578.740,00.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 50: Mutasi Tambah/Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	3.070.894.578.740
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	29.266.112.969
Pembelian	147.395.491.525
Transfer Masuk	32.450.608.119
Hibah Masuk	80.639.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	46.469.228.682
Reklasifikasi Masuk	109.656.729.084
Perolehan Lainnya	45.791.808.440
Penyelesaian Pembangunan Langsung	78.950.644
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.310.137.348
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	12.554.855.504
Pengembangan Melalui KDP	35.268.716
Koreksi Susulan	6.686.154
Transfer Keluar	306.500.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	309.748.175
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(817.628.899)
Transfer Keluar	(32.757.108.119)
Hibah Keluar	(52.741.274)
Reklasifikasi Keluar	(109.607.668.238)
Koreksi Pencatatan	(48.786.237.394)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(70.888.976.406)
Saldo per 31 Desember 2024	3.233.696.982.770
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.552.594.137.135)
Nilai Buku per 31 Desember 204	681.102.845.635

Mutasi Tambah

- Saldo Awal sebesar Rp29.266.112.969,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, KBRI Moskow, KBRI Tokyo, KBRI Madrid, KBRI Washington DC dan KJRI Melbourne, merupakan pembukuan aset kategori Peralatan dan Mesin atas perolehan tahun sebelumnya berdasarkan detil sesuai jumlah

- dan jenis fisik asetnya.
2. Pembelian sebesar Rp147.395.491.525 terdapat pada 10 (sepuluh) satuan kerja Pusat dan 130 (seratus tiga puluh) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan pembukuan aset Peralatan dan Mesin dari pengadaan tahun berjalan yang telah memenuhi definisi Aset Tetap.
 3. Transfer Masuk sebesar Rp32.450.608.119,00 terdapat pada 12 (dua belas) satuan kerja Pusat dan 39 (tiga puluh sembilan) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan pemindahbukuan aset Peralatan dan Mesin antar satker dalam entitas Kementerian Luar Negeri.
 4. Hibah Masuk sebesar Rp80.639.000,00 terdapat pada KBRI Bandar Seri Begawan, merupakan hibah langsung barang berupa 8 (delapan) unit Laptop dan 2 (dua) unit Printer dari Bapak Achmad Dhofir.
 5. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp46.469.228.682,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan 37 (tiga puluh tujuh) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan pembukuan aset Peralatan dan Mesin periode tahun berjalan melalui mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang telah memenuhi definisi Aset Tetap.
 6. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp109.656.729.084,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Kerja Sama Multilateral, Ditjen Protokol dan Konsuler, Inspektorat Jenderal dan 127 (seratus dua puluh tujuh) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi perubahan BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain.
 7. Perolehan Lainnya sebesar Rp45.791.808.440,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan 25 (dua puluh lima) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi pencatatan perolehan aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari prepaid dan/atau koreksi kuantitas akibat kesalahan catat pada Modul Komitmen.
 8. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp78.950.644,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan KBRI Manama, merupakan transaksi penambahan nilai aset atas pekerjaan yang dapat dikapitalisasi tanpa melalui mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 9. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp1.310.137.348,00 terdapat pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, Ditjen Protokol dan Konsuler, PTRI ASEAN dan 15 (lima belas) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi penambahan nilai aset atas pekerjaan yang dapat dikapitalisasi tanpa melalui mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 10. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp12.554.855.504,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan serta 11 (sebelas) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi penambahan nilai aset Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena kesalahan dalam peng-*input*-an dan/atau penyesuaian.
 11. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp35.268.716,00 terdapat pada

- satuan kerja KBRI Zagreb, merupakan transaksi penambahan nilai Aset kategori Peralatan dan Mesin yang dapat dikapitalisasi melalui mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
12. Koreksi Susulan sebesar Rp6.686.154,00 terdapat pada KJRI Karachi, merupakan koreksi nilai BMN yang disebabkan karena transaksi yang seharusnya mempengaruhi nilai BMN untuk NUP bersangkutan yang belum dilakukan koreksi.
 13. Transfer Keluar (Batal Transfer Keluar) sebesar Rp306.500.000,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, merupakan transaksi Batal Transfer Keluar berupa aset Peralatan dan Mesin karena KBRI Kopenhagen sebagai satker penerima telah melakukan tutup periode Modul Aset Tetap pada bulan dilakukan transfer.
 14. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp309.748.175,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, KBRI Paramaribo, KBRI Sarajevo, KBRI Buenos Aires, KJRI Mumbai dan PTRI Jenewa, merupakan perolehan aset yang berasal dari transaksi Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap.

Mutasi Kurang

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp817.628.899,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan 10 (sepuluh) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi pengurangan nilai aset Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian.
2. Transfer Keluar sebesar Rp32.757.108.119,00 terdapat pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, Ditjen Protkons, Ditjen Aspasaf dan Ditjen IDP, merupakan pemindahbukuan aset Peralatan dan Mesin antar satker dalam entitas Kementerian Luar Negeri.
3. Hibah Keluar sebesar Rp52.741.274,00 terdapat pada KBRI Washington DC, merupakan transaksi perubahan BMN atas jenis penggolongan kodefikasi BMN, namun operator salah menggunakan menu transaksi Hibah (Keluar) yang seharusnya menggunakan menu transaksi Reklasifikasi Keluar. Kesalahan tersebut telah dilakukan penyesuaian pada periode Audited.
4. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp109.607.668.238,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Kerja Sama Multilateral, Ditjen Protokol dan Konsuler, Inspektorat Jenderal dan 127 (seratus dua puluh tujuh) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi perubahan BMN atas jenis penggolongan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan kodefikasi BMN yang lain.
5. Koreksi Pencatatan sebesar Rp48.786.237.394,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan serta 25 (dua puluh lima) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi koreksi sesuai dokumen sumber kuitansi/BAST akibat kesalahan kuantitas dan/atau kodefikasi barang pada Modul Komitmen.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

6. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp70.888.976.406,00 terdapat pada 9 (sembilan) satuan kerja Pusat dan 78 (tujuh puluh delapan) satuan kerja Perwakilan RI diluar negeri, merupakan transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya, karena tidak lagi memenuhi definisi Aset Tetap.

*Gedung dan
Bangunan
Rp 10.996.469.656.352*

C.2.3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp10.996.469.656.352,00 dan Rp9.958.070.727.743,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 51: Mutasi Tambah/Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023		9.958.070.727.743
Mutasi Tambah		
Saldo Awal		750.433.029.123
Pembelian		198.864.820.734
Hibah Masuk		11.928.995.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		809.402.332.976
Reklasifikasi Masuk		7.239.710.708.505
Perolehan Lainnya		967.717.323
Penyelesaian Pembangunan Langsung		1.387.455.329
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)		12.866.876.489
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah		47.873.936.359
Penerimaan Aset Tetap Renovasi		1.276.750.686
Pengembangan Melalui KDP		97.244.979.142
Koreksi Susulan		1.171.855.181
Mutasi Kurang		
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		(3.251.626.330)
Hibah Keluar		(667.242.622.812)
Reklasifikasi Keluar		(7.239.751.042.779)
Koreksi Pencatatan		(201.436.649.897)
Penghentian Aset Dari Penggunaan		(23.048.586.420)
Saldo per 31 Desember 2024		10.996.469.656.352
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024		(3.603.088.130.342)
Nilai Buku per 31 Desember 204		7.393.381.526.010

Mutasi Tambah

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

1. Saldo Awal sebesar Rp750.433.029.123,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan KBRI Washington DC dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp83.190.406.311,00 merupakan pencatatan gedung Museum Konferensi Asia Afrika Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat sesuai instruksi Sekretaris Jenderal nomor 01699/PL/05/2024/26.
 - KBRI Washington DC sebesar Rp667.242.622.812,00 merupakan pencatatan kembali gedung Kantor KBRI dan Wisma Duta/DCM akibat dari kesalahan penggunaan transaksi Hibah (Keluar) yang seharusnya Reklasifikasi Keluar.
2. Pembelian sebesar Rp198.864.820.734,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan 6 (enam) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp195.659.351.477,00 merupakan pembayaran cicilan utang jangka panjang untuk pengadaan gedung KBRI London, KBRI Phnom Penh, KBRI Warsawa, KJRI Chicago, KJRI Johor Bahru, KJRI Kuching dan KRI Tawau;
 - KBRI Bern sebesar Rp916.209.552,00 merupakan pekerjaan renovasi Gedung Kantor yang seharusnya dikapitalisasi ke aset Bangunan Gedung Kantor Permanen, namun operator salah melakukan pendetilan.
 - KBRI Bucharest sebesar Rp40.334.274,00 merupakan pengadaan tenda, namun operator salah melakukan pendetilan sebagai Kanopi;
 - KBRI Damascus sebesar Rp393.849.920,00, merupakan pengadaan Kanopi;
 - KBRI Pretoria sebesar Rp 639.486.827,00 merupakan pembuatan pagar di lingkungan kantor KBRI;
 - KJRI Perth sebesar Rp 365.444.704,00, merupakan pekerjaan renovasi Gedung Kantor yang seharusnya dikapitalisasi ke aset Bangunan Gedung Kantor Permanen, namun operator salah melakukan pendetilan;
 - KJRI Vancouver sebesar Rp 850.143.980,00, merupakan pekerjaan renovasi Gedung Kantor yang seharusnya dikapitalisasi ke aset Bangunan Gedung Kantor Permanen, namun operator salah melakukan pendetilan.
3. Hibah Masuk sebesar Rp11.928.995.000,00 pada Sekretariat Jenderal, merupakan penerimaan Hibah Langsung Barang berupa Tanah dan/atau Bangunan dari *The Secretary Of State For Foreign Commonwealth & Development Affairs Of The United Kingdom Of Great Britain & Northern Ireland* yang telah diserahterimakan pada tanggal 31 Oktober 2024 kepada Kementerian Luar Negeri. Serah terima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima nomor BA/01781/PL/10/2024/26 tanggal 31 Oktober 2024, dan Naskah Perjanjian Hibah nomor PRJ/PK/00012/10/2024/03 tanggal 31 Oktober 2024 ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI dan *His Britannic Majesty's Ambassador to the Republic of Indonesia and Timor Leste* selaku kuasa dari *Secretary of State for Foreign Commonwealth & Development Affairs of the United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland*.

4. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp809.402.332.976,00 terdapat pada KBRI Berlin, KBRI Phnom Penh dan KBRI Windhoek, merupakan perolehan Gedung dan/atau Bangunan pada tahun anggaran berjalan melalui mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp7.239.710.708.505,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan 96 (sembilan puluh enam) satuan kerja Perwakilan RI di Luar Negeri, merupakan transaksi perubahan BMN atas jenis penggolongan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan kodefikasi BMN yang lain, sehubungan dengan penambahan kodefikasi barang sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
6. Perolehan Lainnya sebesar Rp967.717.323,00 terdapat pada KBRI Paramaribo, merupakan transaksi pencatatan perolehan aset Gedung dan Bangunan akibat kesalahan catat pada Modul Komitmen, berupa Pagar Permanen yang semula dibukukan dengan kodefikasi Bangunan Gedung Kantor Permanen.
7. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp1.387.455.329,00 terdapat pada KBRI Stockholm, KBRI Paramaribo dan KBRI Kopenhagen, merupakan perolehan Gedung dan/atau Bangunan pada tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
8. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp12.866.876.489,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, KBRI Bern, KBRI Brussels, KJRI Hongkong, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Stockholm, KBRI Kopenhagen, KBRI Antananarivo, KBRI Madrid, dan KBRI Pretoria, merupakan transaksi penambahan nilai aset atas pekerjaan renovasi gedung yang dapat dikapitalisasi tanpa melalui mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
9. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp47.873.936.359,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan 17 (tujuh belas) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi penambahan nilai aset gedung dan/atau bangunan atas nilai pekerjaan yang dapat dikapitalisasi.
10. Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp1.276.750.686,00 terdapat pada KBRI Singapura, merupakan kapitalisasi nilai aset atas pekerjaan renovasi ruangan kerja Atase Keuangan pada Gedung dan Bangunan milik KBRI Singapura atas beban biaya anggaran Atase Keuangan.
11. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp97.244.979.142,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan 19 (Sembilan belas) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi penambahan nilai Aset atas pekerjaan konstruksi gedung dan/atau bangunan yang dapat dikapitalisasi melalui mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
12. Koreksi Susulan sebesar Rp1.171.855.181,00 terdapat pada KBRI Brussels, KBRI Damascus, KBRI Singapura dan KJRI Karachi, merupakan koreksi nilai BMN yang disebabkan karena transaksi yang seharusnya mempengaruhi nilai BMN untuk NUP bersangkutan yang belum dilakukan koreksi.

Mutasi Kurang

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp3.251.626.330,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, KBRI Brussels, KBRI Kopenhagen, dan KBRI Madrid, yang merupakan transaksi pengurangan nilai aset gedung dan/atau bangunan yang disebabkan karena kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian.
2. Hibah Keluar sebesar Rp667.242.622.812,00 terdapat pada KBRI Washington DC, merupakan transaksi perubahan BMN atas jenis penggolongan kodefikasi BMN, namun operator salah menggunakan menu transaksi Hibah (Keluar) yang seharusnya menggunakan menu transaksi Reklasifikasi Keluar. Kesalahan tersebut telah dilakukan penyesuaian pada periode Audited.
3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp7.239.751.042.779,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan 97 (sembilan puluh tujuh) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi perubahan BMN atas jenis penggolongan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan kodefikasi BMN yang lain.
4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp201.436.649.897,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal merupakan koreksi catat atas nilai bangunan pembayaran cicilan utang jangka panjang untuk pengadaan gedung KBRI London, KBRI Phnom Penh, KBRI Warsawa, KJRI Chicago, KJRI Johor Bahru, KJRI Kuching dan KRI Tawau, dan 8 (delapan) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri merupakan koreksi nilai/kuantitas akibat kesalahan pendetilan jenis aset.
5. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp23.048.586.420,00 adalah transaksi yang digunakan oleh Satker sebelum dilakukan proses usul penghapusan Gedung dan Bangunan. Saldo tersebut merupakan penghentian penggunaan 2 unit Gedung Pos Jaga Darurat pada KBRI Khartoum dengan total sebesar Rp58.452.000,00 (vide persetujuan izin prinsip dari Kementerian Keuangan nomor S-80/MK.6/KN.4/2024 tanggal 5 Juni 2024), dan penghentian penggunaan Wisma KJRI Chicago sebesar Rp22.990.134.420,00 (vide persetujuan izin prinsip dari Kementerian Keuangan nomor S-16/MK.6/2023 tanggal 12 Januari 2023).

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp31.480.214.763*

C.2.4. JALAN DAN JEMBATAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31.480.214.763,00 dan Rp30.840.351.331,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52: Mutasi Tambah/Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024

		(dalam Rupiah)
Saldo per 31 Desember 2023		30.840.351.331
Mutasi Tambah		
Pembelian		657.931.082

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Mutasi Kurang		
Reklasifikasi Keluar		(18.067.650)
Saldo per 31 Desember 2024		31.480.214.763
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024		(21.167.143.483)
Nilai Buku per 31 Desember 2024		10.313.071.280

Mutasi Tambah

- Pembelian sebesar Rp657.931.082,00 terdapat pada KBRI Brussels dan KJRI Kota Kinabalu, merupakan pembukuan aset Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari pengadaan Tahun Anggaran Berjalan yang telah memenuhi definisi Aset Tetap Lainnya.

Mutasi Kurang

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp18.067.650,00 terdapat pada KJRI Kota Kinabalu, merupakan transaksi perubahan BMN atas jenis penggolongan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan kodefikasi BMN yang lain, dari Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Sedang menjadi Peralatan dan Mesin (Telephone (PABX)).

Aset Tetap Lainnya
Rp57.517.801.235

C.2.5. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, serta Irigasi dan Jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp57.517.801.235,00 dan Rp Rp56.369.934.155,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53: Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	56.369.934.155
Mutasi Tambah	
Pembelian	4.480.757.753
Transfer Masuk	438.483.146
Hibah Masuk	200.000.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	741.395.383
Reklasifikasi Masuk	9.341.078
Perolehan Lainnya	85.811.595
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	88.500.000
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	(438.483.146)
Koreksi Pencatatan	(20.812.416)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(4.437.126.313)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Saldo per 31 Desember 2024	57.517.801.235
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(7.294.094.161)
Nilai Buku per 31 Desember 204	50.223.707.074

Mutasi Tambah

1. Pembelian sebesar Rp4.480.757.753,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan 22 (dua puluh dua) satker Perwakilan RI di luar negeri, merupakan pembukuan aset yang berasal dari pengadaan Tahun Anggaran Berjalan yang telah memenuhi definisi Aset Tetap Lainnya.
2. Transfer Masuk sebesar Rp438.483.146,00 terdapat pada KBRI Dili dan KBRI Quito, merupakan pemindahbukuan Aset Tetap Lainnya dalam entitas Kementerian Luar Negeri.
3. Hibah Masuk sebesar Rp200.000.000,00 terdapat pada KBRI Paris, merupakan Hibah Barang berupa Benda Kesenian berbentuk Lukisan Kanvas dari Indrawati Gunarnsa kepada KBRI Paris untuk mendukung promosi karya seniman Indonesia di Perancis.
4. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp741.395.383,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal dan KBRI Berlin merupakan pembukuan aset kategori Aset Tetap Lainnya pada periode tahun berjalan melalui mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang telah memenuhi definisi Aset Tetap.
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp9.341.078,00 terdapat pada KJRI Hongkong, merupakan transaksi perubahan BMN atas jenis penggolongan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan kodefikasi BMN yang lain.
6. Perolehan Lainnya sebesar Rp85.811.595,00 terdapat pada KBRI London dan KJRI Vancouver dengan rincian sebagai berikut:
 - KBRI London sebesar Rp41.393.399,00 merupakan pekerjaan perbaikan pagar Wisma Caraka yang memenuhi kriteria kapitalisasi. Wisma Caraka merupakan gedung yang disewa oleh KBRI London untuk mendukung tusi, sehingga untuk pencatatan atas realisasi tersebut dicatat sebagai aset Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi.
 - KJRI Vancouver sebesar Rp44.418.196,00 merupakan pembelian baju tari dengan menggunakan Akun Belanja Bahan.
7. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp88.500.000,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, merupakan koreksi penambahan nilai atas pekerjaan dokumentasi pekerjaan renovasi Gedung Pancasila.

Mutasi Kurang

1. Transfer Keluar sebesar Rp438.483.146,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, merupakan pemindahbukuan Aset Tetap Lainnya dalam entitas Kementerian Luar Negeri.
2. Koreksi Pencatatan sebesar Rp20.812.416,00 terdapat pada KBRI Beograd, merupakan transaksi koreksi sesuai dokumen sumber kuitansi/BAST akibat kesalahan kuantitas dan/atau kodefikasi barang pada Modul Komitmen.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

3. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp4.437.126.313,00 terdapat pada 20 (dua puluh) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya, karena tidak lagi memenuhi definisi Aset Tetap Lainnya.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp168.445.150.188*

C.2.6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp168.445.150.188,00 dan Rp764.076.047.369,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54: Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NAMA SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	NAIK / TURUN
SEKRETARIAT JENDERAL	78.555.306.858	71.826.139.059	6.729.167.799	9,37 %
KEDUTAAN BESAR RI DI WASHINGTON DC	33.083.658.570	10.607.856.453	22.475.802.117	211,88 %
KONSULAT JENDERAL RI DI HAMBURG	2.124.052.372	892.757.196	1.231.295.176	137,92 %
KEDUTAAN BESAR RI DI BERLIN	29.774.243.283	669.972.287.500	(640.198.044.217)	(95,56%)
KEDUTAAN BESAR RI DI WELLINGTON	635.601.599	1.298.206.228	(662.604.629)	(51,04%)
KEDUTAAN BESAR RI DI BANGKOK	3.288.669.653	-	3.288.669.653	100,00 %
KEDUTAAN BESAR RI DI KUALA LUMPUR	6.809.306.744	-	6.809.306.744	100,00 %
KEDUTAAN BESAR RI DI PARIS	1.068.323.872	-	1.068.323.872	100,00 %
KEDUTAAN BESAR RI DI RIYADH	760.433.788	-	760.433.788	100,00 %
KEDUTAAN BESAR RI DI SEOUL	799.500.000	-	799.500.000	100,00 %
KONSULAT JENDERAL RI DI JEDDAH	1.596.849.132	-	1.596.849.132	100,00 %
KONSULAT RI DI DARWIN	470.403.384	-	470.403.384	100,00 %
KEDUTAAN BESAR RI DI BEIJING	248.065.400	248.065.400	-	- %
KEDUTAAN BESAR RI DI KYIV	233.724.950	233.724.950	-	- %
KONSULAT JENDERAL RI DI JOHOR BAHRU	8.997.010.583	8.997.010.583	-	- %
Jumlah	168.445.150.188	764.076.047.369	(595.630.897.181)	(77,95%)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) periode 31 Desember 2024 secara umum mengalami penurunan sebesar Rp595.630.897.181,00 atau 77,95%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) satuan kerja mengalami kenaikan nilai KDP, yaitu:
 - Sekretariat Jenderal mencatat KDP sebesar Rp78.555.306.858,00 atau mengalami kenaikan sebesar 9,37% yang berasal dari Pengembangan KDP atas progres pekerjaan renovasi Gedung dan Bangunan.
 - KBRI Washington DC mencatat KDP sebesar Rp33.083.658.570,00 atau mengalami kenaikan sebesar 211,88% dari KDP per 31 Desember 2023 yang berasal dari Pengembangan KDP atas progres pekerjaan renovasi Gedung dan Bangunan.
 - KJRI Hamburg mencatat KDP sebesar Rp2.124.052.372,00 atau mengalami kenaikan sebesar 137,92% yang berasal dari Pengembangan KDP atas progres pekerjaan renovasi Gedung dan Bangunan.
2. Penurunan nilai KDP terdapat pada 2 (dua) satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - KBRI Berlin mencatat KDP sebesar Rp29.774.243.283,00 atau mengalami penurunan sebesar 95,56% karena telah menyelesaikan pekerjaan fisik yang semula dicatat sebagai KDP, yaitu pembangunan gedung kantor KBRI. Adapun saldo KDP yang masih tercatat di neraca merupakan pekerjaan pengadaan furniture yang belum dapat diditilkan dalam Aplikasi SAKTI.
 - KBRI Wellington mencatat KDP sebesar Rp635.601.599,00 atau mengalami penurunan sebesar 51,04%. Penurunan nilai KDP tersebut dipengaruhi adanya proses penghapusan KDP sebesar Rp1.298.206.228,00 sesuai izin prinsip penghapusan sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-330/MK.6/KN.4/2023 tanggal 20 November 2023 hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara karena Sebab Lain pada KBRI Wellington. Adapun saldo KDP yang masih tercatat di neraca merupakan biaya perencanaan renovasi gedung kantor KBRI.
3. Terdapat perolehan KDP pada 7 (tujuh) satuan kerja Perwakilan RI sampai dengan akhir tahun 2024 belum didefinitifkan menjadi aset, dengan rincian sebagai berikut:
 - KBRI Bangkok mencatat KDP sebesar Rp3.288.669.653,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
 - KBRI Kuala Lumpur mencatat KDP sebesar Rp6.809.306.744,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
 - KBRI Paris mencatat KDP sebesar Rp1.068.323.872,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
 - KBRI Riyadh mencatat KDP sebesar Rp760.433.788,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
 - KBRI Seoul mencatat KDP sebesar Rp799.500.000,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

- KJRI Jeddah mencatat KDP sebesar Rp1.596.849.132,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
 - KRI Darwin mencatat KDP sebesar Rp470.403.384,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
4. Sementara 3 (tiga) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri sampai dengan periode pelaporan TA 2024 tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai KDP, yaitu:
- KBRI Beijing mencatat KDP sebesar Rp248.065.400,00 merupakan biaya jasa *concept design* gedung fasilitas parkir kantor KBRI yang masih akan dilanjutkan pekerjaan fisiknya.
 - KBRI Kyiv mencatat KDP sebesar Rp233.724.950,00 merupakan biaya *appraisal* dan jasa pengacara pengurusan pembelian tanah Wisma Duta yang masih akan dilanjutkan pekerjaan fisiknya.
 - KJRI Johor Bahru mencatat KDP sebesar Rp8.997.010.583,00 merupakan biaya pekerjaan renovasi pembangunan gedung kantor KJRI Johor Bahru yang telah selesai dikerjakan. KDP dimaksud akan dikapitalisasi setelah aset Gedung dan Bangunan diterima dari Sekretariat Jenderal melalui mekanisme transfer keluar/transfer masuk.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp6.184.143.505.121)*

C.2.7. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp6.184.143.505.121,00) dan (Rp5.227.855.479.057,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

**Tabel 55: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

NO	ASET TETAP	NILAI BMN	AKUM. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	3.233.696.982.770	(2.552.594.137.135)	681.102.845.635
2	Gedung dan Bangunan	10.996.469.656.352	(3.603.088.130.342)	7.393.381.526.010
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.480.214.763	(21.167.143.483)	10.313.071.280
4	Aset Tetap Lainnya	57.517.801.235	(7.294.094.161)	50.223.707.074
	Jumlah	14.319.164.655.120	(6.184.143.505.121)	8.135.021.149.999

Piutang Jangka Panjang
Rp675.098.460

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

Nilai Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp675.098.460,00 dan Rp648.117.021,00, naik sebesar Rp26.981.439,00 atau 4,16%. Piutang Jangka Panjang tersebut seluruhnya merupakan saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Luar Negeri merupakan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara sebesar
Rp33.469.087.080

C.3.1. PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.469.087.080,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp34.185.012.104,00.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Saldo serta rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 56: Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)	33.469.087.080	34.185.012.104	(715.925.024)	(2,09%)
Total	33.469.087.080	34.185.012.104	(715.925.024)	(2,09%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat beberapa transaksi terkait Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), yaitu:

1. Terdapat koreksi nilai piutang yang sebelumnya dicatat sebesar nilai pokok ditambah dengan bunga, sesuai hasil rekonsiliasi piutang negara pada Kementerian Luar Negeri dengan KPKNL Jakarta 1 pada 14 Mei 2024 dicatat sebesar nilai pokok sesuai kejadian.
2. Pergerakan nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) akibat perubahan nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika dan beberapa valuta asing lainnya pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Tabel 57: Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo awal per 31 Desember 2023		34.185.012.104
Penambahan		
1	Piutang baru	-
2	Reklas (Piutang TP/TGR ke Aset Lainnya)	-
3	Koreksi penetapan ulang, salah perhitungan dll	-
4	Reklas Piutang ke Bagian Jangka Panjang	-
5	Untung selisih kurs belum terealisasi	937.056.740
Pengurangan		
1	Cicilan/ Penyelesaian piutang	-
2	Reklas (Aset Lainnya ke Piutang TP/TGR)	-
3	Koreksi (penetapan ulang, salah perhitungan dll)	303.542.782
4	Rugi selisih kurs terealisasi	313.804.081
5	Rugi selisih kurs belum terealisasi	1.035.634.901
Saldo akhir potensi TP/TGR per 31 Desember 2024		33.469.087.080

Penyajian Piutang Ganti Rugi dihitung berdasarkan jangka waktu jatuh tempo piutang, maksimal 24 bulan untuk Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Nilai yang akan ditagihkan dalam waktu 12 bulan sejak Surat Ketentuan Penyelesaian (dapat berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara) dicatatkan sebagai Aset Lancar (dalam hal ini Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi) dan porsi piutang yang akan ditagihkan/jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya disajikan sebagai Aset Lainnya (dalam hal ini Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Jangka Panjang).

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, maka piutang jangka panjang yang penagihannya diserahkan

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Panitia Urusan Piutang Negara) karena macet disajikan sesuai dengan klasifikasi awal, yaitu sebagai Piutang Jangka Panjang pada kementerian yang bersangkutan dan tidak direklasifikasi sebagai Aset Lancar.

Penerapan PMK 231/PMK.05/2022 ini yang mendasari dilakukannya reklasifikasi piutang dengan kualitas macet dari yang sebelumnya telah dicatat di bagian lancar piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
-Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti Rugi
Bukan Bendahara
sebesar
(Rp32.793.988.620)*

C.3.2. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp32.793.988.620,00) dan (Rp33.536.895.083,00).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan mutasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Tabel 58: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	DEBITUR	KUALITAS	NILAI PIUTANG	%	NILAI PENYISIHAN
I	ASIA	Lancar	-	0,50 %	-
		Kurang Lancar	-	10,00 %	-
		Diragukan	-	50,00 %	-
		Macet	26.201.899.520	100,00 %	26.201.899.520
II	EROPA	Lancar	-	0,50 %	-
		Kurang Lancar	-	10,00 %	-
		Diragukan	-	50,00 %	-
		Macet	2.937.181.512	100,00 %	2.937.181.513
III	AFRIKA DAN TIMUR TENGAH	Lancar	-	0,50 %	-
		Kurang Lancar	-	10,00 %	-
		Diragukan	1.325.298.985	50,00 %	662.649.493
		Macet	2.513.880.588	100,00 %	2.513.880.588
IV	AMERIKA DAN PASIFIK	Lancar	-	0,50 %	-
		Kurang Lancar	-	10,00 %	-

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	DEBITUR	KUALITAS	NILAI PIUTANG	%	NILAI PENYISIHAN
		Diragukan	24.897.937	50,00 %	12.448.969
		Macet	465.928.537	100,00 %	465.928.537
Jumlah			33.469.087.080		32.793.988.620

Penyelesaian piutang yang dikategorikan macet dan telah dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) KPKNL Jakarta I, dilakukan melalui koordinasi intensif termasuk penyampaian surat kepada BPK RI dan PUPN KPKNL Jakarta I untuk meminta rekomendasi penghapusan piutang melalui penerbitan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PMK 128/PMK.06/2007, sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 21/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara.

Berdasarkan rekonsiliasi piutang negara pada Kementerian Luar Negeri dengan KPNL Jakarta I pada 14 Mei 2024, terdapat piutang TGR an. Sdr. RKM (KJRI Johor Bahru) yang telah mendapatkan pernyataan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai dengan surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PSBDT-06/PUPNC.10.01/2022 tanggal 22 September 2022. Berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 163/PMK. 06/2020, dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), usulan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan permohonan rekomendasi penghapusan piutang tersebut melalui surat nomor 01427/KU/06/2024/03 pada 3 Juni 2024.

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(Netto) Rp675.098.460

C.3.3. TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp675.098.460,00 dan Rp648.117.021,00.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) merupakan hasil pengurangan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024.

Tabel 59: Perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN	(%)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)	434.202.976	414.907.455	19.295.521	4,65 %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN	(%)
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara	240.895.484	233.209.566	7.685.918	3,30 %
Jumlah	675.098.460	648.117.021	26.981.439	4,16 %

Penurunan nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (*Netto*) berasal dari selisih kurs karena perubahan nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika dan beberapa valuta asing lainnya pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Aset Lainnya
Rp1.187.173.961.971

C.4. ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.187.173.961.971,00 dan Rp1.203.622.763.472,00, turun sebesar Rp16.448.801.501 atau 1,37% dari 31 Desember 2023. Aset Lainnya tersebut terdiri dari saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri, Aset Lain-lain, dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.

Rincian Aset Lainnya per jenis aset dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 60: Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	156.068.872.428
Aset Tak Berwujud	87.389.576.973
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	31.019.944.315
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	694.448.762.957
Aset Lain-Lain	378.815.746.630
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(160.568.941.332)
Jumlah	1.187.173.961.971

Perbandingan Aset Lainnya per jenis aset per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 61: Perbandingan Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	156.068.872.428	156.068.872.428	-	- %
Aset Tak Berwujud	87.389.576.973	79.025.406.260	8.364.170.713	10,58 %
Dana Yang Dibatasi	31.019.944.315	69.287.878.219	(38.267.933.904)	(55,23%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	%
Penggunaannya				
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	694.448.762.957	672.607.878.119	21.840.884.838	3,25 %
Aset Lain-Lain	378.815.746.630	379.314.774.954	(499.028.324)	(0,13%)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(160.568.941.332)	(152.682.046.508)	(7.886.894.824)	5,17 %
Jumlah	1.187.173.961.971	1.203.622.763.472	(16.448.801.501)	(1,37%)

*Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Rp156.068.872.428*

C.4.1. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp156.068.872.428,00 dan Rp156.068.872.428,00 (tidak terdapat Mutasi Tambah/Kurang).

Mutasi nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 62: Mutasi Tambah/Kurang Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	156.068.872.428
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2024	156.068.872.428
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	156.068.872.428

Tabel 63: Rincian Tanah dan Bangunan yang dijadikan Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.428 m ²	2.428
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	6.944 m ²	156.068.870.000
Jumlah		9.372 m²	156.068.872.428

Aset Kemitraan adalah aset kerja sama yang timbul dari perjanjian antara Pemerintah dengan mitra berupa badan usaha, pihak ketiga atau investor yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Yayasan Pendidikan Daya Dutika Cenderawasih (YPDDC) adalah mitra atas penggunaan aset Kemitraan Pihak Ketiga berupa Tanah Persil milik Kementerian Luar Negeri dengan rincian aset sebagai berikut:

Tabel 64: Tanah Persil Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	NUP	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I Luas : 2.428 m2 Peruntukan : Sekolah Komplek Deplu Pondok Aren	67	2.428
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Luas : 2.827 m2 Peruntukan : SD Cendrawasih Komplek Deplu Cipete	2	50.409.651.000
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Luas : 580 m2 Peruntukan : TK Komplek Gandaria Selatan	5	8.551.773.000
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Luas : 2.374 m2 Peruntukan : SMA Komplek Gandaria Selatan	6	33.738.341.000
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Luas : 1.163 m2 Peruntukan : SD Komplek Gandaria Selatan	7	63.369.105.000
Jumlah			156.068.872.428

*Aset Tak Berwujud
Rp87.389.576.973*

C.4.2. ASET TAK BERWUJUD

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp87.389.576.973,00 dan Rp79.025.406.260,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud antara lain berupa *software* dan lisensi pada lingkup Kementerian Luar Negeri yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 65: Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN	(%)
Software	59.186.811.318	55.807.292.429	3.379.518.889	6,06 %
Lisensi	28.163.915.655	23.179.263.831	4.984.651.824	21,50 %
Aset Tak Berwujud Lainnya	38.850.000	38.850.000	-	- %
Jumlah	87.389.576.973	79.025.406.260	8.364.170.713	10,58 %

Adapun mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 66: Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	79.025.406.260
Mutasi Tambah	
Pembelian	17.217.082.404
Transfer Masuk	2.474.825.500
Hibah Masuk	715.721.500
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.539.889.104
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	198.880.000
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	(2.474.825.500)
Koreksi Pencatatan	(11.245.752.222)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(61.650.073)
Saldo per 31 Desember 2024	87.389.576.973
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(65.511.210.794)
Nilai Buku per 31 Desember 204	21.878.366.179

Mutasi Tambah

1. Pembelian sebesar Rp17.217.082.404,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, Pustik KP dan 9 (sembilan) satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri, merupakan pencatatan pengadaan Aset Tak Berwujud periode tahun anggaran berjalan.
2. Transfer Masuk sebesar Rp2.474.825.500,00 terdapat pada 11 (sebelas) satuan kerja Pusat, merupakan pemindahbukuan aset tak berwujud antar satker dalam entitas Kementerian Luar Negeri.
3. Hibah Masuk sebesar Rp715.721.500,00 terdapat pada Ditjen Protokol dan Konsuler, merupakan hibah barang dari *UN Women Indonesia* berupa Aplikasi *Chatbot* berbasis *artificial intelligence* dan kekayaan intelektual untuk mendukung Kemenlu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan perlindungan WNI di luar negeri.
4. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp1.539.889.104,00 terdapat pada Ditjen Protkons, merupakan transaksi penambahan nilai aset atas pekerjaan yang dapat dikapitalisasi tanpa melalui mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

5. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp198.880.000,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, merupakan perolehan aset yang berasal dari transaksi Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tak Berwujud.

Mutasi Kurang

1. Transfer Keluar sebesar Rp2.474.825.500,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal, merupakan pemindahbukuan aset tak berwujud antar satker dalam entitas Kementerian Luar Negeri.
2. Koreksi Pencatatan sebesar Rp11.245.752.222,00 terdapat pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pusat TIK KP, merupakan transaksi koreksi sesuai dokumen sumber kuitansi/BAST akibat kesalahan kuantitas dan/atau kodefikasi barang pada Modul Komitmen.
3. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp61.650.073,00 terdapat pada KBRI Baku dan KBRI Kairo, merupakan transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya, karena tidak lagi memenuhi definisi Aset Tak Berwujud.

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp31.019.944.315*

C.4.3. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Nilai dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, masing-masing sebesar Rp31.019.944.315,00 dan Rp69.287.878.219,00.

Dana tersebut merupakan saldo utang yang belum dapat diakui sebagai penambahan aset dan dana titipan serta dana atas pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Rincian Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 67: Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	VALUTA SETEMPAT	USD	NILAI (Rp)
1	PFK Plus dari Pembayaran Terakhir Sewa Beli Gedung KBRI Damascus	-	\$114,892.74	1.856.322.000
2	Dana Titipan Diyat KBRI Riyadh	SAR 598.855,97	-	1.814.684.533
3	Dana Titipan Diyat KJRI Jeddah	SAR 192.104,46	-	1.656.884.821
4	Sekretariat Jenderal - Pembayaran atas Pekerjaan yang belum Selesai sampai dengan akhir tahun	-	-	19.930.825.721
5	PUSTIK KP - Pembayaran atas Pekerjaan yang belum Selesai sampai dengan akhir tahun	-	-	5.540.352.400

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	URAIAN	VALUTA SETEMPAT	USD	NILAI (Rp)
6	Ditjen Protokol dan Konsuler - Pembayaran atas Pekerjaan yang belum Selesai sampai dengan akhir tahun	-	-	220.874.840
Jumlah				31.019.944.315

Dana yang dibatasi penggunaannya pada KBRI Damascus merupakan Reklasifikasi Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan PK Plus dari pembayaran terakhir sewa beli gedung sebesar Rp1.856.322.000,00. Kemudian, Dana Titipan Diyat terdapat di KBRI Riyadh sebesar Rp1.814.684.533,00 serta KJRI Jeddah sebesar Rp1.656.884.821,00. Dana atau uang titipan ini antara lain:

1. Hak para WNI yang ditransfer oleh para majikan/sponsor mereka yang selama ini menahan gajinya yang akhirnya dibayarkan setelah adanya upaya dari KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah; serta
2. Dana lainnya yang terkait dengan penyelesaian kasus WNI kurang beruntung yang ditangani oleh KBRI Riyadh.

Mengingat para WNI kurang beruntung tersebut tidak memiliki rekening pada bank setempat, maka hak mereka tersebut dititipkan terlebih dahulu di rekening Dana Titipan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Selanjutnya, setelah mereka pulang/tiba kembali di Indonesia, mereka memberitahukan nomor rekening mereka untuk dilakukan transfer oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.

Selanjutnya, Dana di Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp25.692.052.961,00 terdapat di Sekretariat Jenderal, Pustik-KP, dan Ditjen Protkons merupakan dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

*Dana Cadangan
Perwakilan RI di luar
negeri
Rp694.448.762.957*

C.4.4. DANA CADANGAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan saldo dana Kas Besi Perwakilan RI di luar negeri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, masing-masing sebesar Rp694.448.762.957,00 dan Rp672.607.878.119,00.

Tabel 68: Rincian Mutasi Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2023	672.607.878.119
Mutasi Tambah	21.840.884.838
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2024	694.448.762.957

Mutasi tambah sebesar Rp21.840.884.838,00 terjadi karena beberapa faktor seperti fluktuasi nilai kurs pelaporan selama periode Triwulan IV Tahun 2024

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

dan pengembalian Dana Cadangan Perwakilan RI.

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan saldo dana Kas Besi Perwakilan RI. Dana Cadangan Perwakilan RI disajikan berdasarkan nilai yang tercantum pada *Bank Statement* per tanggal 31 Desember 2024 masing-masing Satker Perwakilan RI di luar negeri (tidak termasuk bunga kas besi dan biaya administrasi), dan pencatatan Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri tersebut disajikan dalam akun 163211.

Dalam menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2024, Perwakilan RI menggunakan Kurs Penutup Bank Indonesia (BI) sebagai Kurs Pelaporan, sementara untuk mencatat transaksi-transaksi akrual per 31 Desember 2024 menggunakan Kurs Tengah BI per 31 Desember 2024. Kurs sebagaimana dimaksud (Kurs Tengah dan Kurs Penutup BI) terlampir dalam brafaks Kepala Biro Keuangan Nomor B-00098/KEMLU/250110.

Nilai Kas Besi di Neraca per 31 Desember 2024 tersebut termasuk pagu Kas Besi KBRI Sana'a yang dikelola oleh Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri sebesar USD370,000.00 ekuivalen Rp5.978.090.000,00 dengan kurs 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157,00. Sejak tahun 2018 KBRI Sana'a dinonaktifkan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dan pengelolaan rekening kas besi KBRI Sana'a dialihkan ke Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2021.

Berdasarkan rekening koran Kas Besi yang dibandingkan dengan pagu Kas Besi, berikut merupakan daftar Perwakilan RI yang melakukan peminjaman Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2024, yaitu:

Tabel 69: Daftar Perwakilan yang Melakukan Peminjaman Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

(dalam Rupiah)

NO	PERWAKILAN	PEMINJAMAN KAS BESI	
		NOMINAL (dalam USD)	NOMINAL (dalam Rupiah)
1	KEDUTAAN BESAR RI DI BRUSSELS	160,01	2.423.190
2	KEDUTAAN BESAR RI DI KABUL	50.000,00	757.200.000
3	KEDUTAAN BESAR RI DI TEHRAN	170.000,00	2.574.480.000
4	KEDUTAAN BESAR RI DI KYIV	100.000,00	1.514.400.000
5	KONSULAT JENDERAL RI DI JOHOR BAHRU	10.136,46	153.506.550
6	KEDUTAAN BESAR RI DI BEIRUT	100.000,00	1.514.400.000
TOTAL		430.296,47	6.516.409.740

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat perbedaan jumlah Pagu Kas Besi pada 8 (delapan) Satker Perwakilan RI yang menurut Surat Menkeu dan menurut pagu aplikasi SIMKEU, sehingga terdapat selisih sebesar USD667,601.04 dengan rincian sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

**Tabel 70: Daftar Perwakilan yang Memiliki Pagu Kas Besi Berbeda
antara SIMKEU dengan Surat Menteri Keuangan RI**

(dalam Dolar Amerika Serikat)

NO	PERWAKILAN	PAGU SESUAI SURAT MENKEU	PAGU SESUAI SIMKEU	SELISIH
1	KJRI Chicago	186.000,00	477.000,00	291.000,00
2	KBRI Dili	192.000,00	189.000,00	(3.000,00)
3	KBRI Doha	247.000,00	243.576,25	(3.423,75)
4	KBRI Havana	300.000,00	260.167,70	(39.832,30)
5	KJRI Houston	378.000,00	678.000,00	300.000,00
6	KJRI Jeddah	370.000,00	400.000,00	30.000,00
7	KBRI Lima	155.000,00	252.857,09	97.857,09
8	KBRI Lisabon	356.000,00	351.000,00	(5.000,00)
JUMLAH		2.184.000,00	2.851.601,04	667.601,04

Perbedaan selisih Pagu Kas Besi tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KJRI Chicago

Penetapan pagu Kas Besi pada KJRI Chicago didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1621/MK.03/1990 sebesar USD186,000.00 namun berdasarkan SIMKEU tercatat pagu Kas Besi sebesar USD477,000.00, dengan demikian terdapat penambahan pagu sebesar USD291,000.00, dengan penjelasan bahwa berdasarkan dokumen Daftar Rekapitulasi Keuangan bulan Oktober 1997, pagu Kas Besi KJRI Chicago telah menjadi sebesar USD477,000.00.

Saldo Kas Besi KJRI Chicago per 31 Desember 2024 menurut *Bank Statement* jumlahnya sama dengan saldo pada SIMKEU, yaitu sebesar USD477,000.00.

2. KBRI Dili

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: KMK 770/KM.3-43/SKOR/2001 dan Nomor: KMK 029/KM.3-43/SKOR/2002 total pagu Kas Besi KBRI Dili sebesar USD192,000.00, sedangkan menurut SIMKEU sebesar USD189,000.00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar USD3,000.00, dengan kronologis sebagai berikut:

Pada awal pembukaan Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia (KUKRI) di Dili pada tahun 2000, KUKRI menerima Kas Besi yang dikirim melalui dua tahap sebagai berikut:

- a. Penerimaan pertama tanggal 30 November 2001 sebesar USD91,508.82; dan
- b. Penerimaan kedua tanggal 25 Februari 2002 sebesar USD97,942.50.

Maka, jumlah Kas Besi yang dicatat dalam SIMKEU sesuai dengan total penerimaan sebesar USD189,451.34.

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Nomor 975/KU/85/02 tanggal 9 September 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Deposito Kas Besi pada Perwakilan RI di luar negeri, pada tanggal 24 Juni 2002 dilaksanakan pemindahbukuan Kas Besi dari bentuk rekening giro ke rekening deposito sebesar USD189,000.00. Jumlah pagu deposito Kas Besi dibulatkan dari jumlah yang diterima mengingat KBRI Dili belum mengetahui secara detail jumlah pagu sebagaimana surat Menteri Keuangan. Selisih sebesar USD451.34 telah disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan PNBPNon Fungsional.

Saldo Kas Besi KBRI Dili per 31 Desember 2024 menurut *Bank Statement* yaitu sebesar USD189,012.04 di mana selisih sebesar USD12.04 merupakan bunga kas besi.

3. KBRI Doha

Penetapan pagu Kas Besi pada KBRI Doha didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor: 770/KM.3-43/SKOR/2001 dan KMK 029/KM.3-43/SKOR/2002 dengan jumlah sebesar USD247,000.00, namun berdasarkan SIMKEU tercatat pagu Kas Besi adalah sebesar USD243,576.25, sehingga terdapat selisih USD3,423.75 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penerimaan dana Kas Besi pertama pada tanggal 8 November 2001 sebesar USD117,722.28.
- b. Penerimaan dana Kas Besi kedua pada tanggal 27 Februari 2002 sebesar USD125,998.97 sehingga total dana Kas Besi yang diterima KBRI Doha sebesar USD243,721.25.
- c. Jumlah Kas Besi yang tercatat dalam SIMKEU adalah sebesar USD243,576.25, sehingga terdapat selisih sebesar USD145.00 yang merupakan selisih antara penerimaan transfer pengembalian dana Kas Besi (*vide* berita Nomor RR-019/DOHA/III/2010 tanggal 22 Maret 2010).
- d. Pada *Bank Statement* KBRI Doha posisi 31 Desember 2024 tercatat sebesar USD243,815.33 di mana selisih sebesar USD239.08 merupakan bunga kas besi.

4. KBRI Havana

Dasar penetapan Kas Besi pada KBRI Havana berupa SK Kepala Perwakilan RI Nomor: S.P./77/V/K/HCB/1998 dengan jumlah USD260,167.70; dan dana Kas Besi yang tercatat dalam SIMKEU sebesar USD260,167.70 sesuai dengan jumlah yang ditentukan pada SK Kepri KBRI Havana.

Sementara itu, menurut Surat Menteri Keuangan Nomor: S-2.18/424/0182 dan Nomor: S.778/MK.03/1985, pagu Kas Besi KBRI Havana adalah sebesar USD300,000.00.

Atas selisih kurang sebesar USD39,832.30 tersebut KBRI Havana telah memberikan penjelasan kronologis saldo Kas Besi sesuai bukti penerimaan awal saldo Kas Besi sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 31 Januari 1996, KBRI Havana menerima *Bank Statement* dari BNI Los Angeles yang menginformasikan bahwa Bank menerima dana Kas Besi sebesar USD260,167.70 pada rekening KBRI No. 302620 US-D3185-01.
- b. Pada tanggal 20 Maret 1996 telah dibukukan oleh Perwakilan dengan Tanda Bukti Penerimaan T-IV sebesar USD260,167.70.
- c. Saldo Kas Besi KBRI Havana sesuai *Bank Statement* per tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD260,194.22 di mana USD26.52 merupakan bunga kas besi.

5. KJRI Houston

Dasar Penetapan pagu Kas Besi KJRI Houston adalah Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1621/MK.03/1990 tanggal 11 Desember 1990 sebesar USD378,000.00; namun berdasarkan catatan SIMKEU jumlahnya adalah sebesar USD678,000.00 dengan demikian terdapat perbedaan sebesar USD300,000.00 yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 1 Agustus 1996 dana Kas Besi Perwakilan masih sesuai dengan jumlah pada SK Menkeu yaitu sebesar USD378,000.00.
- b. Pada tanggal 27 September 1996 terdapat pengiriman tambahan dana Kas Besi dari Pusat ke rekening KJRI Houston di Bank Dagang Negara Cayman Branch sebesar USD300,000.00.
- c. Hingga saat ini belum didapatkan bukti-bukti komunikasi melalui surat, nota, kawat, ataupun brafaks mengenai latar belakang Pusat mentransfer dana sebesar USD300,000.00 tersebut, sehingga total Kas Besi KJRI Houston adalah sebesar USD678,000.00.
- d. Saldo Kas Besi KBRI Houston sesuai *Bank Statement* per tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD678,046.50 di mana USD46.50 merupakan bunga kas besi.

6. KJRI Jeddah

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1621/MK.03/1990, pagu Kas Besi KJRI Jeddah ditetapkan sejumlah USD370,000.00, namun dalam pencatatan SIMKEU sebesar USD400,000.00, sehingga terdapat selisih lebih sebesar USD30,000.00.

Kronologis penerimaan dana Kas Besi KJRI Jeddah (Brafaks Penjelasan dari KJRI Jeddah No: R-00039/Jeddah/160202) sebagai berikut:

- a. Penerimaan Tahap I sebesar USD200,000.00.

- b. Pada tanggal 7 Februari 1991 terdapat transfer masuk sebesar USD200,000.00 dengan detail uraian “Penambahan Pagu Kas.”
- c. Pada tanggal 9 Februari 1991 berdasarkan bukti pengiriman tersebut, Bendaharawan KJRI Jeddah melakukan pembukuan pada formulir 6 sebesar USD200,000.00 sehingga saldo Kas Besi berubah menjadi USD400,000.00.
- d. Saldo Kas Besi sesuai *Bank Statement* per 31 Desember 2024 sebesar USD400,000.00.

7. KBRI Lima

Penetapan pagu Kas Besi pada KBRI Lima didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor: 770/KM.3-43/SKOR/2001 dan KMK 029/KM.3-43/SKOR/2002 dengan jumlah sebesar USD155,000.00.

Adapun kronologis Kas Besi KBRI Lima menjadi sebesar USD252,857.09 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dana yang diterima di Perwakilan sejumlah USD152,942.49 yang dikirimkan dalam dua tahap yaitu penerimaan tahap pertama sebesar USD73,874.31 dan penerimaan tahap kedua sebesar USD79,068.18 (Berdasarkan Brafaks Penjelasan KBRI Lima No: R-00073/Lima/160822).
- b. Pada bulan Agustus 2002, atas kebijakan pengelola keuangan dan persetujuan Keppri dilakukan pembulatan dengan mengambil dari dana rutin Perwakilan sebesar USD57.51, sehingga jumlah Kas Besi menjadi USD153,000.00.
- c. Pada Oktober 2004, Perwakilan mendapat pengiriman dari Bendaharawan Rutin Kesetjenan Deplu sebesar USD99,754.65 sebagai penerimaan tambahan dana Kas Besi, sehingga jumlahnya menjadi USD252,754.65.
- d. Dana sebesar USD102.44 adalah bunga bank selama kurun 2004-2016, sehingga jumlah dana Kas Besi Perwakilan sesuai dengan yang ada pada SIMKEU, yaitu sebesar USD252,857.09.

Saldo Kas Besi KBRI Lima sesuai *Bank Statement* per 31 Desember 2024, adalah sebesar USD252,878.57 di mana USD21.48 merupakan bunga kas besi.

8. KBRI Lisabon

Penetapan pagu Kas Besi pada KBRI Lisabon didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor: KMK 770/KM.3-43/SKOR/2001 dan KMK 029/KM.3-43/SKOR/2002 dengan jumlah sebesar USD356,000.00. Namun pencatatan pada SIMKEU *Real Time* sebesar USD351,000.00, sehingga terdapat selisih sebesar USD5,000.00.

Perbedaan selisih tersebut dijelaskan oleh KBRI Lisabon sebagai berikut:

Penerimaan pengiriman Dana Kas Besi yang nilainya lebih sedikit USD4,870.86 akibat rugi selisih kurs pada saat pengiriman dana Kas Besi yang dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut:

- a. Perwakilan menerima dana tahap pertama sebesar USD169,537.39 dan tahap kedua sebesar USD181,591.75 (Rp1.857.786.000,00 dengan kurs USD1 = Rp10.230,00 sehingga diterima USD181,601.75 dengan biaya administrasi USD10.00). Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: KMK 029/KM.3-43/SKOR/2002, dana Kas Besi untuk Perwakilan sebesar Rp1.857.786.000,00 dengan equivalen USD178,000.00. Jumlah tersebut didapat atas dasar kurs BI pada tanggal 16 Januari 2002 yaitu USD1 = Rp10.437,00. Namun pengiriman dana tersebut dilakukan pada bulan Februari 2002 dimana seperti yang tercantum pada bukti penerimaan dana Kas Besi yang didapat dari Bank, kurs transfer yang dipergunakan pada saat itu sudah berbeda dari pada kurs yang dipergunakan dalam surat Menteri Keuangan.
- b. Total penerimaan dana Kas Besi adalah sebesar USD351,129.14 dan berdasarkan informasi dari operator SIMKEU KBRI Lisabon, jumlah penerimaan dana Kas Besi sebesar USD351,129.14 tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam SIMKEU yaitu sebesar USD351,000.00 dikarenakan selisih sejumlah USD129.14 telah disetorkan ke Pusat sebagai PNBP.
- c. Saldo Kas Besi KBRI Lisabon sesuai *Bank Statement* tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD351,310.12 di mana terdapat selisih sebesar USD310.12 merupakan bunga kas besi dan biaya administrasi.

Sebagai informasi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan koordinasi baik secara internal maupun dengan Kementerian Keuangan untuk memperoleh data dukung terkait selisih pagu kas besi pada catatan Kementerian Keuangan dengan Aplikasi SIMKEU *Real Time*. Berdasarkan koordinasi internal, beberapa upaya yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri antara lain mencoba mencari data dukung atas Perwakilan RI yang memiliki selisih pagu kas besi, berkoordinasi dengan Arsiparis untuk memperoleh data dukung di gudang arsip, dan melakukan rapat koordinasi dengan unit-unit terkait di Kementerian Luar Negeri. Namun demikian, Kementerian Luar Negeri sampai saat ini belum menemukan data dukung untuk perbedaan pagu kas besi di Perwakilan RI tersebut.

Dengan kendala tidak ditemukannya data dukung dimaksud, Kementerian Luar Negeri kemudian menyampaikan Surat ke Kementerian Keuangan No. 01029/KU/03/2018/25/03 tanggal 29 Maret 2019 tentang Usulan Penetapan Pagu Kas Besi dan Realokasi Pagu Kas Besi pada Beberapa Perwakilan RI di luar negeri. Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi secara informal ke Kementerian Keuangan terkait hal ini, namun masukan yang diberikan adalah agar Kementerian Luar Negeri untuk terus mencari data dukung sumber

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

perbedaan pagu kas besi tersebut, sementara itu, usulan penetapan pagu kas besi baru dan realokasi pagu kas besi belum mendapatkan jawaban secara formal.

Kementerian Luar Negeri akan kembali menyampaikan usul penetapan pagu kas besi baru dan realokasi pagu kas besi pada Perwakilan RI yang memiliki selisih pagu kas besi sekiranya data dukung tidak dapat ditemukan.

Diinformasikan pula daftar Perwakilan RI yang tidak mempunyai dana cadangan Perwakilan RI di luar negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 71: Daftar Perwakilan yang Tidak Mempunyai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

NO	PERWAKILAN
1	KEDUTAAN BESAR RI DI SARAJEVO
2	KEDUTAAN BESAR RI DI ZAGREB
3	KEDUTAAN BESAR RI DI MANAMA
4	KEDUTAAN BESAR RI DI MAPUTO
5	KEDUTAAN BESAR RI DI PANAMA
6	KEDUTAAN BESAR RI DI MUSCAT
7	KONSULAT RI DI TAWAU
8	KEDUTAAN BESAR RI DI ASTANA
9	KEDUTAAN BESAR RI DI BAKU
10	KEDUTAAN BESAR RI DI QUITO
11	KEDUTAAN BESAR RI DI YAOUNDE
12	KONSULAT JENDERAL RI DI SHANGHAI
13	KONSULAT JENDERAL RI DI ISTANBUL

Perwakilan RI di atas tidak mendapatkan alokasi Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri atau Kas Besi dikarenakan tidak adanya alokasi Kas Besi oleh Kementerian Keuangan.

Rincian saldo Dana Cadangan Perwakilan RI di luar negeri atau Kas Besi dilampirkan pada Laporan Keuangan.

Aset Lain-Lain
Rp378.815.746.630

C.4.5. ASET LAIN-LAIN

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp378.815.746.630,00 dan Rp379.314.774.954,00. Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 terdiri dari Deposit Sewa Gedung, PK Minus yang tercatat sebagai Aset Lain-lain, PK Atnis, PK Lain-lain, PK Plus, dan Aset Tetap dan Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional.

Tabel 72: Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	379.314.774.954
Mutasi Tambah	15.997.863.453
Mutasi Kurang	(16.496.891.777)
Saldo per 31 Desember 2024	378.815.746.630

Perbandingan rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 73: Perbandingan Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	%
Aset Lain-Lain				
PFK Minus	681.570.765	3.305.899.901	(2.624.329.136)	(79,38%)
Potensi TP/TGR	2.654.617.420	1.184.893.790	1.469.723.630	124,04 %
Reklas Atase Teknis	-	183.647.369	(183.647.369)	(100,00%)
PFK Lain-Lain	-	559.120.145	(559.120.145)	(100,00%)
PFK Plus	1.652.828.056	1.565.267.771	87.560.285	5,59 %
Deposit Sewa	16.514.119.340	26.159.088.138	(9.644.968.798)	(36,87%)
Deposit FSR	14.109.072.076	1.770.770.350	12.338.301.726	696,78 %
Reklas Potensi TP/TGR	2.102.277.812	-	2.102.277.812	- %
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	325.501.731.137	328.833.286.381	(3.331.555.244)	(1,01%)
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	15.599.530.024	15.752.801.109	(153.271.085)	(0,97%)
Jumlah	378.815.746.630	379.314.774.954	(499.028.324)	(0,13%)

PK Minus yang tercatat sebagai Aset Lain-lain merupakan PK Minus Tahun Anggaran Yang Lalu dan Tahun Berjalan yang belum dapat diselesaikan di 31 Desember 2024 sebesar Rp681.570.765,00.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

PK Lain-lain yang tercatat sebagai Aset Lain-lain merupakan transaksi belanja tahun anggaran yang lalu yang sudah dipertanggungjawabkan, tetapi belum dibayarkan ke pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.654.617.420,00.

PK Plus yang tercatat sebagai Aset Lain-lain merupakan sisa Dana Indover yang belum diterima oleh KBRI Den Haag sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.652.828.056,00, dan Selisih Kas di BP atas pengeluaran yang tidak dapat dibukukan berdasarkan Laporan Hasil Penelaahan dan Konfirmasi atas BAPK Periode Desember 2022 pada KBRI Dhaka sebesar Rp111.715.799,00.

Deposit Sewa dan Deposit FSR yang tercatat sebagai Aset Lain-lain merupakan dana yang dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai jaminan atas kontrak sewa gedung dan sewa rumah *Home Staff* yang akan dibayarkan kembali sesuai dengan periode kontrak yang telah ditetapkan.

Aset Lain-lain atas Reklasifikasi Potensi TP/TGR Perwakilan sebesar Rp2.102.277.812,00 terdapat pada Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri sebesar Rp1.183.427.479,00, KJRI New York sebesar Rp145.080.489,00, dan KBRI Astana sebesar Rp773.769.844,00.

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp160.568.941.332)*

C.4.6. AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya adalah merupakan Penyusutan Aset Lainnya yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp160.568.941.332,00) dan (Rp152.682.046.508,00).

Perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 74: Perbandingan Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NO	ASET LAINNYA	AKM.PENYUSUTAN/ AMORTISASI TAHUN 2024	AKM.PENYUSUTAN/A MORTISASI TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	(47.880.716.420,00)	(42.097.010.668,00)	13,74 %
2	Lisensi	(17.630.494.374,00)	(15.063.335.400,00)	17,04 %
	Jumlah	(65.511.210.794,00)	(57.160.346.068,00)	14,61 %
B	Aset Lainnya			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	- %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	ASET LAINNYA	AKM.PENYUSUTAN/ AMORTISASI TAHUN 2024	AKM.PENYUSUTAN/A MORTISASI TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(79.458.200.514,00)	(79.889.748.023,00)	(0,54%)
3	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(15.599.530.024,00)	(15.631.952.417,00)	(0,21%)
Jumlah		(95.057.730.538,00)	(95.521.700.440,00)	(0,49%)
Total		(160.568.941.332,00)	(152.682.046.508,00)	5,17 %

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 75: Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKM.PENYUSUTA N/AMORTISASI	NILAI BUKU
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	59.186.811.318	(47.880.716.420)	11.306.094.898
2	Lisensi	28.163.915.655	(17.630.494.374)	10.533.421.281
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	38.850.000	-	38.850.000
Jumlah		87.389.576.973	(65.511.210.794)	21.878.366.179
B	Aset Lainnya			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	156.068.872.428	-	156.068.872.428
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	325.501.731.137	(79.458.200.514)	246.043.530.623
3	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	15.599.530.024	(15.599.530.024)	-
Jumlah		497.170.133.589	(95.057.730.538)	402.112.403.051
Total		584.559.710.562	(160.568.941.332)	423.990.769.230

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp322.297.762.953

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp322.297.762.953,00 dan Rp342.055.133.499,00, turun sebesar Rp 19.757.370.546,00 atau 5,78%.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Yang Belum Ditagihkan, Hibah

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Yang Belum Disahkan, Pendapatan Diterima di Muka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 berikut:

Tabel 76: Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	60.400.813.192	93.195.203.923	(32.794.390.731)	(35,19%)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	128.938.661.211	129.164.861.024	(226.199.813)	(0,18%)
Pendapatan Diterima Di Muka	475.797.550	1.107.191.389	(631.393.839)	(57,03%)
Uang Muka dari KPPN	132.479.164.274	118.552.365.738	13.926.798.536	11,75 %
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.326.726	35.511.425	(32.184.699)	(90,63%)
Jumlah	322.297.762.953	342.055.133.499	(19.757.370.546)	(5,78%)

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp60.400.813.192

C.5.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp60.400.813.192,00 dan Rp93.195.203.923,00, turun sebesar Rp32.794.390.731,00 atau 35,19%.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Utang kepada Pihak Ketiga di Kementerian Luar Negeri meliputi Belanja Akrual, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang, Dana Pihak Ketiga, dan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 77: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
--------	------------------	------------------	--------------	----------------

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	14.376.083.714	519.588.765	13.856.494.949	2.666,82 %
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	10.071.452.267	40.950.633.779	(30.879.181.512)	(75,41%)
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	1.689.979.571	(1.689.979.571)	(100,00%)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	32.093.603.725	45.390.747.085	(13.297.143.360)	(29,29%)
Dana Pihak Ketiga	3.859.673.486	4.644.254.723	(784.581.237)	(16,89%)
Total	60.400.813.192	93.195.203.923	(32.794.390.731)	(35,19%)

Keterangan:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan pada lampiran Laporan Keuangan.

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Terdapat kenaikan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar 2.666,82% disebabkan oleh adanya pembayaran belanja pegawai akrual terkait dengan gaji induk, tunjangan kinerja, uang makan, dan gaji *Local Staff* tahun anggaran 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025, pada Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri dan 8 Perwakilan RI di luar negeri.

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar untuk mencatat utang karena belanja yang telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Akun ini terdiri atas beban-beban operasional kantor antara lain, langganan listrik, telepon, asuransi kendaraan dinas, dan pemeliharaan peralatan dan mesin serta gedung.

3. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Terdapat penurunan Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar sebesar (100,00%) disebabkan oleh adanya merupakan angka bentukan dari jurnal koreksi BPK atas KDP Gedung Pancasila yang merupakan selisih progres pekerjaan dengan pembayaran per 31 Desember 2024.

4. Utang Kepada Pihak Ketiga lainnya

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebagian besar disebabkan oleh adanya dana yang ditampung pada RPATA atas pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 pada Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri, PUSTIK KP, dan Direktorat Jenderal Protokol Konsuler.

5. Dana Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebagian besar terdiri atas PNBPN mengendap yang belum teridentifikasi, dana diyat, dan penerimaan

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

pengembalian biaya pembatalan pekerjaan pemeliharaan.

*Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang
sebesar
Rp128.938.661.211*

C.5.2. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp128.938.661.211,00 dan Rp129.164.861.024,00, turun sebesar Rp226.199.813,00 atau 0,18%.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang di Kementerian Luar Negeri berupa pembelian (cicilan) tanah gedung/bangunan di Perwakilan RI di luar negeri.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terdapat pada Satker Sekretariat Jenderal yang merupakan pengadaan Gedung dan bangunan KBRI London, KJRI Johor Bahru, KJRI Kuching, KRI Tawau, KBRI Phnom Penh, KBRI Warsawa, dan KJRI Chicago.

Pada 31 Desember 2024 telah dilakukan reklasifikasi pembayaran cicilan utang pihak ketiga (bank) dalam rangka pembelian dan renovasi Gedung Perwakilan RI di luar negeri yang akan dibayarkan sepanjang dalam dua termin pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78: Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
1	Pembelian Gedung KBRI London	58.030.870.354	58.030.870.354	-	- %
2	Pembelian Gedung KJRI Chicago	9.629.228.966	9.629.228.966	-	- %
3	Pembelian Gedung KRI Tawau	4.639.912.883	4.866.112.696	(226.199.813)	(4,65%)
4	Pembelian Gedung KJRI Johor Bahru	10.875.845.422	10.875.845.422	-	- %
5	Pembelian Gedung KJRI Kuching	8.303.639.024	8.303.639.024	-	- %
6	Pembelian Gedung KBRI Warsawa	5.421.763.182	5.421.763.182	-	- %
7	Pembelian Gedung KBRI Phnom Penh	32.037.401.380	32.037.401.380	-	- %
Total		128.938.661.211	129.164.861.024	(226.199.813)	(0,18%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Pendapatan Diterima
di Muka
Rp475.797.550

C.5.3. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp475.797.550,00 dan Rp1.107.191.389,00, turun sebesar Rp631.393.839,00 atau 57,03%.

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNPB yang telah diterima, tetapi belum menjadi hak Kementerian Luar Negeri sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima di Muka berupa pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan atas:

- a. Sewa ruangan gedung kantor Kementerian Luar Negeri jangka panjang sejak tahun 2020 hingga 2025 oleh Bank BNI, Mandiri dan BRI.
- b. Penggunaan Kantin Diplomasi selama 3 (tiga) tahun sejak 2021 s.d. 2024.
- c. Sewa sebagian tanah sebagai Pusat Jajanan Kemlu oleh Nelson C. Simatupang (Kopi Diplomasi), Kurniawati (Cafeteria Diplomasi), Elvis Napitupulu (Caraka Kopi), dan Bakmi Aseng.
- d. Sewa Sebagian bangunan di Ruang Tunggu Supir (RTS) oleh Hamidin, Tetty Herawati, Kurniawati, dan Nur Kamal.
- e. Pendapatan jeda sewa dari YPDDC dan Bakmi Aseng.
- f. Sewa enam belas *tenant* Kantin Diplomasi.

Tabel 79: Perbandingan Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Diterima Dimuka	475.797.550	1.107.191.389	(631.393.839)	(57,03%)
Total	475.797.550	1.107.191.389	(631.393.839)	(57,03%)

Tabel 80: Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	1.107.191.389
Mutasi tambah	
1. Penambahan Perjanjian Sewa	-
a. Pendapatan Ruang Bank (BRI)	-
b. Pendapatan Warung Jajanan (Kopi diplomasi)	-
2. Reklas	-
3. Koreksi penetapan, salah perhitungan	-
4. Reklas	-
Jumlah	-
Mutasi Kurang	
1. Pendapatan terealisasi	-

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

a. Pendapatan Ruang Bank (BNI)	124.000.000
b. Pendapatan Ruang Bank (Mandiri)	71.700.000
c. Pendapatan Ruang Bank (BRI)	77.844.500
e. Pendapatan Kantin Diplomasi	48.733.667
f. Pendapatan Kopi Diplomasi	4.603.000
g. Pendapatan Cafeteria Diplomasi	3.533.000
h. Pendapatan Caraka Kopi	2.500.000
i. Pendapatan Kios Jajanan Hamidin	1.250.000
j. Pendapatan Kios Jajanan Tetty Herawati	1.250.000
k. Pendapatan Kios Jajanan Kurniawati	5.799.370
l. Pendapatan Kios Jajanan Nur Kamal	3.362.500
m. Pendapatan Kios Jajanan Bakmi Aseng	4.672.875
n. Pendapatan Jeda sewa tanah yang dimanfaatkan oleh YPDDC	250.358.350
o. Pendapatan Jeda sewa tanah Kios Jajanan Mie Ayam Aseng	5.687.500
p. Pendapatan enam belas tenant Kantin Diplomasi	26.099.077
2. Reklas	-
3. Koreksi penetapan ulang atas jurnal koreksi BPK atas sewa Kantin Diplomasi oleh PT. Provinces	
Jumlah	631.393.839
Saldo per 31 Desember 2024	475.797.550

*Uang Muka dari KPPN
Rp132.479.164.274*

C.5.4. UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp132.479.164.274,00 dan Rp118.552.365.738,00, naik sebesar Rp13.926.798.536,00 atau 11,75%.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai Uang Muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp3.326.726*

C.5.5. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.326.726,00 dan Rp35.511.425,00, turun sebesar Rp(32.184.699,00) atau (90,63%).

Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa Utang Potongan Pajak (PPh 21 dan PPh 22) oleh Bendahara Pengeluaran di 2 (dua) Perwakilan RI di Luar Negeri yang belum disetor ke rekening Kas Negara, yaitu KBRI Bogota dan KBRI Muscat.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 81: Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.326.726	35.511.425	(32.184.699)	(90,63%)
Jumlah	3.326.726	35.511.425	(32.184.699)	(90,63%)

Keterangan:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dijelaskan pada lampiran Laporan Keuangan.

Kewajiban Jangka Panjang
Rp670.822.370.149

C.6. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp670.822.370.149,00 dan Rp812.174.395.025,00, turun sebesar Rp141.352.024.876,00 atau 17,40%.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
Rp670.822.370.149

C.6.1. UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI LAINNYA

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp670.822.370.149,00 dan Rp812.174.395.025,00, turun sebesar Rp141.352.024.876,00 atau 17,40%.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya merupakan Utang Jangka Panjang pembelian tanah dan gedung Perwakilan RI di luar negeri. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada masing-masing Satuan Kerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 82: Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Pembelian Gedung KBRI London	243.983.793.003	302.014.663.357	(58.030.870.354)	(19,21%)
Pembelian Gedung KJRI Chicago	71.848.446.219	81.477.675.186	(9.629.228.967)	(11,82%)
Pembelian Gedung KRI Tawau	30.021.359.286	34.887.471.981	(4.866.112.695)	(13,95%)
Pembelian Gedung KJRI Johor Bahru	55.809.592.423	66.685.437.845	(10.875.845.422)	(16,31%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

KETERANGAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Pembelian Gedung KBRI Warsawa	28.901.187.015	46.736.313.862	(17.835.126.847)	(38,16%)
Pembelian Gedung KBRI Phnom Penh	310.538.019.025	342.575.420.405	(32.037.401.380)	(9,35%)
Pembelian Gedung KJRI Kuching	58.658.634.389	66.962.273.413	(8.303.639.024)	(12,40%)
Reklasifikasi Utang Jangka Panjang pada bagian lancar utang jangka Panjang TA 2024 Perwakilan RI	(128.938.661.211)	(129.164.861.024)	226.199.813	(0,18%)
JUMLAH	670.822.370.149	812.174.395.025	(141.352.024.876)	(17,40%)

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri digunakan untuk membiayai pembelian 7 (tujuh) gedung Perwakilan, sebagai berikut:

1. Gedung Kantor KBRI London
Pembelian tertuang dalam *contract for sale and purchase of Trevelyan House*, 30 Great Peter Street, London SW1P 2 HW tanggal 15 Agustus 2016. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menandatangani “Perjanjian Pinjaman Maksimum sebesar Rp3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar rupiah)”, dengan Nomor SJ/PL/228/08/2016/21 dan DIR/075.2/PKS dan kontrak pengadaan jasa perbankan dalam rangka penyediaan gedung KBRI London Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2016 Nomor SJ/PL/227/08/2016/21 dan DIR/075.1/PKS tanggal 05 Agustus 2016. Perjanjian tersebut sudah mengalami perubahan sebagaimana diubah dengan “Perubahan Perjanjian Pinjaman” Nomor SJ/PL/303/11/2016/21, dan (1) DIR/075.2/PKS dengan jumlah pokok pinjaman Rp841.447.620.134,00 dan Perubahan Kontrak Pengadaan Jasa Perbankan dalam rangka penyediaan gedung KBRI London Kementerian Luar Negeri Nomor SJ/PL/302/11/2016/21 dan (2) DIR/075.1/PKS pada tanggal 02 November 2016. Kewajiban Kemenlu dalam melakukan pembayaran pokok cicilan pada TA 2024 adalah sebesar Rp58.030.870.354,00.

2. Gedung Kantor KJRI Chicago
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani “Perjanjian Pinjaman Maksimum sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah)”, dengan Nomor 0020/Perjanjian/PL-BMB/01/2018 dan Nomor CRO.KP/002/PTK/2018 tanggal 10 Januari 2018. Berdasarkan surat Bank Mandiri Nomor HBK.GI1/060/2019 tanggal 10 Januari 2019

disampaikan bahwa penarikan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) untuk Pengadaan Gedung KJRI Chicago telah mencapai maksimal sehingga tidak terdapat kelonggaran Tarik atas fasilitas PTK tersebut, maka total pokok pinjaman pengadaan Gedung KJRI Chicago adalah sebesar Rp155.000.000.000,00. Kewajiban Kemenlu dalam melakukan pembayaran pokok cicilan pada TA 2024 adalah sebesar Rp9.629.228.967,00.

3. Gedung Kantor KRI Tawau
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menandatangani “Perjanjian Pinjaman Maksimum sebesar Rp69.704.251.873,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)” dalam rangka Pengadaan Gedung Siap Pakai KRI Tawau dengan Nomor 0045/Perjanjian/PL-BMB/02/2018 dan Nomor 007/BIN/PK/2018 tanggal 22 Februari 2018. Adapun total pinjaman pengadaan Gedung KRI Tawau sudah mencapai maksimal plafon yaitu sebesar Rp69.704.251.873,00. Kewajiban Kemenlu dalam melakukan pembayaran pokok cicilan pada TA 2024 adalah sebesar Rp4.866.112.695,00.
4. Gedung Kantor KJRI Johor Bahru
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menandatangani “Perjanjian Pinjaman Maksimum sebesar Rp139.600.981.886,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)” dalam rangka Pengadaan Gedung Siap Pakai Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru dengan Nomor 0153/Perjanjian/PL-BMB/05/2018 dan Nomor 033/BIN/PK- KMK/2018 tanggal 9 Mei 2018. Adapun total pinjaman pengadaan Gedung KJRI Johor Bahru sudah mencapai maksimal plafon yaitu sebesar Rp139.600.981.886,00. Kewajiban Kemenlu dalam melakukan pembayaran pokok cicilan pada TA 2024 adalah sebesar Rp10.875.845.422,00.
5. Gedung Kantor KBRI Warsawa
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menandatangani “Perjanjian Pinjaman Maksimum sebesar Rp108.013.846.310,00 (seratus delapan miliar tiga belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah)” dalam rangka Pengadaan Gedung Siap Pakai Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa dengan Nomor CRO.KP/395/PTK/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor HBK.GI1/1289/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Percepatan Pembayaran Cicilan Pokok Pengadaan Gedung KBRI Warsawa Tahun Anggaran 2019. Kewajiban Kemenlu dalam melakukan pembayaran pokok cicilan pada TA 2024 adalah sebesar Rp17.835.126.847,00.

6. Gedung Kantor KBRI Phnom Penh
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menandatangani “Perjanjian Pinjaman Maksimum sebesar Rp478.500.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah)” dalam rangka Pengadaan Gedung Siap Pakai Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh dengan Nomor 012/BIN/PT-KMK/2019 tanggal 17 Desember 2019. Namun demikian, total pinjaman pengadaan Gedung KBRI Phnom Penh adalah sebesar Rp464.542.320.000,00. Kewajiban Kemenlu dalam melakukan pembayaran pokok cicilan pada TA 2024 adalah sebesar Rp32.037.401.380,00.

7. Gedung Kantor KJRI Kuching
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menandatangani “Perjanjian Pinjaman Maksimum sebesar Rp198.583.673.393,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)” dalam rangka Pengadaan Gedung Siap Pakai Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching dengan Nomor 001/BIN/PK-KMK/2019 tanggal 28 Maret 2019. Adapun total pinjaman pengadaan Gedung KJRI Kuching sebesar Rp124.554.585.372,00, sehingga masih terdapat kelonggaran penarikan sebesar Rp74.029.088.021,00. Kewajiban Kemenlu dalam melakukan pembayaran pokok cicilan pada TA 2024 adalah sebesar Rp8.303.639.024,00.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan KBRI London, KJRI Chicago, KRI Tawau, KJRI Johor Bahru, KBRI Warsawa, KBRI Phnom Penh, dan KJRI Kuching sebagaimana diamanatkan dalam PMK 53/PMK.02/2015 tentang Penganggaran Penyediaan Tanah/Gedung/Bangunan Perwakilan RI di Luar Negeri.

Skedul utang per masing-masing perjanjian utang dan tingkat bunga JIBOR dijelaskan pada lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas
Rp 52.727.665.951.788

C.7. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp52.727.665.951.788,00 dan Rp52.720.930.123.336,00.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
POS-POS
LAPORAN OPERASIONAL**

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Penjelasan atas
Pos-Pos Laporan
Operasional

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebesar
Rp445.569.421.683

D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Luar Negeri untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp445.569.421.683,00 dan Rp454.791.664.833,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	14.708.800	(14.708.800)	(100,00%)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	2.848.622.093	3.621.941.460	(773.319.367)	(21,35%)
Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	94.971.417.183	83.146.635.359	11.824.781.824	14,22 %
Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri	160.113.041.242	173.843.574.962	(13.730.533.720)	(7,90%)
Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	110.742.936.040	112.426.811.807	(1.683.875.767)	(1,50%)
Pengembalian Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	-	(275.000)	275.000	(100,00%)
Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri	23.770.127.428	49.637.941.516	(25.867.814.088)	(52,11%)
Pendapatan Administrasi di Luar Negeri	45.212.418.089	30.516.156.142	14.696.261.947	48,16 %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.688.505.695	1.303.082.693	385.423.002	29,58 %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerja Pemerintah	75.200.756	7.864.865	67.335.891	856,16 %
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	6.147.153.157	273.222.229	5.873.930.928	2.149,87 %
Total Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	445.569.421.683	454.791.664.833	(9.222.243.150)	(2,03%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp445.569.421.683,00. Pada Laporan Operasional periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat kekeliruan penggunaan akun pendapatan untuk setoran Satker Sekretariat Jenderal sehingga terdapat akun Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp14.708.800,00 yang merupakan pendapatan atas pemusnahan arsip inaktif Kementerian Luar Negeri Tahun 2022, sementara pada Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sudah tidak terdapat kekeliruan penggunaan akun tersebut.

Salah satu komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan sewa bagian gedung, kantin dan rumah dinas pada 9 (sembilan) satuan kerja di Kementerian Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
1	403247	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	1.152.139.832
2	403290	KEDUTAAN BESAR RI DI BANGKOK	20.558.456
3	403448	KEDUTAAN BESAR RI DI DAR ES SALAM	17.436.000
4	403454	KONSULAT JENDERAL DAVAO CITY	11.701.911
5	403598	KEDUTAAN BESAR RI DI LONDON	495.293.552
6	403706	PERUTUSAN TETAP RI PADA PBB DAN OI LAINNYA DI NEW YORK	665.247.580
7	403780	KEDUTAAN BESAR RI DI SINGAPURA	402.480.322
8	576605	KONSULAT JENDERAL RI DI JOHOR BAHRU	42.105.480
9	666965	KONSULAT JENDERAL RI DI KUCHING	41.658.960
TOTAL PENDAPATAN SEWA TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN			2.848.622.093

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar 21,35% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya pengguna fasilitas sewa sepanjang Tahun 2024.

Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri sebesar Rp94.971.417.183,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerbitan visa oleh Perwakilan RI di luar negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Pendapatan visa ini mengalami kenaikan sebesar 14,22% bila dibandingkan dengan pendapatan visa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp83.146.635.359,00. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kondisi global dan kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan

investasi serta kunjungan kepariwisataan dalam negeri dengan membuka dan menetapkan kebijakan keimigrasian untuk pemberian visa kunjungan melalui 2 (dua) jalur yaitu layanan e-visa dan penerbitan visa oleh Perwakilan RI (sebelumnya hanya diberikan melalui e-visa yang langsung dilayani oleh Ditjen Imigrasi Jakarta).

Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri sebesar Rp160.113.041.242,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerbitan paspor oleh Perwakilan RI di luar negeri, mengalami penurunan sebesar 7,90% dari periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp173.843.574.962,00. Penurunan pendapatan paspor Republik Indonesia di Luar Negeri disebabkan oleh menurunnya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri yang memperbarui paspor ataupun mengajukan pembuatan paspor baru.

Pendapatan Dokumen Kekonsuleran sebesar Rp110.742.936.040,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari legalisasi dokumen kekonsuleran, mengalami penurunan sebesar 1,50% dari pendapatan dokumen kekonsuleran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp112.426.811.807,00. Penurunan pendapatan ini terjadi akibat telah diberlakukannya secara efektif Perpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) atau disebut Konvensi *Apostille* sejak September 2022. Dengan sertifikat legalisasi *Apostille*, suatu dokumen publik yang dikeluarkan otoritas asing akan secara otomatis diakui secara hukum oleh 122 negara, sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan legalisasi dokumen dan kekonsuleran yang semakin menurun. Berbeda dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang terdapat pengembalian pendapatan dokumen kekonsuleran sebesar Rp275.000,00 yang terjadi pada Satker Ditjen Protokol dan Konsuler, pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 tidak terjadi pengembalian pendapatan dokumen konsuler.

Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri sebesar Rp23.770.127.428,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemberian fasilitas keimigrasian (affidavit), Surat Keterangan, dan pelayanan lainnya. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 52,11% dari pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp49.637.941.516,00. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pengajuan pelayanan fasilitas keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri.

Pendapatan Administrasi di Luar Negeri sebesar Rp45.212.418.089,00 terdiri dari pengembalian *Value Added Tax* (VAT) dan pendapatan administrasi lainnya. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 48,16% dari pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp30.516.156.142,00 yang disebabkan oleh kenaikan klaim VAT yang diajukan oleh Satker Perwakilan ke pemerintah negara akreditasi.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp1.688.505.695,00 merupakan pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening pemerintah, mengalami kenaikan sebesar 29,58% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.303.082.693,00. Pendapatan Jasa Giro mengalami kenaikan karena nilai simpanan dana yang ada pada rekening pemerintah dalam hal ini kas besi pada Satker Perwakilan sebagian besar dalam posisi sesuai dengan pagu (hanya sebagian kecil satker perwakilan yang melakukan peminjaman) sehingga mempengaruhi pokok pengenaan bunga dan juga dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar USD ke Rupiah.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp75.200.756,00 merupakan pendapatan dari Satuan Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan senilai Rp52.809.738,00 yang berupa pendapatan penyelesaian denda penyelesaian pekerjaan terkait temuan pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 atas pengadaan revitalisasi portal Kementerian Luar Negeri Tahun 2023, selain itu Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp88.738,00 yang merupakan penyelesaian denda penyelesaian pekerjaan terkait Pengadaan Jasa Pelatihan Menulis Opini Beradu Gagasan di Media Massa untuk Peserta Sesdilu Angkatan ke-76, dan Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri senilai Rp22.302.280,00 yang terdiri atas:

1. Pembayaran keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PT. Winaguna Sarana Teknik berupa Belanja Modal Termin ke IV Pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi (M) Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kontrak Nomor 001.971.054.D/KONTRAK/PL/09/2023) sebesar Rp3.264.472,00 sesuai potongan pada SPM nomor 02091T;
2. Pembayaran keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PT. Rakit Unggul Mitratama berupa Belanja Modal Termin ke III Pengadaan Pelaksana Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kontrak Nomor 002.971.054.D/ADD-IV/KONTRAK/PL/09/2024) sebesar Rp19.037.808,00 sesuai potongan SPM nomor 02027T.

Pendapatan Anggaran Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp6.147.153.157,00 mengalami kenaikan sebesar 2.149,87% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp273.222.229,00. Pendapatan anggaran lain-lain mengalami kenaikan disebabkan karena adanya setoran kelebihan saldo uang kas pada beberapa Satker Perwakilan RI yang baru disetorkan pada tahun 2024, antara lain KBRI Mexico City, KBRI London, KBRI Berlin dsb. Pada periode 31 Desember 2024. Rincian Pendapatan Anggaran Lain-lain secara keseluruhan dapat tergambar sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 85: Pendapatan Anggaran Lain-Lain untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
1	403247	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.450.000
2	403329	KEDUTAAN BESAR RI DI BERN	910.319
3	403341	KEDUTAAN BESAR RI DI BERLIN	5.681.721.208
4	403573	KEDUTAAN BESAR RI DI KUALA LUMPUR	0
5	403598	KEDUTAAN BESAR RI DI LONDON	51.961.935
6	403618	KEDUTAAN BESAR RI DI MEXICO CITY	316.082.304
7	403630	KEDUTAAN BESAR RI DI NEW DELHI	3.078
8	403686	KEDUTAAN BESAR RI DI PARIS	3.176.625
9	403743	KEDUTAAN BESAR RI DI ROMA	15.375.164
10	403780	KEDUTAAN BESAR RI DI SINGAPURA	11.001.185
11	403799	KEDUTAAN BESAR RI DI SOFIA	559.201
12	403825	KEDUTAAN BESAR RI DI TOKYO	22.461.318
13	403862	KEDUTAAN BESAR RI DI WARSAWA	1.031.947
14	403871	KEDUTAAN BESAR RI DI WASHINGTON DC	20.586.153
15	403975	KEDUTAAN BESAR RI DI BRASILIA-DF	455
16	404160	KONSULAT JENDERAL RI DI MELBOURNE	320.983
17	560710	KEDUTAAN BESAR RI DI KYIV	2.685.549
18	568306	KONSULAT JENDERAL RI DI CAPE TOWN	31.678
19	576605	KONSULAT JENDERAL RI DI JOHOR BAHRU	9.613.447
20	651910	KEDUTAAN BESAR RI DI SUVA	1.746.077
21	677290	KEDUTAAN BESAR RI DI BAKU	434.531
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN			6.147.153.157

*Beban Pegawai
Rp3.847.553.004.171*

D.2. BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.847.553.004.171,00 dan Rp3.755.866.921.473,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86: Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Beban Gaji Pokok PNS	170.746.852.488	160.822.029.270	9.924.823.218	6,17 %
Beban Pembulatan Gaji PNS	2.165.124	2.526.301	(361.177)	(14,30%)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	11.730.077.826	11.044.062.010	686.015.816	6,21 %
Beban Tunj. Anak PNS	2.978.747.710	2.835.341.211	143.406.499	5,06 %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Beban Tunjangan Struktural PNS	7.119.226.000	7.223.123.000	(103.897.000)	(1,44%)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	36.634.033.000	36.571.262.000	62.771.000	0,17 %
Beban Tunjangan PPh PNS	3.377.752.153	1.870.129.157	1.507.622.996	80,62 %
Beban Tunjangan Beras PNS	7.551.993.810	7.845.910.380	(293.916.570)	(3,75%)
Beban Uang Makan PNS	11.143.719.050	12.239.409.550	(1.095.690.500)	(8,95%)
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	1.313.950.000	1.234.800.000	79.150.000	6,41 %
Beban Tunj Sewa Rumah PNS (Staff di LN)	-	276.575.531.849	(276.575.531.849)	(100,00%)
Beban Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	94.324.512.382	91.971.794.026	2.352.718.356	0,76 %
Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)	2.219.930.310.899	1.969.051.346.098	250.878.964.801	15,10 %
Beban Lokal Staff Lainnya	1.058.932.406.389	980.606.151.219	78.326.255.170	7,98 %
Beban Tunjangan Umum PNS	630.385.000	1.108.810.000	(478.425.000)	(43,15%)
Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	5.436.000.000	5.283.000.000	153.000.000	2,90 %
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	67.728.960	-	67.728.960	100,00 %
Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	232.181.600	-	232.181.600	100,00 %
Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	53.439.170	-	53.439.170	100,00 %
Beban Gaji Pokok PPPK	7.173.562.189	1.596.782.300	5.576.779.889	349,25 %
Beban Pembulatan Gaji PPPK	33.532	35.051	(1.519)	(4,33%)
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	319.813.340	61.923.720	257.889.620	416,46 %
Beban Tunjangan Anak PPPK	75.096.796	12.833.840	62.262.956	485,15 %
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.088.975.050	264.120.000	824.855.050	312,30 %
Beban Tunjangan Beras PPPK	332.262.960	72.492.420	259.770.540	358,34 %
Beban Uang Makan PPPK	1.142.484.000	362.572.000	779.912.000	215,11 %
Beban Uang Lembur	7.554.265.400	5.682.499.000	1.871.766.400	32,94 %
Beban Uang Lembur PPPK	1.200.149.000	163.226.000	1.036.923.000	635,27 %
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	186.826.571.913	178.979.955.656	7.846.616.257	4,38 %
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	9.634.308.430	2.385.255.415	7.249.053.015	303,91 %
Total	3.847.553.004.171	3.755.866.921.473	91.686.082.698	2,44 %

Terdapat kenaikan beban pegawai sebesar Rp91.686.082.698,00 atau 2,44%. Kenaikan signifikan terjadi pada Beban Gaji Pokok PPPK, Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK, Beban Tunjangan Anak PPPK, Beban Tunjangan Fungsional PPPK, Beban Tunjangan Beras PPPK, Beban Uang Makan PPPK, Beban Uang Lembur PPPK, Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan Kinerja PPPK yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerimaan PPPK pada rekrutmen PPPK periode Tahun 2024 sehingga menambah jumlah alokasi anggaran dan belanja pegawai terkait dengan PPPK.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Kenaikan juga terjadi pada beban tunjangan PPh PNS sebesar Rp1.507.622.996,00 atau 80,62%, yang disebabkan oleh kenaikan nilai PPh yang dibayarkan khususnya PPh untuk Tunjangan Penghasilan Luar Negeri (TPLN) yang terdampak fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar sehingga nilai tunjangan PPh PNS terutama yang dikenakan terhadap penghasilan PNS yang bertugas di luar negeri semakin meningkat.

Kenaikan terjadi pada beban tunjangan pegawai non PNS dan beban tunjangan lainnya pegawai non PNS yang sebelumnya pada periode yang berakhir pada 2023 tidak terdapat akun ini. Pembebanan ini terjadi untuk pembayaran tunjangan Wakil Menteri Luar Negeri yang bukan berasal dari PNS. Sementara itu, pada periode yang berakhir di 2024 juga terdapat beban uang penghargaan bagi wakil menteri yang sudah selesai masa tugasnya. Beban uang penghargaan bagi wakil menteri yang sudah selesai masa tugas dibayarkan kepada Bapak Pahala Mansury yang bertugas sebagai Wakil Menteri Luar Negeri pada periode 2023 -2024.

Peningkatan juga terjadi pada beban uang lembur sebesar Rp1.871.766.400,00 atau 32,94% yang disebabkan oleh kenaikan jumlah jam lembur yang dilaksanakan oleh pegawai Kementerian Luar Negeri sepanjang Tahun 2024.

Penurunan signifikan terjadi pada beban tunjangan sewa rumah PNS (staf di LN) yang menurun sebesar Rp276.575.531.849,00 atau 100,00% yang diakibatkan oleh kebijakan baru yang diterapkan pada tahun 2024 mengenai Fasilitas Sewa Rumah. Berdasarkan pada kebijakan baru ini, Kementerian Luar Negeri tidak lagi menggunakan akun beban tunjangan sewa rumah PNS (staf di LN).

Penurunan juga terjadi pada beban tunjangan umum PNS yang menurun sebesar Rp478.425.000,00 atau 43,15% yang disebabkan oleh peralihan pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional umum menjadi menduduki jabatan fungsional tertentu.

*Beban Persediaan
Rp75.123.007.371*

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp75.123.007.371,00 dan Rp79.559.602.504,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87: Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Beban Persediaan Konsumsi	73.397.612.464	77.547.833.628	(4.150.221.164)	(5,35%)
Beban Persediaan Bahan Baku	53.954.910	40.579.699	13.375.211	32,96 %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis / berjaga-jaga	1.757.544	-	1.757.544	100,00 %
Beban Persediaan Lainnya	1.669.682.453	1.971.189.177	(301.506.724)	(15,30%)
Total	75.123.007.371	79.559.602.504	(4.436.595.133)	(5,58%)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023, persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO), yaitu barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Beban Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp4.436.595.133,00 atau 5,58%. Penurunan beban persediaan terjadi karena penurunan pemakaian persediaan sepanjang tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Beban Persediaan Barang Konsumsi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp73.397.612.464,00 dan Rp77.547.833.628,00. Beban Persediaan Barang Konsumsi mengalami penurunan sebesar Rp4.150.221.164,00 atau 5,35% dikarenakan menurunnya pemakaian barang konsumsi yang terjadi pada Satker Pusat dan Satker Perwakilan RI pada periode tahun 2024 dibandingkan dengan periode tahun 2023.

Beban Persediaan Bahan Baku untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 32,96% dibandingkan dengan beban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang merupakan beban yang terjadi pada Satker Perwakilan Berlin, Karachi, Tehran, Dakar, Vanimo dan Satker Pusat pada Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional. Beban ini muncul karena kesalahan perekaman kodifikasi barang pada modul persediaan saat pendetailan persediaan namun atas barang persediaan tersebut telah dilakukan pengeluaran pada modul persediaan akibat pemakaian.

Tabel 88: Beban Persediaan Bahan Baku untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
1	403341	KEDUTAAN BESAR RI DI BERLIN	20.201.259
2	403542	KONSULAT JENDERAL RI DI KARACHI	1.126.234
3	403819	KEDUTAAN BESAR RI DI TEHRAN	954.557
4	404032	KEDUTAAN BESAR RI DI DAKAR	3.658.653
5	532654	KONSULAT RI DI VANIMO	27.903.207
6	667829	DITJEN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	111.000
TOTAL BEBAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU			53.954.910

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Beban Persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan 100% dibandingkan dengan beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Beban ini muncul karena kesalahan perekaman kodefikasi barang pada modul persediaan saat pendetilan persediaan namun atas barang persediaan tersebut telah dilakukan pengeluaran pada modul persediaan akibat pemakaian. Beban persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga terjadi pada KBRI Beijing.

Beban Persediaan Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.669.682.453,00 dan Rp1.971.189.177,00. Beban Persediaan Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp301.506.724,00 atau 15,30% yang di antaranya disebabkan karena penurunan jumlah penggunaan barang persediaan lainnya yang terjadi pada Satker Pusat dan Satker Perwakilan sebagai berikut:

Tabel 89: Beban Persediaan Lainnya untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
1	403247	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	1.643.687.579
2	403262	KEDUTAAN BESAR RI DI ALGER	735.404
3	403335	KONSULAT JENDERAL RI DI MUMBAI	1.044.479
4	403341	KEDUTAAN BESAR RI DI BERLIN	17.129.683
5	403950	KEDUTAAN BESAR RI DI HELSINKI	4.672.148
6	403990	KONSULAT RI DI DARWIN	42.138
7	404120	KEDUTAAN BESAR RI DI AMMAN	1.829.897
8	637368	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	541.125
TOTAL BEBAN PERSEDIAAN LAINNYA			1.669.682.453

*Beban Barang dan
Jasa
Rp2.944.878.531.661*

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.944.878.531.661,00 dan Rp2.372.617.827.231,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp572.260.704.430,00 atau 24,12%.

Tabel 90: Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN	% NAIK (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	390.129.264.073	317.716.092.025	72.413.172.048	22,79 %
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(60.116.199)	(87.058.242)	26.942.043	(30,95%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN	% NAIK (TURUN)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	403.763.557	345.618.373	58.145.184	16,82 %
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.752.915.281	2.822.252.980	(69.337.699)	(2,46%)
Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	(5.727.600)	-	(5.727.600)	100,00 %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.644.249.642	126.286.688	3.517.962.954	2.785,70 %
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	11.443.219.108	21.100.970.246	(9.657.751.138)	(45,77%)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(6.238.063)	(54.349.300)	48.111.237	(88,52%)
Beban Barang Operasional Lainnya	40.780.406.219	80.986.205.470	(40.205.799.251)	(49,65%)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(84.881.089)	(1.362.708.944)	1.277.827.855	(93,77%)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	163.874.300	(163.874.300)	(100,00%)
Beban Bahan	163.985.241.744	69.116.431.112	94.868.810.632	137,26 %
Pengembalian Beban Bahan	(16.692.139)	(697.500)	(15.994.639)	2.293,14 %
Beban Honor Output Kegiatan	33.604.397.463	29.999.019.935	3.605.377.528	12,02 %
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(20.507.000)	(343.839.500)	323.332.500	(94,04%)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	345.435.457.187	368.986.527.151	(23.551.069.964)	(6,38%)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(9.791.702)	(24.129.813)	14.338.111	(59,42%)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	106.427.812	(106.427.812)	(100,00%)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	9.000.000	-	9.000.000	100,00 %
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	965.923.704	752.373.120	213.550.584	28,38 %
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	66.148.845	-	66.148.845	100,00 %
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	947.053.667.126	840.155.363.353	106.898.303.773	12,72 %
Pengembalian Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional	-	(1.021.000)	1.021.000	(100,00%)
Beban Langganan Listrik	108.957.872.350	107.354.544.137	1.603.328.213	1,49 %
Pengembalian Beban Langganan Listrik	(50.633.122)	(141.429.274)	90.796.152	(64,20%)
Beban Langganan Telepon	29.350.970.090	38.916.786.162	(9.565.816.072)	(24,58%)
Pengembalian Beban Langganan Telepon	(17.299.846)	(2.577.577)	(14.722.269)	571,17 %
Beban Langganan Air	25.605.101.766	22.949.159.193	2.655.942.573	11,57 %
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	26.116.085.124	29.293.100.469	(3.177.015.345)	(10,85%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN	% NAIK (TURUN)
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	(5.437.887)	(320.768.576)	315.330.689	(98,30%)
Beban Jasa Pos dan Giro	5.846.740	13.627.790	(7.781.050)	(57,10%)
Beban Jasa Konsultanan	28.868.232.680	23.518.864.882	5.349.367.798	22,75 %
Beban Sewa	359.526.191.153	317.091.290.924	42.434.900.229	13,38 %
Pengembalian Beban Sewa	(14.694.098)	(247.316.516)	232.622.418	(94,06%)
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik	342.478.928.969	-	342.478.928.969	100,00 %
Pengembalian Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan	(298.895.877)	-	(298.895.877)	100,00 %
Beban Jasa Profesi	10.295.955.914	11.342.788.568	(1.046.832.654)	(9,23%)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(86.000)	(765.000)	679.000	(88,76%)
Beban Jasa Lainnya	73.990.693.548	92.239.004.478	(18.248.310.930)	(19,78%)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	107.879.305	(107.879.305)	(100,00%)
Total	2.944.878.531.661	2.372.617.827.231	572.260.704.430	24,12 %

Kenaikan signifikan terdapat pada akun Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp3.517.962.954,00 atau 2.785,70% yang disebabkan oleh kebijakan internal terkait penyeragaman penerapan akun tersebut pada periode tahun anggaran 2024. Kenaikan signifikan juga terjadi pada Beban Bahan sebesar 137,26%, yang dipengaruhi oleh realisasi belanja atas akun tersebut yang semakin meningkat serta fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

Beban Jasa Konsultanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp28.868.232.680 mengalami kenaikan sebesar Rp5.349.367.798,00 atau 22,75% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Beban Jasa Konsultanan merupakan beban terkait dengan pendampingan hukum dalam rangka Pelindungan WNI di luar negeri dan Jasa Konsultanan untuk renovasi/pembangunan gedung. Kenaikan pada beban ini dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

Kenaikan sebesar Rp342.478.928.969,00 pada Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik terjadi karena penggunaan akun ini baru dilakukan pada tahun 2024 sebagai dampak atas penerapan kebijakan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Selain itu, pada tahun 2024 terdapat pembebanan pada akun Beban Barang Penghargaan Dalam Bentuk Uang sebesar Rp9.000.000,00 dan Beban Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel sebesar Rp66.148.845,00. Pembebanan barang penghargaan dalam bentuk uang terjadi di Satker KS ASEAN yang

merupakan pemberian hadiah lomba pembuatan video/film pendek dalam rangka memeriahkan HUT ke-57 ASEAN. Sementara itu, Beban Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel merupakan pembebanan untuk pengadaan gedung dan bangunan yang berada di bawah kapitalisasi BMN di bawah Rp25.000.000,00. Pembebanan ini terdapat di Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, KBRI Berlin, KBRI Brussel, KBRI Paramaribo, dan KJRI Vancouver.

Kenaikan signifikan juga terjadi pada akun Pengembalian Beban Bahan dengan kenaikan sebesar 2.293,14% dan akun Pengembalian Beban Langganan Telepon dengan kenaikan sebesar 571,17%. Pembebanan untuk pengembalian bahan ini terdapat di Satker Ditjen Multilateral, KJRI Mumbai, KBRI Berlin, dan KBRI Buenos Aires. Sedangkan pembebanan pengembalian beban langganan telepon, besaran pengembalian terjadi di Satker KBRI Washington DC, Konsulat Darwin, KBRI Oslo, dan Ditjen IDP.

Penurunan signifikan terjadi pada akun Beban Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp9.657.751.138,00 atau 45,77% yang merupakan dampak dari kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024 yang mengatur mengenai besaran honorarium sebagai berikut:

1. Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a. pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan / atau pengadaan barang/jasa;
 - b. pejabat fungsional di bidang perbendaharaan; atau
 - c. pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa
2. Honorarium diberikan 60% (enam puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a. pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa; atau
 - b. pejabat fungsional lainnya.

Dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah berkurangnya realisasi akun beban honor operasional satuan kerja yang mayoritas pengelola keuangannya adalah pejabat/pegawai yang fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Penurunan juga terjadi pada akun Beban Jasa Pos dan Giro sebesar Rp7.781.050,00 atau sebesar 57,10%. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya penggunaan akun ini oleh satker perwakilan karena penyeragaman penggunaan akun beban pengiriman surat dinas pos pusat.

Penurunan pada akun Beban Barang dan Jasa terjadi di Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID 19 yang disebabkan oleh berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia yang secara teknis dijabarkan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-28/PB.PB.6/2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III Tahun 2023 yang mewajibkan seluruh satuan kerja tidak lagi menggunakan akun COVID-19 mulai Semester II Tahun 2023 dan satuan kerja diminta untuk melakukan revisi/koreksi dokumen sumber. Pada periode Desember 2023 masih terdapat penggunaan akun COVID-19, namun demikian karena pertimbangan anggaran yang sudah tidak mencukupi maka revisi antar akun atau koreksi dokumen sumber tidak dilakukan pada periode 2023 sehingga akun ini masih muncul pada laporan keuangan tahun 2023. Namun pada tahun 2024, akun ini tidak lagi diperkenankan untuk dipergunakan oleh Kementerian/Lembaga.

Selain itu, terjadi penurunan yang signifikan pada akun-akun pengembalian beban, antara lain pada Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja dengan penurunan sebesar 88,52%, Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya dengan penurunan sebesar 93,77%, Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan dengan penurunan sebesar 94,04%, Pengembalian Beban barang Non Operasional Lainnya dengan penurunan sebesar 59,42%, Pengembalian Beban Langganan Listrik dengan penurunan sebesar 64,20%, Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya dengan penurunan sebesar 98,30%, Pengembalian Beban Sewa dengan penurunan sebesar 94,06%, dan Pengembalian Beban Jasa Profesi dengan penurunan sebesar 88,76%.

Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp6.238.063,00 terjadi pada Satker Sekretariat Jenderal Pusat, KJRI Hong Kong, KJRI Sydney, dan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Sementara itu, Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan sebesar Rp20.507.00,00 terjadi pada Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, dan Direktorat Jenderal Multilateral.

Pada akun Beban Barang Operasional Lainnya, terdapat pengembalian Rp84.881.089,00. Pengembalian tersebut dilakukan oleh Satker Sekretariat Jenderal Pusat sebesar Rp79.545.000 dan 7 (tujuh) satker lainnya. Pada akun Beban Barang Non Operasional Lainnya, terjadi pengembalian sebesar Rp9.791.702,00. Pengembalian tersebut berasal dari Satker Sekretariat Jenderal Pusat, KJRI Hong Kong, KJRI Sydney, dan KJRI Melbourne.

Pengembalian Beban Langganan Listrik sebesar Rp50.633.122,00 merupakan pengembalian beban yang terjadi di Satker KBRI Paris. Sementara itu, Pengembalian Daya dan Jasa Lainnya sebesar Rp5.437.887,00 terjadi di Satker

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Kantor Pusat Sekretariat Jenderal dan KBRI Bratislava. Di samping itu, akun Pengembalian Beban Sewa sebesar Rp14.694.098,00 terjadi di Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, KBRI Paris, KBRI Bandar Seri Begawan, dan KBRI Harare.

*Beban Pemeliharaan
Rp599.096.273.812*

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp599.096.273.812,00 dan Rp558.622.531.144,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp40.473.742.668,00 atau 7,25%.

Beban Pemeliharaan secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 7,25%, hal ini terjadi karena adanya kenaikan signifikan di Beban Asuransi Gedung dan Bangunan sebesar 35,35%, Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor sebesar 65,72%, dan Beban Pemeliharaan Jaringan sebesar 698,06%.

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp364.021.628.552,00 dan Rp350.521.805.798,00, atau mengalami kenaikan Rp 13.499.822.754,00 atau 3,85%. Beban ini digunakan untuk mencatat pengakuan beban untuk pengeluaran pemeliharaan/perbaikan dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan dengan tingkat kerusakan sampai dengan 2% dan pengeluaran untuk pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal. Beban ini terjadi hampir di semua satker Kementerian Luar Negeri. Kenaikan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada satker perwakilan RI juga turut dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

Tabel 91: Rincian Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	364.021.628.552	350.521.805.798	13.499.822.754	3,85 %
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	(73.255.290)	73.255.290	(100,00%)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	17.285.717.824	12.770.946.314	4.514.771.510	35,35 %
Pengembalian Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	(22.319.722)	-	(22.319.722)	100,00 %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	994.816.492	1.635.747.923	(640.931.431)	(39,18%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183.965.435.704	171.167.746.688	12.797.689.016	7,48 %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(41.581.478)	(40.000.000)	(1.581.478)	3,95 %
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	27.080.190.181	16.340.693.350	10.739.496.831	65,72 %
Pengembalian Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	(32.607.066)	-	(32.607.066)	100,00 %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	10.032.656	(10.032.656)	(100,00%)
Beban Pemeliharaan Jaringan	225.920.763	28.308.837	197.611.926	698,06 %
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.459.317.142	1.071.636.758	387.680.384	36,18 %
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.159.755.420	5.188.770.004	(1.029.014.584)	(19,83%)
Beban Persediaan Suku Cadang	-	98.106	(98.106)	(100,00%)
Total	599.096.273.812	558.622.531.144	40.473.742.668	7,25 %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp994.816.492,00 dan 1.635.747.923,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp640.931.431,00 atau 39,18%. Beban ini merupakan beban yang terjadi pada Satker Sekretariat Jenderal dan merupakan beban atas pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat, seperti Menteri dan Wakil Menteri.

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp183.965.435.704,00 dan Rp171.167.746.688,00, atau mengalami kenaikan sebesar 12.797.689.016,00 atau 7,48%. Kenaikan nilai Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin antara lain karena kenaikan belanja pada Sekretariat Jenderal terkait pemeliharaan untuk instalasi mesin di ruang kerja gedung kantor pusat, gedung arsip, gudang BMN, dan *transit house*. Selain itu, juga terdapat pekerjaan pemeliharaan pemugaran gedung MKAA dan pekerjaan dalam rangka menunjang kegiatan Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dengan terbentuknya kabinet pemerintahan Merah Putih, terdapat perubahan pada SOTK Kementerian Luar Negeri yang baru seperti penambahan 2 (dua) Wakil Menteri beserta perangkatnya. Dalam menunjang kinerja Kementerian Luar Negeri di era Pemerintahan Presiden Prabowo, diperlukan dukungan sarana dan prasarana berupa tambahan pemeliharaan Peralatan dan Mesin dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, juga terdapat pekerjaan pemeliharaan dalam rangka menunjang kegiatan Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri.

Beban Asuransi Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.285.717.824,00 merupakan pembelian atau perpanjangan asuransi atas Gedung dan bangunan pada Satker Setjen Pusat dan 92 satker perwakilan. Kenaikan pada beban ini

terjadi akibat perpanjangan/pembelian asuransi gedung kantor atau wisma sebelumnya yang belum diasuransikan. Asuransi gedung bangunan termasuk salah satu kewajiban dan faktor Indeks Penilaian Aset. Kenaikan pada beban ini terjadi akibat perpanjangan/pembelian asuransi gedung kantor atau wisma sebelumnya yang belum diasuransikan. Asuransi gedung bangunan termasuk salah satu indikator dalam penilaian Indeks Penilaian Aset (IPA).

Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor sebesar Rp27.080.190.181,00 merupakan pembayaran asuransi kendaraan dinas pada Satker Perwakilan RI atas penambahan/pembelian alat angkutan bermotor sehingga berdampak pada meningkatnya pembelian asuransi atas angkutan tersebut.

Beban Pemeliharaan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp225.920.763,00 dan Rp 28.308.837,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp197.611.926,00 atau 698,06%. Beban pemeliharaan jaringan terjadi pada KBRI Islamabad dan KBRI Rabat.

Beban Pemeliharaan Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.459.317.142,00 dan Rp1.071.636.758,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp387.680.384,00 atau 36,18% yang merupakan beban Satker Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, KBRI Bucharest, dan Satker Ditjen Protokol dan Konsuler.

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.159.755.420,00 dan Rp 4.159.755.420,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.029.014.584,00 atau 19,83%. Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan ini terdapat pada 89 Satker Perwakilan RI dan Pusat.

Penurunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar (100%) dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar (100%), terjadi karena berkurangnya kesalahan pembukuan yang mengakibatkan menurunnya pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp756.093.634.596

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp756.093.634.596,00 dan Rp696.165.820.514,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp59.927.814.082,00 atau 8,61%.

Tabel 92: Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	36.831.279.647	30.443.900.818	6.387.378.829	20,98 %
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	(5.442.508)	(15.067.100)	9.624.592	(63,88%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.647.169.024	7.449.252.953	(802.083.929)	(10,77%)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(6.019.257)	(12.485.000)	6.465.743	(51,79%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.244.381.911	35.478.811.310	(19.234.429.399)	(54,21%)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(9.680.000)	(4.024.000)	(5.656.000)	140,56 %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	77.383.008.655	75.690.025.908	1.692.982.747	2,24 %
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(120.945.683)	(64.005.846)	(56.939.837)	88,96 %
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	262.258.083.072	298.287.521.425	(36.029.438.353)	(12,08%)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	(276.720.361)	(513.412.523)	236.692.162	(46,10%)
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	357.777.425.757	249.584.978.884	108.192.446.873	43,35 %
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	(628.905.661)	(159.676.315)	(469.229.346)	293,86 %
Total	756.093.634.596	696.165.820.514	59.927.814.082	8,61 %

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota mengalami penurunan sebesar 54,21%. Penurunan ini merupakan dampak dari pengurangan penggunaan paket *meeting* perjalanan dinas dalam kota. Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri juga mengalami penurunan sebesar 12,08% yang disebabkan oleh berkurangnya pelaksanaan perjalanan dinas biasa yang menggunakan alokasi anggaran belanja operasional. Sementara itu, Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 43,35%, yang disebabkan oleh meningkatnya pelaksanaan perjalanan dinas lainnya yang melekat pada belanja barang non operasional terkait dengan kegiatan-kegiatan satker.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp23.643.934*

D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.643.934,00 dan Rp0,00.

**Tabel 93: Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

(dalam Rupiah)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	1.679.218	-	1.679.218	100,00 %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	21.964.716	-	21.964.716	100,00 %
Total	23.643.934	-	23.643.934	100,00 %

Nilai Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat mengalami kenaikan sebesar Rp23.643.934,00 yang terdiri dari Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges pada KBRI Beograd, PTRI New York, dan KBRI Beijing, dan Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp21.964.716,00 pada Satker Perwakilan Jeddah. Beban ini merupakan beban yang terjadi akibat penjualan atau penyerahan aset persediaan lainnya ke pihak lainnya. Munculnya beban ini pada periode Desember 2024 merupakan kesalahan transaksi yang dilakukan satker pada Modul Persediaan.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp785.989.763.062*

D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp785.989.763.062,00 dan Rp774.070.869.510,00 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 94: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS PENYUSUTAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	256.143.368.106	242.698.553.819	13.444.814.287	5,54 %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	517.516.146.321	519.909.912.013	(2.393.765.692)	(0,46%)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	252.885.465	268.371.716	(15.486.251)	(5,77%)
Beban Penyusutan Irigasi	43.985.135	43.985.135	-	- %
Beban Penyusutan Jaringan	338.055.192	279.075.002	58.980.190	21,13 %
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	490.693.258	565.164.220	(74.470.962)	(13,18%)
Beban Amortisasi Software	5.653.690.200	4.877.999.924	775.690.276	15,90 %
Beban Amortisasi Lisensi	2.567.158.974	2.317.926.383	249.232.591	10,75 %
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	120.848.692	288.371.276	(167.522.584)	(58,09%)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan pada Operasional Pemerintahan	2.862.931.719	2.821.510.022	41.421.697	1,47 %

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN JENIS PENYUSUTAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Total	785.989.763.062	774.070.869.510	11.918.893.552	1,54 %

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp785.989.763.062,00 jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp774.070.869.510,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.918.893.552,00 atau 1,54%.

Kenaikan beban terjadi pada:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin naik sebesar 5,54%, beban ini terdapat pada 14 satuan kerja Pusat dan 131 satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri;
- Beban Penyusutan Jaringan naik sebesar 21,13%, beban ini terdapat pada satuan kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri dan 15 satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri;
- Beban Amortisasi *Software* naik sebesar 15,90%, beban ini terdapat pada 13 satuan kerja Pusat dan 28 satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri;
- Beban Amortisasi Lisensi naik sebesar 10,75%, beban ini terdapat pada satuan kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, KBRI Berlin, KBRI Praha dan KBRI Stockholm;
- Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan pada Operasional Pemerintahan naik sebesar 1,47%, beban ini terdapat pada 3 Satker Pusat, yaitu Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri, Ditjen Multilateral, dan Kantor Pusat Inspektorat Jenderal serta 19 Satker Perwakilan.

Penurunan juga terjadi pada:

- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan pada operasional pemerintahan turun sebesar 58,09% terjadi pada 3 satuan kerja Pusat, yaitu Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kantor Pusat Ditjen Protokol dan Konsuler, dan 1 satuan kerja Perwakilan, yaitu KJRI Melbourne;
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan turun sebesar 0,46%, beban ini terdapat pada 2 satuan kerja Pusat yaitu Kantor Pusat Sekretariat Jenderal dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan serta 99 satuan kerja Perwakilan RI di Luar Negeri;
- Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan turun sebesar 5,77%, beban ini terdapat pada KBRI Bangkok, KBRI Dhaka, KBRI Abu Dhabi dan KBRI Nairobi.
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya turun sebesar 13,18%, beban ini terdapat pada 34 satuan kerja Perwakilan RI di Luar Negeri.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
(Rp799.089.339)*

D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp799.089.339,00) dan Rp105.876.855,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	(56.427.032)	79.134.250	(135.561.282)	(171,31%)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar	(742.662.307)	26.742.605	(769.404.912)	(2.877,08%)
Total	(799.089.339)	105.876.855	(904.966.194)	(854,73%)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar (Rp799.089.339,00) jika dibandingkan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp105.876.855,00 mengalami kenaikan sebesar Rp904.966.194,00 atau 854,73%.

Tabel 96: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	NAMA SATKER	JUMLAH
1	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	(742.678.978)
2	KEDUTAAN BESAR RI DI PRETORIA	16.671
TOTAL		(742.662.307)

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar (Rp742.662.307,00) atau mengalami kenaikan sebesar (2.877,08%). Beban ini merupakan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang terjadi pada Satker Sekretariat Jenderal dan KBRI Pretoria. Kenaikan pada akun ini dipengaruhi oleh adanya pembayaran dan/atau pelunasan piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi serta nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar yang melemah.

*Defisit Pelepasan
Aset Non Lancar
(Rp17.673.882.714)*

D.10. SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

(Rp17.673.882.714,00) dan (Rp232.046.117.401,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97: Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.865.839.733	4.538.775.355	(672.935.622)	(14,83%)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	401.422.000	27.000.000	374.422.000	1.386,75 %
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4.267.261.733	4.565.775.355	(298.513.622)	(6,54%)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	21.941.144.447	236.611.892.756	(214.670.748.309)	(90,73%)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(17.673.882.714)	(232.046.117.401)	214.372.234.687	(92,38%)

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp3.865.839.733,00 jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp4.538.775.355,00.

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp401.422.000,00 jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp27.000.000,00 atau mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 1.386,75%. merupakan hasil penjualan BMN lainnya pada Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal secara lelang oleh KPKNL dengan Risalah Lelang.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp4.267.261.733,00 jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp4.565.775.355,00 atau mengalami penurunan sebesar 6,54%. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya penjualan peralatan dan mesin dan kenaikan pendapatan atas pemindahtanganan BMN yang terjadi pada satuan kerja di Kemenlu.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp21.941.144.447,00 jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp236.611.892.756,00 atau mengalami penurunan sebesar 90,73%. Hal tersebut disebabkan karena adanya penghapusan/penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang telah didefinitifkan menjadi Aset Tetap karena telah dilaksanakan BAST pekerjaan pada KBRI Berlin dan KBRI Wellington.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Selain itu kesalahan perekaman transaksi Aplikasi SAKTI yang mencatatkan Hibah Keluar pada aplikasi SAKTI satker KBRI Washington DC telah diperbaiki pada periode *audited* sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada KBRI Washington DC secara signifikan. Penurunan pelaksanaan penghapusan BMN dengan cara pemusnahan juga terjadi pada 5 (lima) satker Pusat dan Perwakilan RI.

Tabel 98: Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Penghapusan	1.228.698.592
Hibah Keluar	284.495.744.882
Penghapusan/Penghentian KDP	1.350.461.828
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	19.352.952.491
Keluar Lainnya	9.031.536
Koreksi Aset	(284.495.744.882)
Total	21.941.144.447

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp19.468.321.946

D.11. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Surplus dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.468.321.946,00 dan (Rp21.215.901.285,00) mengalami kenaikan sebesar 191,76%.

Tabel 99: Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	346.871.527.999	127.166.393.286	219.705.134.713	172,77 %
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	261.557.921	1.545.063.366	(1.283.505.445)	(83,07%)
Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker	10.258.971	50.137.319	(39.878.348)	(79,54%)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	-	-	- %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.080.890.128	1.746.368.910	(665.478.782)	(38,11%)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.816.513.800	11.953.284.023	(7.136.770.223)	(59,71%)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	464.702.668	181.312.754	283.389.914	156,30 %
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	17.200.000	55.482.750	(38.282.750)	(69,00%)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	336.236.632.875	109.649.360.215	226.587.272.660	206,65 %
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	3.892.112.286	1.979.323.287	1.912.788.999	96,64 %
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	-	-	- %
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	91.659.350	6.060.662	85.598.688	1.412,37 %
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	327.403.206.053	148.382.294.571	178.985.591.085	120,62 %
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI	12.252.865	7.096.811	5.156.054	72,65 %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	94.332.457	579.990	93.752.467	16.164,50 %
Beban Persediaan Rusak/Usang	432.243.888	904.868.275	(472.624.387)	(52,23%)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	318.365.219.606	139.778.407.002	178.588.070.485	127,77 %
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	8.499.157.237	7.691.342.493	771.236.466	10,03 %
Total	19.468.321.946	(21.215.901.285)	40.719.543.628	(191,93%)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp346.871.527.999,00, mengalami kenaikan sebesar 172,77% dibandingkan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp127.166.393.286,00.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp327.403.206.053,00, mengalami kenaikan sebesar 120,62% dibandingkan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp148.382.294.571,00.

Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp261.557.921,00 dan Rp1.545.063.366,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp1.283.505.445,00) atau 83,07%. Hal ini terjadi karena menurunnya nilai klaim asuransi yang diperoleh oleh Satuan Kerja sepanjang tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN pada 31 Desember 2024 terjadi pada KBRI New Delhi, KJRI Sydney, KBRI Tehran, KBRI Vatican, KBRI Washington DC, KJRI Cape Town, KBRI Lisabon, dan KJRI Shanghai.

Pendapatan dari untung selisih kurs uang persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp10.258.971,00 dan Rp50.137.319,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp39.878.348,00) atau 79,54%.

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan penyetoran atas kelebihan pembayaran belanja atas beban APBN tahun anggaran yang lalu termasuk kelebihan pembayaran berdasarkan temuan aparat pemeriksa. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu di Kementerian Luar Negeri terdiri dari:

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu mengalami penurunan sebesar 38,11%. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu terjadi pada Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, KBRI Ankara, KBRI Bangkok, KJRI Mumbai, KBRI Canberra, KBRI Den Haag, PTRI Jenewa, KJRI Hamburg, KBRI London, KBRI Mexico City, KBRI Praha, KBRI Tokyo, KBRI Dakar, KBRI Amman, KJRI Perth, KBRI Lisabon dan KBRI Lima.
- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu mengalami penurunan sebesar 59,71%. Penerimaan kembali belanja barang tahun yang lalu terjadi pada 8 satuan kerja Pusat dan 31 satuan kerja Perwakilan RI di Luar Negeri.
- c. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu mengalami kenaikan sebesar 156,30% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu terjadi pada satuan kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, KBRI Alger, KBRI Ankara, KBRI Berlin, KBRI Bucharest, KBRI Canberra, KBRI London, KBRI Santiago, dan KBRI Astana.

Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS mengalami penurunan sebesar Rp38.282.750,00 atau sebesar 69,00%.

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1.412,37% dan 16.164,50%. Kenaikan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan beban penyesuaian nilai persediaan disebabkan oleh penerapan metode penilaian persediaan secara FIFO pada tahun 2021 ini sesuai dengan PMK nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan penerapan metode FIFO, pendapatan maupun beban penyesuaian nilai persediaan hanya akan terbentuk dari koreksi terkait transaksi opname fisik barang persediaan.

Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs mengalami kenaikan sebesar 96,64%, sementara Beban Penyesuaian Selisih Kurs mengalami kenaikan sebesar

10,03%. Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi masing-masing mengalami kenaikan sebesar 206,65%, dan 127,77%. Pendapatan/Beban Selisih Kurs ini muncul mengingat fluktuasi nilai tukar mata uang US Dolar maupun mata uang negara setempat terhadap Rupiah.

Beban Persediaan Rusak/Usang pada akhir periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp472.624.387,00) atau sebesar 52,23%.

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0

D.12. POS-POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Kementerian Luar Negeri untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
POS-POS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Penjelasan atas Pos –
Pos Laporan
Perubahan Ekuitas

E. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih kementerian yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas Awal
Rp52.720.930.123.336

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp52.720.930.123.336,00 dan Rp49.124.654.310.278,00. Rincian Ekuitas Awal per unit Eselon I dan Satker Perwakilan dapat dilihat dalam tabel lampiran.

Defisit LO
(Rp8.560.594.908.353)

E.2. SURPLUS/(DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp8.560.594.908.353,00) dan (Rp8.035.479.803.084,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Defisit LO sebagian besar merupakan Transaksi Antar Entitas dengan total Rp8.753.759.305.204,00.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/ Kesalahan
Mendasar Rp0

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
(Rp186.428.568.399)

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp186.428.568.399,00) dan Rp3.442.322.486.970,00.

Perbandingan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 100: Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Penyesuaian Nilai Aset	-	-
2	Koreksi Nilai Persediaan	664.601.383	89.265.677
3	Koreksi Atas Reklasifikasi	(1.246.834.261)	(13.623.482)
4	Selisih Revaluasi Aset	-	-
5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(173.067.299.933)	3.360.334.090.996
6	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(11.073.744.581)	282.379.928
7	Lain-lain	(1.705.291.007)	81.630.373.851
TOTAL		(186.428.568.399)	3.442.322.486.970

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.4.1. PENYESUAIAN NILAI ASET

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp664.601.383

E.4.2. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian Persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp664.601.383,00 dan Rp89.265.677,00.

Tabel 101: Daftar Perwakilan dengan Koreksi Nilai Persediaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2024
1	403247	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	127.807.000
2	403479	KONSULAT JENDERAL RI DI JEDDAH	415.372.750
3	524728	KEDUTAAN BESAR RI DI BOGOTA	168.477.283
4	568291	KEDUTAAN BESAR RI DI PRETORIA	35.724.758
5	403341	KEDUTAAN BESAR RI DI BERLIN	17.814.500
6	403825	KEDUTAAN BESAR RI DI TOKYO	16.067.449
7	403950	KEDUTAAN BESAR RI DI HELSINKI	7.231.805
8	677361	KEDUTAAN BESAR RI DI QUITO	1.201.401
9	403945	KEDUTAAN BESAR RI DI YAOUNDE	1.197.998
10	403284	KEDUTAAN BESAR RI DI BAGHDAD	913.308
11	403624	KEDUTAAN BESAR RI DI MOSKOW	268.396
12	532654	KONSULAT RI DI VANIMO	242.745

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2024
13	560724	KEDUTAAN BESAR RI DI TASHKENT	88.990
14	538861	PERWAKILAN RI DI PHNOM PENH	(127.807.000)
TOTAL			664.601.383

Koreksi Nilai Persediaan periode 31 Desember 2024 terdapat pada 1 (satu) Satker Pusat dan 13 (tiga belas) Satker Perwakilan. Koreksi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal terdapat Koreksi Kuantitas Kurang atas Transfer Keluar Online SPRI Paspor 48 Halaman dan Koreksi Kuantitas Tambah atas Transfer Masuk Online SPRI Elektronik E-Paspor 48 Halaman sebesar Rp127.807.000,00;
2. Pada KJRI Jeddah terdapat koreksi atas reklasifikasi masuk SPRI Elektronik sebesar Rp415.372.750,00;
3. Pada KBRI Bogota terdapat Jurnal koreksi Akun Tidak Normal akibat Opname Fisik Semester I TA 2024 sebesar Rp168.477.283,00;
4. Pada KBRI Pretoria terdapat Jurnal penyelesaian Akun 59311 (Beban Persediaan Bahan untuk Operasional) serta Jurnal penyelesaian Akun 593113 (Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan) sebesar Rp35.724.758,00;
5. Pada KBRI Berlin terdapat koreksi atas reklasifikasi masuk Paspor Elektronik 48 Halaman sebesar Rp17.814.500,00;
6. Pada KBRI Tokyo terdapat koreksi nilai saldo awal berupa SPLP WNI dan SPRI Paspor 48 Halaman sebesar Rp16.067.449,00;
7. Pada KBRI Helsinki terdapat koreksi jurnal manual atas void BAST Persediaan sebesar Rp7.231.805,00;
8. Pada KBRI Quito terdapat koreksi berupa Koreksi Persediaan sebesar Rp1.201.401,00;
9. Pada KBRI Yaounde terdapat koreksi atas reklasifikasi masuk Amplop Impressions Sur Envelope A4, reklasifikasi masuk Amplop Impressions Sur Envelope A6 dan reklasifikasi keluar Amplop Putih A6 Envelope A6 di KBRI Yaounde sebesar Rp1.197.998,00;
10. Pada KBRI Baghdad terdapat Koreksi Kuantitas Tambah atas Transfer Masuk Online Visa Diplomatik dan Dinas sebesar Rp913.308,00;
11. Pada KBRI Moskow terdapat Jurnal Koreksi Persediaan sebesar Rp268.396,00;
12. Pada KRI Vanimo juga Jurnal Koreksi Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp242.745,00;
13. Pada KBRI Tashkent terdapat Jurnal koreksi Akun 491429 (Paspor) sebesar Rp88.990,00; dan
14. Pada KBRI Phnom Penh terdapat Koreksi Nilai Kurang atas Transfer Masuk Online SPRI Paspor 48 Halaman sebesar (Rp127.807.000,00).

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Koreksi Atas
Reklasifikasi
(Rp1.246.834.261)

E.4.3. KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang dilakukan untuk mengoreksi secara kuantitas maupun harga per satuan pada Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada periode yang sama. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.246.834.261,00) dan 31 Desember 2023 sebesar (Rp13.623.482,00).

**Tabel 102: Daftar Perwakilan dengan Koreksi Atas Reklasifikasi
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk Periode yang Berakhir 31
Desember 2024**

(dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2024
1	403542	KEDUTAAN BESAR RI DI ATHENA	1.916.503.586
2	403913	KONSULAT JENDERAL RI DI VANCOUVER	432.835.930
3	404072	KONSULAT JENDERAL RI DI PERTH	220.128.491
4	404108	PERWAKILAN RI DI PHNOM PENH	86.520.517
5	404120	KONSULAT JENDERAL RI DI KARACHI	80.013.903
6	538861	KEDUTAAN BESAR RI DI MUSCAT	2.516.290
7	549853	KONSULAT JENDERAL RI DI SHANGHAI	327.703
8	666955	KEDUTAAN BESAR RI DI KOPENHAGEN	(1)
9	677286	KONSULAT JENDERAL RI DI MARSEILLE	(55.120)
10	677312	KEDUTAAN BESAR RI DI AMMAN	(123.050.050)
11	677375	KONSULAT RI DI TAWAU	(459.338.891)
12	683504	KONSULAT JENDERAL RI DI KUCHING	(909.568.097)
TOTAL			1.246.834.261

Koreksi Atas Reklasifikasi periode 31 Desember 2024 terdapat pada 12 (dua belas) Satker Perwakilan. Koreksi tersebut yakni adanya koreksi atas Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk di dua belas Satker berupa Aset Tetap antara lain yakni Printer Paspur, Alat Pemindai Paspur, *Scanner* Keimigrasian, Printer (Peralatan Personal Komputer), *Scanner* (Universal Tester), Tanah Bangunan *Mess/Wisma/Asrama*, Rumah Negara Golongan IA Tipe Permanen, Wisma Kepala Perwakilan RI, dan Bangunan Gedung Kantor Permanen.

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

E.4.4. SELISIH REVALUASI ASET

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
(Rp184.141.044.514)*

E.4.5. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp184.141.044.514,00) dan Rp3.360.616.470.924,00.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp173.067.299.933,00) dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar (Rp11.073.744.581,00).

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut, yaitu karena adanya transaksi Saldo Awal, Reklasifikasi Masuk, Koreksi Nilai KDP Berkurang, Koreksi Nilai KDP Bertambah, Koreksi Pencatatan, Koreksi Pencatatan KDP, Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah, Koreksi Susulan, Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan, Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan, Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif, dan Penghentian Aset dari Penggunaan. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang memiliki saldo paling besar terdapat pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, dikarenakan adanya rincian koreksi berupa jurnal balik atas koreksi jurnal 052 terkait Pembayaran Cicilan Semester II TA 2024 atas gedung Perwakilan RI, Saldo Awal Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen serta pada KBRI Washington DC terdapat Koreksi Saldo Awal.

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi terdapat di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, serta KRI Vanimo, yaitu karena adanya transaksi Koreksi Pencatatan *Software* Komputer, Koreksi Pencatatan Lisensi, dan Jurnal Koreksi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya.

Tabel 103: Daftar Satker Pusat dan Satker Perwakilan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

(dalam Rupiah)

KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO 31 DESEMBER 2024
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		(173.067.299.933)
403247	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	105.739.233.864
403253	KEDUTAAN BESAR RI DI ADDIS ABABA	11.212.928
403262	KEDUTAAN BESAR RI DI ALGER	(145.605.991)
403278	KEDUTAAN BESAR RI DI ANKARA	45.975.000
403284	KEDUTAAN BESAR RI DI BAGHDAD	738.745
403304	KEDUTAAN BESAR RI DI BEOGRAD	-
403310	KONSULAT JENDERAL RI DI FRANKFURT	11.308.155
403341	KEDUTAAN BESAR RI DI BERLIN	(57.759.182.759)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO 31 DESEMBER 2024
403350	KEDUTAAN BESAR RI DI BRUSSELS	21.382.405
403366	KEDUTAAN BESAR RI DI BUCHAREST	(38.743.644)
403381	KEDUTAAN BESAR RI DI BUENOS AIRES	6.107.422
403397	KEDUTAAN BESAR RI DI KAIRO	23.359.458
403401	KEDUTAAN BESAR RI DI CANBERRA	(4.327.033)
403417	KEDUTAAN BESAR RI DI KOLOMBO	(4.966.666)
403423	KEDUTAAN BESAR RI DI DHAKA	7.662.500
403432	KEDUTAAN BESAR RI DI DAMASKUS	(9.623.606)
403460	KEDUTAAN BESAR RI DI DEN HAAG	2.238.348.493
403479	KONSULAT JENDERAL RI DI JEDDAH	-
403511	KONSULAT JENDERAL RI DI HONG KONG	(1.603.969)
403520	KEDUTAAN BESAR RI DI ISLAMABAD	45.975.000
403542	KONSULAT JENDERAL RI DI KARACHI	81.952.446
403567	KONSULAT JENDERAL RI DI OSAKA	70.862.500
403573	KEDUTAAN BESAR RI DI KUALA LUMPUR	49.733.554
403582	KEDUTAAN BESAR RI DI ABUJA	7.662.500
403598	KEDUTAAN BESAR RI DI LONDON	(196.506.110)
403602	KEDUTAAN BESAR RI DI MANILA	222.048
403624	KEDUTAAN BESAR RI DI MOSKOW	500.322
403649	KONSULAT JENDERAL RI DI NEW YORK	29.152.083
403661	KEDUTAAN BESAR RI DI OTTAWA	45.299.074
403670	KEDUTAAN BESAR RI DI PARAMARIBO	18.467.451
403686	KEDUTAAN BESAR RI DI PARIS	1.087.367.625
403692	KONSULAT JENDERAL RI DI PENANG	30.003.000
403743	KEDUTAAN BESAR RI DI ROMA	45.975.000
403774	KONSULAT JENDERAL RI DI SYDNEY	(2.871.831)
403780	KEDUTAAN BESAR RI DI SINGAPURA	(721.915.428)
403800	KEDUTAAN BESAR RI DI STOCKHOLM	(14.446.651)
403825	KEDUTAAN BESAR RI DI TOKYO	(143.548.520)
403831	KEDUTAAN BESAR RI DI VATICAN	45.975.000
403856	KEDUTAAN BESAR RI DI WINA	(4.399.116)
403862	KEDUTAAN BESAR RI DI WARSAWA	16.586.615
403871	KEDUTAAN BESAR RI DI WASHINGTON DC	(238.403.879.149)
403893	KEDUTAAN BESAR RI DI PORT MORESBY	(106.438.680)
403913	KEDUTAAN BESAR RI DI KOPENHAGEN	2.378.147.307
403922	KEDUTAAN BESAR RI DI ANTANANARIVO	45.975.000
403938	KEDUTAAN BESAR RI DI MADRID	(477.540.603)
403944	KEDUTAAN BESAR RI DI KUWAIT CITY	25.004.975

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO 31 DESEMBER 2024
403945	KEDUTAAN BESAR RI DI YAOUNDE	4.051.815
403950	KEDUTAAN BESAR RI DI HELSINKI	29.150.000
403990	KONSULAT RI DI DARWIN	32.319.074
404001	KEDUTAAN BESAR RI DI HAVANA	7.625.000
404010	KEDUTAAN BESAR RI DI ABU DHABI	(30.491.083)
404032	KEDUTAAN BESAR RI DI DAKAR	21.862.500
404041	KEDUTAAN BESAR RI DI NAIROBI	45.975.000
404063	KONSULAT JENDERAL RI DI CHICAGO	26.144.050
404072	KONSULAT JENDERAL RI DI MARSEILLE	7.625.000
404088	KONSULAT JENDERAL RI DI HOUSTON	46.430.201
404094	KONSULAT JENDERAL RI DI TORONTO	3.528.653
404108	KONSULAT JENDERAL RI DI VANCOUVER	166.442.888
404114	KEDUTAAN BESAR RI DI BANDAR SERI BEGAWAN	24.317.132
404120	KEDUTAAN BESAR RI DI AMMAN	(77.696.936)
404145	KEDUTAAN BESAR RI DI RIYADH	57.047.835
404160	KONSULAT JENDERAL RI DI MELBOURNE	74.155.022
417871	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	44.316.875
532633	KEDUTAAN BESAR RI DI SANTIAGO	2
532654	KONSULAT RI DI VANIMO	45.975.000
538861	PERWAKILAN RI DI PHNOM PENH	91.540.581
549853	KONSULAT JENDERAL RI DI PERTH	220.065.243
560703	KEDUTAAN BESAR RI DI ATHENA	1.923.619.528
560710	KEDUTAAN BESAR RI DI KYIV	7.662.500
560724	KEDUTAAN BESAR RI DI TASHKENT	-
568291	KEDUTAAN BESAR RI DI PRETORIA	36.200.406
568306	KONSULAT JENDERAL RI DI CAPE TOWN	45.975.000
568310	KEDUTAAN BESAR RI DI BRATISLAVA	7.662.500
576590	KONSULAT RI DI SONGKHLA	(495.442)
576612	KEDUTAAN BESAR RI DI BEIRUT	10.456.574
621871	KEDUTAAN BESAR RI DI DOHA	62.035.620
632416	KEDUTAAN BESAR RI DI LISABON	28.685.317
651884	PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN	11.196.282.222
651891	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	(719.980)
651906	KEDUTAAN BESAR RI DI LIMA	10.806.203
651931	KEDUTAAN BESAR RI DI TRIPOLI	24.280.414
651948	KONSULAT JENDERAL RI DI DUBAI	34.085.564
666955	KONSULAT JENDERAL RI DI KUCHING	(1.043.536.001)
677286	KEDUTAAN BESAR RI DI ASTANA	42.535.818

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO 31 DESEMBER 2024
677290	KEDUTAAN BESAR RI DI BAKU	7.625.000
677308	KEDUTAAN BESAR RI DI MANAMA	19.477.003
677312	KEDUTAAN BESAR RI DI MUSCAT	(15.750.433)
677329	KEDUTAAN BESAR RI DI MAPUTO	(2.485.230)
677333	KEDUTAAN BESAR RI DI PANAMA CITY	103.092
677340	KEDUTAAN BESAR RI DI SARAJEVO	7.532.401
677354	KEDUTAAN BESAR RI DI ZAGREB	45.975.000
677375	KONSULAT RI DI TAWAU	(459.338.891)
683148	KONSULAT JENDERAL RI DI ISTANBUL	12.010.500
683504	KONSULAT JENDERAL RI DI SHANGHAI	27.684.729
667808	DITJEN MULTILATERAL	(362.138)
404202	KANTOR PUSAT DITJEN PROTOKOL DAN KONSULER	(30.281.775)
KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI		(11.073.744.581)
417871	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	(42.255.625)
532654	KONSULAT RI DI VANIMO	164.793.266
651884	PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN	(11.196.282.222)
TOTAL		(184.141.044.514)

Adapun rincian koreksi Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 104: Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN AKUN YANG MENGALAMI KOREKSI	KOREKSI		TOTAL
	TAMBAH	KURANG	
Belanja Modal Dibayar Dimuka (Prepaid)	13.124.615.428	(71.035.541.714)	(57.910.926.286)
Belanja Pembayaran Bunga Dibayar di Muka (Prepaid)	867.682.274	(867.682.274)	-
Uang Muka Belanja Modal (Prepayment)	-	(36.861.475.638)	(36.861.475.638)
Tanah	477.014.326	-	477.014.326
Peralatan dan Mesin	42.137.402.802	(120.492.842.699)	(78.355.439.897)
Gedung dan Bangunan	799.609.106.217	(227.867.148.201)	571.741.958.016
Aset Tetap Renovasi	-	(3.991.247.203)	(3.991.247.203)
Aset Tetap Lainnya	88.500.000	(466.691.526)	(378.191.526)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.198.757.853	(14.654.845.056)	5.543.912.797
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	75.042.528.353	(4.751.913.514)	70.290.614.839
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.212.057.235	(647.545.430.268)	(635.333.373.033)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

URAIAN AKUN YANG MENGALAMI KOREKSI	KOREKSI		TOTAL
	TAMBAH	KURANG	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.984.837.540	(1.167.635)	1.983.669.905
Dana Lainnya	-	(10.482.779.869)	(10.482.779.869)
Aset Tetap yang Belum Diregister	1.691.667.135	-	1.691.667.135
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	98.389.963.062	(14.540.762.421)	83.849.200.641
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	(198.880.000)	(198.880.000)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	198.880.000	-	198.880.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	14.266.841.570	(77.571.467.144)	(63.304.625.574)
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	28.101.602.133	-	28.101.602.133
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	1.689.979.571	-	1.689.979.571
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	206.160.655.201	(76.995.794.177)	129.164.861.024
Utang yang Belum Diterima Tagihannya	32.117.421	(3.551.015)	28.566.406
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	871.233.289	(871.233.289)	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	46.552.549.430	(878.266.743)	45.674.282.687
Beban Barang Non Operasional Lainnya	66.494.490.454	-	66.494.490.454
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	(6.730.360.035)	(6.730.360.035)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.057.553	-	139.057.553
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.804.972	-	1.804.972
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	(1.647.575.989)	(1.647.575.989)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154.044.869	(482.185.123)	(328.140.254)
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	-	(120.102.206)	(120.102.206)
Kerugian Pelepasan Aset	-	(284.495.744.882)	(284.495.744.882)
Jumlah	1.430.487.388.688	(1.603.554.688.621)	(173.067.299.933)

*Koreksi Nilai Aset
Lainnya Non Revaluasi
(Rp11.073.744.581)*

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp11.073.744.581,00) dan Rp282.379.928,00. Adapun rincian koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi dan Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 105: Rincian Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

JENIS ASET TETAP	KOREKSI		TOTAL
	TAMBAH	KURANG	
Software	198.880.000	111.120.073	87.759.927
Lisensi	-	11.196.282.222	(11.196.282.222)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	61.650.073	-	61.650.073
Akumulasi Amortisasi Software	68.864.448	198.880.000	(130.015.552)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	61.650.073	(61.650.073)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	164.793.266	-	164.793.266
Jumlah	494.187.787	11.567.932.368	(11.073.744.581)

Terkait Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi, yaitu karena adanya transaksi berupa Koreksi Pencatatan.

Koreksi Lain-Lain
(Rp1.705.291.007)

E.4.6. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp(1.705.291.007,00) dan Rp81.630.373.851,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait dengan Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, piutang, utang, dan koreksi penihilan Uang Muka Belanja Pegawai (*Prepayment*).

Tabel 106: Rincian Koreksi Lain-lain untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

JENIS KOREKSI	NILAI KOREKSI
Koreksi Aset	6.241.564
Koreksi Piutang	64.878.136.719
Koreksi Kewajiban	(3.766.341.950)
Koreksi Pendapatan	(356.269)
Koreksi Beban	(62.822.971.071)
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	(1.705.291.007)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Transaksi Antar
Entitas
Rp8.753.759.305.204

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.753.759.305.204,00 dan Rp8.189.433.129.172,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 107: Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	NILAI
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.911.996.778.615
Diterima dari Entitas Lain	(534.394.583.417)
Transfer Keluar	(76.828.941.200)
Transfer Masuk	123.045.279.706
Pengesahan Hibah Langsung	329.940.771.500
Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	-
JUMLAH	8.753.759.305.204

Diterima Dari Entitas
Lain (DDEL)
(Rp534.394.583.417)
/ Ditagihkan Ke
Entitas Lain (DKEL)
Rp8.911.996.778.615

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp534.394.583.417,00) sedangkan DKEL sebesar Rp8.911.996.778.615,00.

Transfer Masuk
Rp123.045.279.706

E.5.2. TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp123.045.279.706,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Keluar
(Rp76.828.941.200)

Tabel 108: Rincian Transfer Masuk untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	JENIS	ENTITAS	NILAI
1	Barang Konsumsi	Kemenlu dengan Kemenkumham	44.939.587.820
2	Barang Konsumsi	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	46.446.087.409

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	JENIS	ENTITAS	NILAI
3	Tanah	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	-
4	Peralatan dan Mesin	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	32.450.608.119
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	(4.650.487.268)
6	Gedung dan Bangunan	Kemenlu dengan Kemenkeu	1.276.750.686
7	Aset Tetap Lainnya	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	438.483.146
8	Software	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	2.474.825.500
9	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	(3.247.893)
10	Akumulasi Amortisasi Software	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	(327.327.813)
JUMLAH			123.045.279.706

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp76.828.941.200,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109: Rincian Transfer Keluar untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	JENIS	ENTITAS	NILAI
1	Barang Konsumsi	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	(46.446.087.409)
2	Tanah	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	-
3	Peralatan dan Mesin	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	(32.450.608.119)
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	4.650.487.268
5	Gedung dan Bangunan	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	-
6	Software	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	(2.474.825.500)
7	Akumulasi Amortisasi Software	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	327.327.813
8	Aset Tetap Lainnya	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	(438.483.146)
9	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Antar Sesama Satuan kerja di Kemenlu	3.247.893
JUMLAH			(76.828.941.200)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Jumlah selisih transfer keluar dan transfer masuk adalah sebesar Rp46.216.338.506,00. Selisih tersebut merupakan penerimaan Barang Konsumsi (Antar Kementerian dan Antar Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri) melalui transaksi transfer masuk berupa Dokumen Keimigrasian, yaitu Paspor 48 Halaman dan SPLP WNI dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Untuk Gedung dan Bangunan (Antar Kementerian) terdapat selisih dikarenakan adanya transaksi transfer masuk berupa Gedung dan Bangunan di KBRI Singapura terkait Renovasi Ruang Kerja Atase Keuangan di KBRI Singapura dari Atase Keuangan.

Tabel 110: Penjelasan Selisih Transfer Keluar Transfer Masuk untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TRANSFER MASUK	TRANSFER KELUAR	SELISIH
1	Barang Konsumsi (Antar Kementerian)	44.939.587.820	-	44.939.587.820
2	Barang Konsumsi (Antar satuan kerja Kementerian Luar Negeri)	46.446.087.409	46.446.087.409	-
3	Gedung dan Bangunan (Antar Kementerian)	1.276.750.686	-	1.276.750.686
JUMLAH				46.216.338.506

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp329.940.771.500

E.5.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung Kementerian/Lembaga dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp329.940.771.500,00 dan Rp8.699.820.808,00.

Tabel 111: Penjelasan Pengesahan Hibah Langsung untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 DESEMBER 2024
1	403247	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	328.944.411.000
2	403686	KEDUTAAN BESAR RI DI PARIS	200.000.000
3	404114	KEDUTAAN BESAR RI DI BANDAR SERI BEGAWAN	80.639.000
4	404202	KANTOR PUSAT DITJEN PROTOKOL DAN KONSULER	715.721.500
TOTAL			329.940.771.500

Pengesahan Hibah Langsung periode 31 Desember 2024 terdapat pada 4 (empat) satuan kerja baik Pusat maupun Perwakilan RI. Transaksi tersebut

yakni adanya transaksi Pengesahan Hibah Langsung berupa Hibah Hak Pakai atas Tanah, Bangunan, Struktur, dan Fasilitas di atas Tanah bagi Kantor Pusat Sekretariat Jenderal; lalu hibah berupa benda kesenian berupa lukisan kanvas dari Sdri. Indrawati Gunarsa kepada KBRI Paris; adanya Berita Acara Serah Terima Langsung berupa Barang pada KBRI Bandar Seri Begawan, dan Hibah Langsung Barang pada Satker Kantor Pusat Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri sesuai Surat Perjanjian Hibah berupa Aset Tak Berwujud (*software*).

*Pengesahan Hibah
Langsung TAYL Rp0*

E.6. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung TAYL Kementerian/Lembaga dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Kenaikan Ekuitas
6.735.828.452*

E.7. KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS

Nilai Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp6.735.828.452,00 dan Rp3.596.275.813.058,00.

*Ekuitas Akhir
Rp52.727.665.951.788*

E.8. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp52.727.665.951.788,00 dan Rp52.720.930.123.336,00.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PENGUNGKAPAN
PENTING LAINNYA**

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Pengungkapan
Penting Lainnya

Tindak Lanjut Temuan
Pemeriksaan 2010 –
2023

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2010 – 2023

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berkomitmen tinggi untuk menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Tahun 2010 – 2023. Secara garis besar, dalam perkembangan tindak lanjut temuan BPK dalam periode tersebut, terdapat temuan pemeriksaan sebanyak 206 temuan dengan 682 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, Kemenlu telah menyelesaikan sebanyak 424 rekomendasi. Sebanyak 203 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut dan sebanyak 38 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan BPK per Semester II tahun 2024, rincian perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu 2010 – 2023, sebagai berikut:

Tabel 112: Matriks Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2010 – 2023 Kementerian Luar Negeri

No	Tahun	Temuan	Rekomendasi / Saran	Rekomendasi				Nilai yang belum ditindaklanjuti
				Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	2010	8	17	14	3	0	0	-
2	2011	10	26	25	1	0	0	-
3	2012	15	28	25	2	1	0	Rp15.660.000,00
4	2013	15	34	27	7	0	0	-
5	2014	21	46	41	5	0	0	-
6	2015	24	48	44	4	0	0	-
7	2016	22	48	46	2	0	0	-
8	2017	17	43	37	6	0	0	-
9	2018	19	108	66	33	9	0	MYR70,848.17
10	2019	16	92	56	31	5	0	Rp31.392.120,00
11	2020	9	31	11	19	1	0	USD 28,548,00
12	2021	9	50	17	33	0	0	-
13	2022	11	62	17	35	10	0	1. Rp1.626.310.528,03 2. EUR8,933.00

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

14	2023	10	49	15	22	12	0	Rp52.809.738,00
TOTAL		206	682	424	203	38	0	1. Rp1.726.172.386,00; 2. MYR70.848.17 3. USD28.548,00 4. Eur8,933.00;

Dalam kaitan tindak lanjut temuan BPK periode Tahun 2010 – 2023, Kemenlu telah melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Kemenlu telah mengirimkan berita rahasia Nomor R-06904/KEMLU/241230 perihal Izin Peminjaman Kas Besi Maksimal 50% pada Awal Tahun sebelum UP Perdana TA 2025 diterima di Perwakilan RI dan berita rahasia Nomor R-06905/KEMLU/241230 perihal Izin Peminjaman Kas Besi untuk Perwakilan yang Tidak Memiliki Dana Kas Besi pada Awal Tahun sebelum UP Perdana TA 2025 diterima di Perwakilan RI. Dengan adanya arahan yang disampaikan oleh Pusat ke Perwakilan RI tersebut, maka Pengelola Keuangan di Perwakilan RI diharapkan secara tertib meminta izin pembukaan dan pembukuan PK Minus pada aplikasi SIMKEU *Realtime* apabila akan menggunakan Kas Besi melebihi 50% dan menyelesaikan PK Minus tersebut dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan terkait revisi anggaran.
2. Kemenlu telah menyelesaikan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Kementerian Luar Negeri. Permenlu ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2022. Permenlu ini telah disosialisasikan pada bulan Januari tahun 2022. Namun demikian, pada Tahun 2022 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengimplementasikan Aplikasi SAKTI *full modul* termasuk untuk pelaporan keuangan, sehingga terdapat beberapa ketidaksinkronan dengan Permenlu Nomor 5 Tahun 2022 tersebut. Sebagai upaya untuk memperbaharui Petunjuk Teknis Akuntansi Kementerian Luar Negeri, Biro Keuangan telah melaksanakan beberapa pembahasan, di antaranya:
 - a. Kebijakan Pencatatan dan Pengungkapan Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid).
Melalui surat No. S-7/PB.6/2023 tanggal 7 Februari 2023, Kemenkeu mengatur penyajian atas pembelian Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme kontrak tahun tunggal yang pembayarannya telah dilakukan pada tahun berjalan namun serah terima barang baru dilakukan pada tahun berikutnya. Transaksi tersebut diakomodasi pada modul aset menu Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) dan atas KDP tersebut, dilakukan koreksi penyesuaian nilai KDP yang membentuk jurnal otomatis sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
K	136111	Konstruksi dalam Pekerjaan	Neraca

Selanjutnya atas jurnal otomatis tersebut, dilakukan penyesuaian untuk menyajikan nilai Belanja Modal Dibayar di Muka, dengan jurnal manual pada modul Pelaporan sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	Neraca
K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE

Kemudian pada saat aset diterima pada tahun berikutnya maka dilakukan perekaman pada modul aset menu perolehan lainnya yang akan membentuk jurnal otomatis sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	13XXXX	Aset Tetap/Aset Lainnya	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO

Langkah berikutnya yang dilakukan adalah melakukan perekaman jurnal manual pada modul pelaporan untuk koreksi penyesuaian belanja modal dibayar di muka sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
K	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	Neraca

Selanjutnya perlu dilakukan juga koreksi atas pendapatan perolehan aset lainnya dengan melakukan jurnal manual pada modul pelaporan sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO
K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Kebijakan tersebut telah mulai diterapkan oleh Kemenlu pada Laporan Keuangan Tahun 2022.

b. Koreksi atas Kesalahan Pemilihan Kategori Barang/Jasa pada saat Interkoneksi SIMKEU-SAKTI

Hal ini terjadi karena dalam proses interkoneksi SIMKEU-SAKTI untuk belanja yang menghasilkan persediaan dan/atau aset sering kali masih terjadi kekeliruan dalam pemilihan kategori. Pada belanja yang menghasilkan persediaan dan/atau aset, maka kategori yang wajib dipilih adalah kategori barang. Kekeliruan pemilihan kategori akan berpengaruh terhadap munculnya akun null pada Aplikasi SAKTI, ketidaksinkronan nilai surplus/defisit Laporan Operasional (LO) yang tercantum pada Laporan Operasional dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan satker tidak dapat melakukan pendetailan atas persediaan dan/atau aset atas belanja tersebut. Adapun belanja persediaan/aset yang umumnya ada di Kemenlu adalah sebagai berikut:

- 1) Akun-521811 (belanja barang persediaan konsumsi)
- 2) Akun-523112 (belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan)
- 3) Akun-523123 (belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin)

Atas kekeliruan tersebut, Kemenlu telah melakukan pembahasan dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) dan Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP) Kementerian Keuangan dan bersepakat maka perekaman persediaan dan/atau aset dilakukan melalui modul aset menu perolehan lainnya. Adapun jurnal otomatis yang terbentuk atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Transaksi Persediaan

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	117XXX	Barang persediaan xxx	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO

Transaksi Aset

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	13XXXX	Aset Tetap/Aset Lainnya	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO

Adapun pada modul pelaporan perlu dilakukan koreksi atas munculnya akun pendapatan perolehan aset lainnya dan kaitannya dengan akun

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

null yang muncul, jurnal manual yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Persediaan

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO
K	5218XX/ 5231XX	Beban Barang Persediaan	LO

Aset

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO
K	53XXXX	Beban Modal	LO

Kemenlu telah menerapkan hal ini sejak Laporan Keuangan Tahun 2022 pada saat implementasi Aplikasi SAKTI dimulai secara serentak untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Dalam perkembangannya, SIMKEU telah menerapkan pemilihan kategori secara otomatis namun demikian hingga Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* kebijakan ini tetap dilakukan mengingat masih terdapat satker Perwakilan RI yang melakukan kekeliruan tersebut.

- c. Penyesuaian atas Pembulatan Nilai Selisih Kurs Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbentuk otomatis di sistem SAKTI

Kemenlu menerapkan penggunaan mata uang USD pada pertanggungjawaban keuangannya, dalam proses pengajuan SPP, Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D yang menggunakan Aplikasi SAKTI di akhir tahun akan memunculkan beberapa variasi seperti saldo tidak normal dan/atau munculnya akun yang seharusnya tidak bersaldo di periode Laporan Keuangan. Hal ini merupakan residu dari perhitungan otomatis kurs yang dipergunakan pada pengajuan SPP, SPM dan SP2D. Saldo akun yang terpengaruh atas transaksi tersebut antara lain:

- 1) Akun-218111 (Utang yang Belum Diterima Tagihannya) yang seharusnya tidak diperkenankan muncul pada Laporan Keuangan. Atas akun ini terdeteksi juga pada periode rekonsiliasi sebagai to do list yang perlu diselesaikan
- 2) Akun-212111 (Belanja Pegawai Dibayar Di muka) yang bersaldo di debet
- 3) Akun-212112 (Belanja Barang Dibayar Di muka) yang bersaldo di debet

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

- 4) Akun-212113 (Belanja Modal Dibayar Di muka) yang bersaldo di debet

Atas hal tersebut, Kemenlu telah melakukan pembahasan dengan Dit.APK dan Dit. SITP Kemenkeu dan bersepakat untuk melakukan jurnal penyesuaian pada modul pelaporan dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	218111/ 2121XX	Utang yang Belum Diterima Tagihannya/Belanja XXX yang Masih Harus Dibayar	Neraca
K	491111	Pendapatan Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	LO

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Neraca
K	218111/ 2121XX	Utang yang Belum Diterima Tagihannya/Belanja XXX yang Masih Harus Dibayar	LO

Transaksi penyesuaian ini telah dilakukan sejak Laporan Keuangan Tahun 2023 dan masih berlanjut hingga Laporan Keuangan tahun 2024.

- d. Pemberlakuan Kebijakan Belanja Fasilitas Sewa Rumah (FSR) mulai Tahun 2024

Dengan berlakunya Permenlu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sejak 1 Januari 2024 maka berdampak pada beberapa penyajian akun di Laporan Keuangan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mulai tahun 2024 tidak lagi dibayarkan Pinjaman Deposit Sewa Rumah sehingga akan berpengaruh terhadap akun piutang lainnya.
- 2) Pembayaran FSR yang menggunakan belanja Fasilitas Sewa Rumah (522142) menimbulkan beberapa transaksi lainnya yang berkenaan dengan kebutuhan sewa rumah tersebut, seperti deposit sewa yang harus dibayarkan di awal atau pembayaran sewa dibayar di muka. Hal ini bergantung pada kebijakan sewa yang berlaku di masing-masing negara akreditasi. Atas hal tersebut, Kemenlu telah melakukan pembahasan dengan Dit. APK dan memberlakukan beberapa kebijakan seperti penyajian deposit sewa rumah sebagai aset lain-lain dan pembayaran sewa dibayar di muka sebagai belanja barang dibayar di muka.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Penyajian Aset Lain-lain

Untuk pembayaran deposit atas fasilitas sewa rumah (FSR) dapat dilakukan penjurnalan manual pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	166111	Aset Lain-Lain	Neraca
K	522142	Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan RI	LO

Penyajian Belanja Dibayar Di Muka

Untuk pembayaran sewa rumah dibayar di muka atas fasilitas sewa rumah (FSR) dapat dilakukan penjurnalan manual pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Keterangan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	Neraca
K	522142	Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan RI	LO

Mengingat implementasi Permenlu Nomor 11 Tahun 2023 baru diberlakukan mulai tahun 2024, maka penerapan kebijakan ini baru dilakukan pada Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited*.

3. Kemenlu telah membuat Permenlu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2022 dan sudah disosialisasikan pada tanggal 22 Juni 2022. Pelaksanaan Pinjaman Resmi tersebut juga telah didukung dengan Aplikasi Pinjaman Resmi yang mulai digunakan sejak Maret 2023.
4. Kemenlu telah membuat Permenlu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2022 dan sudah disosialisasikan pada tanggal 22 Juni 2022.
5. Kemenlu telah membuat Permenlu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2022 dan sudah disosialisasikan pada tanggal 22 Juni 2022.

6. Kemenlu telah menyelesaikan Permenlu Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Permenlu ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1616 Tahun 2020 dan telah disosialisasikan ke Perwakilan pada akhir Februari 2021.
7. Kemenlu telah melakukan pendataan atas 55 (lima puluh lima) tanah kavling yang berada di kompleks perumahan Kemenlu di Pondok Aren, Cipadu, Jurangmangu, dan Kreo. Bulan November 2021 dilakukan koordinasi dengan Direktorat BMN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Museum KAA Bandung. Dari hasil pertemuan tersebut terkait tanah kavling direncanakan akan dilakukan pelepasan hak tanah ke para pegawai. Namun hingga tanggal pelaporan, sesuai informasi Kemenkeu, pelepasan hak tanah tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih adanya moratorium pelepasan hak tanah negara.
8. Sebagai tindak lanjut temuan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung ASEC tidak sesuai ketentuan, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri telah meminta pihak ketiga untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dana yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga dengan total yang harus dikembalikan pihak ketiga sebesar Rp38,6 Milyar.

Sampai dengan tanggal pelaporan telah dikembalikan dana sebesar Rp300 juta oleh PT PP pada tanggal 1 Desember 2021 dengan Kode *Billing* 820211126165302 dan NTPN 480922G4UU95RNPM. Di samping itu, telah diperoleh Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara (SPKMKN) bulan Agustus 2021 dari PT PR dan PT A dalam upaya pengembalian kelebihan pembayaran dari penyedia barang/jasa tersebut. Sampai dengan tanggal pelaporan belum ada perkembangan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut.

9. Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK tahun 2020 atas Penatausahaan Kas pada KBRI Lisabon, Sekretariat Jenderal bersama dengan Inspektorat Jenderal telah melakukan penelusuran selisih kas pada KBRI Lisabon melalui wawancara konfirmasi dengan Pengelola Keuangan, verifikasi data dukung dan perbaikan pembukuan pada Aplikasi SIMKEU *Real Time*. Pada tanggal 27 dan 28 April 2022 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Kesanggupan Membayar (SKM) sebesar USD18,195.56 dan EUR6,282.49 oleh Pengelola Keuangan terkait dan telah dibukukan sebagai PK – SKTA 2016-2019 pada aplikasi SIMKEU. Pada penyusunan LK Audited TA 2023 telah dilakukan reklasifikasi akun Kas Bendahara Pengeluaran ke akun Aset lain-lain atas saldo PK – SKTA Sdr NA (2016-2019) sebesar USD24,222.13 dan dibukukan pada tanggal 21 Maret 2024. Sampai dengan periode 31 Desember 2024 sudah terdapat cicilan dari Pengelola Keuangan a.n. Sdri. NA sebesar EUR604.00 sehingga saldo PK – SKTA a.n Sdri NA tercatat

sebesar USD18,195.56 dan EUR5,678.49. Atas PK-SKTA tersebut telah tersaji pada akun Aset lain-lain di Satker Sekretariat Jenderal, mengingat Sdri. NA menggunakan mekanisme potongan SPM gaji bulanan Sdri. NA untuk mencicil PK - SKTA tersebut.

10. Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK Tahun 2022 atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Perbaikan di Lingkungan Kemenlu oleh PT Bermica Karya Kreasi, Biro Umum telah mengirimkan Surat Kepala Biro Umum kepada PT Bermica Karya Kreasi Nomor 0043/PL/04/2023/26 tanggal 17 April 2023 perihal Penarikan Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Perbaikan di Lingkungan Rumah Dinas Eselon I oleh PT Bermica Karya Kreasi.

Mengingat belum ada tindak lanjut dari PT Bermica, maka pada tanggal 4 Oktober 2023, Biro Umum mengirim surat kembali kepada PT Bermica dengan Nomor 18467/PL/10/2023/26 perihal Penarikan kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Perbaikan di lingkungan Kemenlu oleh PT. Bermica Karya Kreasi. Sampai dengan tanggal pelaporan, belum ada tindak lanjut dari PT Bermica Karya Kreasi.

11. Di samping itu, dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK tahun 2022 atas Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Perbaikan di Lingkungan Kemenlu oleh PT Dalika Maju Mandiri, Biro Umum telah mengirimkan kepada PT Dalika Maju Mandiri dengan surat Kepala Biro Umum nomor 0048/PL/04/2023/26 tanggal 17 April 2023 perihal Penarikan Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Perbaikan di Lingkungan Kemenlu oleh PT Delika Maju Mandiri.

Mengingat belum ada tindak lanjut dari PT Delika Maju Mandiri, maka pada tanggal 4 Oktober 2023, Biro Umum mengirim surat kembali kepada PT Delika Maju Mandiri dengan nomor 18370/PL/10/2023/26 perihal Penarikan kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Perbaikan di lingkungan Kemenlu oleh PT. Dalika Maju Mandiri. Sampai dengan tanggal pelaporan, belum ada tindak lanjut dari PT Delika Maju Mandiri.

Perkembangan
Penyelesaian
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi

F.2. PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Kemenlu telah berupaya untuk menindaklanjuti penyelesaian kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Sampai dengan periode 31 Desember 2024 terdapat perkembangan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebagai berikut:

**Tabel 113: Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara oleh TPKN
Periode Januari – Desember 2024**

No	Nama / (Satker Kejadian)	Temuan	Sisa Piutang		Penyelesaian	Sisa Piutang		
			Per 31 Des 2023			Per 31 Des 2024		
1	IPH / (KBRI Astana)	Penggunaan anggaran DIPA TA 2021 untuk pembayaran Sewa Gedung KBRI Astana yang tidak sesuai ketentuan	USD	89,009.26	USD	1,135.91	USD	87,873.35

Berdasarkan rekonsiliasi piutang negara pada Kemenlu dengan KPNL Jakarta I pada 14 Mei 2024, terdapat piutang TGR an. Sdr. RKM (KJRI Johor Bahru) yang telah mendapatkan pernyataan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai dengan surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PSBDT-06/PUPNC.10.01/2022 tanggal 22 September 2022. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 163/PMK. 06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), usulan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kemenlu telah menyampaikan permohonan rekomendasi penghapusan piutang tersebut melalui surat Nomor 01427/KU/06/2024/03 tanggal 3 Juni 2024. Selain piutang negara yang telah mendapatkan PSBDT, terdapat koreksi atas pencatatan nilai piutang yang semula dicatat sebesar nilai pokok ditambah biaya denda menjadi sebesar nilai kerugian awal, sedangkan untuk biaya denda diakui pada saat terjadi cicilan atau pembayaran dari penanggung hutang ke Kas Negara oleh Kemenkeu.

**Tabel 114: Koreksi Nilai Piutang TP/TGR (Berdasarkan Rekon Piutang
Negara dengan KPKNL) Periode Januari – Desember 2024**

No.	Nama/ (Satker Kejadian)	Temuan	Sisa Piutang Per 31 Des 2023		Penyelesaian	Sisa Piutang Per 31 Desember 2024		
1	NA (KJRI Hamburg)	Manipulasi dan kelebihan pembayaran VAT bensin, VAT pembelian kendaraan dinas, kelebihan pembayaran TSR, pengeluaran untuk	USD	5,487.90	USD	(498.90)	USD	5,986.80

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

No.	Nama/ (Satker Kejadian)	Temuan	Sisa Piutang Per 31 Des 2023		Penyelesaian		Sisa Piutang Per 31 Desember 2024	
		kepentingan pribadi, dan pemalsuan faktur	DEM	373,876.81	DEM	(34,034.26)	DEM	407,911.07

Selain penyelesaian pengembalian maupun koreksi atas Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), terdapat perkembangan atas penyelesaian potensi kerugian negara yang telah dibahas oleh TPKN dan belum mendapatkan penetapan BPK. Kemenlu melalui surat nomor 01112/KU/05/2024/03 tanggal 7 Mei 2024 telah menyampaikan Laporan selisih kurang saldo Kas di Bendahara Pengeluaran KBRI Athena oleh Sdr. IS, Bendahara periode Agustus 2015 sd Oktober 2018 untuk mendapatkan penetapan TP oleh BPK.

Tabel 115: Perkembangan Penyelesaian Potensi Kerugian Negara

No.	Nama (Satker Kejadian)	TP / TGR	Temuan	Saldo per 31 Des 2023		Penyelesaian		Saldo per 31 Des 2024	
1	TS (KJRI Johor Bahru)	TP	PFK Dana Pemilu	MYR	42,002.65	MYR	-	MYR	42,002.65
2	E (KBRI Astana)	TP	Selisih Kas di Bendahara	USD	24,809.82	USD	-	USD	24,809.82
				KZT	5,178,373.08	KZT	-	KZT	5,178,373.08
3	IS (KBRI Athena)	TP	Selisih Kas di Bendahara	USD	10,813.94	USD	-	USD	10,813.94
				EUR	654.76	EUR	-	EUR	654.76
4	NA (KBRI Lisabon)	TP	Selisih Kas di Bendahara	USD	18,195.55	USD	641.53	USD	17,554.02
				EUR	5,678.49	EUR	-	EUR	5,678.49

*Penyelesaian
Pengembalian Selisih
Tunjangan
Penghidupan Luar
Negeri (TPLN) atas
Pemberlakuan
Permenlu 04 Tahun
2009 dan Selisih
Lumpsum Tiket
Mutasi di Perwakilan
RI*

F.3. PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SELISIH TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI (TPLN) ATAS PEMBERLAKUAN PERMENLU 04 TAHUN 2009 DAN SELISIH LUMP SUM TIKET MUTASI DI PERWAKILAN RI

Pengembalian selisih TPLN terjadi karena pemberlakuan Permenlu Nomor 4 Tahun 2009. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan instruksi kepada 97 Perwakilan RI yang menerapkan kenaikan TPLN berdasarkan Permenlu Nomor 4 Tahun 2009 untuk mengembalikan selisih TPLN dimaksud ke Kas Negara. Penyampaian permohonan pengembalian disampaikan juga kepada Atase Teknis melalui Kementerian terkait dan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Tercatat 615 Home

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Staff yang harus mengembalikan kelebihan TPLN dimaksud dengan nilai total sebesar USD351,464.54.

Dalam perkembangannya, hasil rapat TPKN tidak menetapkan pengembalian selisih TPLN dimaksud sebagai kerugian negara, sehingga Kemenlu belum mencatat selisih TPLN tersebut ke dalam daftar kerugian negara dan belum mengakui selisih TPLN dimaksud sebagai Piutang TP/TGR. Hal ini disebabkan selisih pembayaran TPLN tersebut terjadi karena adanya penerapan Permenlu Nomor 4 Tahun 2009 yang merupakan peraturan di internal Kemenlu, bukan sebagai akibat adanya kelalaian atau perbuatan melawan hukum oleh Pengelola Keuangan maupun *Home Staff* penerima.

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 1 orang pegawai yang telah melakukan pengembalian kelebihan TPLN sebesar USD469.05, sehingga pegawai yang belum mengembalikan selisih TPLN karena pemberlakuan Permenlu Nomor 4 Tahun 2009 menjadi 5 orang pegawai dengan total sebesar USD2,299.65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116: Rekapitulasi Pegawai yang Belum Mengembalikan Selisih TPLN Akibat Penerapan Permenlu 04 Tahun 2009 per 31 Desember 2024

No	Nama Pejabat	Perwakilan RI Saat Kejadian	Nilai Selisih	
1	Sdr. S	KBRI Paris	USD	502.50
2	Sdr. N	KJRI Johor Bahru	USD	500.85
3	Sdr. YA	PTRI Jenewa	USD	591.30
4	Sdr. BR	KJRI Marseille	USD	502.50
5	Sdr. ST	KBRI Bogota	USD	202.50
	Total		USD	2,299.65

Selanjutnya, berdasarkan hasil reuiu Itjen dalam verifikasi tanda bukti pembelian tiket *at cost* atas 284 orang, maka jumlah keseluruhan tagihan pengembalian selisih tiket per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.017.376.288,00.

Sampai dengan 31 Desember 2024, telah disetorkan ke Kas Negara atas pengembalian biaya selisih tiket 267 orang sebesar **Rp10.565.415.201,00** atau **87,92%**. Sementara yang belum disetorkan oleh pegawai adalah sebesar **Rp1.451.961.087,00** atau **12,08%** dari nilai keseluruhan, dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

1. Kategori lancar: 10 orang mencicil pengembalian tiket lumpsum tersebut. Selama bulan Januari – Desember 2024, 4 orang telah melakukan cicilan pengembalian selisih *lumpsum* tiket penempatan sebesar **Rp42.213.000,00**.
2. Kategori macet: 17 orang belum melakukan pengembalian selisih *lumpsum* tiket penempatan dengan jumlah **Rp947.170.200,00**.

Adapun rincian perkembangan pengembalian selisih *lumpsum* tiket per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 117: Pengembalian Selisih Lumpsum Tiket

(dalam Rupiah)

KETERANGAN PEMBAYARAN	SALDO PER 31/12/2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN/ PELUNASAN	SALDO PER 31/12/2024
1. Lancar *)	547.003.887	-	42.213.000	504.790.887
2. Macet *)	947.170.200	-	-	947.170.200
JUMLAH	1.494.174.087	-	42.213.000	1.451.961.087

KETERANGAN:

*) Lancar = pengembalian dicicil pegawai secara rutin setiap bulan

Macet = pengembalian dicicil/dibayar pegawai tidak rutin atau > 6 bulan

Nilai selisih *lumpsum* tiket penempatan *Home Staff* tidak dicatat sebagai Piutang Bukan Pajak karena belum ada penetapan resmi atas pengembalian tersebut sebagai kerugian negara.

Persekot Kerja Minus pada Perwakilan RI Di Luar Negeri

F.4. PERSEKOT KERJA (PK) MINUS PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

Persekot Kerja (PK) Minus yang berasal dari dana Uang Persediaan (UP) dan/atau Kas Besi (KB) yang menjadi kewajiban Kemenlu disajikan ke dalam akun beban sedangkan PK yang menjadi kewajiban Atase Teknis disajikan ke dalam akun Aset Lain-Lain.

Saldo PK Minus Kemenlu per 31 Desember 2023 tercatat sebesar eqv. USD421,530.98, sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar eqv. USD303,529.89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118: Rincian PK Minus per 31 Desember 2024

(dalam Dollar Amerika)

NO	SUMBER DANA	KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2024	+/-
1	Uang Muka KPPN	PK Kemenlu	137,223.06	64,764.12	72,459
2	Uang Muka KPPN	PK Kementerian Terkait/Atase Teknis	15,430.29	60,011.22	(44,581)
3	Kas Besi	PK Kemenlu	10,883.83	9,417.64	1,466
4	Kas Besi	PK Kementerian Terkait/Atase Teknis	11,971.79	-	11,972
5	PK Plus	PK Kemenlu	173,591.11	96,370.52	77,221
6	PK Plus	PK Kementerian Teknis/Atase Teknis	72,430.90	72,966.39	(535)

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	SUMBER DANA	KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2024	+/-
TOTAL			421,530.98	303,529.89	118,001.09

Rincian lebih lanjut disajikan dalam Lampiran Saldo PK Minus Kemenlu per 31 Desember 2024.

Menindaklanjuti permasalahan PK Minus dimaksud, Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal bersama dengan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Teknis terkait terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan PK Minus Satker Perwakilan RI di luar negeri secara bertahap. Beberapa mekanisme yang dapat dilakukan antara lain:

1. Revisi Anggaran dengan sumber dana melalui optimalisasi anggaran satuan kerja yang bersangkutan;
2. Revisi Anggaran dengan sumber dana dari Pusat (dana cadangan Sekretariat Jenderal);
3. Revisi Anggaran melalui pergeseran anggaran antar satuan kerja; dan
4. Upaya-upaya penyelesaian PK Minus Perwakilan RI yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 antara lain melalui optimalisasi anggaran satker perwakilan dengan berpedoman pada PMK 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

*Pinjaman Resmi
Kementerian Luar
Negeri*

F.5. PINJAMAN RESMI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Pinjaman Resmi adalah pinjaman sejumlah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada DIPA Kementerian kepada PDLN yang dimutasi/dipindahtugaskan ke Perwakilan sebagai persekot yang wajib dikembalikan oleh PDLN dan/atau ahli warisnya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenai bunga pinjaman.

Pinjaman resmi diberikan kepada PDLN unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditempatkan pada Perwakilan di luar negeri atau dipindahkan antar Perwakilan di luar negeri. Pemberian pinjaman tersebut dimaksudkan untuk memberi bantuan kelayakan hidup PDLN pada masa awal penempatan di luar negeri. Pinjaman Resmi dapat digunakan untuk membeli keperluan rumah tangga maupun kebutuhan pokok lainnya dalam rangka membantu penyesuaian diri dengan tempat baru di Perwakilan.

Pemberian pinjaman resmi diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Pinjaman resmi dimaksud meliputi persekot 2 bulan tunjangan penghidupan luar negeri (TPLN) dan persekot pembelian mobil. Pinjaman resmi selanjutnya

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

dikembalikan oleh PDLN dengan cara mengangsur untuk periode paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dimulai pada bulan berikutnya setelah pinjaman diberikan. Selanjutnya, besaran pinjaman resmi PDLN diberikan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-4/AG/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Sesuai DIPA Satker Sekretariat Jenderal Tahun 2024, alokasi anggaran awal pinjaman resmi untuk TPLN adalah sebesar Rp46.770.000.000,00 dan alokasi anggaran awal pinjaman resmi untuk Mobil adalah sebesar Rp.15.135.552.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 rincian sebagai berikut:

Tabel 119: Pagu dan Realisasi Anggaran BPPR per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	511145	521119	Jumlah
Pagu	46.770.000.000	15.135.552.000	61.905.552.000
Realisasi	46.760.082.145	15.129.825.000	61.889.907.145
Sisa Pagu	9.917.855	5.727.000	15.644.855

Berdasarkan catatan SIMKEU *Real Time* 31 Desember 2024 terdapat saldo minus BPPR sebesar (USD137.56) dan saldo plus BPPR sebesar USD24,440.00 pada tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120: Rincian Data BPPR Minus Berdasarkan Simkeu *Real Time* per 31 Desember 2024

No.	Perwakilan	Total Equiv (USD)
1	KJRI HAMBURG	(137.56)
TOTAL EQUIVALENT USD		(137.56)

BPPR minus di KJRI Hamburg sebesar (USD137.56) tersebut merupakan BPPR minus yang muncul karena residu permasalahan selisih kas kurang di tahun 2022. Namun atas selisih tersebut telah diselesaikan di Januari 2025.

Tabel 121: Rincian Data BPPR Plus Berdasarkan Simkeu *Real Time* per 31 Desember 2024

No.	Perwakilan	Total Equiv (USD)
1	KBRI BERN	24,440.00
TOTAL EQUIVALENT USD		24,440.00

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Sedangkan untuk BPPR plus di KBRI Bern sebesar USD24,440.00 belum dilakukan transfer kepada *Home Staff* yang bersangkutan.

Kemudian, pada tanggal 13 Januari 2025 telah dilakukan transfer atas BPPR ke *Home Staff* tersebut.

*Beban Pusat
Perjalanan Dinas
Kementerian Luar
Negeri*

F.6. BEBAN PUSAT PERJALANAN DINAS (BPJ) KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Pagu anggaran BPJ pejabat Kemenlu dari dan ke luar negeri Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp196.062.279.000,00. Setelah dilakukan revisi pagu anggaran beban pusat perjalanan dinas periode 31 Desember 2024 menjadi Rp173.744.944.000,00.

Jenis pengeluaran BPJ terdiri dari biaya tiket perjalanan dinas pindah, biaya lumpsum barang pindahan, dan uang harian tiba di Perwakilan. Pada tahun 2023 masih terdapat biaya penginapan sementara 2 bulan hotel yang dibayarkan tahun 2024.

Realisasi anggaran mutasi perjalanan pindah pejabat Kemenlu dari dan/atau ke luar negeri per 31 Desember 2024 berdasarkan dokumen SP2D adalah sebesar Rp173.738.567.130,00 atau sebesar 99,99 % dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122: Rincian Realisasi Anggaran Mutasi Perjalanan Pindah per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	Jenis Belanja	Akun	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Biaya MPK di Rumah Sakit Rujukan	521219	3.115.185.000	3.115.185.000	-
2.	Biaya tiket mutasi penempatan ke luar negeri	524211	51.590.000.000	515.900.000.003	-
3	Biaya tiket mutasi penarikan dari luar negeri	524211	52.584.000.000	52.584.000.000	-
4	Biaya lumpsum mutasi penempatan ke luar negeri	524211	33.804.000.000	338.040.000.005	-
5	Biaya lumpsum mutasi penarikan dari luar negeri	524211	13.709.400.000	13.709.400.000	-
6	Biaya uang pakaian mutasi penempatan ke luar negeri	524211	9.769.000.000	9.769.400.000	-
7	Biaya uang harian tiba di Perwakilan	524211	5.915.700.000	5.915.700.000	-
8	Biaya uang harian tiba di Pusat	524211	497.670.000	497.670.000	-

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO	Jenis Belanja	Akun	Pagu	Realisasi	Sisa
9	Biaya penampungan 2 bulan di luar negeri	524211	584.609.000	584.609.000	-
10.	Biaya Tiket Mutasi Pindah dari Luar Negeri	524211	2.275.380.000	2.169.003.130	6.376.870
Total Realisasi			173.844.944.000	942.284.967.138	6.376.870

Berdasarkan data pembukuan pada SIMKEU *Real Time* sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat BPJ minus, sebagai berikut:

Tabel 123: Rincian Data BPJ Minus Berdasarkan Simkeu *Real Time* per 31 Desember 2024

No.	Perwakilan	Total Equiv (USD)
1	KBRI BOGOTA	6,287.41
2	KBRI LISABON	176.61
TOTAL EQUIVALENT USD		6,464.02

Tabel 124: Rincian Data BPJ Plus Berdasarkan Simkeu *Real Time* per 31 Desember 2024

No.	Perwakilan	Total Equiv (USD)
1	KBRI MUSCAT	0.01
TOTAL EQUIVALENT USD		0.01

Permasalahan terkait Aset Tanah dan Bangunan yang Dikelola Kementerian Luar Negeri

F.7. PERMASALAHAN TERKAIT ASET TANAH DAN BANGUNAN YANG DIKELOLA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Kemenlu memiliki permasalahan terkait aset tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. Kendala penyelesaian sertifikasi tanah yang berlokasi di Cijantung seluas 139.470 m² karena masih berstatus sengketa.

Pada tanggal 30 April 2024, Menteri Luar Negeri mengirimkan surat No. 149/PL/04/2024/03/01 tanggal 30 April 2024 kepada Menteri Keuangan perihal Upaya Pembenahan Infrastruktur Diplomasi Kemenlu di Pusat. Dalam surat tersebut, Menteri Luar Negeri meminta dukungan Menteri Keuangan untuk mendorong tercapainya jalan tengah dari perbedaan posisi antara pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan Kementerian Pertahanan terkait tanah Cijantung. Opsi penyelesaian yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri adalah tukar guling, dengan kondisi tanah Cijantung dapat tetap digunakan oleh Kementerian Luar Negeri, sedangkan tanah Abdul Muis yang telah diserahkan kepada Kemenlu pada tahun 2018 dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PT

Pertamina) dapat digunakan oleh Pihak Kementerian Pertahanan.

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2024 Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan (BHAKP) melakukan pertemuan dengan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) Kementerian Keuangan. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara dimungkinkan untuk dilakukan penggunaan bersama atas lahan tersebut. Namun demikian, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut atas ketentuan dan pembagian penggunaan bersama.

2. Penguasaan tanah Kementerian Luar Negeri yang berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 68 diduduki pihak ketiga.

Lahan yang berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 68 Jakarta Pusat ini memiliki status hukum yang jelas yaitu tercatat atas nama PT. Pertamina dan sebagian dari tanah tersebut seluas 5.000 m² telah diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri pada tanggal 7 Agustus 2018. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat penggunaan lahan oleh 3 (tiga) kelompok masyarakat yang terdiri dari 250 jiwa yang mempergunakan lahan tersebut tanpa izin. Pada awal tahun 2020, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai pihak yang juga ikut menguasai tanah tersebut telah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk pengosongan lahan yang diserahkan kepada BNN, namun rencana tersebut urung dilakukan karena terjadinya pandemi Covid-19.

Pada tanggal 1 Oktober 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi rencana pengamanan tanah yang berlokasi di Jalan Abdul Muis No.68, Jakarta Pusat yang bertempat di Kementerian Luar Negeri. Pertemuan itu dihadiri oleh tim dari BNN, yaitu Kepala Biro Umum BNN, Direktur Kerja Sama BNN, dan Kepala Bagian Logistik BNN. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri diwakili Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Kerumahtanggaan dan Pejabat Fungsional Bagian Kerumahtanggaan pada Biro Umum, dan perwakilan dari Kepala Bagian Layanan Hukum, beserta staf Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan (BHAKP). Rapat bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pengamanan lahan milik Kementerian Luar Negeri dan lahan milik BNN yang berlokasi di lahan yang sama yaitu di Jalan Abdul Muis No.68, Jakarta Pusat. Hingga saat ini lahan tersebut belum dapat dikuasai oleh Pemerintah (Kemenlu dan BNN) dikarenakan dikuasai oleh penghuni liar yang mendirikan bangunan baik permanen ataupun semi permanen di atas lahan tersebut untuk kepentingan pribadi.

Langkah awal yang akan diambil oleh tim dari BNN untuk melakukan penertiban tersebut adalah dengan mengirimkan somasi kepada para penghuni liar yang menguasai lahan tersebut agar mengosongkan lokasi

dan tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Kementerian Luar Negeri berkomitmen dalam pengamanan aset secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam kaitannya dengan pengamanan aset berupa lahan tanah di Jalan Abdul Muis No.68, Biro Umum Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi intensif dan mendukung upaya yang akan dilakukan oleh BNN. Untuk keperluan pengamanan aset tersebut, Biro Umum Kementerian Luar Negeri telah mengalokasikan anggaran pengamanan lahan di Jalan Abdul Muis No. 68 pada DIPA tahun 2025.

3. Status kepemilikan aset tanah dan bangunan Gedung Museum Konferensi Asia Afrika (Museum KAA) belum didukung bukti kepemilikan dan penetapan status penggunaan.

Kementerian Luar Negeri melalui Surat Menteri Luar Negeri No. 426/PL/11/2022/03/01 tanggal 4 November 2022 menyampaikan bahwa Pimpinan Kemenlu RI memerlukan dukungan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Kementerian Sekretariat Negara untuk kiranya dapat segera mengalihkan status penggunaan Kompleks Gedung Merdeka Bandung kepada Kementerian Luar Negeri.

Guna penyelesaian isu tersebut, Pada tanggal 1 Maret 2024, bertempat di Ruang Rapat Gede Pangrango, Gedung Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA), Bandung, Jawa Barat, telah diselenggarakan pertemuan antara Sekretariat Jenderal MPR RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPK RI pemeriksa MPR RI, dan Kemenlu RI (Kepala MKAA, Perwakilan BHAKP, dan Perwakilan BUM). Pertemuan bertujuan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan aset di Kompleks Gedung Merdeka serta untuk mengetahui perkembangan penyelesaian permasalahan sertifikat tanah dan kepemilikan Gedung Museum KAA Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI menyampaikan bahwa MPR RI berharap Kementerian Luar Negeri dapat segera mencabut keberatan pada BPN Jawa Barat sehingga proses sertifikasi oleh pihak MPR RI dapat segera terselesaikan.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada tanggal 30 April 2024, Menteri Luar Negeri mengirimkan surat Nomor 151/PL/04/2024/03/01 tanggal 30 April 2024 kepada Menteri Keuangan perihal Aset Kompleks Gedung Merdeka Bandung. Melalui surat tersebut, Menteri Luar Negeri meminta dukungan Menteri Keuangan untuk mendorong tercapainya jalan tengah dari perbedaan posisi antara Kementerian Luar Negeri dengan MPR RI mengingat terdapat kebutuhan untuk segera melakukan revitalisasi aset Gedung Merdeka guna mempersiapkan pelaksanaan peringatan KAA ke-70 di Gedung Merdeka dan juga kondisi Gedung Merdeka secara umum telah mengalami banyak kerusakan dan membutuhkan perbaikan besar.

Pada tanggal 27 Mei 2024, Kementerian Luar Negeri telah melakukan pencatatan Aset Gedung Merdeka ke dalam Aplikasi SAKTI dan telah melaporkan pencatatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal vide Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor 23909/PL/05/2024/26 tanggal 31 Mei 2024. Biro Umum Kementerian Luar Negeri juga telah mengusulkan Penetapan Status Pengguna (PSP) atas Komplek Gedung Merdeka ke Kementerian Keuangan pada awal Juni 2024.

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2024 Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan melakukan pertemuan dengan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa sesuai dengan PMK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara dimungkinkan untuk dilakukan penggunaan bersama atas lahan tersebut. Namun demikian, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut atas ketentuan dan pembagian penggunaan bersama tersebut.

Selanjutnya, Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri melalui Surat No. 19054/PL/11/2024/26 tanggal 4 November 2024 menyampaikan kepada Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan perihal Data Dukung terkait Usulan Penetapan Status Penggunaan dan Rencana Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Gedung Merdeka/Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung TA 2024-2025 oleh Kementerian Luar Negeri. Di dalam Surat tersebut disampaikan latar belakang perlunya Penetapan Status Penggunaan atas Gedung Merdeka/MKAA oleh Kementerian Luar Negeri. Adapun latar belakang tersebut adalah Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan pemugaran Gedung Merdeka/MKAA secara menyeluruh mengingat kondisi Gedung tersebut telah rusak parah. Pemugaran gedung perlu dilakukan secepatnya untuk persiapan peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika atau Platinum Jubilee. Pada Surat tersebut disampaikan juga rencana pemugaran dan restorasi Gedung Merdeka oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara rinci.

4. Program Sertifikasi Nasional dan Perubahan Nama Sertifikat Hak Pakai (SHP)

Kementerian Luar Negeri mengajukan 5 (lima) bidang tanah yang belum disertifikasi dalam program Sertifikasi Nasional Tahun Anggaran 2021. Saat ini proses sertifikasi tersebut masih dalam proses dan telah dilakukan pengukuran pada bidang tanah tersebut. Pada pertengahan bulan Desember 2021, merujuk Surat Kantor Pertanahan kota Jakarta Selatan Nomor: SP.02.04/5454.31.74-200/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal konfirmasi aset tanah kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, disampaikan permintaan kejelasan terhadap 5 (lima) bidang tanah di atas karena berdasarkan Peta Jakarta Satu (yang dimiliki

Pemprov DKI Jakarta) alamat kelima bidang tanah tersebut tercatat dalam aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Melalui surat Nomor: 40/-179 tanggal 11 Januari 2022, Suku Dinas Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Kantor Pertanahan kota Jakarta Selatan, Bidang Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Luar Negeri untuk menghadiri rapat yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai bidang tanah yang dicatitkan pada Pemprov DKI Jakarta yang berlokasi sama dengan bidang tanah yang dicatitkan pada Kementerian Luar Negeri. Hasil rapat dimaksud sebagai berikut:

- a. Pencatatan oleh Kementerian Luar Negeri dilakukan tahun 1981 sedangkan Pemprov DKI Jakarta mencatatkan tahun 1997.
- b. Kesepakatan atas aset tanah berupa jalan dan saluran air dapat dipelihara dan dimanfaatkan kepentingan masyarakat, Kementerian Luar Negeri melanjutkan proses sertifikasi dan selanjutnya akan dihibahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Atas hasil rapat dimaksud, Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat Nomor 01443/PL/01/2022/26 tanggal 26 Januari 2022 kepada Badan Pengelola Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta yang menyampaikan mengenai rencana sertifikasi bidang tanah atas nama Pemri c.q. Kementerian Luar Negeri. Dalam surat dimaksud Kementerian Luar Negeri menyampaikan beberapa hal termasuk rencana sertifikasi atas 5 (lima) bidang tanah berupa jalan dan saluran air serta rencana hibah aset tanah dimaksud apabila telah diterbitkan sertifikasi atas nama Pemri cq. Kementerian Luar Negeri. Surat dimaksud disampaikan sebagai dasar tindak lanjut pensertifikatan bidang tanah Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2022 Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2022 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, untuk melanjutkan proses sertifikasi 5 (lima) bidang tanah yang masih terhambat dikarenakan kurangnya data dukung, pihak Kanwil BPN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri dapat menyampaikan notulensi rapat koordinasi atau surat keterangan yang menyebutkan bahwa pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetujui proses sertifikasi 5 (lima) bidang tanah dimaksud diusulkan oleh Kementerian Luar Negeri yang ditandatangani oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk digunakan sebagai dokumen pendukung pengusulan sertifikasi oleh Kementerian Luar Negeri.

Dalam notulensi rapat koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan Kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 70/-179 tanggal 12 Januari 2021, telah disepakati bahwa usulan sertifikasi Kementerian Luar Negeri TA 2021 tetap dilanjutkan, sedangkan

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

penyerahan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan melalui mekanisme hibah.

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri melalui surat Nomor 02400/PL/03/2022/26 tanggal 21 Maret 2022 menyampaikan permohonan proses tindak lanjut sertifikasi atas 5 (lima) bidang tanah dimaksud dengan melengkapi dokumen pendukung berupa notulensi rapat dengan Pihak Pemprov DKI Jakarta.

Pada tanggal 7 April 2022, Kemenlu diwakili oleh Kepala Biro Umum didampingi Pejabat dan Staf Bagian Kerumahtanggaan, telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Selatan bertempat di kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Atas usulan permohonan sertifikasi 5 (lima) bidang tanah tersebut, mengingat batas penerbitan target sertifikasi tahun 2021 telah berakhir, pihak Kantah memberikan arahan agar Kemenlu menyampaikan pembatalan dan penarikan berkas permohonan 5 (lima) bidang tanah dimaksud dan mengajukan kembali permohonan sertifikasi dengan sistem mandiri/rutin.

Atas arahan tersebut, Kemenlu melalui surat Nomor 03713/PL/04/2022/26 tanggal 7 April 2022 menyampaikan Permohonan Pembatalan Target Sertifikasi Tanah Tahun 2021 dan Permohonan Usulan Sertifikasi 5 (lima) Bidang Tanah Kementerian Luar Negeri melalui mekanisme mandiri/rutin. Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2022 telah menerbitkan surat perintah setor untuk bea pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk 5 (lima) bidang Tanah dimaksud dan Biro Umum telah melakukan penyetoran pada tanggal 17 Juni 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 125: Rincian Setoran Bea Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan 5 (lima) Bidang Tanah

(dalam Rupiah)

No.	No. NTPN	Tanggal	Jumlah
1	80EF47QLU61BILUE	17 Juni 2022	700.000
2	CF7E155DEMR6BLFT	17 Juni 2022	364.000
3	15D141JNFCHKNK2J	17 Juni 2022	340.000
4	C831461KUHDIOK0G	17 Juni 2022	375.040
5	OC59F48VUS8PUJ24	17 Juni 2022	328.000
Jumlah			2.107.040

Pada tanggal 27 Desember 2022, Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan kembali menerbitkan surat perintah setor sebagai tambahan biaya bea pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk 5 (lima) bidang tanah yang mengalami perubahan luasan setelah dilakukan pengukuran kembali. Biro Umum telah melakukan penyetoran atas biaya bea pelayanan tersebut pada tanggal 28 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 126: Rincian Setoran Bea Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan 5 (lima) Bidang Tanah

(dalam Rupiah)

No.	No. NTPN	Tanggal	Jumlah
1	F0B162G4V7M6SIDT	28 Desember 2022	738.000
2	5780748VUSQVMJSU	28 Desember 2022	360.000
3	A574648VUSQVMJMS	28 Desember 2022	360.000
4	EAE8C55DENDC3J3T	28 Desember 2022	529.280
5	005B60N9VIHE2G10	28 Desember 2022	737.760
Jumlah			2.725.040

Pada tanggal 28 Agustus 2023, telah dilakukan survei lokasi kembali oleh Panitia A Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan bersama Biro Umum Kementerian Luar Negeri. Dalam pelaksanaan survei tersebut, dilakukan pertemuan dengan kelurahan setempat juga penandatanganan Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Lurah setempat. Informasi dari Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya akan diterbitkan SK tentang Pemberian Hak Pakai dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Tanah untuk 5 (lima) bidang tanah tersebut.

Pada tanggal 6 Desember 2023, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan surat Nomor 22916/PL/12/2023/26 tanggal 6 Desember 2023 kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang permohonan sertifikasi aset negara berupa tanah yang digunakan Kemenlu. Bersama surat tersebut juga telah dilampirkan data dukung berupa Surat Permohonan Hak Pakai Selama Dipergunakan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Kartu Identitas Barang untuk 5 (lima) bidang tanah tersebut.

Pada tanggal 11 September 2024, telah diterbitkan sertipikat atas 5 (lima) bidang tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127: Rincian Peta Bidang Tanah yang sudah Bersertifikat

No.	Nomor Sertifikat Hak Pakai	Luas Tanah (M2)	Tanggal Sertifikat
1	09.02.000008791.0	2.447	11-Sep-24
2	09.02.000008796.0	2.600	11-Sep-24
3	09.02.000008797.0	4.000	11-Sep-24
4	09.02.000008789.0	4.075	11-Sep-24
5	09.02.000008790.0	4.220	11-Sep-24
Jumlah		17.342	

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

5. 60 (enam puluh) bidang tanah Bersertifikat Bukan Sesuai Ketentuan (BBSK).

Merujuk Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor: 186/PMK.06/2009 dan Nomor: 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara. Kemenlu memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang masih atas nama Departemen Luar Negeri sebanyak 60 (enam puluh) SHP.

Mengingat hal tersebut, Kemenlu telah mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat yang semula Departemen Luar Negeri menjadi Pemerintah RI c.q. Kementerian Luar Negeri kepada Bagian Sertifikasi Kantor Pertanahan sesuai dengan lokasi tanah yang dimiliki oleh Kemenlu. Sebelumnya telah diungkapkan pada Laporan Keuangan Tahun 2021 bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menerbitkan 19 (sembilan belas) SHP yang telah mengalami perubahan nama menjadi Pemerintah RI c.q. Kementerian Luar Negeri. Adapun rincian perkembangan permohonan perubahan nama sertifikat adalah sebagai berikut:

Tabel 128: Rincian Perubahan Nama Sertifikat

Lokasi Kantor Pertanahan	Jumlah Sertifikat yang Diajukan	Tanggal Perubahan Nama Sertifikat	Jumlah Sertifikat yang Telah Mengalami Perubahan	Sisa Sertifikat
Jakarta Selatan	21	31/12/2021	19	1
		06/07/2022	1	
Jakarta Pusat	3	17/10/2022	2	-
		10/04/2023	1	
Tangerang Selatan	30	07/12/2022	24	6
Tangerang Kota	4	16/01/2023	3	-
		18/04/2023	1	
Bogor	2	07/05/2024	2	-
Total	60		53	7

Dari 7 (tujuh) SHP yang masih berstatus BBSK, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. 1 (satu) SHP No. 438 Jakarta Selatan masih berada di Kantah untuk pemecahan SHM;
- b. 3 (tiga) SHP No. 2 Jurangmangu Timur, No. 2 Pondok Karya dan No. 4 Pondok Karya, Tangerang Selatan masih belum dilakukan perubahan nama dikarenakan terdapat permintaan Kantah untuk melakukan pengukuran ulang luas tanah dan pemasangan palang batas tanah kembali;
- c. 3 (tiga) SHP No. 4 Pondok Betung, No. 3 Jurangmangu Timur dan No. 2 Pondok Betung, Tangerang Selatan masih berada di Kantah untuk pemecahan SHM.

Pengelolaan
Dokumen
Keimigrasian

F.8. PENGELOLAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN

1. Perlakuan atas SPRI/Paspor 24 Halaman

Merujuk berita Direktur Konsuler nomor B-05594/Kemlu/210929 perihal Pengembalian Blanko Paspor 24 Halaman dan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Permenkumham Nomor 25 Tahun 2016 dan perubahannya, pengembalian SPRI/Paspor 24 Halaman dari Perwakilan RI dilakukan melalui Sekretariat Jenderal terhitung tanggal 1 Oktober 2021 hingga 31 Desember 2024. Adapun rincian pengembalian SPRI/Paspor 24 Halaman adalah sebagai berikut:

Tabel 129: Rincian Pengembalian SPRI/paspor 24 Halaman dari Perwakilan RI ke Sekretariat Jenderal

(dalam Rupiah)

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
1	1010315001000002	SPRI/Paspor Biasa 24 Halaman	7.517	buku	62.719	471.458.723
2	1010315999000001	Paspor 24 halaman seri lama	18	buku	62.719	1.128.942
Total			7.535	buku		472.587.665

Sebagaimana yang disampaikan oleh Setditjen Imigrasi pada kesempatan rapat rekonsiliasi penatausahaan dokumen keimigrasian tanggal 21 Juli 2020, SPRI/Paspor 24 Halaman yang dikembalikan ke Ditjen Imigrasi hanya blanko seri AT dan AU. Per tanggal 31 Desember 2023, saldo blanko dengan seri AT sebanyak 950 buku, dan seri AU sebanyak 1.992 buku. Sedangkan seri lainnya sebanyak 4.593 buku tidak dapat dikembalikan ke Ditjen Imigrasi dan belum dapat dilakukan penghapusan oleh Kementerian Luar Negeri dikarenakan Petunjuk Teknis Penghapusan Dokumen Keimigrasian dengan kondisi usang dan rusak masih dalam proses penyusunan bersama.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Sekretariat Jenderal Kemenlu telah melakukan pengembalian SPRI/Paspor 24 Halaman kepada Ditjen Imigrasi sebanyak 1.993 buku pada tanggal 15 November 2023 dengan BAST Nomor BA/02530/PL/11/2023/26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130: Rincian Pengembalian SPRI/Paspor 24 Halaman dari Sekretariat Jenderal Kepada Ditjen Imigrasi

(dalam Rupiah)

No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
1	1010315001000002	SPRI/Paspor 24 Halaman	1.993	buku	62.719	124.998.967
Total			1.993			124.998.967

Tabel 131: Rincian Nomor Perforasi SPRI/Paspor 24 Halaman

No.	Nomor Perforasi				Jumlah	Satuan
	No. Awal		No. Akhir			
1	AT	847387			1	buku
2	AU	78488	AU	78500	13	buku
3	AU	316007			1	buku
4	AU	316009	AU	316250	242	buku
5	AU	550925	AU	552060	1.136	buku
6	AU	599566	AU	599615	50	buku
7	AU	658046	AU	658095	50	buku
8	AU	660001	AU	660500	500	buku
Total					1.993	buku

Koreksi Nilai Blangko Dokumen Keimigrasian atas Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Sebagai laporan, pada bulan Januari 2024 terjadi kesalahan penginputan jenis dokumen keimigrasian ke KBRI Berlin yang seharusnya paspor 48 halaman dan paspor elektronik, tetapi menjadi paspor 48 halaman dan SPLP WNI.

Tabel 132: Transfer Keluar oleh Satker Sekretariat Jenderal ke KBRI Berlin

(dalam Rupiah)

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
1	1010315001000000	SPRI Paspor Biasa 48 Halaman	1500	buku	75.022	112.533.000
2	1010315001000003	SPLP WNI	100	buku	44.715	4.471.500
TOTAL						117.004.500

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Mengingat KBRI Berlin belum melakukan proses Transfer Masuk (TM), maka Satuan Kerja Sekretariat Jenderal melakukan transaksi Koreksi Batal Transfer Keluar Online, pada periode Maret 2024 dan selanjutnya melakukan Transfer Keluar (TK) di Maret 2024 dengan jenis dokumen keimigrasian yang seharusnya ke KBRI Berlin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133: Koreksi Transfer Keluar oleh Satker Sekretariat Jenderal ke KBRI Berlin

(dalam Rupiah)

Semula					
No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	1010315001000000	SPRI Paspor Biasa 48 Halaman	1500	75.022	112.533.000
2	1010315001000003	SPLP WNI	100	44.715	4.471.500
Total					117.004.500
Menjadi					
1	1010315001000000	SPRI Paspor Biasa 48 Halaman	1500	75.022	112.533.000
2	1010315001000006	SPRI Elektronik E-Paspor 48 Halaman	100	202.829	20.282.900
Total					132.815.900

2. Dokumen Keimigrasian In Transit

Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa Sekretariat Jenderal telah mengirimkan dokumen keimigrasian ke beberapa Perwakilan RI pada bulan Desember 2024. Namun demikian, hingga tanggal Neraca dokumen tersebut belum diterima oleh Perwakilan. Hal itu karena status pengiriman dokumen masih in transit di Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan. Sehubungan dengan belum diterimanya pengiriman dokumen keimigrasian dimaksud, maka transaksi Transfer Keluar (TK) belum dilakukan sehingga secara pencatatan, dokumen keimigrasian tersebut masih berada di Sekretariat Jenderal. Adapun rincian pengiriman dokumen keimigrasian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 134: Dokumen Keimigrasian in Transit

(dalam Rupiah)

No	Nama Perwakilan RI	Tanggal Pengiriman	Jenis Dokumen Keimigrasian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Perwakilan RI di Baku	21/11/2024	Paspor 48 Halaman	50	buku	71.040	3.552.000
			Stiker Visa	100	lembar	6.224	622.400
			SPLP WNI	50	buku	37.617	1.880.850
2	Perwakilan RI di Jeddah	10/12/2024	Paspor 48 Halaman	5.000	buku	71.040	355.200.000

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

No	Nama Perwakilan RI	Tanggal Pengiriman	Jenis Dokumen Keimigrasian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
			SPLP WNI	1.500	buku	37.617	56.425.500
3	Perwakilan RI di Paris	24/12/2024	Paspor 48 Halaman	1.000	buku	71.040	71.040.000

Dengan demikian, saldo akhir dokumen keimigrasian di Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 135: Saldo Akhir Dokumen Keimigrasian per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Dokumen Keimigrasian	Berdasarkan SAKTI	in Transit	Koreksi		Jumlah Dokumen Keimigrasian	Satuan	Harga Satuan	Nomor Perforasi		Total Harga
				Keluar	Masuk				Awal	Akhir	
1	SPRI/ Elektronik e-Paspor 48 Hal	18.750	-	-	-	18.750	Buku	202.829	X 3877501	X 3896250	3.803.043.750
2	SPRI/Paspor 48 Halaman	21.250	(6.050)	-	-	15.200	Buku	71.040	E 8844051	E 8854500	1.079.808.000
3	Paspor 48 Halaman seri lama	2	-	-	-	2	Buku	88.990	A1274548	A1274549	177.980
4	SPRI/Paspor 24 Halaman	5.524	-	-	-	5.524	Buku	62.719	AP 790001 AA 225801 AP 790379 AP 790451 AA 028184 AP 146551 AP 790051 AJ 641710 AJ 667001 AS 697853 AT 530267 AP 257951 AT 552204 AN 925537 AT 561087 AP 790151 AT 561010 AT 846536 AT 847688	AP 790050 AA 225994 AP 790450 AP 790500 AA 028197 AP 1466750 AP 790100 AJ 642000 AJ 668000 AS 698500 AT 531000 AP 258000 AT 552300 AN 927500 AT 561200 AP 790200 X X AT 847689	346.459.756
5	Paspor 24 Halaman seri lama	18	-	-	-	18	Buku	62.719	AS359183	AS359200	1.128.942
6	Stiker Visa Biasa	67.401	(100)	-	-	67.301	Lembar	6.224	V6D 481001	V6D 546001	418.881.424
7	SPLP WNI	25.643	(1.550)	-	-	24.093	Buku	37.617	XE 697201	XE 717593	906.306.381
Jumlah											6.555.806.233

Berdasarkan data di atas disampaikan bahwa terdapat beberapa penyesuaian antara SAKTI dengan fisik dokumen keimigrasian yang dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Paspor 48 Halaman
Terdapat 6.050 buku Paspor 48 Halaman yang masih dalam proses in transit
2. Stiker Visa
Terdapat 100 lembar Stiker Visa yang masih dalam proses in transit;
3. SPLP WNI
Terdapat 1.550 buku SPLP WNI yang masih dalam proses in transit.

*Pemanfaatan Barang
Milik Negara*

F.9. PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

Proses perizinan pemanfaatan BMN dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan BMN dimaksud telah dilakukan sesuai dengan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

1. Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga atas sebagian tanah untuk pendidikan oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika Cenderawasih.
 - a. Sebagaimana diungkap pada Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan BMN Kemenlu Nomor 29/LHP/XIV/12/2023 tanggal 6 Desember 2023, BPK menemukan bahwa terdapat pemanfaatan dalam bentuk sewa tanah oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika Cenderawasih (YPDDC) yang tidak berdasarkan persetujuan Pengelola Barang dan perjanjian sewa. Selain itu, tidak terdapat pembayaran sewa atas pemanfaatan BMN pada periode tersebut. Berdasar audit yang dilakukan oleh APIP sebelumnya, maka dilakukan penghitungan biaya sewa untuk periode 2018 s.d. 2022 sebesar Rp834.527.835,00 atau sebesar Rp166.905.567,00 per tahun. Atas hal tersebut, YPDDC telah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp 834.527.835,00 pada 17 April 2023.
 - b. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023, pemanfaatan BMN oleh YPDDC masih belum sesuai dengan persetujuan Pengelola Barang, yaitu terkait dengan penetapan tarif, serta tidak berdasarkan perjanjian sewa. Selain itu, besaran sewa yang telah dibayarkan YPDDC untuk periode 2018 s.d.2022 belum sesuai dengan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
 - c. Untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut, pada tanggal 23 Januari 2024, Biro Umum secara resmi membentuk Tim Internal Kajian Pemanfaatan BMN melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenlu Nomor 18/B/PL/01/2024/03 tanggal 23 Januari 2024 dan sekaligus menyelenggarakan kegiatan kajian internal pemanfaatan BMN untuk mendapatkan skema sewa dan nilai yang tepat untuk BMN dimaksud. Hasil kajian dari Tim Internal Pemanfaatan BMN adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 136: Hasil Kajian Tim Internal Pemanfaatan BMN

No.	Persyaratan Kelayakan	Hasil Kajian
A	Kelayakan Calon Penyewa	<p>Calon Penyewa adalah badan hukum berbentuk Yayasan sesuai dengan Dokumen Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris Ratna Djatnika, SH. Nomor 5 tanggal 19 April 2013 dan Izin Kegiatan Yayasan Nomor 25/F.3/31.74.06.1004/-1.848/e/2020 sehingga termasuk dalam pihak yang dapat melakukan Penyewaan BMN menurut Pasal 10 PMK Nomor 115/PMK.06/2020.</p> <p>Calon Penyewa telah memenuhi kelengkapan dokumen legal yang dipersyaratkan dalam Bab III poin B tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang sesuai KMK Nomor 213/KM.06/2021.</p>
B	Kelayakan BMN Objek Sewa	<p>BMN berupa 5 (lima) bidang Tanah tidak digunakan dan/atau direncanakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenlu. Detail lokasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Iskandarsyah II Melawai, Jakarta Selatan (luas tanah 1.163 m²); 2. Jalan Abdul Madjid Dalam III Cilandak, Jakarta Selatan (luas tanah 2.827 m²); 3. Jalan RS. Fatmawati, Komplek Deplu, Gandaria Selatan (luas tanah 2.374 m²); 4. Jalan RS. Fatmawati, Komplek Deplu, Gandaria Selatan (luas tanah 580 m²); 5. Perumahan Kemenlu Pondok Aren 74, Tangerang. <p>BMN berupa 5 bidang Tanah tidak dapat seluruhnya dimanfaatkan oleh YPDDC dengan pertimbangan 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Pondok Aren belum memiliki Penetapan Status Pengguna dari Kementerian Keuangan sehingga tidak eligible untuk dilakukan proses pemanfaatan oleh pihak lain (detail lokasi sesuai pada butir 1). Kementerian Luar Negeri hanya dapat memproses pemanfaatan BMN untuk 4 bidang tanah lainnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Iskandarsyah II Melawai, Jakarta Selatan (luas tanah 1.163 m²); 2. Jalan Abdul Madjid Dalam III Cilandak, Jakarta Selatan (luas tanah 2.827 m²); 3. Jalan RS. Fatmawati, Komplek Deplu, Gandaria Selatan (luas tanah 2.374 m²); 4. Jalan RS. Fatmawati, Komplek Deplu, Gandaria

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

No.	Persyaratan Kelayakan	Hasil Kajian
		Selatan (luas tanah 580 m2);
C	Kelayakan Peruntukan Sewa	<p>BMN tidak akan digunakan untuk kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, keamanan negara dan masyarakat, dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.</p> <p>Peruntukan BMN untuk penyelenggaraan jasa Pendidikan swasta (SD, SMP, dan SMA) tidak bertentangan dengan nilai agama, sosial, dan budaya.</p>
D	Kelayakan Jangka Waktu Sewa	Jangka waktu sewa diusulkan adalah 5 (lima) tahun dengan mekanisme pembayaran bertahap setiap tahunnya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 115/PMK.06/2020, demikian juga sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 dengan memperhatikan kekhususan dari pelaksanaan jasa pendidikan yang berkelanjutan berdasarkan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014.
E	Kewajaran Pengajuan Besaran Sewa	<p>Yayasan Pendidikan Daya Dutika Cenderawasih Jakarta Selatan mengajukan permohonan Sewa sesuai aturan pada Pasal 21 PMK Nomor 115/PMK.06/2020 sebesar Rp140.976.133,00 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemanfaatan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenlu, perlu dilakukan penyesuaian jangka waktu pemanfaatan oleh YPDDC dari semula diusulkan 1 tahun menjadi 5 tahun. Hal ini dilakukan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. YPDDC secara berkelanjutan dan terus-menerus menjalankan misi sosial dalam bidang pendidikan sehingga proyeksi pemanfaatan lahan milik Kemenlu dapat dipastikan lebih dari 5 tahun ke depan. 2. Keberadaan YPDDC sesuai dengan Dokumen Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris Ratna Djatnika, SH. Nomor 5 tanggal 19 April 2013 telah beroperasi hingga saat ini lebih dari 10 tahun dan masih akan terus beroperasi di tahun-tahun mendatang. YPDDC merupakan Yayasan yang menjalankan kegiatan non bisnis sehingga dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b PMK Nomor 115/PMK.06/2020 diperuntukkan bagi

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

No.	Persyaratan Kelayakan	Hasil Kajian
		kegiatan yang menarik imbalan atas barang/ jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, yang salah satu diantaranya merupakan penyelenggaraan pendidikan nasional. Di samping itu YPDDC selama ini telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga Aparatur Sipil Negara/Kemenlu, sehingga dari hal-hal tersebut dapat diberikan faktor penyesuaian Sewa sebesar 10% (sepuluh persen).
F	Kelayakan Tujuan Sewa	<p>Sewa dilakukan untuk mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>Sewa dilakukan untuk mencegah penggunaan BMN oleh Pihak Lain secara tidak sah.</p> <p>Sewa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.</p>

Pada tanggal 5 Desember 2024, secara resmi Yayasan Pendidikan Daya Dutika Cenderawasih telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Perjanjian Kerja Sama No. PRJ/PL/00090/02/2025/26 untuk periode 1 November 2024 hingga 1 November 2025.

*Tanah Gedung
ASEAN Secretariat
(ASEC)*

F.10. TANAH GEDUNG ASEAN SECRETARIAT (ASEC)

SERTIFIKASI TANAH UNTUK GEDUNG ASEAN SECRETARIAT (ASEC) LAMA

Pada tanggal 4 November 2022, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00305 atas tanah jalan Sisingamangaraja No. 70A, Kelurahan Selong dengan nama pemegang hak Pemerintah RI c.q. Kemenlu.

Selanjutnya Kemenlu menindaklanjuti penerbitan SHP tersebut dengan pengajuan permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan penilaian bangunan di atas tanah tersebut ke Kemenkeu sebagai nilai yang akan dicatat pada Neraca.

Adapun tanah Kemenlu yang digunakan untuk Gedung Kantor Sekretariat ASEAN adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 137: Rincian Tanah dan Gedung Kantor ASEAN Secretariat (ASEC)

No	Kode Barang/NUP/ Nama barang	Merk/Tipe	Alamat	Nilai Buku (dalam ribuan rupiah)	Kuantitas
1.	2010104001/7/ Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Gedung Kantor Asec (baru)	Jl. Trunojoyo No. 1, Selong	98.406.000	11.446 m ²
2.	2010104001/10/ Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Sekretariat ASEAN	Jl. Sisingamangaraj a No.70A, Selong	869.338.835	13.815 m ²

Nilai Tanah Gedung Kantor ASEC Baru belum disajikan sesuai perubahan luasan pada sertifikat Tanah. Hal ini dikarenakan nilai tersebut diperoleh melalui hibah dari Pemprov DKI Jakarta pada 2 Agustus 2016. Perincian tanah yang dihibahkan berdasarkan perjanjian tersebut yaitu seluas 13.200. Namun demikian terdapat perbedaan luasan tanah dikarenakan sebagian tanah digunakan untuk jalan umum. Kemenlu telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut berkoordinasi dengan BPN terkait pengukuran tanah yang menghasilkan luasan yang berbeda dibandingkan dengan data yang ada di sertifikat. Melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor SP.02.04/394-31.74/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 menyatakan bahwa selisih luas 1.754 m² disebabkan karena sebagian tanah digunakan untuk pagar tembok.

Kemenlu telah memperbarui luasan tanah untuk gedung kantor baru Sekretariat ASEAN sesuai dengan luasan pada SHP Nomor 00298, yaitu seluas 11.446 m², namun demikian Kemenlu belum memperbaharui nilai tanah pada aplikasi SAKTI yang digunakan untuk mencatat transaksi BMN maupun aplikasi SIMAN. Kemenlu akan melakukan perubahan data pada aplikasi SAKTI setelah dilakukan pengukuran kembali oleh BPN.

Dari hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan terdapat juga perbedaan signifikan nilai dua persil tanah walaupun pada satu premis yang sama. Hal ini dikarenakan tanah untuk gedung kantor lama Sekretariat ASEAN tersebut telah dinilai oleh KPKNL Jakarta I. Adapun untuk Gedung Kantor Sekretariat ASEAN yang baru belum dilakukan penilaian kembali oleh Direktorat Penilaian, sehingga nilai yang tercantum adalah nilai yang berasal dari Hibah dari Pemprov. DKI Jakarta. Perbedaan disajikan pada tabel berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

**Tabel 138: Rincian Tanah dan Gedung Kantor ASEAN Secretariat (ASEC)
Setelah Penilaian Kembali**

No	Kode Barang/NUP/ Nama barang	Nilai Buku (Rp)	Kuantitas (m ²)	Nilai per meter persegi (Rp)
1.	2010104001/7/ Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	98.406.000.000	11.446 m ²	8.597.413,94
2.	2010104001/10/ Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	869.338.835.000	13.815 m ²	62.927.168,66

*Permasalahan
Rumah Dinas/Rumah
Negara Kementerian
Luar Negeri*

F.11. PERMASALAHAN RUMAH DINAS/RUMAH NEGARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Kemenlu memiliki 45 (empat puluh lima) rumah dinas yang berstatus Rumah Negara Golongan I yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara disebutkan bahwa Rumah Negara Golongan I merupakan Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuninya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu.

Pada tanggal 9 Desember 2008, terdapat 13 (tiga belas) penghuni rumah negara yang mengajukan gugatan perdata atas permasalahan pembatalan status rumah negara golongan III yang mereka huni dikarenakan kesalahan administrasi. Hingga di tahun 2016 gugatan telah sampai pada PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung (MA) dan telah mencapai *inkracht* berdasarkan putusan MA Nomor 18 PK/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 bahwa menolak PK dari ketiga belas penghuni rumah negara. Merujuk hal tersebut, Kemenlu berupaya melakukan pendekatan persuasif dengan menghubungi para penghuni secara langsung dan menyampaikan surat pengosongan rumah negara.

Dalam perkembangannya, dari 13 (tiga belas) unit rumah negara, terdapat 6 unit rumah negara yang sudah kosong dan 7 unit rumah negara lainnya masih dihuni. Berdasarkan laporan koordinasi dengan Kemenkeu, upaya Kemenlu dapat dilanjutkan dengan menyampaikan surat pengosongan rumah negara kembali namun apabila tidak terdapat tanggapan dari penghuni rumah, maka dapat melakukan upaya lanjutan seperti pemadaman listrik, penghentian aliran air ke rumah dimaksud hingga pemutusan jaringan telepon.

Upaya dimaksud telah dikoordinasikan dengan BHAKP Kementerian Luar Negeri dan terdapat salah satu usulan mengenai pelaksanaan kerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kantor Kejaksaan Agung RI. Salah satu upaya dimaksud dianggap dapat menjadi cara paling efektif dengan

mempertimbangkan aspek hukum yang mungkin akan dilakukan kembali oleh para penghuni tersebut serta mempertimbangkan pengamanan aset negara yang lebih baik.

Pada tanggal 16 September 2023 BHAKP telah mengadakan rapat terkait permasalahan rumah negara. Dalam rapat dimaksud disampaikan rencana aksi untuk pengosongan rumah negara dimaksud, antara lain, yaitu sbb:

- a. Atas rumah negara yang dihuni oleh pejabat/pegawai yang sudah tidak lagi aktif sebagai PNS (pensiun), Biro Umum telah menyampaikan Surat Peringatan Pengosongan rumah negara dan menyusun konsep Surat Keputusan Pengakhiran/Pemutusan Penghunian rumah negara, merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, disebutkan bahwa **“Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri”**;
- b. Penyusunan *time frame* dalam upaya penertiban rumah negara agar dapat dilaksanakan secara teratur;
BHAKP menyusun strategi pengosongan rumah dengan tetap memperhatikan asas hukum dan kemanusiaan dan berkoordinasi dengan pihak Pemda, Satpol PP dan pihak berwenang lainnya, serta akan meminta permohonan eksekusi putusan pengadilan.

Menindaklanjuti hasil rapat, telah diterbitkan 4 Surat Keputusan Pengakhiran izin penghunian Rumah Negara kepada 4 (empat) Pegawai yang telah Pensiun, dan yang bersangkutan telah menandatangani surat pernyataan pengembalian kunci rumah, serta SK Pengakhiran Izin Penghunian Rumah Jabatan Eselon I di Jagakarsa yang dihuni oleh keluarga dari mantan pejabat Eselon I Kementerian Luar Negeri yang telah pensiun.

Pada tanggal 27 Desember 2023, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri melalui Surat Nomor 24022/PL/12/2023/26 tanggal 27 Desember 2023 memberikan peringatan kepada 2 penghuni rumah negara Arinda Permai I Pondok Aren untuk segera mengosongkan rumah negara tersebut karena yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi sebagai PNS Kementerian Luar Negeri (Pensiun). Pada tanggal 30 April 2024, 2 (dua) penghuni rumah negara tersebut telah mengosongkan dan mengembalikan kunci kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Pengungkapan Atas Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Berupa Tanah, Bangunan, Struktur, Dan Fasilitasnya

F.12. PENGUNGKAPAN ATAS HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG BERUPA TANAH, BANGUNAN, STRUKTUR, DAN FASILITASNYA

Pada tanggal 31 Oktober 2024, Kementerian Luar Negeri telah menerima Hibah dari *The Secretary of State for Foreign Commonwealth & Development Affairs of The United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland* berupa Hak Pakai atas tanah, bangunan, struktur, dan fasilitasnya di atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Menteng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 328.944.411.000,00 yang terdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Menteng tanggal 30 November 1961. Hal tersebut tertuang pada Perjanjian tentang Hibah Hak Pakai atas Tanah, Bangunan, Struktur, dan Fasilitasnya No. PRJ/PK/00012/10/2024/03 tanggal 31 Oktober 2024.

Perjanjian tersebut diperkuat dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA/01781/PL/10/2024/26 tanggal tanggal 31 Oktober 2024 antara *The Secretary of State for Foreign Commonwealth & Development Affairs of The United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland* dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Luar Negeri telah mendapatkan penetapan nomor register hibah langsung dengan nomor 2K43744A melalui Surat dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Nomor S-5/PR.8/2025 tanggal 6 Januari 2025. Surat tersebut merupakan salah satu syarat untuk melakukan registrasi pada aplikasi SAKTI atas hibah langsung dimaksud.

Proses pendaftaran hibah langsung pada aplikasi SAKTI telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri dan telah mendapatkan Memo Persetujuan Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga No. 03458T pada tanggal 31 Desember 2024 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Force Majeure Yang Terjadi di Perwakilan RI Di Luar Negeri

F.13. FORCE MAJEURE YANG TERJADI DI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

KEBAKARAN WISMA INDONESIA PADA KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI CHICAGO

Berdasarkan laporan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Chicago telah terjadi kebakaran di Wisma Indonesia pada tanggal 2 September 2020. Dalam peristiwa tersebut Konsul Jenderal RI Chicago dan keluarga dalam keadaan selamat, dan api berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran (Damkar) atau *Fire Department* (FD). Dugaan awal petugas FD, api berasal dari insulasi di bawah atap yang mengalami panas berlebih sehingga menimbulkan

api. Catatan: pada saat kejadian tengah dilakukan pekerjaan perbaikan Wisma Indonesia dan pemasangan sekat anti air oleh kontraktor. Asap keluar dari atap gedung bagian tengah pada pukul 12.30 waktu setempat.

Pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, petugas FD dan kontraktor kembali datang untuk memastikan situasi benar-benar telah aman, dan selanjutnya dilakukan pembersihan. Namun pada pukul 08.40 waktu setempat asap kembali terlihat pada atap wisma bagian tengah dan berhasil dipadamkan kembali oleh petugas FD. Dari hasil pemeriksaan petugas FD bahwa bahan insulasi lama di atap wisma berpotensi menyimpan panas.

1. Penyebab Kebakaran

Kebakaran disebabkan secara tidak sengaja (*unintentional*). Titik awal api berasal dari permukaan atap bagian luar, dengan sumber api adalah percikan dari alat pembakar (*burner portable*) yang digunakan saat perbaikan atap, didukung oleh material yang mudah terbakar pada bagian atap wisma saat dilakukan pekerjaan perbaikan atap. Dalam *basic report* disebutkan bahwa kelalaian kontraktor perbaikan atap wisma merupakan penyebab timbulnya kebakaran.

2. Pemeriksaan Kerusakan dan Taksiran Awal Kerugian

Pemeriksaan dampak kerusakan material bangunan dilakukan oleh *adjuster* dan penilaian kerusakan struktur bangunan dilakukan oleh *structure engineer* yang didatangkan oleh asuransi. Taksiran awal kerugian yang dilakukan petugas FD atas kejadian tersebut antara lain:

- Kerugian properti sebesar USD500,000.00
- Kerugian barang sebesar USD200,000.00

3. Penggantian Asuransi State Farm

Pemeriksaan dampak kerusakan material bangunan dilakukan oleh *adjuster* dan penilaian kerusakan struktur bangunan dilakukan oleh *structure engineer* yang didatangkan oleh asuransi. Dari hasil pemeriksaan, asuransi menanggung biaya perbaikan kerusakan bangunan dan kerugian barang. Pada periode 1 Oktober s.d. 11 November 2020, pihak SF telah mengeluarkan 6 (enam) lembar cek total sebesar USD1,144juta yang ditujukan kepada KJRI Chicago untuk penggantian biaya renovasi wisma akibat terbakar. Namun, cek dimaksud tidak pernah tiba dan diterima oleh KJRI Chicago. Diduga cek tersebut dicegat saat dalam pengiriman ke KJRI Chicago oleh pihak kontraktor (general contractor) yang awalnya bertanggung jawab atas proses pembangunan kembali. Atas kasus pemalsuan cek tersebut, hingga saat ini masih dilakukan proses litigasi di pengadilan setempat.

Pada tanggal 17 September 2021, KJRI Chicago telah menerima surat dari pihak asuransi *State Farm* yang menyampaikan persetujuan penambahan dana sebesar USD774,671.90. Jumlah tersebut merupakan tambahan biaya renovasi Wisma KJRI Chicago yang sebelumnya telah dibayarkan sebesar USD1,178,337.77. Dalam Surat tersebut, pihak asuransi *State Farm* juga setuju untuk membayar penggantian *personal property loss*, yang akan disampaikan melalui Surat terpisah. Sesuai dengan komunikasi antar Pengacara, pihak asuransi *State Farm* juga telah menyetujui perpanjangan waktu penyampaian *Sworn Proof of Loss* (SPoL) yang baru hingga 1 Oktober 2021. Pada tanggal 17 Januari 2023, pihak asuransi *State Farm* telah membayarkan dana *depreciation cost* sebesar USD601,253.48 kepada KJRI Chicago. Dana tersebut saat ini tersimpan pada *trust account* di bawah pengawasan bersama pihak KJRI Chicago dan Tim Penasihat Hukum.

Posisi awal dana yang terdapat pada account dana *Trust Fund* adalah USD1,545,005.00. Berdasarkan SK Kepala Perwakilan KJRI Chicago nomor melalui SK Kepri Nomor SK-31/KU/IX/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengendalian *Trust Fund* Hasil Klaim Asuransi Wisma Kepala Perwakilan RI di Chicago, dana *Trust Fund* digunakan untuk pembiayaan tahap *demolition* kepada kontraktor, biaya jasa konsultan hukum dan pembiayaan lainnya dalam rangka pembangunan kembali wisma sehingga posisi saldo *Trust Fund* per 14 Maret 2025 adalah sebesar USD966,308.15

Pada Tahun 2024, KJRI Chicago telah melaksanakan pemusnahan/*demolition* wisma tersebut dan pembuatan dokumentasi laporan serta Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan telah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024. Proses penghapusan wisma melalui aplikasi SAKTI juga telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2024.

Dari sisi permasalahan hukum, pada Tahun 2024 telah dilaksanakan *hearing* oleh Pengadilan Cook County, Illinois terhadap tuntutan pihak kontraktor A&M Investors, Inc. yang mengajukan *Motion to Dismiss*. Hasil putusan pengadilan Cook County tanggal 16 Agustus 2024 diantaranya adalah:

- Tiga tuntutan dari pihak tergugat A&M Investors Inc ditolak;
- Pihak tergugat diberikan 28 hari untuk memberi tanggapan;
- Putusan pengadilan Cook County ditandatangani oleh Judge Mary Colleen Roberts-1937;
- Dengan ditolaknya *Motion to Dismiss* yang diajukan tergugat, proses peradilan terhadap A&M Investors Inc. terus berlanjut dan KJRI Chicago bersama pengacara Dwayne R. Day dan Harun Calehr terus memantau perkembangan proses peradilan ini.

PENJARAHAN BMN PADA KBRI KHARTOUM

Pada tanggal 15 April 2023 telah terjadi konflik bersenjata dan pertempuran berskala besar antara Angkatan Bersenjata Sudan dengan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Baku tembak dan pertempuran yang melibatkan persenjataan berat dan artileri terjadi di beberapa titik di Ibukota Khartoum antara lain di Bandara Internasional yang berjarak kurang dari 1 km dari Wisma Indonesia. Dalam rangka upaya perlindungan WNI tersebut, KBRI Khartoum telah menetapkan status siaga II dan Rencana Kontijensi KBRI Khartoum serta menyampaikannya ke Pusat. Pada tanggal 28 April 2023 KBRI Khartoum dimasuki Pasukan Pendukung Pemberontak dengan cara membuka paksa gerbang KBRI Khartoum yang telah dikunci dan dirantai. Dari pembobolan tersebut terdapat sejumlah BMN hilang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 139: Rincian Kendaraan Dinas Hilang Akibat Penjarahan

(dalam Rupiah)

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
1	3020101001	5	Sedan - Mercedes Benz E350 (47/3)	2005	1	468.062.000
2	3020101001	8	Sedan - Toyota Camry GL (47/4)	2013	1	442.179.730
3	3020101001	9	Sedan - Toyota Camry GL (47/5)	2013	1	442.179.730
4	3020101001	10	Sedan - Mercedes Benz S450 (47/1)	2022	1	1.799.076.748
5	3020101002	2	Jeep - Toyota Prado (47/2)	2017	1	502.228.607
6	3020101003	1	Minibus - Hyundai H-1 (47/6)	2013	1	516.374.655
7	3020101002	1	Pickup - Toyota Hilux Double Cabin (47/13)	2018	1	312.232.500
Jumlah					7	4.482.333.970

Selain unit kendaraan dinas, terdapat juga gedung dan bangunan yang rusak, diantaranya:

Tabel 140: Rincian Gedung dan Bangunan Rusak Akibat Penjarahan

(dalam Rupiah)

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
1	4010113003	1	Gedung Pos Jaga Darurat	2008	1	28.436.000
2	4010113003	2	Gedung Pos Jaga Darurat	2010	1	30.016.000
Jumlah					2	58.452.000

Disamping itu, terdapat pula BMN yang memerlukan penghapusan dalam kewenangan Pengguna Barang, sebagai berikut:

Tabel 141: Rincian BMN yang Memerlukan Penghapusan

(dalam Rupiah)

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
1	3010304001	1	Transportable Generating Set - Perkins	2006	1	267.540.000
2	3100203003	39	Printer - Datacard Printer Passport PB500 Gen2/D	2017	1	289.546.944
3	3010304001	1	Server - HP Proliant DL 380G9-064	2017	1	364.418.351
Jumlah					3	921.505.295

Rincian BMN sebagaimana pada tabel 139 - 141 di atas telah dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024.

Saat ini KBRI Khartoum sedang dalam proses penghapusan BMN karena sebab lain (masih dalam proses pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) berupa inventaris dan peralatan kantor sejumlah 1.017 (seribu tujuh belas) unit. Berdasarkan PMK Nomor 271/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, penghapusan BMN dimaksud menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Barang.

*Pengelolaan
Provident Fund pada
Perwakilan RI*

F.14. PENGELOLAAN PROVIDENT FUND PADA PERWAKILAN RI

Provident Fund adalah tabungan yang akan dikembalikan oleh Perwakilan kepada Pegawai Setempat beserta seluruh bunganya pada saat yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Perwakilan. *Provident Fund* merupakan pengganti pesangon yang telah ditiadakan sesuai surat edaran Nomor S.E.0189/OT/VII/2007/02. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Permenlu Nomor 07/A/KP/X/2006/02, pengelolaan *provident fund* dilakukan secara manual oleh Pengelola Keuangan di Perwakilan RI, dan disesuaikan dengan kondisi aturan perbankan negara penerima di masing-masing perwakilan.

*Pembayaran
Rekening
Penampungan Akhir
Tahun Anggaran
(RPATA) Tahun
Anggaran 2023*

F.15. PEMBAYARAN REKENING PENAMPUNGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN (RPATA) TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, diatur mengenai penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023, diatur bahwa:

1. RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.
2. Pekerjaan dimaksud merupakan:
 - a. pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran.
3. Pekerjaan pada poin 2 merupakan pekerjaan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran:
 - a. LS kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; atau
 - b. LS non kontraktual tanggap darurat bencana
4. Pekerjaan poin 2 tidak termasuk pekerjaan dari suatu Kontrak yang dibiayai dari pendapatan badan layanan umum.

Selama periode 31 Desember 2024 terkait pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran - saldo akun Utang Pihak Yang Belum Diterima Tagihannya dan pada bulan Januari 2024 telah terbit SP2D, terdapat 3 Satker Pusat yang memiliki transaksi pembayaran melalui RPATA sebagai berikut:

1. KANTOR PUSAT DITJEN PROTOKOL DAN KONSULER (404202)

Transaksi dengan Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA), pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, yaitu:

- 1) Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Helpdesk Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri TA 2024 dengan BAST nomor BASTB/PL/01/12/2024/66 tanggal 31 Desember 2024. Nilai pembayaran sebesar Rp143.967.000,00 telah diselesaikan melalui transaksi penampungan RPATA sesuai dengan SPM nomor 01254A tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240180301000640 tanggal 27 Desember 2024. Pembayaran telah diterima PT. Traspac Makmur Sejahtera melalui transaksi Pembayaran RPATA dengan SPM nomor 00001A tanggal 9 Januari 2025 dan SP2D nomor 259991301003102 tanggal 10 Januari 2025.
- 2) Pengadaan Penyediaan Tenaga Kerja Alih Daya TA 2024 dengan BAST nomor BASTB/02027/PL/12/2024/62 tanggal 31 Desember 2024. Nilai pembayaran sebesar Rp76.907.840,00 telah diselesaikan melalui transaksi penampungan RPATA sesuai dengan SPM nomor 01253A tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240180301000622 tanggal 27 Desember 2024. Pembayaran telah diterima PT Provinces Indonesia melalui transaksi Pembayaran RPATA dengan SPM nomor 00002A tanggal 9 Januari 2025 dan SP2D nomor 259991301003134 tanggal 10 Januari 2025.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

**2. PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN
DAN PERWAKILAN (PUSTIK KP) – (651884)**

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas. Dana yang dibatasi penggunaannya pada Pusat TIK KP ini berasal dari transaksi RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun). Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024, salah satu kategori pekerjaan yang memenuhi syarat pembayaran menggunakan mekanisme RPATA adalah LS Kontraktual dengan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2024. SPM Penampungan RPATA dibuat pada akhir TA 2024, dan SPM Pembayaran RPATA dibuat pada awal TA 2025.

Tabel 142: Rincian atas saldo RPATA Pustik-KP

(dalam Rupiah)

No	Nama Penyedia	Uraian Pekerjaan	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
1	PT. SENTRA NETCOMINDO	Perpanjangan Lisensi, Annual Technical Support HSM Thales Luna Kemlu TA 2024 sesuai BAST/BAPP No. BAST/117/PPK-PUSTIK/XII/2024/19 Tanggal 30-12-2024	25999130 2003052	08-Jan-25	393.000.000
2	PT. ARULOGIC LABS INDONESIA	Perpanjangan Lisensi Subscription Platform Nextcloud Kemlu TA 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST/111/PPK-PUSTIK/XII/2024/19 Tanggal 24-12-2024	25999130 2003063	08-Jan-25	1.345.000.000
3	PT. KAYREACH SYSTEM	Perpanjangan Lisensi Subscription Zoom Virtual Meeting Kemlu TA 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST/115/PPK-PUSTIK/XII/2024/19 Tanggal 30-12-2024	25999130 2003107	08-Jan-25	277.000.000
4	PT. AYOOKLIK AIRMAS PERKASA	Perpanjangan Lisensi Subscription Endpoint Security Kemlu TA 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST/113/PPK-PUSTIK/XII/2024/19 Tanggal 30-12-2024	25999130 2003051	08-Jan-25	555.000.000
5	PT. IP NETWORK SOLUSINDO	Pengadaan Jasa Tenaga Helpdesk Layanan TIK Kemlu TA 2024 Termin XII sesuai BAST/BAPP Nomor BAST/032/PPK-PUSTIK/XII/2024/19 Tanggal 31-12-2024	25999130 2003080	08-Jan-25	172.716.000

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

No	Nama Penyedia	Uraian Pekerjaan	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
6	PT. GARUDA MAS RENTALINDO	Pengadaan Jasa Sewa Mesin Fotokopi dan Faksimile Multifungsi Pusat TIK KP TA 2024 Termin XII sesuai BAST/BAPP Nomor BAST/005/PPK-PUSTIK/XII/2024/19 Tanggal 31-12-2024	25999130 2003133	08-Jan-25	74.400.000
7	PT. AIR MAS PERKASA	Jasa Sewa Laptop Pusat TIK KP Kemlu TA 2024 Termin IV sesuai BAST/BAPP Nomor BAST/007/PPK-PUSTIK/XII/2024/19 Tanggal 31-12-2024	25999130 2003095	08-Jan-25	123.360.000
8	PT APLIKANUSA LINTASARTA	Pengadaan Jasa Sewa Layanan Internet, Local Leased Line dan Global IP VPN-II Kemlu TA 2024 Termin VI sesuai BAST/BAPP Nomor BAST/001/PPKPUSTIK/XII/2024/19 Tanggal 31-12-2024	25999130 2003083	08-Jan-25	593.450.000
9	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	Pengadaan Jasa Sewa Layanan Internet, Local Leased Line dan Global IP VPN-I Kemlu TA 2024 Termin VI sesuai BAST/BAPP Nomor BAST/003/PPKPUSTIK/XII/2024/19 Tanggal 31-12-2024	25999130 2004399	09-Jan-25	2.006.426.400
					5.540.352.400

3. KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI (403247)

Berdasarkan amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024, seluruh Kementerian dan Lembaga wajib melakukan transaksi pengeluaran dan penerimaan negara di bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Berdasarkan PER-13/PB/2023 pula diketahui bahwa transaksi kontraktual dengan periode Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 23 s.d. 31 Desember 2024 diarahkan untuk menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme RPATA ini secara garis berat membagi pengajuan pembayaran kontraktual di akhir tahun menjadi 3 (tiga) jenis SPM yaitu SPM-Penampungan, SPM-Pembayaran, dan SPM-Penihilan.

Pada tahun anggaran 2024, satker Sekretariat Jenderal telah mengajukan 15 (lima belas) SPM-Penampungan atas pembayaran pekerjaan 13 (tiga belas) kontrak dengan total Rp19.930.825.721,00 dan telah terbit SP2D-Penampungan

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

pada tanggal 27 Desember 2024.

Selanjutnya, satker Sekretariat Jenderal menerbitkan 15 (lima belas) SPM-Pembayaran dengan total Rp19.575.806.758,00 dengan periode SP2D-Pembayaran di tahun anggaran 2025. Jumlah selisih Rp355.018.963,00 dikarenakan nilai BAST akhir lebih kecil daripada nilai pengajuan SPM-Penampungan telah dikembalikan ke Kas Negara melalui SPM-Penihilan pada bulan Januari 2025 sesuai lampiran pada Laporan Keuangan TA 2024 ini.

*Pengungkapan Atas
Capaian Output
Strategis
Kementerian Luar
Negeri Tahun 2024*

**F.16. PENGUNGKAPAN ATAS CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS
KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2024**

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kemenlu mendapatkan Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional VII - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kemenlu melaksanakan Prioritas Nasional VII melalui 1 program prioritas, 2 kegiatan prioritas, yang tersebar di 3 Satker Pusat dan 127 Satker Perwakilan RI (kecuali KBRI Pyongyang yang ditutup sementara dan Perutusan Tetap Republik Indonesia) dengan pagu mencapai sebesar Rp220.068.795.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp193.676.611.448,00 (88,01%). Pada akhir 2024 telah dilakukan realokasi anggaran Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri untuk Belanja Pegawai Tunjangan Penghasilan Luar Negeri (TPLN) di Perwakilan RI. Capaian kinerja Prioritas Nasional VII hingga 31 Desember 2024 tercatat dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : Kementerian Luar Negeri
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Satker : Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri							
KP1 Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri							
Perundingan Batas Maritim, implementasi perjanjian pengelolaan ruang udara;	2.775.000.000	2.713.968.960	97,80 %	Kesepakatan	8	8	100%

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
pemutakhiran kebijakan satu peta							

Capaian output strategis terealisasi hingga 31 Desember 2024 adalah 8 kesepakatan dari hasil pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim (PBM) RI – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Rakor Persiapan dan Tindak Lanjut hasil Perundingan PBM RI dengan Negara Tetangga Lainnya, Yogyakarta, 28 – 31 Januari 2024;
2. Pertemuan ke-46 *Co-Project Director Sector Sabah* – Kalimantan dan pertemuan ke-56 *Co-Project Director Sector Sarawak* – Kalimantan Barat, Kuching, Malaysia 19 – 22 Februari 2024.
3. Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Penegasan Batas Darat RI – Malaysia, Rapat Koordinasi Pembahasan Strategi Perundingan Pemri berdasarkan Pasal 298 UNCLOS, dan Rapat Koordinasi Pembahasan *Implementing Arrangement* Area Tumpang Tindih Yurisdiksi RI – Vietnam Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta, di Bandung, 20 – 23 Maret 2024;
4. Pertemuan Tim Teknis Batas Maritim pada Pembahasan *Implementing Arrangement* Area Tumpang Tindih Yurisdiksi Yurisdikasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontingen (LK) RI – Vietnam di Hai Phong, Vietnam, 22 – 26 April 2024;
5. Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi Persetujuan *Realignment Flight Information Region* (FIR) RI – Singapura dalam Penanganan Pelanggaran Wilayah Udara, Rapat Koordinasi Persiapan Pra-Penyelarasan Perjanjian ZEE RI – Vietnam, dan Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan MoU Demarkasi Batas Darat RI – Malaysia di Segmen OBP Pulau Sebatik, OBP Sungai Sinapad/Sesai dan Segmen WP-AA2, Bandung, 14 – 17 Mei 2024;
6. Pertemuan *Joint Malaysia – Indonesia Technical Meeting* ke-50 (MIT 50) di Johor Bahru, Malaysia;
7. Pertemuan ke-44 JWG – DOC dan Pertemuan ke-22 SOM – DOC dan Sinkronisasi Penggunaan Peta Rujukan Batas Negara dalam Perencanaan Tata Ruang untuk Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta;
8. *Implementing Arrangement* Area Tumpang Tindih Yurisdikasi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontingen RI – Vietnam.

Kementerian/Lembaga: Kementerian Luar Negeri

Unit Organisasi : 1. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
2. Sekretaris Jenderal

Satker : 1. Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia
2. Perwakilan RI

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri							
KP1 Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri							
Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Pusat)	50.761.914.000	45.062.811.835	88,77%	Orang	24.748	32.448	131,11 %
Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI)	163.412.000.000	142.780.177.181	87,37%	Orang	164.202	180.066	109,66 %

Kegiatan yang mendukung Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan), berupa:

1. 32.448 orang telah menerima manfaat dari program dan kegiatan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri di Pusat dan 180.066 orang telah menerima manfaat program dan kegiatan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri di Perwakilan RI. Data tersebut diperoleh dari penyelesaian kasus – kasus WNI bermasalah di luar negeri dan penanganan penyelesaian kasus WNI di dalam negeri untuk penyelesaian kasus WNI di luar negeri, seperti:
 - a. Penanganan kasus WNI/PMI terancam hukuman mati berinisial S binti MD;
 - b. Penanganan kasus ABK korban kapal ikan tenggelam di Korea Selatan;
 - c. Percepatan pemulangan 216 orang WNI/PMI kelompok rentan dari Depo Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia;
 - d. Pendampingan kekonsuleran atas penangkapan 14 PMI di Hong Kong diduga terlibat tindak pidana pencucian uang;
 - e. Penanganan kasus *online scam*;
 - f. Penangkapan evakuasi WNI dari Lebanon;
 - g. Penanganan WNI/PMI meninggal di Kamboja;
 - h. Penanganan situasi keamanan di Rusia dan Ukraina.
2. Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi Mahasiswa Indonesia saat Magang di Luar Negeri dalam rangka Pelindungan WNI di Luar Negeri melalui Portal Peduli WNI dan Aplikasi Safe Travel dan Penyelenggaraan HWWA.
3. Pelaksanaan Audit ISO 27001 Stage 1 dan 2.
4. Pemantapan Substansi dan Pelatihan Fotografi dan Videografi untuk Pengelola Media Sosial.
5. Rapat Koordinasi Pelayanan Publik & PWNI Kawasan Eropa di London, Inggris.
6. Repatriasi WNI/PMI-B dari Luar Negeri.
7. Rapat Koordinasi Yanlik & PWNI Kawasan Eropa di London, Inggris.
8. Tim Perbantuan Teknis Penyelesaian Dokumen Perjalanan dan Verifikasi Laporan Diri di KJRI Osaka, Jepang.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

9. Reviu dan Pemutakhiran Data dan Informasi pada Aplikasi Safe Travel di Jabar.
10. Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenlu dengan Para Operator Telekomunikasi tentang Informasi Yanlik bagi WNI Pengguna Jasa Telekomunikasi yang sedang Melakukan Perjalanan ke LN (Roamers).
11. Pengesahan Kepmenlu Pedoman Pendampingan WNI yang menghadapi Ancaman Hukuman Mati di Luar Negeri.
12. Penandatanganan MOU Kemenlu – JWB tentang Proyek Pembangunan Kapasitas Perwakilan RI terkait Penanganan Ganti Kerugian Perdata.
13. Penandatanganan Perjanjian Hibah Kemenlu – UN Women tentang Hibah Aplikasi Chatbot berbasis AI untuk pelayanan dan perlindungan WNI.
14. Finalisasi MOU Kemenlu – IOJI tentang Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran.
15. Finalisasi PKS Informasi Pelayanan Publik bagi WNI Pengguna Jasa Telekomunikasi yang sedang Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri.
16. Finalisasi Pedoman Kampanye Penyadaran Publik terkait Migrasi yang Aman ke Luar Negeri dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunikasi Publik.
17. Penyusunan SOP Penanganan Anak Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.
18. Finalisasi Kepmenaker Pedoman Verifikasi Surat Permintaan PMI di Negara Tujuan Penempatan.
19. Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI.
20. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.
21. Layanan Terpadu Pengesahan Perkawinan WNI Non Muslim di KJRI Kota Kinabalu dan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) dan Pencatatan Pernikahan Terpadu di KRI Tawau.
22. Pembahasan berbagai Perjanjian Kerja Sama Integrasi Sistem dan Pemanfaatan Data dengan Dukcapil, Bea Cukai, KP2MI, Ditjen Imigrasi, BPJS TK, Ditjen AHU.

Kementerian/Lembaga : Kementerian Luar Negeri
 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
 Satker : Sekretariat Ditjen Kerja Sama Multilateral

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri							
KP4 Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global							
Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jaringan 10 Besar	3.119.899.000	3.119.653.472	99,99%	Kegiatan	26	26	100%

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Negara Kontributor MPP PBB							

Capaian Output Strategis atas Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB per 31 Desember 2024 terealisasi 26 kegiatan dari target 26 kegiatan. Kegiatan yang mendukung Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB, berupa:

1. Rapat Pleno Pelaksana Harian I TKMPP 2024 di Bogor, 15 – 17 Januari 2024.
2. Pertemuan Sesi Substantif *Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34)* telah berlangsung di New York Amerika Serikat.
3. Upacara Pembukaan Latihan Pratugas 5 Satgas TNI Konga UNIFIL Lebanon TA 2024 di Sentul, 8 Januari 2024.
4. Kegiatan *CPOP Course* dan *The Fourth Review Conference (RevCon4) of the UN PoA SALW* di New York.
5. Rapat Khusus TKMPP terkait Rencana Kontribusi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia dalam Konflik Gaza dan *CoDeployment* Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, 10 Juni 2024.
6. Pembekalan Latihan Pratugas Satgas BGC TNI Konga XXXIX-F MONUSCO Kongo TA 2024 di PMPP TNI di Sentul, 13 Maret 2024.
7. Pembekalan Latihan Pratugas Operasi Personel Standby Milobs dan Milstaff TA 2024 di PMPP TNI di Sentul, 29 April 2024.
8. Kegiatan *Focus Group Discussion* Isu-Isu Terkini pada Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB di Bogor, 26 – 28 Maret 2024.
9. Pembukaan UN *CPOC Course* Tahun 2024 di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, 22 April 2024.
10. Rapat Koordinasi Pembahasan *Stocktaking* dan Isu Prioritas Kerja Sama di Bidang Terorisme dalam Kerangka Multilateral di Bogor Jawa Barat, 18 Maret 2024.
11. Pertemuan *Co-Hosting Side Event "Future of PoC in UN Peacekeeping"* pada *UN Protection Civilians Week* di New York, 20 – 24 Mei 2024.
12. Rapat Pleno Pelaksana Harian II TKMPP 2024.
13. Pendampingan dalam rangka Kunjungan Delegasi Biro Komite Palestina PBB (*Committee on the Exercise of the Inalienable Right of the Palestinian People / CEIRPP*).
14. Kegiatan *Workshop on Promoting National Awareness of UNSCR 1540 (2004) in the Republic of Indonesia*.
15. Berpartisipasi pada *EU P2P Summer University on Strategic Trade Controls* ke Hungaria.
16. National Action Plan (NAP) Training and Workshop ke Bangkok.
17. Persiapan Kegiatan *8th ARF Peacekeeping Experts Meeting*.
18. Penyelenggaraan Rapat Pelaksana Harian TKMPP ke II.

19. Kuliah Umum Serempak dalam Rangka HUT ke-79 RI dan Kementerian Luar Negeri.
20. Diskusi Terbatas Jilid II Terkait Isu Keamanan dan Perdamaian Internasional.
21. Pembekalan Peserta Latihan Pratugas *Maritime Task Force* (MTF) TNI Konga XXVIII-P UNIFIL TA 2024.
22. Pembekalan Kepada Personel Satgas FPU 6 MINUSCA.
23. Partisipasi pada Sidang Komite I dan IV pada SMU PBB ke-79 ke New York.
24. Rapat Pelaksanaan Harian TKMPP.
25. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Logistik dan Substansi Penyelenggaraan UNPM *Preparatory Meeting: New Models of UN Peacekeeping*.
26. Kegiatan Promosi Industri Pertahanan RI.

Pengembangan
Aplikasi SIMKEU

F.17. PENGEMBANGAN APLIKASI SIMKEU REAL TIME

1. Pada Oktober 2022, implementasi interkoneksi SIMKEU *Realtime* dan SAKTI dalam proses pengiriman data transaksi pengeluaran belanja DIPA mulai dapat diberlakukan pada Satker Perwakilan RI. Hal ini merujuk pada berita Kepala Biro Keuangan nomor B-08600/Kemlu/221227 perihal Penyampaian Surat Edaran Bersama (SEB) Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dan Kepala Biro Keuangan Nomor SE-110/PB.8/2022 dan Nomor SE/00200/KU/12/2022/25) dan Petunjuk Teknis Implementasi Interkoneksi Sistem SAKTI dengan SIMKEU *Realtime* TA 2023. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Sistem SAKTI dengan SIMKEU *Realtime* Nomor 264/PB/2023 dan 05167/KU/03/2023/25.
2. Pada awal 2023, implementasi fitur sinkronisasi Pagu SIMKEU-SAKTI mulai berlaku untuk DIPA Kementerian Luar Negeri. Pengembangan fitur ini bertujuan untuk meniadakan perbedaan Pagu DIPA antara SIMKEU *Realtime* dengan sistem MonSAKTI. Fitur sinkronisasi bekerja dengan cara menarik data pagu anggaran dari sistem MonSAKTI ke aplikasi SIMKEU *Realtime* secara otomatis pada pukul 05.00 WIB setiap hari. Sebelum adanya fitur ini, pengelola keuangan pada satker Perwakilan RI melakukan setup Pagu DIPA tiap awal tahun dan pemutakhiran data Pagu DIPA pada SIMKEU *Realtime* setiap ada persetujuan revisi DIPA. Dengan fitur sinkronisasi pagu, menihilkan proses pemutakhiran data secara manual dan meminimalkan risiko perbedaan data Pagu DIPA antara SIMKEU *Realtime* dan SAKTI.
3. Selain sinkronisasi pagu SIMKEU *Real Time* dan MonSAKTI, aplikasi SIMKEU *Real Time* juga telah dikembangkan fitur lainnya. Melalui berita nomor B-04621/KEMENLU/230727 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis Sepuluh Fitur Pengembangan Aplikasi SIMKEU TA 2023 yang meliputi:
 - a. Sinkronisasi Pagu SIMKEU *Realtime* dan SAKTI.

- b. Pengecekan (kendali) pagu 12 Chart of Account (CoA).
 - c. Pengecekan upload dokumen pendukung Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran.
 - d. Otomasi pembuatan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) DIPA Kementerian Luar Negeri.
 - e. Penyederhanaan pilihan pada Laporan Realisasi Program.
 - f. Notifikasi pembebanan belanja UP/TUP.
 - g. Penambahan pilihan tombol “Tipe Belanja” pada Laporan Buku Pembantu Transfer dan Remise (BPTR).
 - h. Penambahan kolom “Status” pada BPTR DIPA Kementerian Luar Negeri.
 - i. Pencetakan tanda bukti pengeluaran dan SPBy.
 - j. Penambahan pengisian kolom Kementerian, No DIPA, dan Kode Satker Atase Teknis pada Menu Setup No. DIPA.
4. Pengembangan fitur-fitur tersebut di atas bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna, baik Satker Perwakilan RI maupun Pusat dalam hal ini unit kerja yang melakukan *monitoring*, seperti Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Perencanaan dan Organisasi. Selain itu, pengembangan ini juga memberikan kemudahan bagi aparat pengawas eksternal dan internal dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan, serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan pada Satker Perwakilan RI.
 5. Proses pengembangan aplikasi untuk pembukaan akses dan implementasi Interkoneksi SIMKEU – SAKTI bagi Atase Teknis telah dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2023. *User Acceptance Test* (UAT) Sistem Interkoneksi SIMKEU-SAKTI bagi Satker Atase Teknis oleh tim pusat untuk Satker Atase Teknis Kemenkumham, Kemendag, dan Kemendikbudristek pada Perwakilan RI di KBRI Singapura, KBRI Riyadh, KBRI Berlin, dan KBRI Den Haag.
 6. Pada awal tahun 2024, proses *deployment* ke *production environment* dilaksanakan untuk implementasi interkoneksi SIMKEU-SAKTI bagi Satker Atase Perdagangan dan Satker Atase Dikbudristek. Implementasi sinkronisasi pagu Atase Teknis telah dilakukan berdasarkan masing-masing Perjanjian Kerjasama (PKS) pada bulan Februari 2024, merujuk pada PKS untuk 2 K/L teknis pengguna SIMKEU yaitu:
 - a. Kementerian Perdagangan (Kemendag); dan
 - b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
 7. Pada tahun 2024, dilakukan pengembangan SIMKEU untuk mendukung proses deteksi dini permasalahan melalui aplikasi, yaitu:
 - a. Peringatan apabila Pengelola Keuangan belum melakukan transaksi pembukuan selama 14 (empat belas) hari;
 - b. Daftar potensi masalah berdasarkan data di SIMKEU;

- c. Pembuatan *template* narasi sesuai jenis belanja;
- d. Peringatan kesesuaian pembebanan belanja pada MAK; dan
- e. Pencegahan proses pencairan dana untuk transaksi tanpa *upload* data dukung.

8. Implementasi atas pengembangan SIMKEU akan dilaksanakan pada TA 2025.

Pengungkapan
Terkait Pembayaran
Iuran Kontribusi
Organisasi
Internasional

F.18. PENGUNGKAPAN TERKAIT PEMBAYARAN IURAN KONTRIBUSI ORGANISASI/INTERNASIONAL

Selama periode Laporan Keuangan TA 2024 (1 Januari s.d. 31 Desember 2024), Ditjen KS Multilateral telah membayarkan iuran kontribusi untuk 154 tagihan Organisasi Internasional (OI) dengan nilai total sebesar Rp892.982.209.108,00 termasuk biaya transfer, selisih kurs dan 7 pembayaran tagihan OI yang digolongkan sebagai Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) dikarenakan periode tagihan atau *financial year* OI yang melewati tanggal pelaporan keuangan (31 Desember 2024) sebesar Rp4.301.066.662,00 namun tidak termasuk pembayaran iuran kontribusi untuk *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* dan *United Nations Peacebuilding Fund (PBF)* yang telah dilakukan *advanced payment* pada TA 2023 untuk iuran tahun 2024.

Adapun daftar OI yang telah dibayarkan beserta rincian keterangan lainnya terlampir pada Laporan Keuangan ini.

Pengungkapan
Terkait Hasil Reviu
Verifikasi
Pembayaran
Kontribusi
Indonesia Pada
Organisasi
Internasional

F.19. PENGUNGKAPAN TERKAIT HASIL REVIU VERIFIKASI PEMBAYARAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL

Pada tanggal 8 Mei 2024, Inspektur Wilayah II telah mengirim Surat Nomor 07910/PW/05/2024/69 tanggal 8 Mei 2024 perihal Hasil Reviu Verifikasi Pembayaran Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional TA 2023. Dalam Hasil Reviu tersebut, Inspektorat Wilayah II menyatakan bahwa tidak terdapat hal-hal yang meyakinkan bahwa usulan pembayaran Kontribusi pada Organisasi Internasional sebesar Rp1.310.351.944,00 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan. Adapun usulan pembayaran dimaksud terdiri dari tagihan sebagai berikut:

I. Tagihan TA 2022

- International Sugar Organization sebesar Rp281.192.234,00

II. Tagihan TA 2023

- Convention on Cluster Munitions sebesar Rp86.098.914,00
- ASEAN+3 Financial Cooperation Fund sebesar Rp32.444.000,00

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

- International Sugar Organization sebesar Rp302.291.796,00
- ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses sebesar Rp608.325.000,00

Pada tanggal 9 September 2024, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengirim Surat Nomor PE.12.03/SP-95/D2/02/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Hasil Reviu atas Tanggahan Tagihan Kontribusi Organisasi Internasional TA 2023 pada Kementerian Luar Negeri RI yang memuat simpulan reviu atas dua OI sebagai berikut:

1. Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Securities (CTI-CFF) sebesar Rp6.302.040.294,00.
2. ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) sebesar Rp8.620.245.444,00.

Penjelasan atas hasil reviu tersebut sebagai berikut:

1. Dasar hukum penetapan atau pengesahan keanggotaan Indonesia pada CTI-CFF dan AMRO telah dilakukan melalui Peraturan Presiden.
2. Instansi Penjuru CTI-CFF dan AMRO telah menyampaikan Laporan Pemanfaatan Tahun 2022 dan 2023.
3. Nilai tunggakan yang diajukan telah sesuai dengan tagihan (*invoice*) dari CTI-CFF dan AMRO yang didasarkan pada kesepakatan bersama anggota.
4. Kenaikan kontribusi CTI-CFF dan AMRO telah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri berdasarkan rekomendasi dari Kelompok Kerja Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (Pokja KKOI).

Hasil reviu ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan berkaitan dengan tagihan Kontribusi OI TA 2023, dengan tidak membatasi manajemen untuk mengambil langkah lain.

Pada tanggal 9 Oktober 2024, Inspektur Wilayah II telah mengirim Surat Nomor 17318/PW/10/2024/69 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Hasil Reviu Verifikasi Pembayaran Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional TA 2020, 2021 dan 2022. Dalam Hasil Reviu tersebut, Inspektorat Wilayah II menyatakan bahwa tidak terdapat hal-hal yang meyakinkan bahwa usulan pembayaran Kontribusi pada Organisasi Internasional sebesar Rp163.476.572,00 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan. Adapun usulan pembayaran dimaksud terdiri dari tagihan sebagai berikut:

1. International Astronomical Union (IAU) – Tagihan TA 2020 sebesar Rp53.367.832,00.
2. International Astronomical Union (IAU) – Tagihan TA 2021 sebesar Rp54.432.484,00.

3. International Astronomical Union (IAU) – Tagihan TA 2022 sebesar Rp55.514.036,00.
4. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – Tagihan TA 2022 sebesar Rp162.220,00.

*Reklasifikasi Akun
Kas di Bendahara
Pengeluaran*

F.20. REKLASIFIKASI AKUN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Pada Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) perwakilan yang melakukan reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran ke akun Aset lain-lain berkaitan dengan permasalahan di masing-masing perwakilan yang mengakibatkan berkurangnya nilai fisik Kas di Bendahara Pengeluaran.

Merujuk surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-855/PB.6/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Penyelesaian Transaksi dalam Konfirmasi (TDK) pada Kas di Bendahara Pengeluaran di Kemenlu, seluruh satker Kemenlu wajib menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar saldo Kas di Bendahara Pengeluaran termasuk apabila terdapat penggunaan kas dengan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan.

Sebagai tindak lanjut Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri TA 2022 *Unaudited*, Kemenlu telah menyampaikan permohonan reklasifikasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk 7 (tujuh) Satker Perwakilan dan telah melakukan reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran ke akun Aset Lain-Lain pada bulan April 2023. Adapun 7 (tujuh) Satker Perwakilan tersebut yaitu KBRI Lisabon, KBRI Astana, KBRI Dhaka, KJRI Kota Kinabalu, KBRI Harare, KJRI New York, dan KJRI Houston.

Dilakukan pengajuan permohonan reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran untuk 7 (tujuh) Perwakilan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan yaitu:

Tabel 143: Rincian Proses Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran

NO.	Perwakilan	Nomor Surat dan Perihal	Permasalahan
1.	KBRI Lisabon	Nomor 06468/KU/04/2023/25 tanggal 4 April 2023 perihal Reklasifikasi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Sebagai Tindak Lanjut Pemeriksaan Bendahara Perwakilan RI di Lisabon	Terdapat selisih kurang rekonsiliasi saldo Kas dan Bank akibat pengelolaan keuangan yang tidak tertib oleh <i>Home Staff</i> KBRI Lisabon, Sdri. NA, sebesar USD18,195.55 dan EUR6,282.49 dengan total ekuivalen Rp388.048.660,58.

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO.	Perwakilan	Nomor Surat dan Perihal	Permasalahan
2.	KBRI Astana	Nomor 06469/KU/04/2023/25 tanggal 4 April 2023 perihal Reklasifikasi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Sebagai Tindak Lanjut Pokok-Pokok Hasil Audit Pengelolaan Keuangan dan Penelaahan Pertanggungjawaban Keuangan Pada KBRI Astana Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Audit Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.	Terdapat ketekoran kas yang disebabkan oleh kelalaian Bendahara KBRI Astana sebesar USD34,779.51 dan KZT6,884,542.79, dengan total ekuivalen Rp773.451.298,00.
3.	KBRI Dhaka	Nomor 06629/KU/04/2023/25 tanggal 6 April 2023 perihal Reklasifikasi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Sebagai Tindak Lanjut Penelaahan Pertanggungjawaban Keuangan Pada KBRI Dhaka dan KJRI Kota Kinabalu Tahun Anggaran 2022	Terdapat selisih antara saldo kas dan bank riil KBRI Dhaka dengan uang muka KPPN per 31 Desember 2022 sebesar USD6,914.39 ekuivalen Rp107.809.163,00.
4.	KJRI Kota Kinabalu		Terdapat selisih antara saldo kas dan bank riil KJRI Kota Kinabalu dengan uang muka KPPN per 31 Desember 2022 sebesar USD31,882.88 ekuivalen Rp497.117.865,00.
5.	KBRI Harare	Nomor 06722/KU/04/2023/25 tanggal 10 April 2023 perihal Reklasifikasi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada KBRI Harare	Terdapat permasalahan pada KBRI Harare atas kas di Bendahara Pengeluaran sebesar ZWD1.551.246 atau setara dengan USD31.366,92, dengan total ekuivalen Rp489.073.016,64 sebagai akibat hilangnya nilai mata uang Zimbabwe Dollar.
6.	KJRI New York	Nomor 06911/KU/04/2023/25 tanggal 12 April 2023 perihal Reklasifikasi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran KJRI New York dan KJRI Houston Tahun Anggaran 2022	Terdapat permasalahan pemalsuan cek pada KJRI New York tahun 2018 dan berdampak pada terjadinya selisih saldo bank dan kas riil dengan uang muka KPPN sebesar USD8,979.42 ekuivalen

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

NO.	Perwakilan	Nomor Surat dan Perihal	Permasalahan
			Rp140.007.117,00.
7.	KJRI Houston		<p>Terdapat permasalahan pemalsuan cek pada KJRI Houston tahun 2022 dan berdampak pada terjadinya selisih saldo bank dan kas riil dengan uang muka KPPN sebesar USD8,240.00 ekuivalen Rp128.478.080,00.</p> <p>Namun setelah melalui rangkaian panjang koordinasi yang dilakukan KJRI Houston dengan pihak yang berkepentingan, reklasifikasi akun yang telah dilakukan pada periode tahun 2022 tidak lagi relevan dan perlu disesuaikan untuk pemulihan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran.</p>

Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut dilakukan dengan mengacu pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 20 yang menyebutkan bahwa pada saat ditemukannya ketekoran kas oleh entitas, maka entitas harus mencatat kejadian tersebut sebagai pengurang kas di Bendahara Pengeluaran dengan Aset Lainnya pada posisi Debit. Untuk menghindari munculnya status Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), maka diusulkan untuk dilakukan koreksi reklasifikasi atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Selanjutnya, dilakukan pengajuan permohonan reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran untuk 7 (tujuh) Perwakilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, Kemenkeu melalui Surat Nomor 06818/KU/OA/2023/25 tanggal 12 April 2023 perihal Permohonan Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Pada KBRI Lisabon, KBRI Astana, KBRI Dhaka, KJRI Kota Kinabalu, KBRI Harare, KJRI New York dan KJRI Houston Tahun Anggaran 2022 sebagai Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI atas LK Kementerian Luar Negeri *Unaudited* TA 2022.

Surat ini menyatakan bahwa agar kewajaran penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri TA 2022 dapat terjaga, maka dimohon agar KPPN melakukan koreksi atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada SIAP untuk 7 (tujuh) Satker Perwakilan tersebut

dengan melampirkan pula surat tanggapan dari Dit. APK Nomor S-36/PB.6/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai bahan pertimbangan.

Dengan berdasarkan persetujuan BPK RI pada forum Rekonsiliasi Tiga Pihak, maka hasil reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran menjadi akun Aset Lain-Lain atas 7 (tujuh) Satker Perwakilan tersebut sudah tersaji di dalam Neraca Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri TA 2022 Audited. Salah satu perwakilan yang melakukan reklasifikasi akun tersebut adalah KJRI Houston dimana melalui berita rahasia nomor R-00027/Houston/221227, KJRI Houston menyampaikan mengenai penyampaian kasus pemalsuan cek KJRI Houston oleh orang tidak dikenal senilai USD8,240.00 yang ditujukan untuk pembayaran jasa pengamanan Gedung KJRI (Houston Independent Security Patrol Inc) yang terjadi pada bulan November 2022.

Atas kejadian tersebut, pada laporan keuangan Audited tahun 2022 dilakukan reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada KJRI Houston sembari KJRI melakukan koordinasi dengan pihak Bank of America (BoA), Diplomatic Service Security (DSS), dan kepolisian setempat.

Pada bulan Agustus 2023 setelah melalui rangkaian panjang koordinasi yang dilakukan KJRI Houston dengan pihak yang berkepentingan, melalui berita rahasia nomor R-00019/Houston/230816 KJRI Houston menyampaikan bahwa dana yang hilang akibat pemalsuan cek tersebut dapat dipulihkan dan dikembalikan ke rekening bendahara KJRI Houston. Atas hal tersebut, reklasifikasi akun yang telah dilakukan pada periode tahun 2022 tidak lagi relevan dan perlu disesuaikan untuk pemulihan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan hal tersebut, Kemenlu telah menyampaikan surat kepada Kemenkeu perihal pemulihan Uang Persediaan (UP) kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta. Atas surat tersebut, Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah menyampaikan tanggapan melalui surat nomor S-415/PB.2/2023 dimana Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyetujui pemulihan UP KJRI Houston dengan mekanisme penggunaan dana langsung atas dana yang telah dikembalikan ke rekening KJRI Houston.

Berdasarkan persetujuan tersebut, KPPN Jakarta I melalui Surat nomor S-432/KPN.1201/2024 menyampaikan data hasil revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran yang ditindaklanjuti oleh satker KJRI Houston dengan melakukan penjurnalan atas Kas di Bendahara Pengeluaran dan Aset lain-lain ke nilai yang seharusnya pada periode Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2023.

Atas reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilakukan terhadap KBRI Lisabon, telah dilakukan pemotongan Uang Persediaan (UP) yang diterima oleh KBRI Lisabon pada Tahun 2023 sesuai dengan nilai reklasifikasi. Pada tahun

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

2024, KBRI Lisabon telah menerima UP Perdana secara utuh, tidak lagi dikurangi oleh nilai reklasifikasi, hal ini berpengaruh juga terhadap penyelesaian kekurangan kas oleh Sdri. NA yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji dan disetorkan langsung ke kas negara. Berkaitan dengan hal tersebut, KBRI Lisabon dapat menyetorkan pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu, yang sebelumnya masih tertahan di KBRI Lisabon karena ketekoran kas yang dialami.

Tabel 144: Rincian Pengembalian Belanja KBRI Lisabon

Tanggal	Uraian Transaksi	No. TB	Akun	Jumlah	
				USD	EUR
31/10/2021	Perbaikan Pembukuan Kekurangan Sisa UP 2019, vide TB IV, 10 Oktober 2019	XVII	425229C	9.12	
31/10/2021	Perbaikan Pembukuan Pengembalian BelBar, vide TB 7, 6 Maret 2019	XX	425912		41.24
22/12/2022	Kelebihan pembukuan TPLN HS bulan Juli - Oktober 2019 (sesuai ND Irwil II Nomor: 11824/PW/05/2022/69 tanggal 13 Mei 2022 dan penjelasan selisih rekonsiliasi bank pada BAPK November 2022)	XX	425911	11,619.47	
22/12/2022	Selisih Sisa UP TA 2019	XXI	425911	5,504.73	
	Jumlah			17,133.32	41.24

Biro Keuangan telah menginstruksikan penyetoran pengembalian belanja tersebut melalui berita rahasia Nomor R-06583/KEMLU/241206 yang telah ditindaklanjuti oleh KBRI Lisabon dan telah disetorkan ke kas negara di Bulan Desember 2024. Sementara itu, untuk pengungkapan aset lain-lain KBRI Lisabon yang berkaitan dengan nilai reklasifikasi, dengan mempertimbangkan bahwa penyelesaian sisa selisih kas yang dilakukan oleh Sdri NA dilakukan melalui mekanisme potongan SPM untuk pengajuan SPM belanja gaji sebesar Rp2.500.000,00 tmt September 2024 yang disetorkan langsung ke kas negara melalui Aplikasi Gaji Satker Terpusat Sekretariat Jenderal pada akun 425912, maka pencatatan atas penyesuaian aset lain-lain yang sebelumnya tersaji pada Laporan Keuangan KBRI Lisabon dialihkan ke Satker Sekretariat Jenderal Pengalihan pencatatan ini dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024.

Berkaitan dengan penyelesaian reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada KJRI New York hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut. Merujuk pada surat Nomor S415-PB.2/2023 tanggal 15 November 2023 mengenai Tanggapan atas Usulan Pemulihan UP TA 2023 pada KJRI New York,

Pemulihan UP untuk KJRI New York belum dapat disetujui mengingat belum ada pendapat dari BPK bahwa tidak terdapat unsur kelalaian pengelolaan keuangan yang menyebabkan kerugian negara. Namun demikian, belum ada arahan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut sementara pihak Bank of America telah menyatakan bahwa nilai tersebut tidak mungkin untuk diganti.

Berkaitan dengan reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada KBRI Dhaka dan KJRI Kota Kinabalu, berdasarkan BAPK per tanggal 31 Desember 2024 (setelah dilakukan perbaikan pembukuan di tahun 2023 dan 2024), selisih yang sebelumnya diyakini kurang pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran KBRI Dhaka sebesar USD6,914.39 dan KJRI Kota Kinabalu sebesar USD31,882.88 tahun 2022, diketahui uang fisiknya ada di perwakilan dan telah dicatat pada SIMKEU BAS 815111A - Sisa UP KEMENLU Tahun berjalan.

Sedangkan, berkaitan dengan reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada KBRI Astana, berdasarkan BAPK per tanggal 31 Desember 2024, selisih yang sebelumnya diyakini kurang pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran KBRI Astana sebesar KZT5,178,373.08 dan USD10,813.94. Diketahui pencatatan ini masih dilakukan di Perwakilan.

Penambahan informasi mengenai PK Minus KBRI Athena, saat ini sedang dalam proses pengajuan Tuntutan Perbendaharaan kepada BPK melalui surat nomor 01112/KU/05/2024/03 tanggal 7 Mei 2024 perihal Laporan Terjadinya Selisih Kurang Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh Sdr. IS, Bendahara Periode Agustus 2015 s.d. Oktober 2018 pada KBRI Athena. Sehingga, proses selanjutnya adalah menunggu Putusan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) menindaklanjuti pengajuan oleh Kemenlu.

Lebih lanjut, telah disampaikan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor 06679/KU/05/2025/25 Perihal Reklasifikasi Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Sebagai Upaya Penyelesaian Persekot Kerja (PK) Minus KBRI Athena tertanggal 2 Mei 2025. Namun demikian, pengajuan tersebut masih menunggu arahan atau petunjuk selanjutnya atas reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai balasan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kepada Kemenlu.

Penghentian
Kegiatan
Operasional Africa
and Gulf Bank
(AGB) Cabang
Khartoum

F.21. PENGHENTIAN KEGIATAN OPERASIONAL AFRICA AND GULF BANK (AGB) CABANG KHARTOUM

KBRI Khartoum memiliki 2 (dua) nomor rekening di Africa and Gulf Bank (AGB) cabang Khartoum yang sejak tahun 2023 telah tutup / berhenti beroperasi sampai dengan saat ini setelah konflik bersenjata. Berdasarkan Berita Nomor R-00035/Khartoum/230417 tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Rencana Kontijensi KBRI Khartoum dan SK Dubes RI tentang Penetapan Status Siaga I, diinformasikan bahwa telah terjadi konflik bersenjata dan pertempuran berskala besar antara Angkatan Bersenjata (tentara Pemerintah) *Sudan Armed Forces*

(SAF) dengan kelompok paramiliter *Rapid Support Forces* (RSF). Diketahui bahwa konflik bersenjata tersebut mulai terjadi pada tanggal 15 April 2023.

Imbas penutupan / penghentian kegiatan operasional AGB tersebut salah satunya adalah terhentinya penerbitan rekening koran. Berdasarkan saldo rekening koran terakhir periode 1 Maret 2023 s.d. 31 Maret 2023 tercatat saldo KBRI Khartoum yaitu sebesar SDG 26,114.59 dan USD 3,404.56. Hingga saat ini, saldo tersebut menjadi tidak dapat diakses (*idle*) dan belum ada kepastian terkait pengembaliannya kepada KBRI Khartoum.

Sehubungan dengan hal ini, KBRI Khartoum telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri Sudan di Port Sudan melalui Surat Nomor D300/04/V/2025/KRT, namun hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi resmi terkait hal tersebut.

Perkembangan
Permasalahan
Keuangan KBRI Den
Haag terkait PFK
Indover

F.22. PERKEMBANGAN PERMASALAHAN KEUANGAN KBRI DEN HAAG TERKAIT PFK INDOVER

KBRI Den Haag memiliki dua nomor Rekening di Bank Indover (Kantor Bank Indonesia Cabang Den Haag) yang pada tahun 2008 telah mengalami kebangkrutan (dibekukan). Dari kedua rekening tersebut terdapat saldo sebesar USD761,827.71 yang saat ini ditangani oleh pihak kurator. Perkembangan dalam penyelesaian dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan keputusan Pengadilan Belanda pada tanggal 5 November 2009 pihak Bank Indover mengembalikan ke Pemerintah Indonesia sebesar EUR599,626.90 atau equivalent USD761,827.71 pada saat itu.
2. Setelah dilakukan koordinasi pada bulan November 2016 terjadi pencatatan antara pihak Bank Indover dengan KBRI Den Haag. Menurut pihak Bank Indover telah dilakukan pengembalian ke rekening KBRI Den Haag sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar EUR485,697.79. Namun demikian, yang tercatat pada *Bank Statement* KBRI Den Haag adalah sebesar EUR485,517.78 sehingga terdapat selisih kurang sebesar EUR180.01 yang merupakan biaya transfer yang ditanggung KBRI Den Haag sebagai pihak penerima. Sehingga, menurut pihak kurator masih akan mengembalikan sebesar EUR113,929.11.
3. Berdasarkan dari penjelasan Stibbe/Rutgers & Posch, selaku kurator, bahwa kekurangan sebesar EUR113,929.11 tidak akan diganti, sehingga langkah pemutihan merupakan salah satu jalan penyelesaiannya.
4. Lebih lanjut pada Juli 2020 dan Desember 2023, KBRI Den Haag menerima kembali dana Indover Tahap 5 dan 6 masing-masing senilai EUR17,599.05 dan EUR4,720.00. Atas penerimaan dana Indover tahap 5 belum dilakukan pembukuan pada Aplikasi SIMKEU, sedangkan penerimaan dana Indover tahap 6 telah dilakukan pembukuan. Sehingga hal tersebut tertuang pada Kertas Kerja Tambahan (KKT) BAPK KBRI Den Haag periode Desember 2024.
5. Pada tanggal 10 Maret 2025, telah disusun dan disampaikan permohonan penghapusan atas sisa dana *outstanding* Bank Indover pada KBRI Den

Haag melalui Surat Nomor 03987/KU/03/2025/25. Pada surat tersebut, telah Kemenlu sampaikan bahwa sampai dengan tahun 2024, jumlah dana penyelesaian aset kepailitan Bank Indover yang sudah diterima oleh KBRI Den Haag tercatat sebesar EUR508,017.70 atau sebesar 84,7223% dari nilai Piutang sebesar EUR599,626.90 Eqv. USD761,827.71 sehingga masih terdapat sisa dana *outstanding* sebesar EUR91,609.20.

6. Dasar penyusunan Surat Permohonan Penghapusan atas Sisa Dana *Outstanding* Bank Indover pada KBRI Den Haag adalah Brafaks No. B-00073/DEN HAAG/240328 perihal *Final Report* terkait Permasalahan Bank Indover, menginformasikan laporan publik Kurator dan pemberitahuan dari Stibbe, selaku pihak yang menangani tuntutan terkait Bank Indover, menyatakan bahwa pengembalian ke-6 yang diterima pada Desember 2023 sudah final, sehingga tidak akan ada lagi pengembalian berikutnya.

Jaminan Kesehatan
Pimpinan
Perwakilan RI

F.23. JAMINAN KESEHATAN PIMPINAN PERWAKILAN RI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya dalam pasal 1 disebutkan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Duta Besar LBBP) adalah Pejabat Negara Eksekutif yang diangkat oleh Presiden yang mewakili Negara dan Kepala Negara Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional.

Pengangkatan tersebut nyatanya belum selaras dengan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang diterima oleh Unsur Pimpinan Perwakilan RI. Perlindungan jaminan sosial kepada unsur pimpinan pada Perwakilan RI di Luar Negeri yang terdiri dari Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan melalui perlindungan kesehatan sebagai asuransi wajib sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja sebagai asuransi wajib kecelakaan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan dukungan APBN sesuai Keputusan Menteri Luar Negeri (Kepmenlu) Nomor SK.008/KU/11/2000/02 tentang Penggantian Biaya Pengobatan/Perawatan untuk Pegawai yang Ditugaskan pada Perwakilan RI di Luar Negeri, dengan pola restitusi biaya pengobatan atau ikut pada asuransi setempat. Namun demikian, pengaturan dimaksud mempunyai keterbatasan yakni:

1. Perlindungan Jaminan Kesehatan (Jamkes) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tidak mencakup pelayanan kesehatan di luar negeri.
2. Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 hanya mencakup kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sementara terdapat kemungkinan adanya sakit biasa/bawaan.

3. Penggantian biaya pengobatan/perawatan yang saat ini diatur dalam Kepmenlu No. SK.008/KU/11/2000/02, dirasakan belum memadai jumlahnya serta tidak mengatur lebih lanjut pendanaan kelebihan biayanya, dalam hal biaya pengobatan/perawatan melampaui pagu biaya yang diatur dalam Kepmenlu tersebut.

Selain hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK, Hakim Agung MA, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu mengatur bahwa yang dimaksud Pejabat Tertentu adalah Pejabat K/L yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. Ketentuan ini belum mengakomodir jaminan pemeliharaan Kesehatan bagi Duta Besar ataupun Kepala Perwakilan RI yang diangkat sebagai perwakilan pemerintah di luar negeri.

Berdasarkan keterbatasan di atas, terdapat potensi untuk menimbulkan permasalahan seperti biaya pengobatan/perawatan dapat melebihi plafon yang diatur dalam Kepmenlu Nomor SK.008/KU/11/2000/02 dan belum ada pengaturan mengenai penggantian biaya atas selisih lebih dari plafon yang ada sehingga biaya tersebut harus ditanggung oleh Kepala Perwakilan atau Wakil Kepala Perwakilan yang bersangkutan, serta APBN berpotensi terekspos risiko biaya pengobatan/perawatan yang jumlahnya tidak terprediksi.

Sebagai perhatian bersama bahwa sampai dengan TA 2020, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat 2 (dua) kasus adanya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang jatuh sakit ketika menjalankan tugas di wilayah akreditasi dan tidak dapat sepenuhnya dibayarkan oleh anggaran Perwakilan karena terbatasnya anggaran dan ketentuan yang mengatur jaminan kesehatan Unsur Pimpinan Perwakilan RI.

Menindaklanjuti hal tersebut, serta salah satu upaya pencegahan dan perbaikan peningkatan jaminan kesehatan bagi unsur Pimpinan Perwakilan RI beserta keluarga, Kemenlu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkoordinasi menyusun dan mengatur tentang jaminan kesehatan bagi Kepala Perwakilan RI dengan latar belakang Surat Menteri Keuangan nomor S-412/MK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang merekomendasikan Kemenlu untuk menyusun peraturan perundang undangan yang dapat memayungi jaminan kesehatan Unsur Pimpinan Perwakilan RI.

Setelah melalui proses pembahasan dengan Kementerian Teknis terkait dan Badan Penyelenggara, pada awal tahun 2024 telah tersusun payung hukum Program penyelenggaraan peningkatan jaminan kesehatan bagi unsur Pimpinan pada Perwakilan RI di sebagai berikut:

- a. Penpres Nomor 110 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

- b. PMK Nomor 131 Tahun 2023 tentang Pendanaan Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan RI di Luar Negeri;
- c. Permenlu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Beserta Keluarga; dan
- d. Pedoman Umum dari Badan Penyelenggara (PT Jasindo).

Sesuai Permenlu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan Perwakilan RI di Luar Negeri beserta Keluarga, program peningkatan jaminan kesehatan Pimpinan Perwakilan RI beserta keluarga telah diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Program ini merupakan wujud upaya pemberian perlindungan dan jaminan kesehatan bagi unsur pimpinan di seluruh Perwakilan secara optimal dan setara.

Merujuk pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan beserta keluarga dilakukan melalui penugasan Pemerintah Pusat kepada Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan fungsi kendali mutu kendali biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dan sesuai PMK Nomor 131 Tahun 2023, bahwa pembayaran premi peserta Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan RI beserta keluarga telah dibayarkan oleh Kemenkeu c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (sebagai KPA BUN) kepada PT. Jasindo selaku Badan Penyelenggara yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kementerian Keuangan.

Untuk lebih memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi Pimpinan Perwakilan RI di luar negeri, Kemenlu bersama dengan Kemenkeu, Kemenkes dan PT. Jasindo, telah melakukan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut masih ditemukan kendala dalam implementasi di wilayah akreditasi/wilayah kerja perwakilan, yaitu terkait pembebanan, kepesertaan, skema pelayanan, manfaat pelayanan kesehatan, alur pelayanan, ketentuan prosedur dan proses penggantian biaya (*reimbursement*). Kemenlu, Kementerian Teknis terkait dan badan penyelenggara Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut telah melakukan upaya perbaikan diantaranya:

- a. Berdasarkan hasil rapat Monitoring dan Evaluasi Program Jamkes Pimpri, telah disepakati sejumlah usulan penyesuaian terhadap Pedoman Pelaksanaan untuk Tahun Anggaran 2025. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketentuan program dengan dinamika di lapangan, memperkuat akses peserta terhadap pelayanan kesehatan, serta meningkatkan efisiensi administrasi program. Penyesuaian Pedoman Pelaksanaan dimaksud sedang dalam tahapan finalisasi.

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

- b. Biro Keuangan telah menginventarisasi transaksi atau pembebanan akun restitusi pengobatan pada DIPA Perwakilan RI TA 2024 bagi Pimpinan Perwakilan RI dan/atau pasangan dan anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta Program Jamkes Pimpri.

Sebagai langkah awal mitigasi permasalahan pembukuan restitusi pengobatan Pimpinan Perwakilan RI beserta keluarga TA 2024, Sekretaris Jenderal telah mengirimkan brafaks arahan kepada Perwakilan yang telah membebankan premi asuransi Pimpinan Perwakilan RI beserta keluarga pada DIPA Perwakilan RI TA 2024 melalui brafaks Sekretaris Nomor R-06281/Kemlu/241119 perihal Konfirmasi data, Penyampaian Langkah-langkah Pengajuan Penggantian Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan Perwakilan RI yang Sudah Dibebankan pada DIPA Perwakilan RI TA 2024, dan izin Pembukaan PK Titipan Penggantian Jamkes Pimpri TA 2024 dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 145: Rincian Jaminan Kesehatan Unsur Pimpinan pada Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun Anggaran 2024

Nilai Restitusi yang diajukan	Nilai Restitusi yang dibayarkan	Nilai Restitusi yang disetorkan ke Pusat
EUR31,512.66 dan USD535,659.06	EUR22,374.05 dan USD499,913.96	USD403,019.98 eqv. Rp 6.606.330.543

Berdasarkan rincian tersebut, terdapat 41 (empat puluh satu) Perwakilan yang telah mengajukan klaim restitusi pengobatan Pimpinan Perwakilan RI beserta keluarga kepada PT Jasindo dengan total nilai sebesar EUR31,512.66 dan USD535,659.06 termasuk di dalamnya klaim dari KBRI Athena dan KJRI Noumea yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan penyelesaian. Dari jumlah tersebut, PT. Jasindo telah menyetujui dan membayarkan restitusi senilai EUR22,374.05 dan USD499,913.96.

Sehubungan dengan penerimaan restitusi tersebut, Perwakilan telah melakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan Pusat sebesar USD403,019.98 eqv. Rp6.606.330.543,00 dan telah disetorkan ke kas negara. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdapat 1 (satu) Perwakilan yakni KBRI Quito yang belum mengajukan permohonan restitusi ke PT. Jasindo, sehingga potensi pengembalian dana dari PT. Jasindo ke Perwakilan belum dapat diakui.

Bantuan Biaya
Pendidikan Anak
(BBPA)

F.24. BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK (BBPA)

Berdasarkan catatan SIMKEU *Real Time* 31 Desember 2024 terdapat saldo Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) plus sebesar USD13,413.32 pada tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Tabel 146: Rincian Data BBPA Plus Berdasarkan Simkeu Real Time per 31 Desember 2024

No.	Perwakilan	Total Equiv (USD)
1	KBRI ISLAMABAD	7,477.55
2	KBRI HAVANA	5,935.77
TOTAL EQUIVALENT USD		13,413.32

Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 039/BBPA/KP/XII/2024/24 Tahun 2024 tentang Pemberian BBPA pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad Periode Juli – Desember 2024, ditetapkan bahwa jumlah BBPA untuk KBRI Islamabad sebesar USD7,477.55. Dana BBPA tersebut diterima oleh perwakilan pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga hingga akhir Desember 2024 masih terdapat saldo BBPA plus di KBRI Islamabad. Selanjutnya, KBRI Islamabad telah menyalurkan BBPA kepada *Home Staff* sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Keputusan Menteri Luar Negeri tersebut, yang dilakukan pada 3 Januari 2025.

Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 037/BBPA/KP/XII/2024/24 Tahun 2024 tentang Pemberian BBPA Pada Kedutaan Besar RI di Havana Periode Juli - Desember 2024, ditetapkan bahwa jumlah BBPA untuk KBRI Havana sebesar USD5,935.77. Dana BBPA tersebut diterima oleh perwakilan pada tanggal 20 Desember 2024, sehingga hingga akhir Desember 2024 masih terdapat saldo BBPA plus di KBRI Havana. Selanjutnya, KBRI Havana telah menyalurkan BBPA kepada *Home Staff* sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Keputusan Menteri Luar Negeri tersebut, yang dilakukan pada 4 Januari 2025.

Aset Bersejarah

F.25. ASET BERSEJARAH

Aset bersejarah adalah benda, bangunan, situs, atau struktur yang memiliki nilai sejarah, budaya, arkeologis, atau arsitektural yang penting bagi suatu masyarakat atau bangsa. Aset ini dianggap memiliki makna khusus karena berkaitan dengan peristiwa, tokoh, atau periode penting dalam sejarah.

Jumlah aset bersejarah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2024 adalah 70 (tujuh puluh) unit. BMN tersebut tercatat pada Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP) sejumlah 68 (enam puluh delapan) unit, dan 2 (dua) unit tercatat pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri. Aset bersejarah yang berada di Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung ditatausahakan oleh Ditjen IDP, antara lain, yaitu lampu, mesin ketik manual, kursi kayu, tripod kamera, dan alat hiasan.

Sementara itu, untuk aset bersejarah yang tercatat di Perwakilan RI di Luar

Negeri adalah 1 (satu) unit Miniatur di KBRI Singapura dan 1 (satu) unit Tugu Peringatan Lainnya di KBRI Port Moresby.

Upaya Penyitaan
Properti Pemerintah
RI di Paris

F.26. UPAYA PENYITAAN PROPERTI PEMERINTAH RI DI PARIS

Sebagaimana dimaklumi, Kementerian Pertahanan telah kalah dalam sengketa arbitrase atas kontrak pengadaan Satelit Orbit 123° Bujur Timur/Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) dengan Navayo International AG melalui putusan tribunal arbitrase Singapore International Court of Arbitration (SIAC) tanggal 22 April 2021 sehingga diharuskan membayar denda sekitar USD16,000,000.00 dan bunga berjalan. Karena ketiadaan pembayaran dari Kementerian Pertahanan RI, pada tanggal 5 Desember 2022, Navayo International AG melalui Kuasa Hukumnya, mendaftarkan putusan eksekusi di Pengadilan Paris Tribunal judiciaire de Paris untuk menyita 5 (lima) properti milik Pemerintah Indonesia yaitu:

1. Wisma Atase Pertahanan yang berlokasi di 7, 9, 11 avenue Jean Jaurès, 92290, Chatenay Malabry. Prosedur penyitaan properti dimaksud telah terdaftar berdasarkan RG n° 24/00306;
2. Wisma Wakil Duta Besar yang berlokasi di 152, rue Perronet, 92200 Neuilly-sur-Seine. Prosedur penyitaan properti dimaksud telah terdaftar berdasarkan RG n°24/00309;
3. Apartemen Korfung Ekonomi, yang terletak di 7, rond-point du Pont Mirabeau, 75015 Paris. Prosedur penyitaan properti dimaksud telah terdaftar di bawah RG n°24/00311.
4. Apartemen Korfung Politik yang berlokasi di 7, rue Bory d'Arnex, 92210 Saint-Cloud. Prosedur penyitaan properti dimaksud telah terdaftar berdasarkan RG n°24/00307; dan
5. Rumah dinas yang berlokasi di 55, rue Cortambert, 75116 Paris. Prosedur penyitaan properti dimaksud telah terdaftar berdasarkan RG n°24/00310;

Dalam kaitan ini, Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyewaan jasa pengacara CKR Law untuk melawan sita eksekusi tersebut. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Sekretaris Jenderal kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mendukung pengacara CKR Law di Paris. Adapun Sidang perlawanan sita eksekusi ke-1 telah dilaksanakan 13 Februari 2025. Kemudian sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025.

Pihak CKR Law saat ini membutuhkan affidavit dari ahli hukum Indonesia yang menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan RI tidak memiliki legal personality mewakili Pemerintah Indonesia dalam kontrak pengadaan Satkomhan tersebut. Sehingga perlu adanya narasi bahwa penyitaan tidak dapat dilakukan karena properti bukan aset Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan tidak berwenang menandatangani kontrak atas nama Pemerintah RI. Selain itu,

pembelaan utama mengenai kekebalan diplomatik akan terus ditegaskan dalam pembelaan.

Perkembangan
Kasus Pemalsuan
Cek

F.27. PERKEMBANGAN KASUS PEMALSUAN CEK

Perkembangan informasi terkait pemalsuan cek oleh pihak yang tidak berkepentingan merujuk berita KJRI Chicago Nomor R-00057/Chicago/230623 dan Nomor R-00094/Chicago/231122, antara lain:

1. Terdapat pemalsuan cek milik KJRI Chicago untuk nomor cek 49715 dan 49719 dengan nilai total sebesar USD21,300.50. Bank of America sampai saat ini baru melakukan penggantian sebesar USD10,671.56. Dengan demikian masih terdapat sisa sebesar USD10,628.94 yang belum mendapatkan penggantian dan saat ini masih tercatat sebagai PFK minus pada pembukuan keuangan KJRI Chicago.
2. Berdasarkan komunikasi dengan Bank of America, mereka telah berupaya untuk melakukan pengembalian dana dengan mengajukan permintaan pengembalian kepada bank yang mencairkan cek tersebut, namun permintaan tersebut ditolak sehingga Bank of America tidak dapat mengembalikan dana dimaksud kepada KJRI Chicago.
3. KJRI Chicago telah mengajukan kembali permintaan pengembalian dana atas cek yang dipalsukan tersebut kepada Bank of America, namun Bank of America menyampaikan bahwa Bank of America tidak dapat melakukan hal lebih jauh dari meminta pengembalian kepada bank yang telah mencairkan cek tersebut. Hal ini berdasarkan jawaban dari Sumeya Mchabcheb selaku Vice President, Global Government, Global Transaction Services pada Bank of America.
4. Lebih lanjut, Bank of America menyarankan KJRI Chicago untuk melaporkan kasus tersebut ke local authorities sehingga proses investigasi lanjutan terkait pengembalian dana akan dilakukan oleh pihak berwenang serta meminta KJRI Chicago mengikuti program *positive pay* untuk mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari.
5. Terkait hal tersebut, KJRI Chicago telah menyampaikan kasus tersebut kepada pihak berwenang melalui police report nomor JG-223234 dan telah mengaktifkan fitur *positive pay* di sistem aplikasi sebagaimana berita R-00057/Chicago/230623. KJRI Chicago juga telah melaporkan kasus tersebut kepada Diplomatic Security Service.
6. Berdasarkan perkembangan tersebut, kami telah melakukan koordinasi dengan Sdr. Haroen Calehr selaku pengacara KJRI Chicago dan disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Tindak lanjut pemalsuan cek oleh Bank of America dinilai kurang memuaskan dari sisi KJRI Chicago sebagai nasabah. Namun demikian

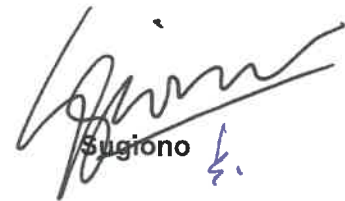
- hal tersebut sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening di Bank of America.
- b. Perlu dipahami jika KJRI Chicago ingin menuntut Bank of America di pengadilan posisi KJRI Chicago lebih lemah karena perangkat hukum lebih menjunjung tinggi kepentingan bank daripada nasabah.
 - c. Terkait hal ini, KJRI Chicago dapat menunggu proses investigasi yang dilakukan pihak berwenang namun paralel melakukan pengaduan ke Federal Reserve (bank sentral). Pengaduan pada Federal Reserve tidak akan dianggap hal sepele oleh perbankan di Amerika. Sekiranya langkah ini akan diambil pihak pengacara akan melakukan pendampingan untuk berproses di Federal Reserve.
 - d. Namun demikian, KJRI Chicago perlu mencermati perjanjian pembukaan rekening dengan Bank of America karena terdapat klausa yang menyatakan bahwa Bank of America dapat melakukan *suspend* tanpa pemberitahuan sekiranya Bank of America menilai rekening / account nasabah akan menimbulkan kerugian bagi Bank of America.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, KJRI Chicago tengah meminta arahan lebih lanjut terkait saran dari Sdr. Haroen Calehr terkait pengaduan kasus tersebut dan pendampingan/asistensi dari Pusat sekiranya KJRI Chicago akan berproses di Federal Reserve.

Dana Sumbangan
Rohingya

F.28. DANA SUMBANGAN ROHINGYA

Pada Semester I Tahun 2025, sebagai upaya tindak lanjut yang didasarkan atas koordinasi dengan Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik sesuai Nota Dinas Nomor 16237/DM/04/2025/61 tanggal 27 April 2025, Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelesaian bantuan Rohingya dengan mengirimkan dana ke UNHCR sebesar USD53,000.00. Kementerian Luar Negeri akan memproses penutupan rekening Bantuan Rohingya tersebut dan jika terdapat sisa setelah proses pengiriman dana, akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Giro.

Jakarta, Mei 2025
Menteri Luar Negeri



Sugiono